



REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK
MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN
DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH





DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan I-3

- 1.1 Latar Belakang I-3
 1.2 Tujuan I-3
 1.3 Sistematika I-3

Bab 2 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional II-3

- 2.1 RPJMN dan Nawacita II-3
 2.2 Tema Pembangunan II-4
 2.3 Strategi Pembangunan II-5
 2.4 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2017 II-6
 2.5 Sasaran Pembangunan II-6

Bab 3 Prioritas Pembangunan Nasional III-3

- 3.1 Pembangunan Manusia dan Masyarakat III-3
 Revolusi Mental II-3
 Kesehatan III-12
 Pendidikan III-20
 Perumahan dan Permukiman III-35
 3.2 Pembangunan Sektor Unggulan III-43
 Kedaulatan Pangan III-43
 Maritim dan Kelautan III-51
 Kelangkaan Energi III-61
 Pembangunan Pariwisata III-70
 Atraksi Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Baru (IKLEB) III-81
 3.3 Pemerataan dan Kewilayahan III-99
 Antar Kecamatan Pendataran III-99
 Reformasi Agraria III-110
 Daerah Perbatasan III-119
 Daerah Tertinggal III-127
 Desa dan Kawasan Perdesaan III-135
 Perkotaan III-148
 Konektivitas III-157
 3.4 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan III-191
 Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum III-191
 Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban III-200
 Konsolidasi Demokrasi Dan efektivitas Diplomasi III-213
 Reformasi Birokrasi III-225
 3.5 Pembangunan Ekonomi III-230
 Perbaikan Klim Investasi Dan Klim Usaha III-230
 Peningkatan Ekspor Nonmigas III-230
 Reformasi Eskalasi III-247

Bab 4 Pembangunan Bidang..... IV-3

4.1 Pengarusutamaan Dan Pembangunan Lintas Bidang.....	IV-3
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-3
Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	IV-4
Pengarusutamaan Gender.....	IV-6
Pengarusutamaan Anti-Korupsi.....	IV-8
Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim.....	IV-8
4.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama.....	IV-9
Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	IV-9
Kesehatan.....	IV-11
Pendidikan.....	IV-12
Perpustakaan.....	IV-13
Pemuda dan Olahraga.....	IV-14
Agama.....	IV-15
Kebudayaan.....	IV-17
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	IV-17
Perlindungan Anak.....	IV-18
4.3 Bidang Pembangunan Ekonomi.....	IV-19
Stabilitas Harga.....	IV-21
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.....	IV-21
Perdagangan Dalam Negeri.....	IV-22
Kerjasama Ekonomi Internasional.....	IV-24
Jasa Keuangan.....	IV-25
Basis Usaha Milik Negeri (BUMN).....	IV-26
Data dan Informasi Statistik.....	IV-27
Ketenagakerjaan.....	IV-29
4.4 Bidang Iptek.....	IV-29
NSRF Pembangunan Iptek.....	IV-31
Kejangkaan Regulasi.....	IV-32
4.5 Bidang Pembangunan Politik.....	IV-32
4.6 Bidang Aparatur.....	IV-34
Aparatur Negara.....	IV-34
4.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan Dan Tata Ruang.....	IV-35
4.8 Bidang Pembangunan Sarana Dan Prasarana.....	IV-40
4.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	IV-50

Bab 5 Ekonomi Makro, Pembangunan Wilayah & Pendanaan..... V-3

5.1 Kerangka Ekonomi Makro.....	V-3
Perkembangan Ekonomi 2015 Dan 2016.....	V-3
Perkiraan Ekonomi Makro Tahun 2017.....	V-6
Kebutuhan Investasi.....	V-8
5.2 Arah Pengembangan Wilayah.....	V-10
5.3 Pendanaan Pembangunan.....	V-24
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....	V-24

Bab 6	Kaidah Pelaksanaan	VI-3
6.1	Kerangka Kelembagaan	VI-3
6.2	Kerangka Regulasi	VI-4
6.3	Norma Pembangunan	VI-6
Bab 7	Penutup	VII-3
Lampiran		



BAB 1

PENDAHULUAN





The image shows a table of contents on a page with a yellow and brown floral pattern. The table consists of seven rows, each with a title and a corresponding page number. The titles are: 'Pendahuluan', 'Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional', 'Prioritas Pembangunan Nasional', 'Pembangunan Bidang', 'Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan', 'Kaidah Pelaksanaan', and 'Penutup'. The page numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 respectively.

Pendahuluan	1
Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional	2
Prioritas Pembangunan Nasional	3
Pembangunan Bidang	4
Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan	5
Kaidah Pelaksanaan	6
Penutup	7



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbeda dengan RKP sebelumnya, penyusunan RKP 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas-tugas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2017 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pembiayaan yang bersifat ikatatif.

1.2 TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah 2017 dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 2017 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKF Daerah (RKFD). RKP 2017 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2017, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan RKP 2017 adalah sebagai berikut:

- BAB 1. PENDAHULUAN** yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika penyusunan.
- BAB 2. TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL** beserta agenda prioritas pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran dan program-program untuk mencapainya baik melalui kerangka pendanaan, kerangka regulasi maupun kerangka kelembagaan.

- BAB 3 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL berisikan sasaran dan arah kebijakan prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas pembangunan nasional.
- BAB 4 PEMBANGUNAN BIDANG memuat program-program pembangunan menurut bidang-bidang pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam program Kementerian/Lembaga.
- BAB 5 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN memuat rancangan kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk faktor-faktor pendorong kemajuan ekonomi, sasaran dan arahan kebijakan pengembangan wilayah, dan kerangka pendanaan.
- BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN memuat isu-isu pengarusutamaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan norma-norma pembangunan.
- BAB 7 PENUTUP

BAB 2

TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL





The image shows a table of contents on a blue background with a floral pattern. The table consists of seven rows, each with a title and a corresponding page number. The titles are: 'Pendahuluan', 'Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional', 'Prioritas Pembangunan Nasional', 'Pembangunan Bidang', 'Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan', 'Kaidah Pelaksanaan', and 'Penutup'. The page numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 respectively.

Pendahuluan	1
Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional	2
Prioritas Pembangunan Nasional	3
Pembangunan Bidang	4
Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan	5
Kaidah Pelaksanaan	6
Penutup	7



TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2.1 RPJMN DAN NAWACITA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat:

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:

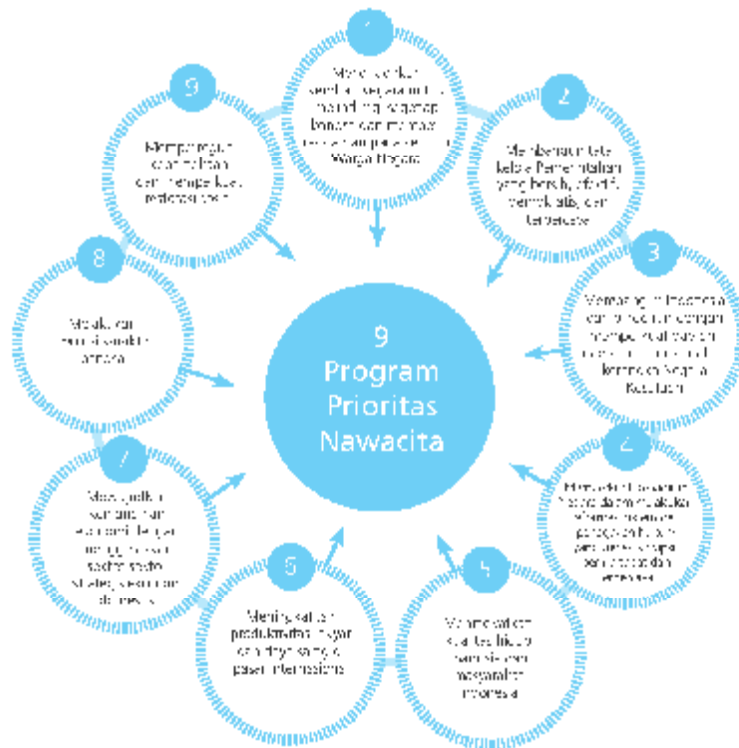
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeadilan Berdasarkan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berdasarkan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkukuh jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam kebudayaan

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 tersebut disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

Gambar 2.1
9 Program
Prioritas
Nawacita



2.2 TEMA PEMBANGUNAN

RKP tahun 2010 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema *Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan* dan kemudian di revisi melalui Ferpres Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan RKP 2010, dengan fokus pembangunan pada infrastruktur. RKP Tahun 2016 sebagai perjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema *Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas*. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema:

"Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Antarwilayah"

2.3 STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan. Hal ini ditunjukkan dalam Gambar berikut.



1) Disiapkan oleh B-III, kondisi di revisi melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan RPJPD 2015

2.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2017

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam penyusunan RKP 2017 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- **Tematik-Holistik:** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.
- **Integratif:** Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- **Spasial:** Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

2.5 SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Indikator Makro	2014 (Rencana)	2015	2016	2017	2018 ¹	Sasaran Akhir RPJMN 2019 ²
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Perencanaan Target)	5,1 (5,0)	5,8 (4,8)	5,6 (5,3) ³	7,1 (5,5 – 5,9)	7,5	8,0
Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Perencanaan Target)	4,6-4,8 (5,34)	5,5-5,8 (6,16)	5,2-5,7 (5,4-5,7) ⁴	5,0-5,3 (5,7 – 5,4)	4,6-5,1	4,0- 5,0
Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Perencanaan Target)	9,0 10,0 (10,06)	5,5 10,0 (11,12)	9,0-10,0 (10,0-10,6) ⁴	8,5-9,5 (9,5-10,5)	7,5-8,5	7,0-8,0
Gini Ratio (Indeks) (Angka Realisasi & Perencanaan Target)	0,3 (0,47)	0,40 (0,31)	0,34	0,38	0,37	0,18
Indeks Pembangunan Manusia (IM)	73,8	74,0	75,3	75,7	76,1	78,8
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) ⁵	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	meningkat

¹ Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional, anggaran get togetherness perlu dicek keseimbangan kembali

² Target APBN 2018

³ Indeks cara dengan parameter jenis minyak, listrik dan rawa air. Konsep dasar dasar proses pengumpulan dan penyalangan ke masuk pemerintahan ke ada sehingga target masih belum dapat di capai secara kuantitatif

⁴ Kemungkinan nilai 2018

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait.

BAB 3

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL





The table of contents is presented on a green background with a repeating floral pattern. It consists of seven horizontal sections, each separated by a thin white line. The text is white and centered within each section. The sections are: 'Pendahuluan', 'Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional', 'Prioritas Pembangunan Nasional', 'Pembangunan Bidang', 'Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan', 'Kaidah Pelaksanaan', and 'Penutup'.

Pendahuluan
Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Nasional
Pembangunan Bidang
Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan
Kaidah Pelaksanaan
Penutup



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

3.1 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

3.1.1 REVOLUSI MENTAL

Revolusi Mental merupakan upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat yang berorientasi pada kemajuan dan kemerdekaan yang religius. Revolusi Mental harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa yang di tempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan serta prasarana sosial-budaya di masyarakat dengan mengubah pola pikir dan perilaku lama yang tidak sesuai dengan cita-cita membangun bangsa yang maju, modern, dan mandiri. Revolusi Mental mendorong bangsa tumbuh menjadi bangsa unggul, yang berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan Revolusi Mental bertumpu pada pilar Tri-Sakti, yaitu berkeadilan secara politik, berdaya saing secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: Integritas yang mencakup sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil, serta taat hukum dan aturan; Pribadi Kerja yang mencakup sikap optimistik, kerja keras, berprestasi, gigih/pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif, berprestasi, dan mengutamakan pelayanan publik prima; dan Gotong Royong yang mencakup kerja sama, kesetokawanan, solidaritas, menghargai perbedaan dan keberagaman, toleransi, saling menghargai/menghormati, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Tabel 3.1
Sasaran
Revolusi Mental

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
Meningkatnya Integritas						
1	Index Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-10)	3,61	5,54	7,61	7,70	8,75
2	Index Pencegahan Hukum Berkeadilan (Skala 0-1)	0,44	0,38	0,38	0,40	0,44
3	Persentase pejabat/Pejabat Publik yang menerima sanksi karena pelanggaran disiplin/kecelakaan/anggaran hukum					
	o Kepolisian	10%	31%	45%	67%	81%
	o Kejaksaan	76%	81%	84%	87%	93%
	o Mahkamah Agung	17%	27%	47%	57%	87%
	o Lainnya/bersifat rata-rata	95,70%	96,25%	95,80%	97,35%	98,45%
4	PVE yang menerima sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum*	1.893	1.083	597	328	100

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
5	Persentase instansi pemerintahan (pusat dan daerah) yang melibatkan status kelangkaan dalam urusan anggaran	15%	33%	60%	80%	100%
6	Persentase keteroukuan penuntasan kasus pidana	50%	55%	60%	75%	90%
7	Peningkatan kualitas, pemenuhan, dan keberlanjutan mutu layanan pemerintah					
	a) Peningkatan kualitas pelayanan dan anggaran	47,3	48,1	49,0	54,5	60,0
	b) Pemenuhan dan keberlanjutan mutu layanan (skala 1-7)	4,0	4,1	4,2	4,3	5,5
Meningkatnya Hots Kerja						
8	Tingkat Kelelahan Kerja (Kendaraan, Jemberga, Provinsi, KawKote) dalam pemenuhan standar pelayanan publik pada unit layanan					
	a) Kementerian	11,8%	17%	38%	58%	100%
	b) Keluarga	8,1%	10%	22,5%	55%	100%
	c) Provinsi	n.a	9%	31,75%	54,5%	100%
	d) Kab/kota	n.a	1%	14,75%	30,5%	60%
9	Peningkatan komposisi busi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	n.a	92,8%	92,5%	92,7%	93,1%
10	Peningkatan semangat persaingan usaha yang sehat (<i>competitive and coscared</i>)	n.a	40%	50%	60%	75%
11	Salahkhusus bersih dan sehat	30%	40%	50%	60%	80%
Meningkatnya Gotong Royong						
12	Indeks Partisipasi Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	0,55 (2012)	↑	▲	▲	↑
13	berkurangnya jumlah konflik kekerasan di kalangan masyarakat	n.a	<5	<5	<5	<3
14	Persentase ruang publik yang bebas masalah sampah (terutama kelengkapan, tiduran dan pemungutan)	100%	100%	100%	100%	100%
15	Indeks Partisipasi Masyarakat	70,5 (2013)	↑	▲	▲	↑

↑ data berasal dari 25% KUPemda yang melaporkan ke BKN

↑ : meningkat

ARAH KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL

Gerakan 3.1
Sasana
Revolusi Mental

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

- 1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif)
- 2. Program pembangunan dan belanja Pemerintah didasarkan atas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
- 3. Penerapan disiplin, *reward & punishment*, dan sistem merit dalam birokrasi

PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK

- 1. Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat
- 2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundang-undangan untuk mendorong kreativitas masyarakat
- 3. Penanganan perkara secara transparan dan memisahkan
- 4. Pendidikan dan pengkondisian etika dalam berpolitik

PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

- 1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras)
- 2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying-free environment*)
- 3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (ketuhanan keluarga, kesetiaan sosial, dan toleransi)
- 4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air

PENGUATAN DAYA REKAI SOSIAL DALAM KEMAJEMUKAN

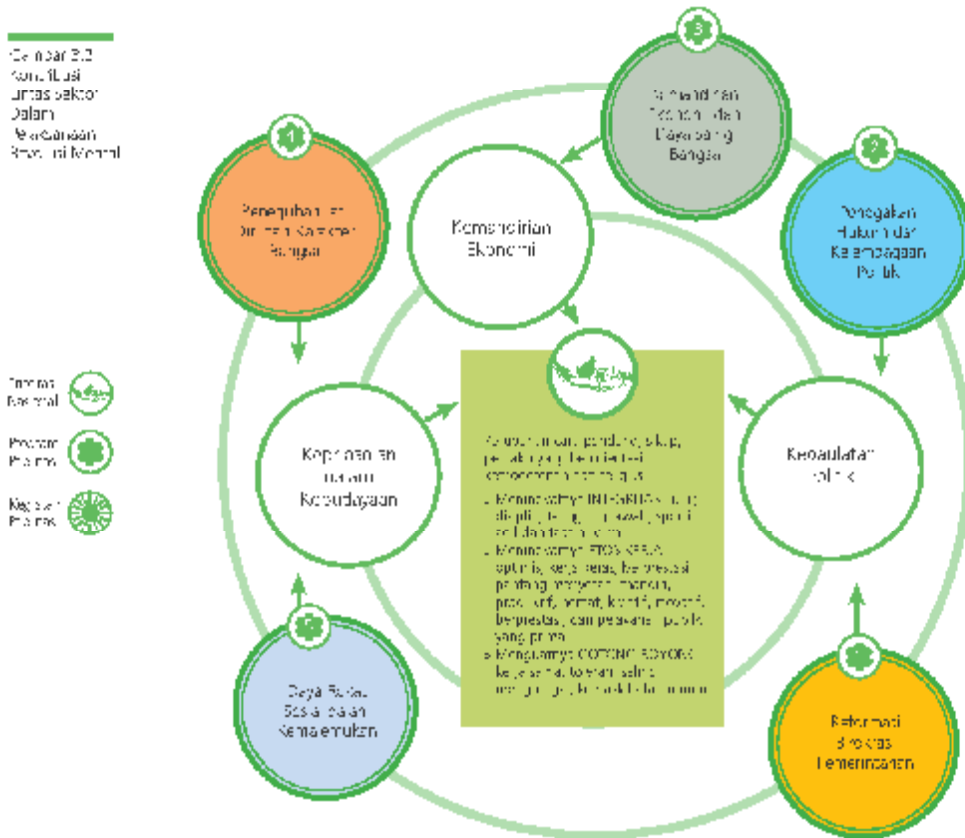
- 1. Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian
- 2. Peningkatan kerjasama dan kesetiakawanan sosial
- 3. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi

PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA

- 1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan
- 2. Peningkatan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri
- 3. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (*cooperate and compete*, bekerja berorientasi hasil, bermutu dan nilai tambah)

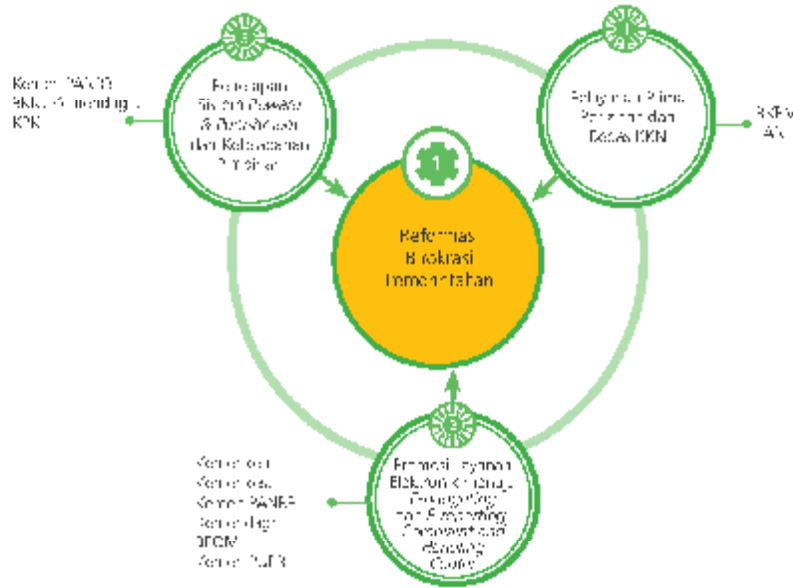
Program Prioritas

Pembangunan Revolusi Mental dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, yaitu setiap sasaran revolusi mental dicapai melalui pelaksanaan program prioritas secara sinergis, melibatkan seluruh aspek terkait dan terpadu.



Kegiatan Prioritas

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Revolusi Mental, seluruh sektor memberikan dukungan secara sinergis dan terintegrasi melalui pencapaian sasaran kegiatan masing-masing.

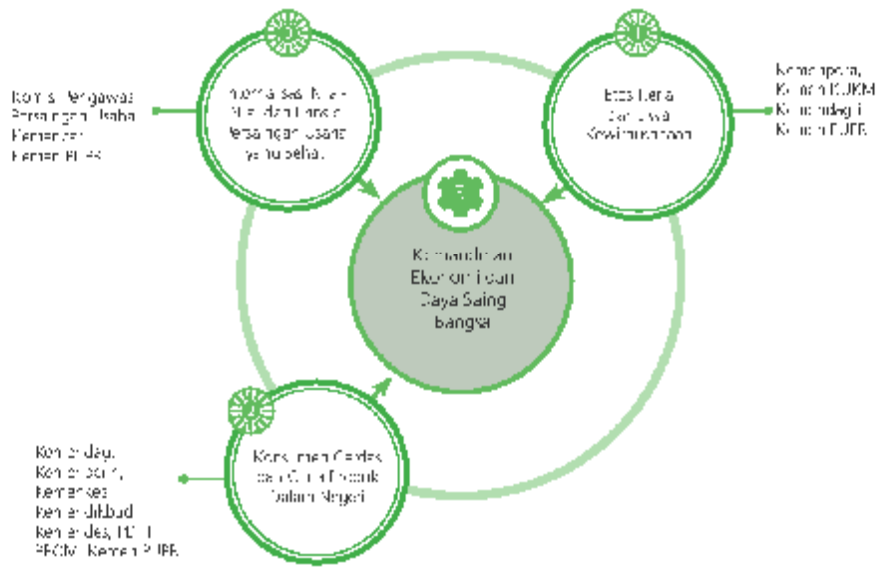


Gambar 3.4
Kelembagaan
Kelembagaan
Kelembagaan

Sasaran:
Program dan kegiatan prioritas Revolusi Mental selengkap-selengkapnya dapat diwujudkan secara optimal dalam Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	
1.	Pelayanan Prima Perizinan dan Dasar KKN	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat atas mutu pelayanan perizinan, perizinan digital dan pelayanan manual di PPA (Pusat menjadi 3,2 atau skala 4 (minimal 3)
2.	Promosi Layanan Elektronik (E-Procurement, E-budgeting dan E-recording, E-complaint and E-aiding Center)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem rujukan online di 4 RS dan 2 puskesmas • Pelaksanaan sistem e-budgeting, e-recording dan e-monev di nasional
3.	Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Sumbangan Pungutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat pelanggaran disiplin di seluruh (100%) instansi pemerintah • Ombudsman (12) Promosi 2:0 sabb/cota

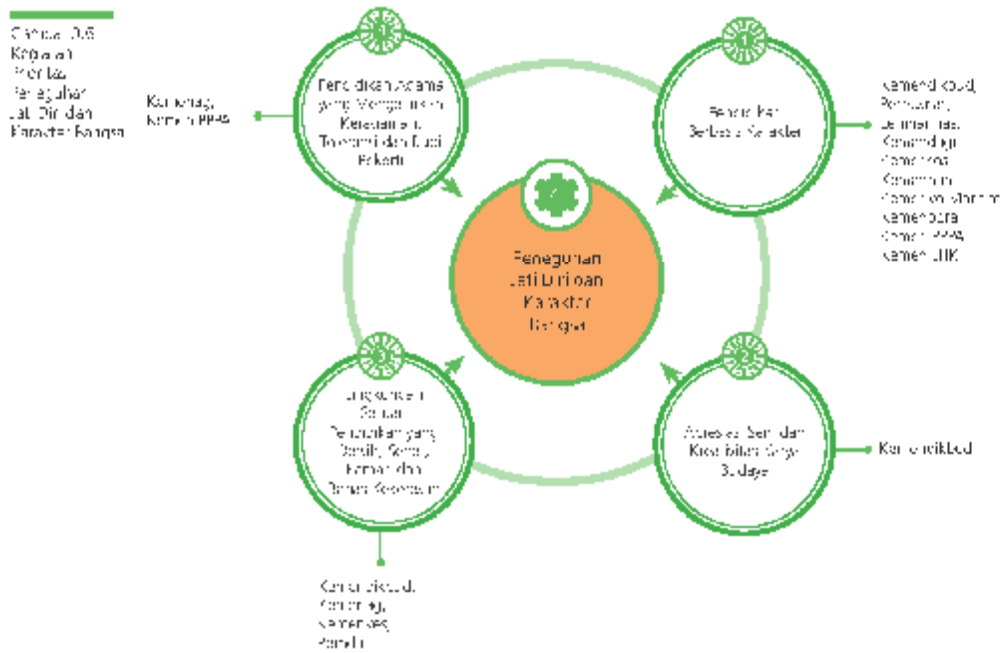
Tabel 3.1
Kegiatan
Prioritas
Kelembagaan
Kelembagaan
Kelembagaan



Gambar 3.5 Kegiatan Prioritas Kemandirian ekonomi dan Daya Saing Bangsa

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa	
1.	Perkembangan jiwa kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perkembangan jiwa kewirausahaan oleh 99,5 Petalasan, Peningkatan Keaktifan Lapangan (PKPL); • berkembangnya wirausahawan baru yang berorientasi tumbuh, h untuk mencukupi kebutuhan mental
2.	Konsumsi Cemas dan Cinta Produk Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kontribusi penduduk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional hingga mencapai 67,40% • Terselenggaranya 500 produk industri dalam negeri dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN);
3.	Integrasi Nilai-Nilai dan Prinsip Business Usaha yang Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait nilai-nilai bisnis yang sehat yang diadopsi minimal sebesar 60%

Tabel 3.5 Kegiatan Prioritas Kemandirian ekonomi dan Daya Saing Bangsa



lampiran 4a
Sequitar
Penerapan
Pendidikan
Karakter Bangsa

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Penerapan Pendidikan Karakter Bangsa	
1.	Pendidikan berbasis Karakter	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (P3WK) di 34 provinsi Penerapan pendalaman saskin di seluruh satuan pendidikan Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan 4.300 orang
2.	Apresiasi Seni dan Kreativitas karya budaya	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Lapangan Budaya di 3 provinsi Fasilitas sarana kesenian di 200 satuan pendidikan
3.	Pengabdian Sosial dan Layanan Masyarakat Bersih, Sehat, dan Aman Bebas Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan 40 model sekolah Ramah Anak (SRA) di 20 provinsi (Provinsi Sumatera, Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I.Y, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) Penerapan model kesantunan Ramah Anak di 5 provinsi perantara/provinsi
4.	Pendidikan Agama Islam Mendukung Keberagaman, Toleransi dan Bani Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan model Pendidikan Agama Islam di 5.852 sekolah Peningkatan kualitas Pembelajaran dan Pembinaan Pendidikan di 34 Provinsi melalui penerapan kurikulum yang berlaku

3.1.2 KESEHATAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, membaiknya status gizi masyarakat, serta menurunnya penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya akses secara finansial maupun geografis terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan kesehatan tahun 2017 diarahkan pada upaya pencegahan penyakit dengan mendorong masyarakat untuk tetap hidup sehat, memperluas kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (sisi *demand*) dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (sisi *supply*), percepatan perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Tabel 3.8
Sasaran
Pembangunan
Kesehatan

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat					
1.	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, diukur dengan angka:	346 (SP 2010)	303 (SUPAS 2015)	n.a.	n.a.	306
	▪ Persalinan di fasilitas kesehatan (%)	70,4 (2013)	75,0	77,0	81,0	85,0
	▪ Kunjungan Antenatal (KAP) (%)	70,4 (2013)	73,0	74,0	78,0	80,0
2.	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, diukur dengan angka:	32 (2012)	n.a.	n.a.	n.a.	34
	▪ Kunjungan Neonatal Pertama (KNP) (%)	71,3 (2013)	75,0	78,0	81,0	90,0
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak Bawah Dua Tahun (ABDT) (%)	19,9 (2011)	31,3	40,5	29,6	28,0
4.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun	2,6 (SDG 2012)	2,17	2,36	2,31	2,38
5.	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) modern (seamless) (%)	61,9 (SDG 2012)	65,2	65,4	65,6	66,0
2	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular					
a.	Tuberculosis (%)	1,46 (2014)	1,5	1,5	1,5	1,5
b.	Prevalensi merokok per 100.000 penduduk	297 (2013)	280	271	262	245
c.	Prevalensi Malaria pada Usia < 12 Tahun (%)	7,2 (2013)	6,9	6,4	5,9	5,4
d.	Prevalensi Infeksi Darah Tinggi (%)	25,8 (2013)	25,0	24,5	24,2	23,4

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
e.	Prevalensi Obesitas pada Perempuan Usia 18-tahun (%)	15,4 (2014)	15,4	15,4	15,4	15,4
3.	Meningkatnya Perlindungan Finansial					
1.	Penduduk yang menjadi Peserta BPJS-Kesehatan (%)	51,8 (Oktober 2014)	60,0	68,0	77,0	85,0
4.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan					
1.	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang memiliki akreditasi nasional (Kab/Kota)	10 (2014)	94	190	287	481
2.	Kapupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	71,2 (2013)	75,0	80,0	85	95
3.	1.015 (2013)	1.200	2.000	3.000	5.000	
5.	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesehatan (sedang disebarkan)					
6.	Meningkatkannya Jumlah Dokter yang Menesepkan Obat Rasional kepada Pasien					

Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
3. Mempercepat pencapaian gizi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Arah Kebijakan yang Mendukung Revolusi Mental

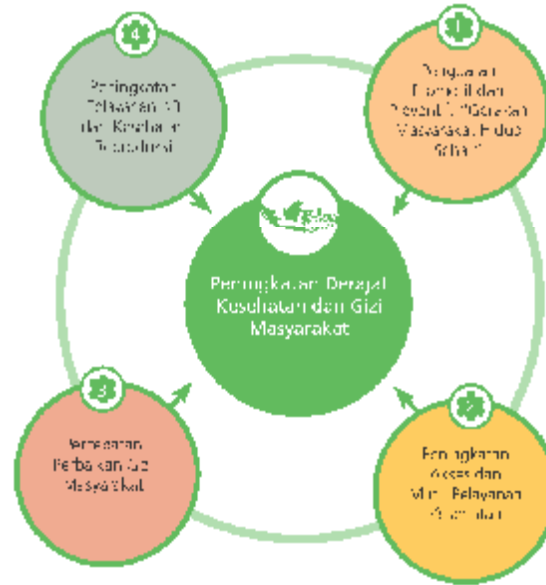
- Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan lainnya lain dengan menggunakan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan melalui media online dan mobile dan lainnya
- Efektifitas program promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Penguatan rumah sakit di tingkat kecamatan, standar rumah sakit, dan lain-lain.

Gambar 2.8
Arah Kebijakan
Pembangunan
Kesehatan

Program Prioritas

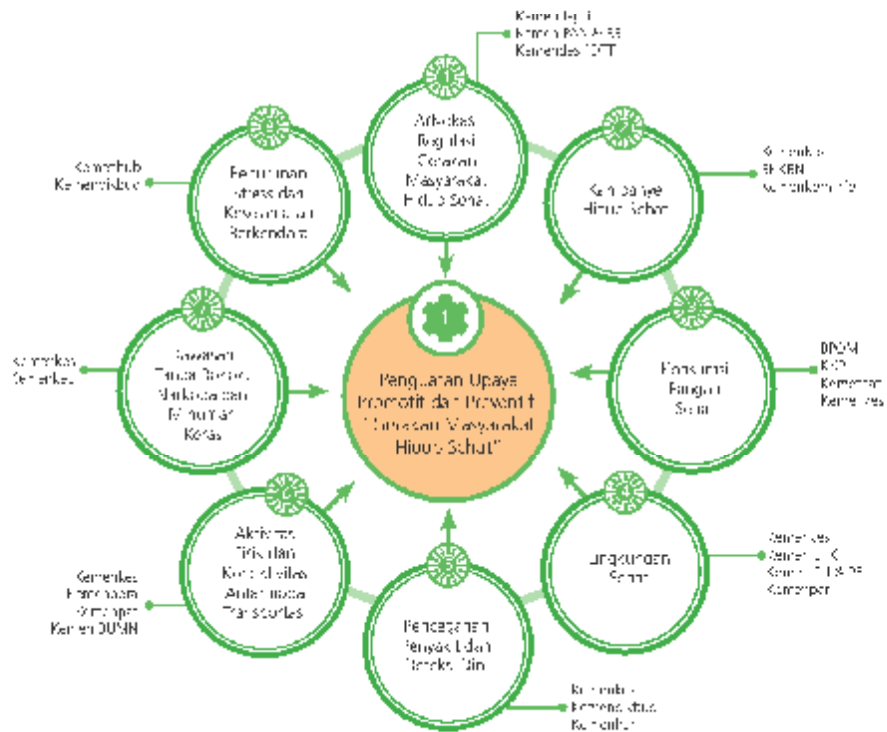
Gambar 9.0 Program Prioritas Kementerian Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- Peningkatan Kesehatan
- Peningkatan Gizi
- Selular



Kegiatan Prioritas

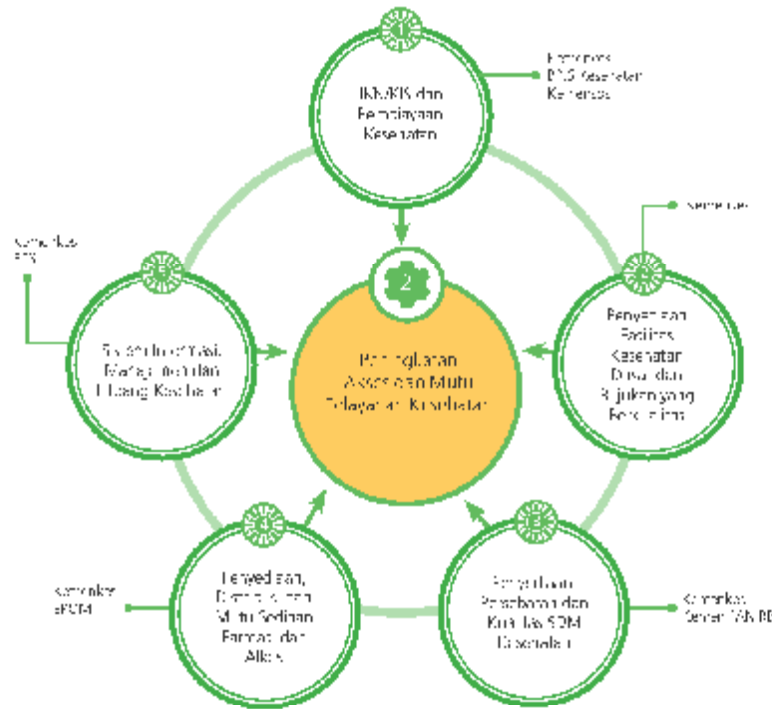
Gambar 9.10 Kegiatan Prioritas Peningkatan Promosi dan Preventif "Perilaku Masyarakat Hidup Sehat"



No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Penguatan Upaya Promotif dan Preventif: "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"	
1	Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi di daerah (17 provinsi) Durasi edaran mengenai aktivitas fisik (senam, yoga-yoga) kepada instansi pemerintahan Keaktifan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di 6.961 desa
2	Kampanye Hidup Sehat	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di 100 kabupaten Sentasi total berbasis masyarakat di 23.000 desa 50 % Posyandu aktif Sosialisasi dan sosialisasi lebih lanjut keuang kesehatan dan pemukiman keluarga
3	Konsumsi Pangan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> Jajanan sehat sekolah sehat dan aman 100 Desa Pangan Aman 139 Pasar Aman dari bahan berbahaya Cetakan Sehat Makanan 106 mesin pencacah pengemasan keamanan dan mutu pangan
4	Limpuhan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> Pencawasan sanitasi tempat-tempat umum (TTU) Peraturan Desa kebakaran hutan dan lahan sebesar 10 % di wilayah 52 Kabupaten, 17 Kecamatan, dan seluruh kawasan konservasi Penghapusan penggunaan merkuri di lokasi pertambangan Emas Skala Kecil (PUSK) Zero Mercury dan <i>Polychlorinated Biphenyls</i> (PCB) pada minyak jelutau Ruang terbuka hijau di perkotaan 350.000 sembungun atau air minum (SAM) di kawasan rawan air/ pencemaran/kelebihan toilet bersih di tempat wisata prioritas
5	Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini	<ul style="list-style-type: none"> 92 % bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 1.943 Puskesmas dengan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim 1.312 sekolah dengan UKS sesuai standar Permenkasan kesehatan berkala dan tes HIV pada anggota TNI
6	Aktivitas Fisik dan Konektivitas Antar Media Transporasi	<ul style="list-style-type: none"> 75 % Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga setiap anak SD 3.000 peserta event olahraga rekreasi (sewalangan, maraton) Pekan Olahraga Pelajar Event olahraga wisata Aktivitas fisik di kantor BUMN
7	Kawasan Tanpa Rokok, Narkotika dan Miras di Kawasan Kampus	<ul style="list-style-type: none"> 50 % kabupaten/kota memiliki lebih banyak kawasan tanpa rokok (KTR) di minimal 50 % sekolah Peningkatan cukai rokok dan PPN produk rokok
8	Penurunan Stress dan Keselamatan Berkehidupan	<ul style="list-style-type: none"> 270 paket fasilitas presureless along koridor arteri jalan Rute aman di kawasan sekolah SD, SMP, SMA ramah anak

Table 3.21
Tinjauan
dan Sasaran
Perencanaan
Kesehatan
tahun 2017

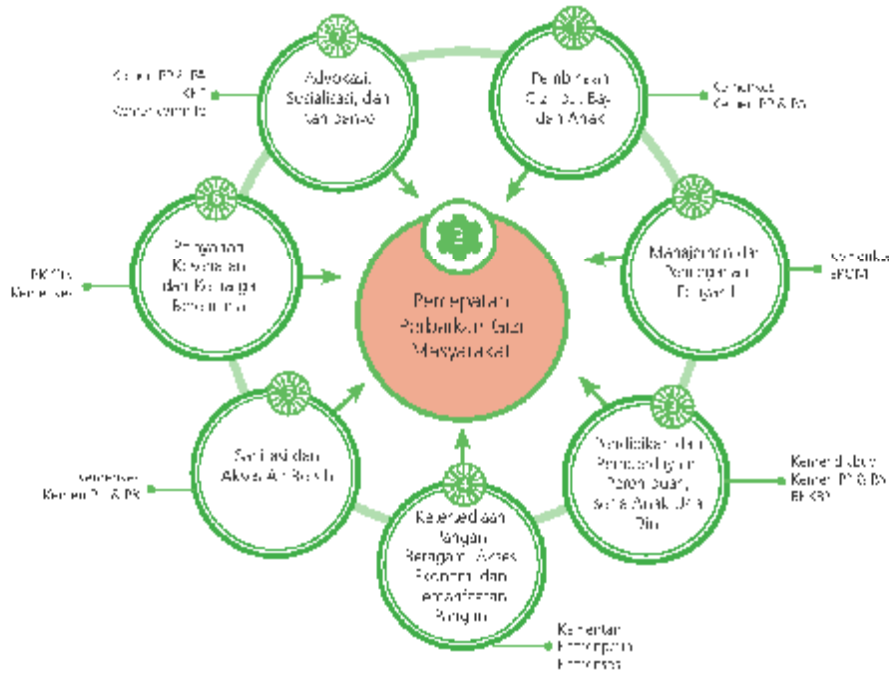
Gambar 11
Kegiatan
Prioritas
Peningkatan
Akses dan
Mutu Pelayanan
Kesehatan



Catatan:
Program dan kegiatan prioritas terkait kesehatan sebagaimana diuraikan di atas dapat diliris dalam suplemen di masa Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Tabel 3.10
Kegiatan
Prioritas
Peningkatan
Akses dan
Mutu Pelayanan
Kesehatan

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
1.	IKK, RKI dan Pembiayaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta BPJS/KIS: 94,4 juta • Selama pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) • Fasilitas kesehatan dasar dan rujukan III
2.	Pengadaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • 700 Kecamatan dengan Puskesmas sertifikasi akreditasi • 57 kabupaten dengan RSUD sertifikasi akreditasi nasional • Sistem rujukan dengan 4 RS dan 2 puskesmas
3.	Pengadaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Sialit: 140 tim (1.170 orang) • Wajib Kerja Sarjana dokter spesialis: 1.250 orang • Promosi tenaga kesehatan
4.	Pengadaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • ketersediaan obat dan vaksin esensial di 55% Puskesmas • 15 tahun masa tunggu farmasi sertifikasi seluruh kabupaten
5.	Sistem Informasi Kesehatan dan Rujukan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan telemedisin di 8 rumah sakit percontohan • publikasi laporan statistik terkait indikator kesehatan



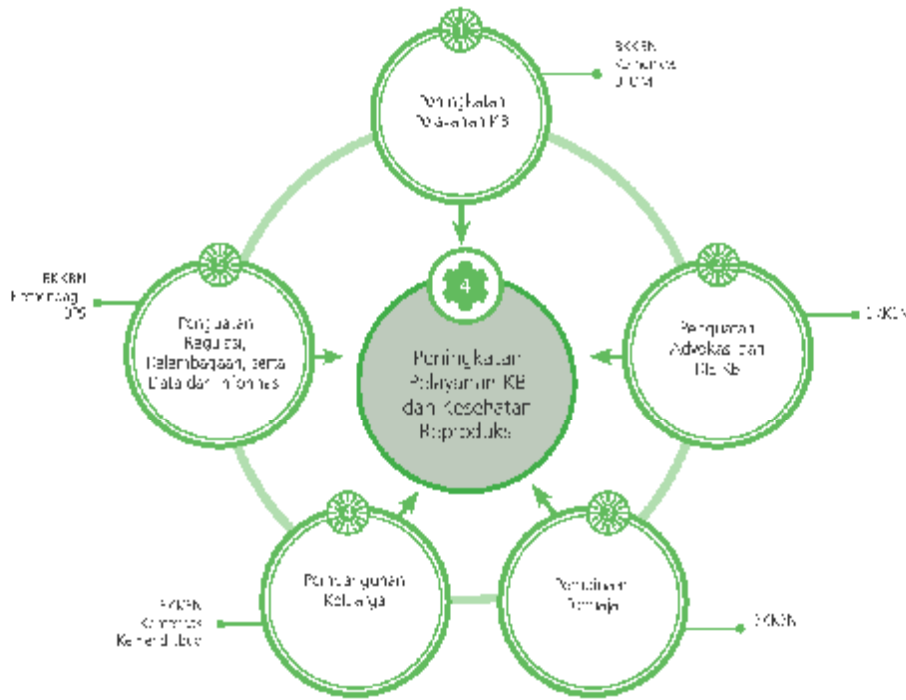
Gambar 3.12 Kegiatan Prioritas Percepatan Perubahan Gizi Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sebaran
3.	Percepatan Gizi Masyarakat	
1.	Peminaan ibu, bayi dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • 95 % ibu hamil kurang Energi Sotol mendapat makanan tambahan • 80 % balita kurang mendapat makanan tambahan • 44 % bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif • Sosialisasi peningkatan gizi ibu dan anak
2.	Manajemen dan Pemasaran Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • 113 fasilitasi Program Pasar Pangan dari Bahan Beras yang lebih • 92 % anak usia 0-11 bulan mendapat makanan yang cukup
3.	Peningkatan pemeroayaan Perencanaan serta Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000 lembaga/ satuan penidikan memperoleh pendampingan penidikan keluarga • 1 paket komunikasi, informasi, edukasi (KIE) perkan keluarga sederhana • Peminaan Gender Berencana (GenRe)
4.	Peningkatan layanan pangan bergizi, Akses ekonomi dan pemanfaatan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • 6.004 oasa pemeroayaan pakan ternak pangan • Standarisasi nutrisi makanan hasil laut dan perikanan (KSBM/ KNS/ KNS/ KNS) • 5.000 keluarga miskin mendapat bantuan tunai bersyarat
5.	Saniitasi dan Akses Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di 25.000 desa • 25 % sarana air minum diawasi • 88 kas/ kota dengan instalasi pengolahan Lumpur tinja (IPU)
6.	Pelaksanaan Kesehatan dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tim rumah kesehatan jember dan pemenuhan ke Landa di 23 provinsi dan 547 kabupaten • 700 kabupaten dengan Puskesmas teridentifikasi kredensial

Tabel 3.11 Kegiatan Prioritas Percepatan Perubahan Gizi Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
7	Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye tentang gizi Gerakan Cermat Memilih Obat Edukasi dan pelatihan tentang inisiasi menyusui dini (IMD) pemberian makan bayi (AM) eksklusif dan MPASI dan 100 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Gambar 3.13
Keputusan
Etiologi
Perbaikan
Pelayanan KB
dan Kesehatan
Reproduksi

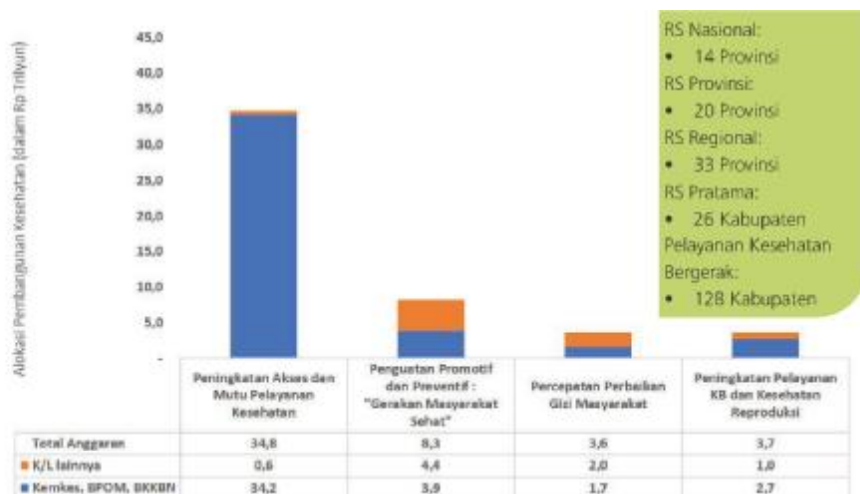


Tabel 3.12
Segitiga
Etologi
Peningkatan
Pelayanan KB
dan Kesehatan
Reproduksi

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	
1.	Pelayanan KB	<ul style="list-style-type: none"> Akseptor KB 7,1 juta peserta baru, dan 30,5 juta peserta aktif
2.	Peningkatan Advokasi dan KIF KB	<ul style="list-style-type: none"> Penggerakan program keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di 87.505 desa Mobilisasi massa dan media luar ruang sebanyak 62 jenis serta media lini basah sebanyak 19 jenis
3.	Pembiayaan Berbasis	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dan pembinaan 22.014 kelompok Pk 5M
4.	Pembiayaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan 80 % PLUS anggota kelompok sine keluarga
5.	Peningkatan Regulasi, Kelermbagaan, serta Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota diinisiasi dalam sinkronisasi kebijakan dan penentuan kelembagaan KB tersedianya 4 jenis data dan informasi program KB/PK

Pendekatan kewilayahan dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem rujukan pelayanan kesehatan (Gambar 3.14), penyediaan RS Pratama, pelayanan kesehatan bergerak, dan pengiriman tim tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan kepulauan. Pengendalian malaria fokus di 265 kabupaten/kota endemis malaria. Penyakit menular tropis yang terabaikan (*neglected tropical diseases*), khususnya *amblyostoma* akan di eradikasi di provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Persebaran Wilayah

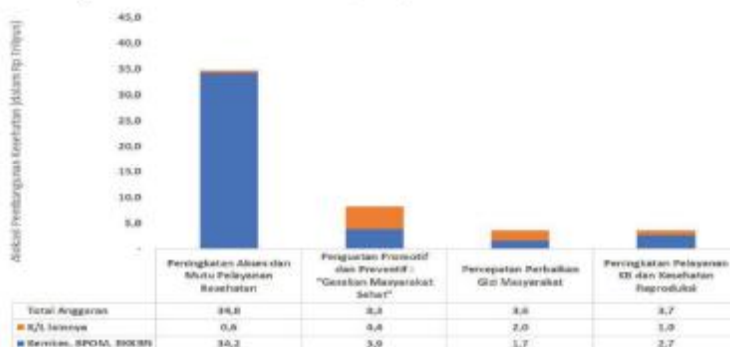


Gambar 3.14
Peta sebaran peningkatan kapasitas sistem rujukan

- RS Nasional:
 - 14 Provinsi
- RS Provinsi:
 - 20 Provinsi
- RS Regional:
 - 33 Provinsi
- RS Pratama:
 - 26 Kabupaten
- Pelayanan Kesehatan Bergerak:
 - 128 Kabupaten

Alokasi Pendanaan

Untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan kesehatan dibutuhkan alokasi pendanaan yang terdiri atas anggaran di sektor kesehatan (Kemenkes, BPOM dan BKKBN) dan non-sektor kesehatan (misalnya Kemenristekdikti, Kemenko PMK, Kemenkominfo, BPS, Kemenhub, Kemensos). Disamping itu terdapat sumber pendanaan lainnya dalam pembangunan kesehatan yakni Dana Alokasi Khusus (DAK).



Gambar 3.15
Alokasi Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2017 Berdasarkan Sektor dan Program Prioritas (belum termasuk kebutuhan DAK)

3.1.3 PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Fokus pembangunan pendidikan adalah pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, untuk memastikan anak-anak usia sekolah 7-18 tahun dapat menempuh pendidikan paling kurang sampai jenjang menengah. Pendidikan vokasi juga sangat penting untuk memberi bekal keterampilan bagi penduduk usia produktif yang memilih bekerja. Pendidikan anak usia dini (PAUD) juga menjadi perhatian, yang bertujuan untuk menyiapkan anak-anak masuk ke sistem persekolahan dan menempuh pendidikan formal.

Pembangunan pendidikan yang berkualitas harus berfokus pada proses pembelajaran yang efektif, dengan menyediakan guru-guru dan mutu yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogis, antara lain melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai bagian dari reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pendidikan tinggi juga menjadi salah satu prioritas pembangunan, yang diarahkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang menjadi pilar utama daya saing bangsa dan ekonomi berbasis pengetahuan. Pembangunan pendidikan juga berkaitan erat dengan agenda Revolusi Mental melalui pendidikan karakter/budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, toleran, disiplin, serta menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkeadilan di setiap satuan pendidikan.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Tabel 3.13
Sasaran
Umum dan
Arah Kebijakan
Pendidikan

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Rata-rata lama sekolah ¹ penduduk usia 15-24 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,8 tahun
2.	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun	94,7% (2012)	94,8%	95,1%	95,4%	96,1%
3.	Produksi perguruan tinggi minimal layak minimal B	50,4% (2012)	57,9%	58,8%	61,3%	68,1%
4.	Persentase SIMM/MSM berakreditasi minimal B	68,7%	71,9%	76,5%	79,0%	81,2%
5.	Persentase SIMM/MSM berakreditasi minimal B	62,3%	68,7%	71,8%	74,3%	81,0%
6.	Persentase SIMM/MSM berakreditasi minimal B	73,3%	77,2%	79,1%	80,0%	84,0%
7.	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,7%	51,8%	56,6%	59,4%	61,0%
8.	Rasio APK/SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,85	0,87	0,88	0,90
9.	Rasio APK/SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk kaya	0,53 (2012)	0,53	0,58	0,59	0,60

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPIMN 2019
10.	Esas APK PI antara 20% berduo s temiskin dan 20% berduo c torkaya	0,07 (2012)	0,20	0,35	0,42	0,54
11.	Nilai In-TPA - Matematika - Sains - Membaca	14012) 373 382 396	n.a n.a n.a	n.a n.a n.a	n.a n.a n.a	09116) 427 438 446
12.	Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogical knowledge dan professional knowledge)					
13.	Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan SD-PT (tidak membajak, bebas dan jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)					
14.	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menggunakan dan menerapkan model pembelajaran kelas (seperti <i>flipping classroom</i>)					
15.	Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai tuntutan zaman					
16.	Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkembangkan akhlak mulia					

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai tuntutan zaman, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan pemerataan guru yang merata
4. Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan beasiswa kewirausahaan kerja
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; dan
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

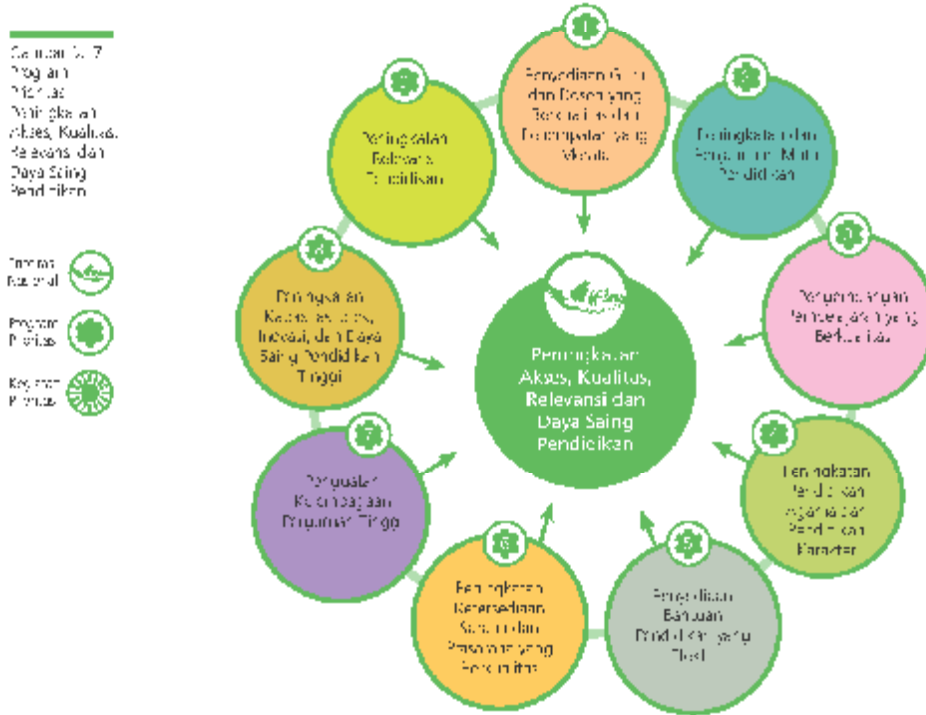
Kebijakan terkait Revolusi Mental

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter, budi pekerti, dan budaya bangsa
2. Mendapatkan lingkungan pendidikan yang mencerminkan integritas, bebas korupsi, dan keadilan; dan
3. Menegakkan hukum dan disiplin (tepat menyalah dan serifikasi, bebas korupsi, mencontoh plagiat, bala)

Gambar 2.16
Arah Kebijakan
Pembangunan
Pendidikan

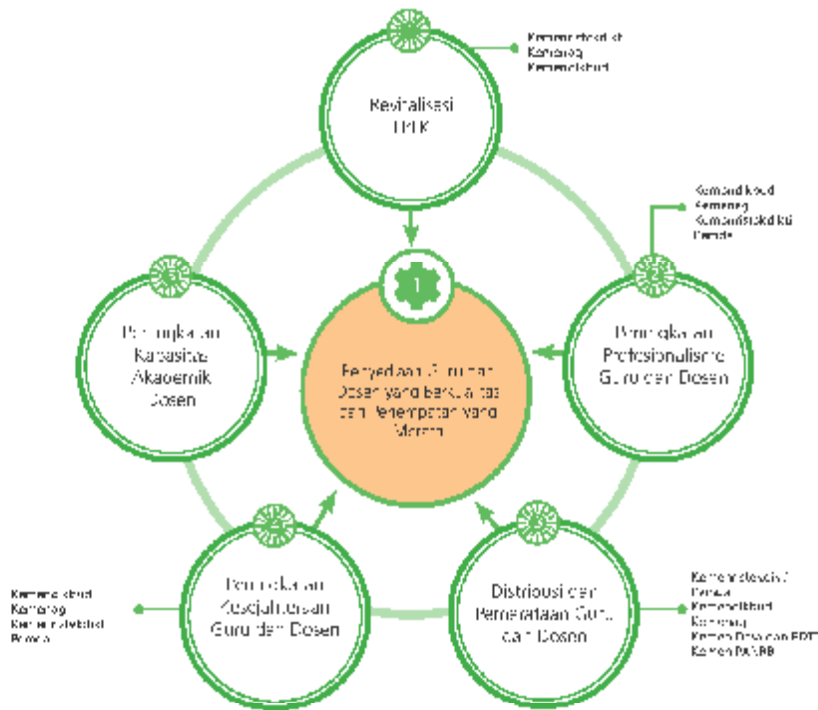
Program Prioritas

Perencanaan pembangunan pendidikan dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta. Dengan demikian semua pihak saling bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan sesuai peran dan fungsi masing-masing, baik langsung maupun tidak langsung. Program dan kegiatan prioritas disusun berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan dan untuk mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan.



Kegiatan Prioritas

Penetapan program prioritas didasarkan pada nilai penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Pada setiap program prioritas dipilih kegiatan-kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja pembangunan pendidikan secara akhir pelaksanaan program. Pilihan kegiatan-kegiatan prioritas didasarkan pada kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan dengan minimal sebagai berikut:



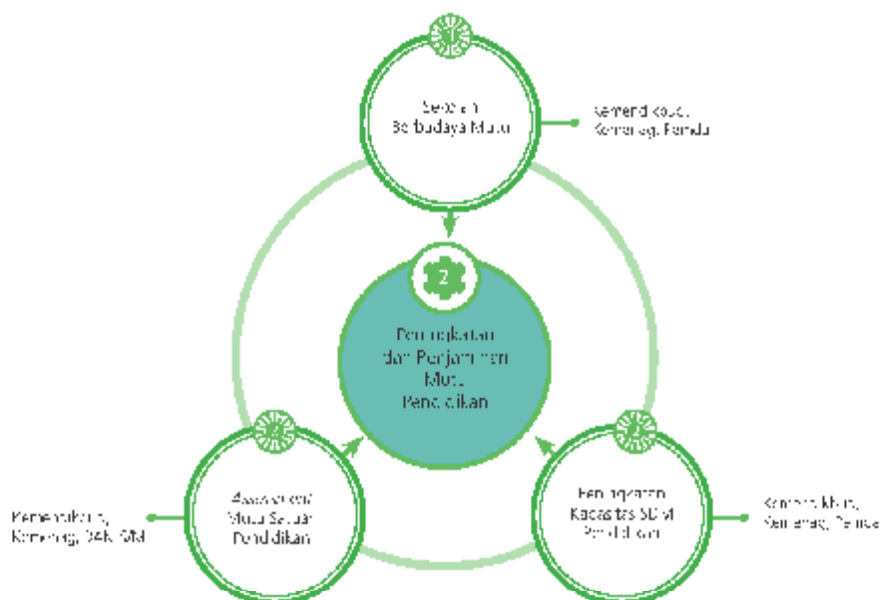
Gambar 3.12
Penyediaan
Guru dan
Dosen yang
berkualitas dan
pemerataan
yang merata

Catatan:
Terdapat 51 kegiatan prioritas untuk mendukung upaya di bidang sumber daya manusia
Pembangunan Manusia dan Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Pemerataan yang Merata	
1.	Rekrutasi PTK	26.000 PTK yang meningkatkan kapasitasnya
2.	Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen	• 50.000 guru tersertifikasi • 10.000 dosen tersertifikasi
3.	Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen	34 kabupaten yang menjadi kantong dalam pemerataan guru antara seluluhan kabupaten
4.	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen	• 480.000 guru dan PNS yang menerima tunjangan profesi • 100.000 dosen yang menerima tunjangan profesi
5.	Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen	• 1.000 dosen yang meningkatkan kompetensinya

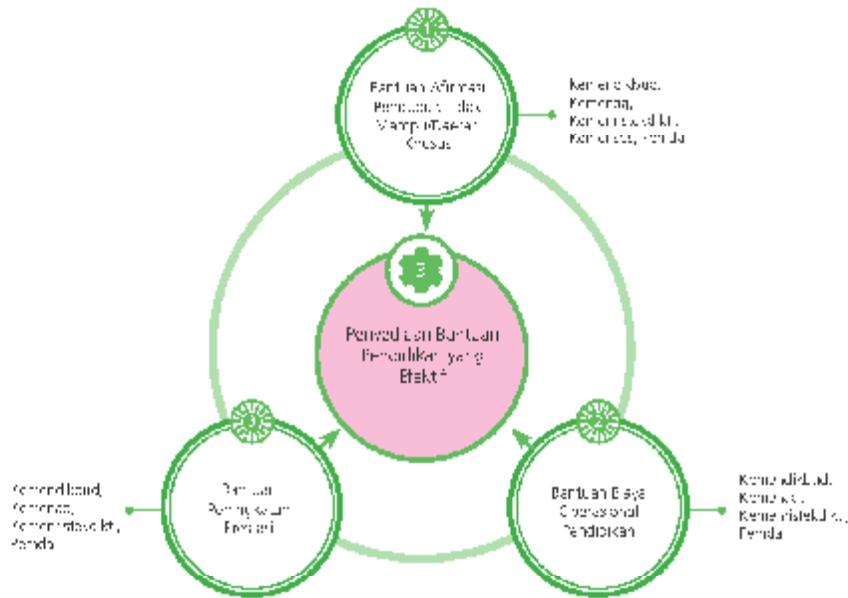
Tabel 3.14
Terdapat 51
Kegiatan
Prioritas

Gambar 10
Regulator
Prioritas
Peningkatan
dan Penjaminan
Mutu
Pendidikan



Tabel 3.15
Regulator
Prioritas
Peningkatan
dan Penjaminan
Mutu
Pendidikan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	
1.	Sekolah Berbudaya Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • 38.154 Sekolah/Madrasah yang meningkatkan kualitas dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3.	Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • 11.006 orang kepala sekolah mendapat peningkatan kompetensi • 1.189 orang kepala sekolah mendapat peningkatan kompetensi
3.	Assesment Mutu Sekolah Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • 8.936 Sekolah/Madrasah yang memperoleh pembinaan, akreditasi dan akreditasi • 50.240 Sekolah/Madrasah diakreditasi • 10.000 satuan PMU/akreditasi

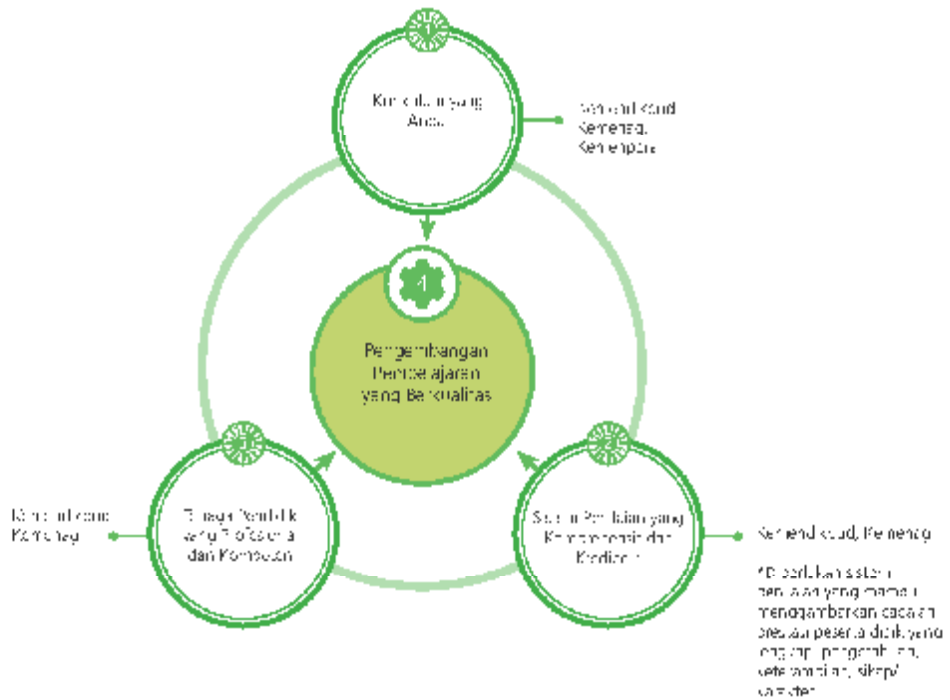


Gambar 3.16 Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan yang Efektif

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	
1	Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Sempit Sasaran Khusus	<ul style="list-style-type: none"> 19,7 juta siswa menerima bantuan melalui KIP 17.494 Mahasiswa menerima Bantuan Pendidikan Bulanan
2	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 54.222.712,5 siswa menerima BOS 787 PT penerima BOS-PTN
3	Bantuan Penanganan Prestasi	<ul style="list-style-type: none"> 45.541 Siswa mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi 67.280 Mahasiswa menerima beasiswa PPA

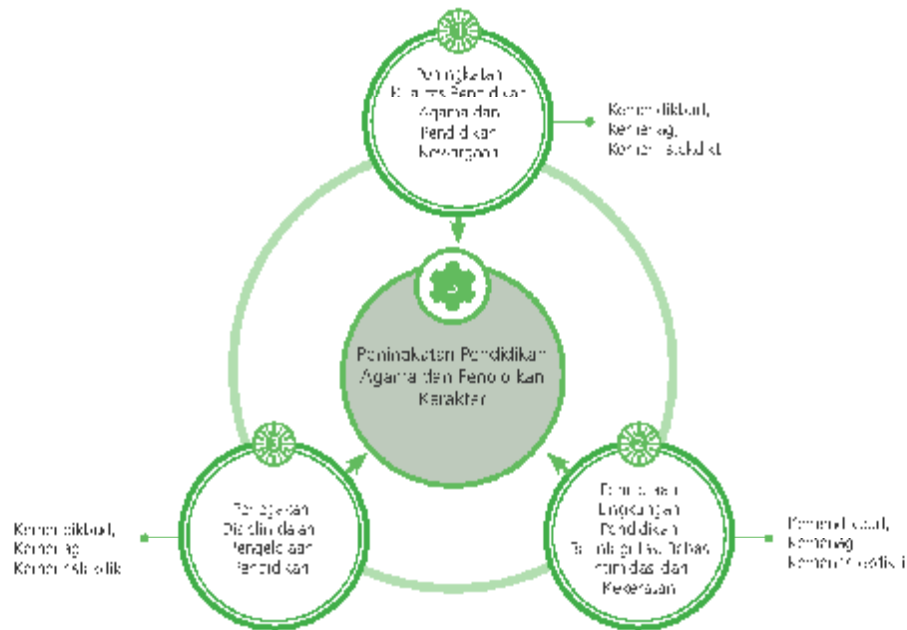
Tabel 3.16 Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Gambar 2.1
Kegiatan
Prioritas
Pengembangan
Pembelajaran
yang Berkualitas



Tabel 2.17
Kegiatan
Prioritas
Pengembangan
Pembelajaran
yang Berkualitas

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
4	Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas	
1	Kurikulum yang Anna	<ul style="list-style-type: none"> 212 satuan pendidikan berkualitas yang dinilai 110 model kurikulum pembelajaran yang berkualitas
2	Sistem Penilaian yang komprehensif dan Kredibel	15.000 satuan pendidikan melaksanakan berbasis komputer (CBI)
3	Tiga Model yang Profesional dan Kompeten	129.000 satuan pendidikan yang melaksanakan K13

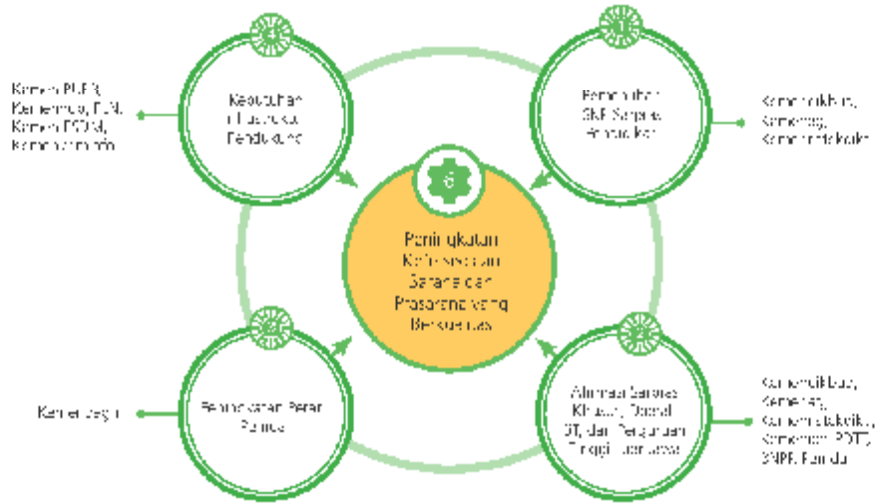


Tabel 3.17
Struktur Organisasi
Peningkatan
Pendidikan
Agama dan
Pendidikan
Karakter

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter	
1.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keluarga	22.000 orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga
2.	Peningkatan Lingkungan Pendidikan, Kualitas, Akses, Mutu, dan Keberagaman	Siswa Sekolah Dasar Atas (sekolah yang mempunyai kelas dan laboratorium)
3.	Penerapan Disiplin dalam Pengelolaan Pendidikan	Seluruh guru mengikuti program guru pembelaan

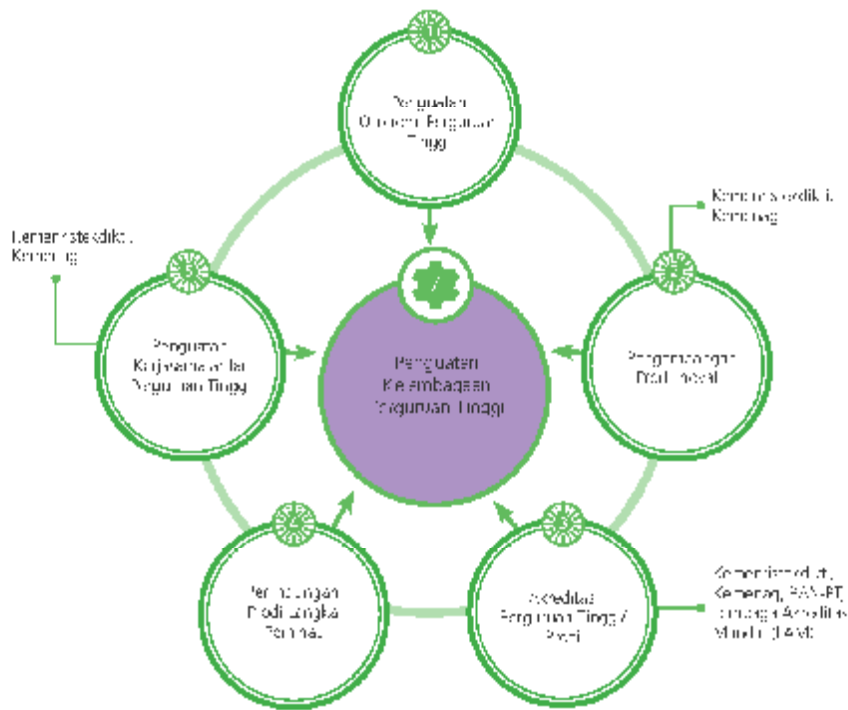
Tabel 3.18
Kegiatan
Peningkatan
Pendidikan
Agama dan
Pendidikan
Karakter

Gambar 4.28 Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas



Tabel 4.19 Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	
1.	Pemenuhan SNP Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Sarana dan Prasarana 10 Perguruan Tinggi Keagamaan Melalui Matrikalisasi PIM (non pda) • 14.100 ruang kelas yang direhabilitasi • 470 unit sekolah baru yang dibangun • 10.000 ruang kelas baru yang dibangun
2.	Afirmasi Sarana Khusus Daerah 3T dan Terpapar Tinggi Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • 140 lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan pembangunan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan daerah 3T dan wilayah kerentanan • 120 SD SMP Suku Atau yang dibangun • 40 SMK di Papua/Papua Barat/Daerah khusus/ET • 7 asrama siswa yang dibangun • 400 sekolah yang direvitalisasi • 20 SMP berserana yang dibangun
3.	Peningkatan Peran Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana 15 Perguruan Tinggi Negeri, Akademi Komunitas dan Velasi (Kerjasama Forum) yang direvitalisasi
4.	Keputusan Infrastruktur Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • 4.948 satuan Pendidikan dan Sarana Pendidikan yang direvitalisasi

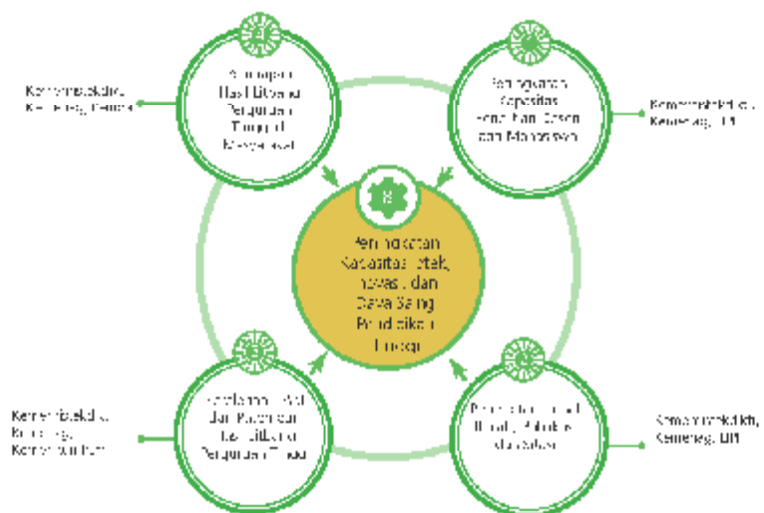


Gambar 3.14 Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
7	Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi	
1.	Penguatan Otonomi PT	<ul style="list-style-type: none"> 11 PIN mahasiswa BHM-BH
2.	Pemenuhan Prodi Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> Ditukanya 745 prodi terakreditasi
3.	Akreditasi Perguruan Tinggi/ Prodi	<ul style="list-style-type: none"> 809 Prodi Terakreditasi 750 PT Terakreditasi
4.	Penguatan Prodi Langka Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> 10 Prodi Langka Terpadu yang diluncurkan 5000 mahasiswa S1K yang menerima beasiswa pemerintah
5.	Penguatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 100 Lembaga PT yang melaksanakan kerjasama kelembagaan nasional dan internasional

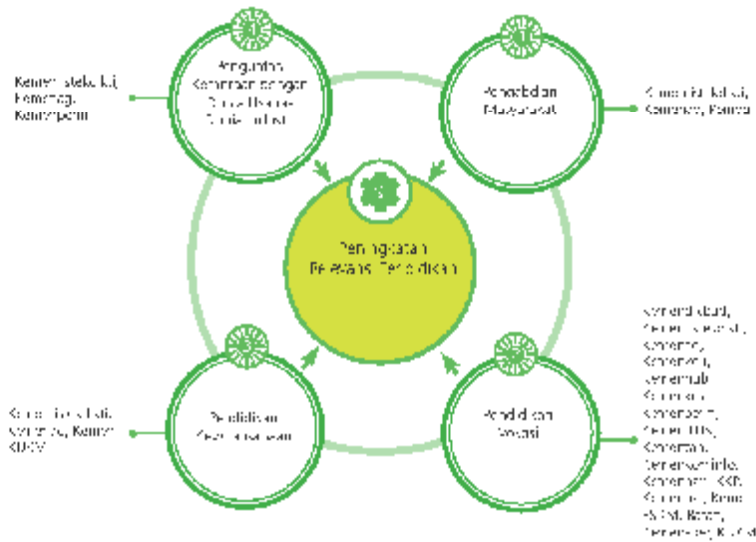
Tabel 3.10 Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Gambar 2.5
Regulator
Prioritas
Peningkatan
Kapasitas
Inovasi dan
Daya Saing
Perguruan
Tinggi



Tabel 2.2
Regulator
Prioritas
Peningkatan
Kapasitas TEK,
Inovasi dan
Daya Saing
Perguruan
Tinggi

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
8	Peningkatan Kapasitas Intelektual, Inovasi dan Daya Saing Perguruan Tinggi	
1.	Peningkatan Kualitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> 473 dosen PT yang dilatih tentang penelitian artikel ilmiah dan ditingkatkan kapasitas penelitiannya 105 jurnal yang ditingkatkan mutunya untuk mendapatkan pengakuan internasional
2.	Peningkatan Jumlah Riset Publikasi dan Paten	<ul style="list-style-type: none"> 245 hasil riset internasional 138 artikel pada jurnal internasional ditulis oleh dosen 6180 hasil penelitian dosen di PT
3.	Peningkatan Hak Paten dan Hasil Riset PT	<ul style="list-style-type: none"> 275 hasil litbang PT didaftarkan ke HKI
4.	Peningkatan Hasil Riset PT untuk pemajemukan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 17 hasil litbang PT untuk pemajemukan masyarakat



Gambar 3.16
Kejelasan
Mekanisme
Peningkatan
Pendidikan

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
9	Peningkatan Relevansi Pendidikan	
1.	Pengabdian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 2.000 hasil pengabdian dosen dan mahasiswa ke masyarakat 55 TKK yang melaksanakan pengabdian ke masyarakat
2.	Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan sarana dan prasarana 15 Perguruan Tinggi Vokasi, Akademik, Komunitas dan Vokasi (Kampus Mitra) yang direhabilitasi 250 lembaga VV yang terakreditasi Tingkat Kemahasiswaan
3.	Pendidikan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> 100 lembaga pendidikan kewirausahaan yang melaksanakan di lembaga pendidikan kesetaraan 28.000 orang mahasiswa dan dosen mendapatkan pelatihan kewirausahaan
4.	Pengujian Kemahiran dengan Dunia Usaha-Dunia Industri	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 mahasiswa yang mengikuti program kemahiran di Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI) 1.000 mahasiswa yang mengikuti program kemahiran di dunia industri

Gambar 3.17
Kejelasan
Mekanisme
Peningkatan
Pendidikan

Persebaran Wilayah

Untuk memastikan program dan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran, maka perlu penetapan lokus yaitu pilihan lokasi yang menjadi target. Di bawah ini adalah tiga contoh kegiatan prioritas, yaitu gambar 3.27 mengenai persebaran guru penerima tunjangan profesi, rasio guru dan murid per sekolah tahun 2016, serta usulan tambahan TPG 2017, gambar 3.28 mengenai distribusi dan pemerataan guru melalui Sarjana Mendidik untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil, tertinggal, terdepan (SM3T), dan gambar 3.29 mengenai siswa penerima bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan sebaran wilayah sebagaimana terlihat dalam peta Indonesia.

Gambar 3.27 Sebaran Guru melalui SM3T di wilayah Indonesia



Permasalahan:

1. Distribusi guru tidak merata yang ditunjukkan dengan rasio guru:murid yang sudah sangat kecil (tidak efisien)
 - o Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah 1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
2. Selisih jumlah guru yang belum tersertifikasi masih besar dan sangat berpengaruh terhadap penambahan alokasi anggaran untuk membayar TPG
 - o Untuk memenuhi UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen masih terdapat > 441 ribu guru yang belum tersertifikasi

Gambar 3.28 Permasalahan Distribusi Guru



Usulan 2017:

1. Tidak menambah jumlah guru, baik PNS, maupun guru honor
2. Penambahan sertifikasi dan tunjangan profesi guru harus dilakukan secara sangat selektif
3. Tunjangan profesi guru harus berdasarkan kinerja guru
4. Usulan penambahan TPG 2017 sejumlah 66 ribu guru (seluruh jenjang) dengan tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun.
5. Persebaran 66 ribu guru per provinsi masih dalam perhitungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



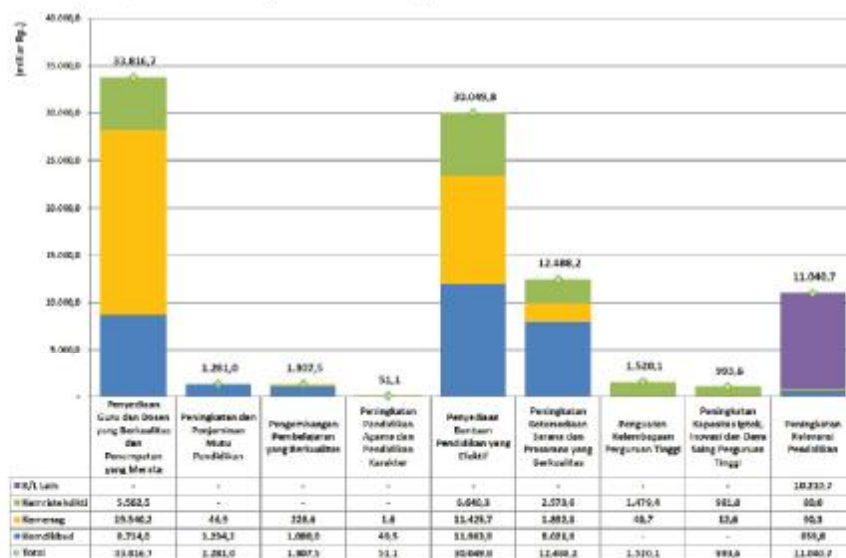
Gambar 3.29 Sebaran Siswa Penerima KIP Tahun 2017

Keterangan:

- Jumlah sasaran penerima KIP tahun 2017 masih sementara, akan diupdate berdasarkan hasil PPLS 2015

Alokasi Pendanaan

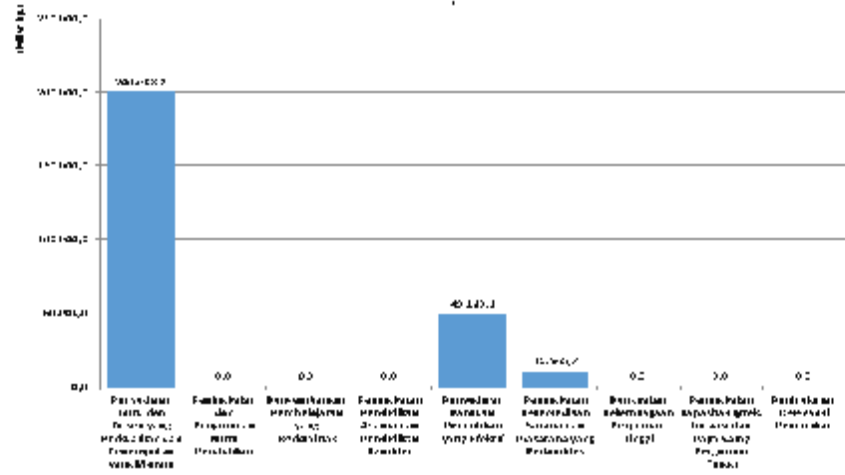
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran pokok pembangunan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan alokasi anggaran K/L sebesar Rp 92,55 triliun dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 3.30 Kebutuhan Anggaran Prioritas Nasional: Pembangunan Pendidikan

Selain itu, dibutuhkannya anggaran pendidikan melalui transfer daerah sebesar Rp. 133,1 triliun, yang dialokasikan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan fisik dan non fisik sebagai berikut:

Gambar 3.11
Kebijakan Anggaran Prioritas Nasional, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Daerah (Miliar)



3.1.4 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Akses Air Minum Layak (%)	70,00	70,25	77,00	84,00	100,00
2.	Akses Ventilasi Layak (%)	69,47	77,70	77,40	83,70	100,00
	Akses Layak (%)	51,1	62,4	65,2	70,7	84,0
	Akses Dasar (%)	9,34	9,3	11,7	12,4	17,0
3.	Kawasan Permukiman Kumuh (Kondisi Kumuh <100%)	Penanganan 39.451 ha (Kondisi Kumuh 100%)	Penanganan 36.451 ha (Kondisi Kumuh 84%)	Penanganan 38.431 ha (Kondisi Kumuh 70%)	Penanganan 38.431 ha (Kondisi Kumuh 44%)	Penanganan 38.431 ha (Kondisi Kumuh 0%)
	Perencanaan	0 kab/kota	116 kab/kota	55 kab/kota	121 kab/kota	- kab/kota
4.	Keurangan mortalitas neonatal berdasarkan Perspektif Perempuan (ura rumah tangga)	7,6	7,0	6,5	6,0	5,0

Gambar 3.22
Sasaran Umum dan
Perspektif
Perempuan
Perumahan dan
Permukiman 2017

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pendanaan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan
2. Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, serta penguatan rencana penanganannya kawasan kumuh dan rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh
3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan ketidaksihan dan perubahan perilaku masyarakat
4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimalisasi sistem akses air minum dan pelaksanaan bea air

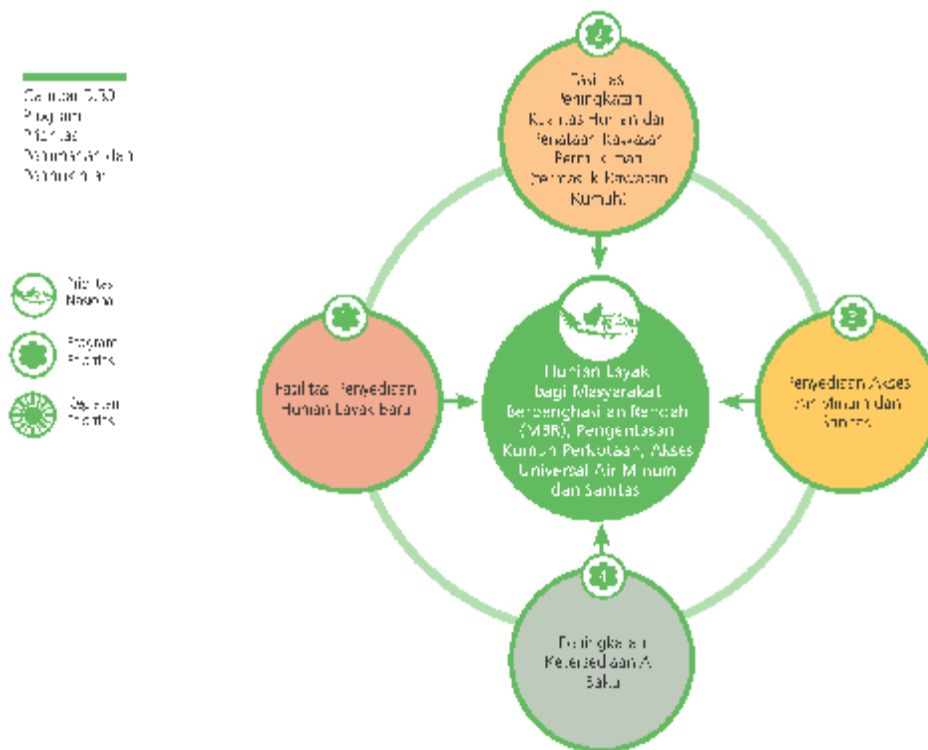
Kebijakan terkait Revolusi Mental

1. Berhikmah dalam berurusan
2. Stop uang sampul dan sampul saluran
3. Stop uang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung)
4. Tidak mengizinkan IMH (Izin Mendirikan Bangunan)
5. Gerakan 31 (31 April, 31 Mei, 31 Agustus)
6. Gerakan mengungkap urusan permukiman

Gambar 3.23
Arah Kebijakan
Perumahan dan
Permukiman
2017

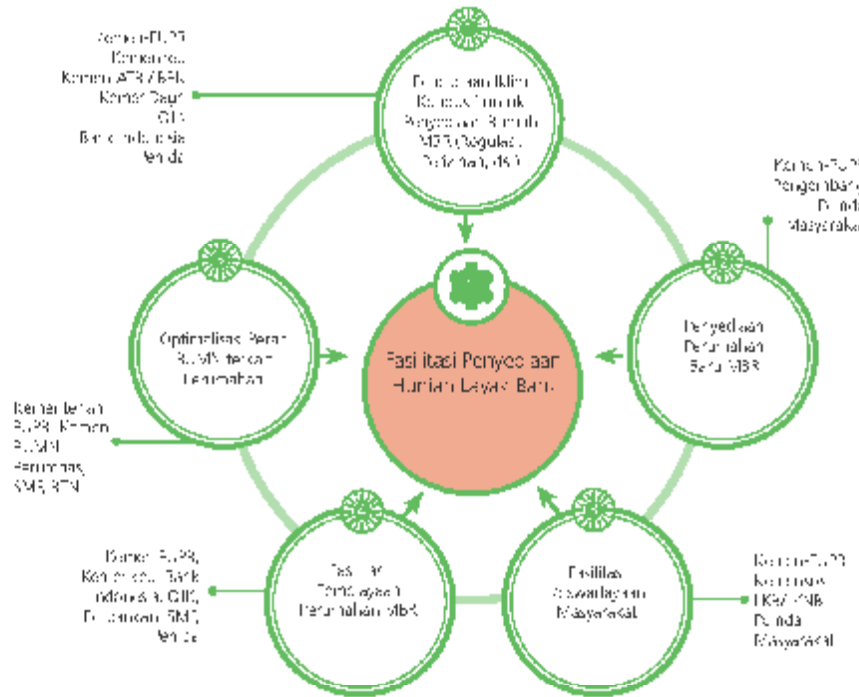
Program Prioritas Perumahan dan Permukiman

Sasaran yang dicanangkan pada tahun 2019 untuk Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman adalah tersedianya 100 % akses air minum dan sanitasi, terentaskannya seluruh kawasan permukiman kumuh perkotaan (0 % kawasan kumuh), dan tersedianya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada tahun 2017 disusun empat Program Prioritas Perumahan dan Permukiman yang keberadaannya saling mendukung pencapaian satu sama lain sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Empat program prioritas tersebut tercantum pada Gambar 3.33.



Kegiatan Prioritas

Berikut adalah salah satu contoh Kegiatan Prioritas Fasilitas Penyediaan Hunian Layak Baru. Kegiatan prioritas selengkapnya dapat dilihat pada suplemen Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat



Gambar 3.51
Sasaran
Program
Prioritas
Masyarakat
Perumahan

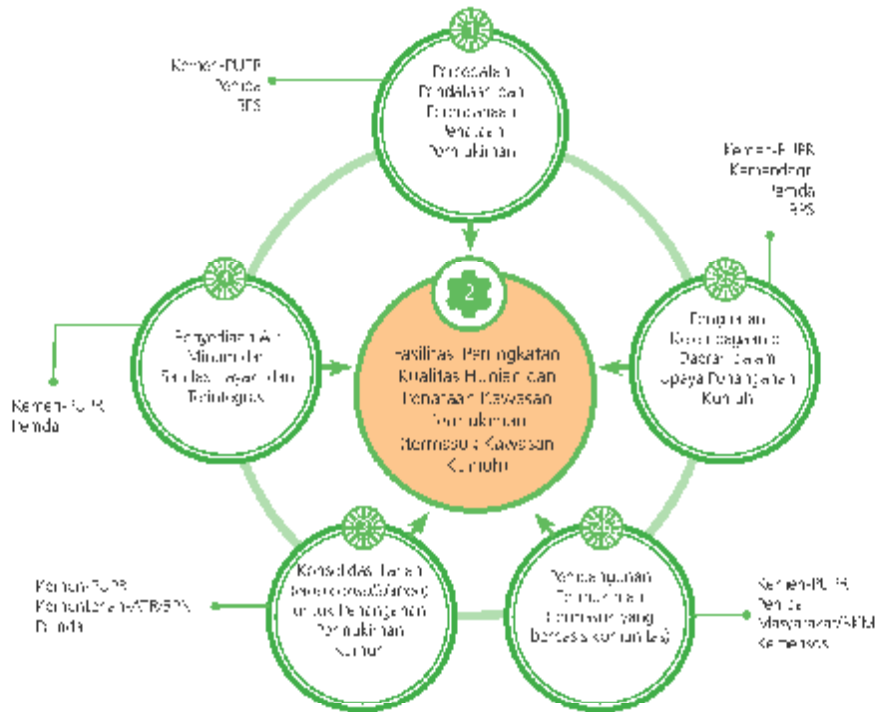
Sasaran

Program dan kegiatan prioritas akan prioritas Mabrind, Mabrind dan Mabrind selengkap-lengkap yang akan di realisasikan di masa mendatang oleh masyarakat.

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru	
1	Penciptaan Ildim Komposisi untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)	<ul style="list-style-type: none"> 10 Maksimal lebih dari 1 MBR pada perumahan perumahan 1 Bank/lembaga "Perumahan" untuk rumah-rumah, rumah-rumah swadaya, perumahan mikro, investasi perumahan
2	Penyediaan Perumahan Baru MBR	<ul style="list-style-type: none"> 11.400 unit rumah dengan Program Sarana dan Utilitas (PSU) Bantuan stimulan rumah swadaya untuk 2.000 rumah 1.900 rumah khusus dengan PSUnya
3	Fasilitasi Kewacayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1.863 keluarga mendapat pendampingan pemberdayaan masyarakat
4	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	<ul style="list-style-type: none"> 173.000 RT memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejati dan Tabungan 50.000 RT memperoleh KPR Barusan 174.240 RT memperoleh subsidi bantuan lang muka
5	Optimalisasi Peran BUMS terkait perumahan	<ul style="list-style-type: none"> 8.000 unit rumah swadaya memperoleh obyek service obligation (PSO) tarif Tersedianya 250 ha tanah tersedia, dan 50.000 unit rumah terbangun

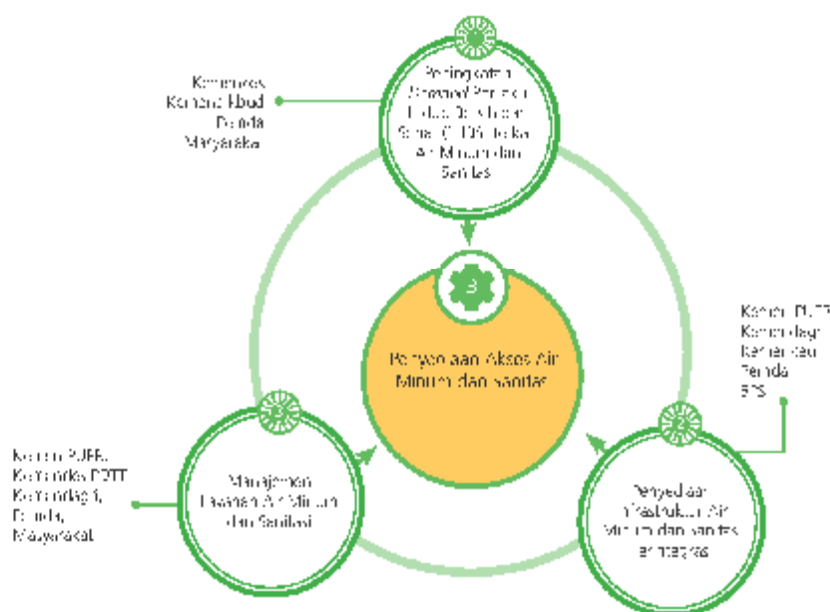
Gambar 3.21
Kegiatan
Prioritas
Masyarakat
Perumahan
Mabrind

Gambar 3.25
Kegiatan
Prioritas
Fasilitas
Peningkatan
Kualitas Hunian
dan Penataan
Kawasan
Perumahan
Kumuh dan
Kawasan
Kumuh



Gambar 3.26
Kegiatan
Prioritas
Fasilitas
Peningkatan
Kualitas Hunian
dan Penataan
Kawasan
Perumahan
Kumuh dan
Kawasan
Kumuh

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Fasilitas Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Perumahan (termasuk kawasan kumuh)	
	1. Percepatan Pendaftaran dan Perencanaan Penataan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Rencana Penataan kawasan Perumahan Kumuh Skala Kota di 121 kabupaten
	2.a. Penguatan Kelembagaan dan peran dalam upaya penanganan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan (P3) kawasan: pengembangan kawasan permukiman untuk 567 kabupaten
	2.b. Pembangunan Perumahan (termasuk yang berbasis komunitas)	<ul style="list-style-type: none"> Santunan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 107 kabupaten Penataan 867 Ha kawasan permukiman khusus Penataan 7.001 Ha kawasan permukiman perdesaan Penataan 9.650 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan
	3. Konsolidasi Lahan dan Konsolidasi untuk Pemukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> 13.648 bidang tanah terkonsepsi
	4. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran kegiatan prioritas ini terintegrasi dengan Program Prioritas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi

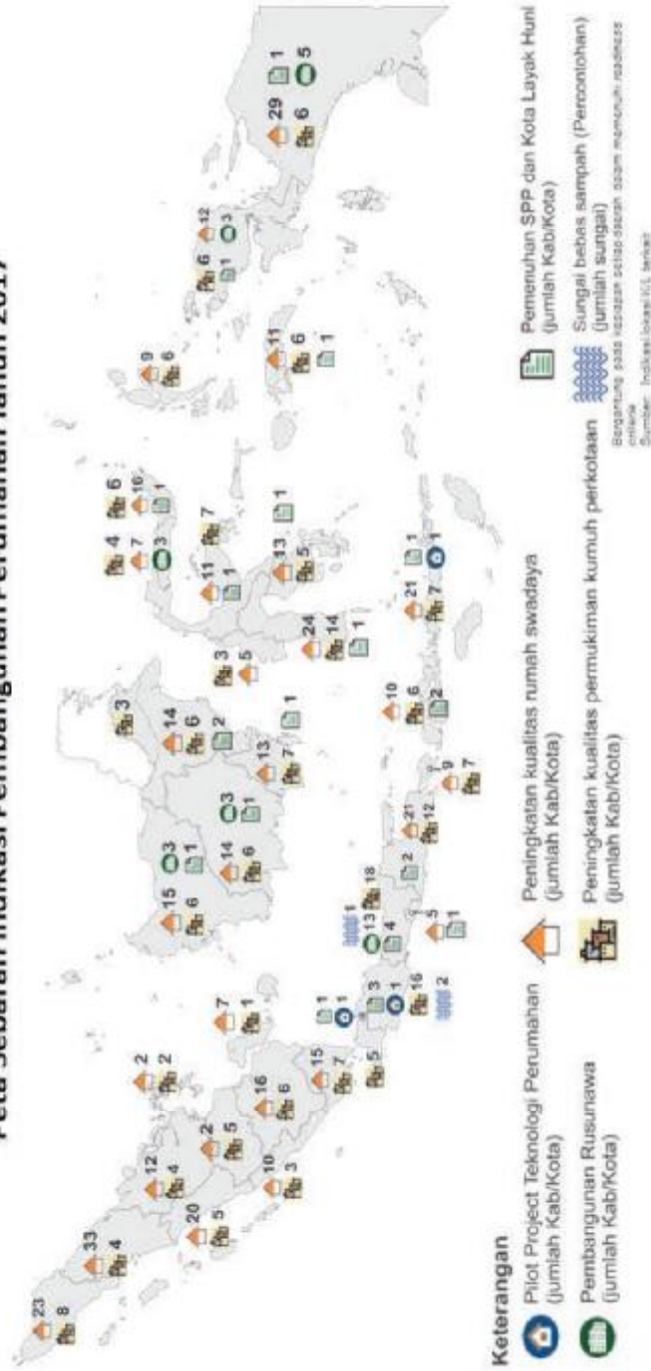


Tablo 3.26
Kegiatan
Prioritas
Penyediaan
Akses Air
Minum dan
Sanitasi

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi	
1	Peningkatan Demand Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> 35.000 desa sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100% rumah penduduk sanitasi untuk 50% kabupaten 5.000 desa mendapat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMB)
2	Penyediaan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu skala regional di 2 kabupaten, skala kabupaten di 6 kabupaten, skala kawasan di 33 kabupaten, dan skala komunal di 108 kabupaten Instalasi Pengolahan Lumpur Lijau (IPL) dan pemantauan Layanan Limbah Tinja Terpadu (LITT) di 53 kabupaten Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala regional di 3 kabupaten, dan skala kabupaten di 49 kabupaten Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala komunal di 53 kabupaten 281.800 Sambungan Rumah (SR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan 491.520 SR SPAM Perdesaan 125.260 SR SPAM Kawasan khusus 158 Kawasan MBK terfasilitasi SPAM Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 22 Kawasan MBK terfasilitasi SPAM non PDAM 350 L/det atau 55.000 SR SPAM regional

Gambar 3.26
Kegiatan
Prioritas
Penyediaan
Akses Air
Minum dan
Sanitasi

Peta Sebaran Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2017

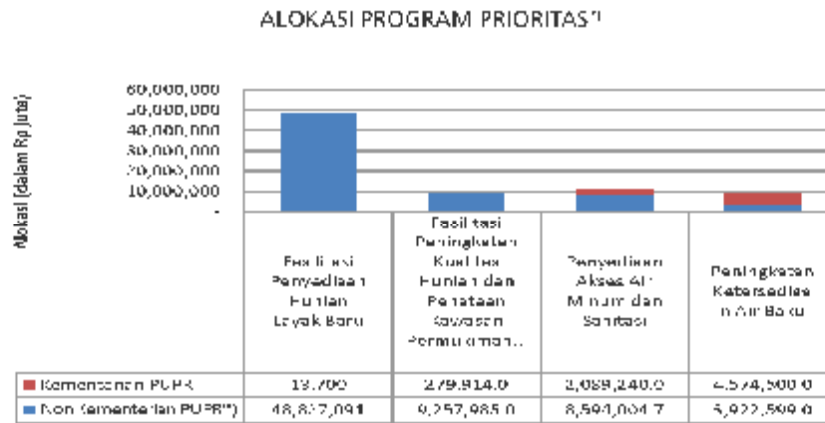


Keterangan: Bergantung pada kesiapan setiap daerah dalam memenuhi readiness criteria
Sumber: Indikasi lokasi K/L terkait

Gambar 3.38
Peta Sebaran
Indikasi
Pembangunan
Perumahan

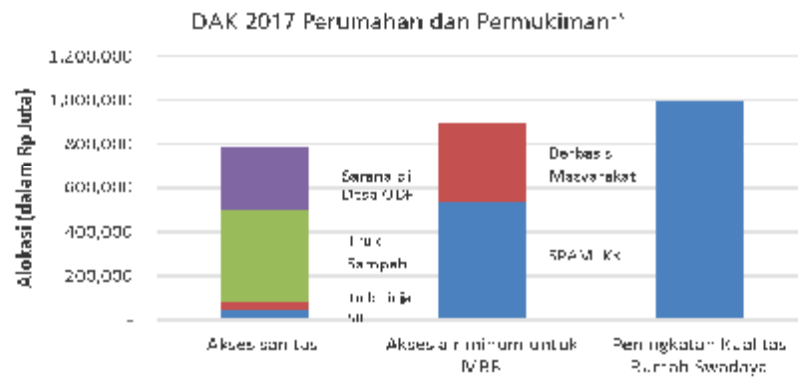
Alokasi Pendanaan

Gambar 3.39
Kontribusi Anggaran Program Prioritas Kementerian PU-PR



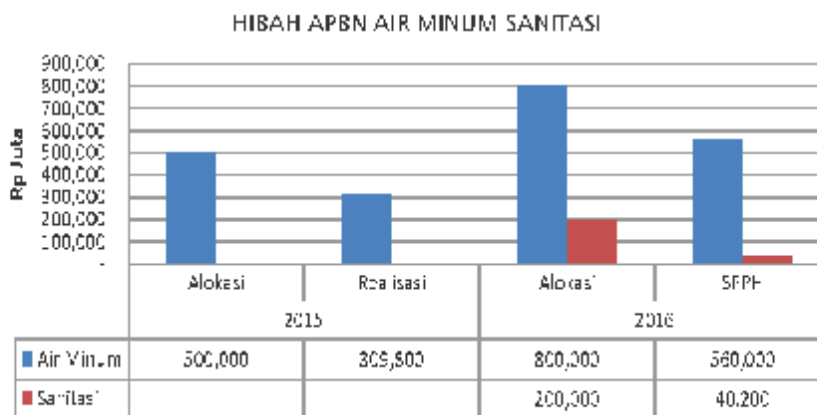
*) Alokasi Non-Kementerian PU-PR berdasarkan usulan ketubuhan

Gambar 3.40
DAK No.7 Program Perumahan dan Permukiman



*) Menyatakan urutan DAK 2017

Gambar 3.41
Rasio APBN Program AP Minum dan Sanitasi



3.2 PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

3.2.1 KEDAULATAN PANGAN

Kedaulatan pangan memegang peranan strategis di dalam pembangunan nasional dalam kebutuhan pokok (penyediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau), peletakan dasar stabilitas nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Naiknya pendapatan masyarakat, urbanisasi, dan kemajuan teknologi dibidang rantai pasokan mengakibatkan terjadinya pergeseran pola konsumsi ke arah nutrisi yang lebih seimbang, masyarakat Indonesia menghadapi tiga jenis malnutrisi, yaitu kelaparan, kekurangan gizi, dan obesitas.

Pembangunan kedaulatan pangan akan menyesuaikan kebijakan produksi pangan dengan pergeseran permintaan. Dari sisi konsumsi, kebijakan pangan diarahkan pada perbaikan kualitas konsumsi gizi masyarakat, ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga pangan. Pada sisi produksi, kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, diversifikasi, dan penanganan gangguan terhadap produksi pangan. Selain itu, perlu sinergi rantai pasokan dan distribusi yang didukung oleh peningkatan pendidkan dan pengetahuan di bidang pertanian serta data yang akurat dari tingkat petani hingga konsumen menjadi bagian dari kebijakan kedaulatan pangan ini.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No.	Indikator	2014 (baseline)	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1. Produksi Dalam Negeri untuk Kedaulatan Pangan						
	Produksi pangan utama: - (miliar ton)	70,3	75,4	76,2	77,0	83,0
	Produksi pangan lainnya/ diversifikasi pangan: - (miliar ton)	19,1	19,5	21,4	22,4	24,1
	- Kedelai (juta ton)	0,82	0,85	1,50	1,90	2,60
	- Gula (juta ton)	2,5	2,5*	2,8	3,0	3,2
	Produksi sumber protein: Daging Sapi (juta ton)	0,41	0,72*	0,50	0,61	0,76
	- (juta ton)	10,6	13,5	14,8	16,0	18,8
2. Pemoangan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi						
	Pemeliharaan jaringan irigasi dan pemukiman air tanah dan rawa (juta ha, kumulatif)	6,80	9,08	9,17	9,18	9,69
	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan pemukiman air tanah dan rawa (juta ha)	2,71 (2010-2014)	0,40**	0,75**	0,22**	1,07 (2015-2019)
	- Pemeliharaan irigasi tanah dan rawa (juta ha, kumulatif)	169,75	103,90	100,34	208,39	204,75
	- Pemeliharaan waduk (sistem irigasi)	15	13	8	9	45
	- Pemeliharaan waduk lanjutan	(lanjutan)	1*	12	29	(2015-2019)

Label - 28
Sasaran Umum
Kategori
Kedaulatan
Pangan Tahun
2017

Kelompok 1 Angka Sampel, 22 Angka Tahunan.

Gambar 3.2
Arah Kebijakan
Pembangunan
Lingkungan
Lokal, Azim
Tengah

Arah Kebijakan

1. Peningkatan produksi dan pangan lain, terutama produktivitas, diversifikasi dan efisiensi rantai pasokan pangan
2. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat
3. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, terutama kecukupan nutrisi bagi masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat
4. Peningkatan ganguan terhadap produksi pangan

**Kebijakan terkait
Revolusi Mental**

- 1) Menorong konsumen untuk cerdas, hemat dan bijaksana dalam mengonsumsi makanan, termasuk keamanan *food safety*
- 2) Menorong produsen dan pedagang agar kreatif, merdikan inovatif dalam memproduksi dan memanfaatkan peluang pasar
- 3) Menorong produsen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk dan pestisida
- 4) Memondulatkan penanganan hulum dan usulu
- 5) Menorong kerjasama antar pelaku ekonomi dari berbagai termas, termasuk enter ole to usaha skala kecil hingga belaku usaha skala menengah dan besar

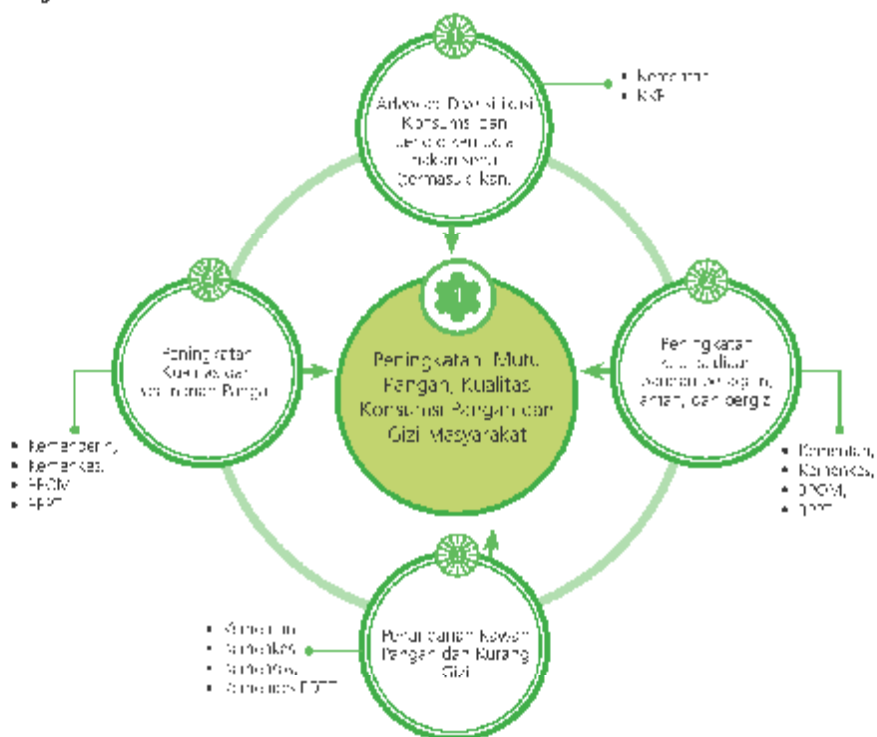
Program Prioritas

Gambar 3.3
Program
Prioritas
Pembangunan
Kedaulatan
Pangan

-  Peningkatan
Produksi
-  Peningkatan
Ternak
-  Peningkatan
Ternak



Kegiatan Prioritas



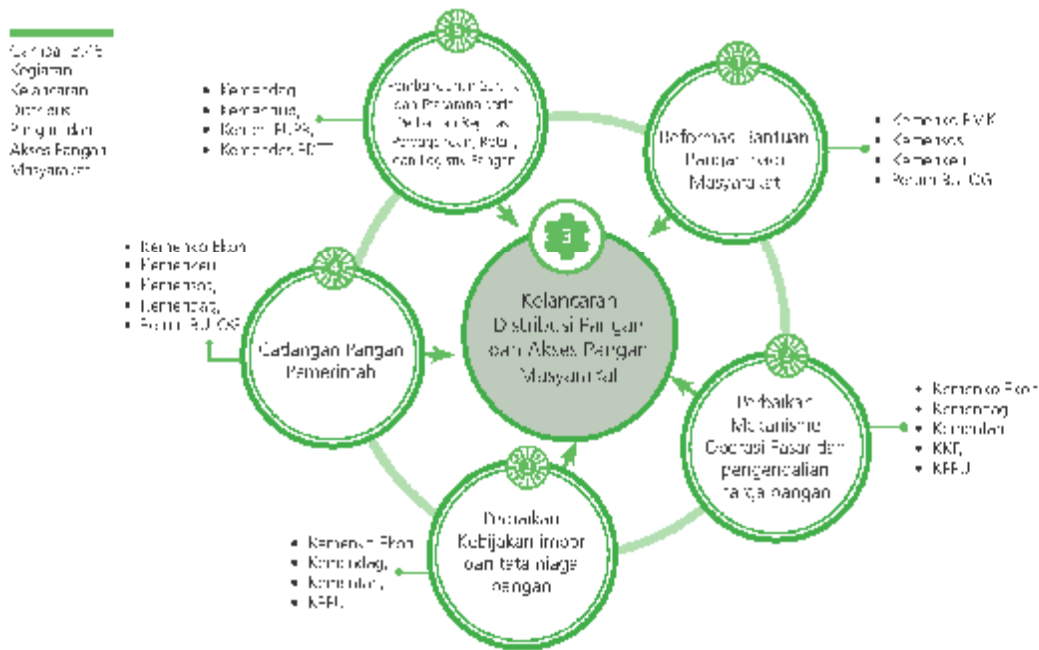
Gambar 3.14
Kejutan
Peningkatan
Mutu Pangan,
Keamanan,
Keberagaman
Pangan dan
Gizi Masyarakat

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Tawaran
1	Peningkatan Mutu Pangan, Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat	
1.	Aksesori Diversifikasi Konsumsi dan Pendidikan Makan Sehat Bermasukkan (termasuk ikan)	<ul style="list-style-type: none"> Gerakan diversifikasi pangan masyarakat 34 provinsi Pekayaan pangan di 6 ribu desa Cetakan makanan ikan di 250 gerai bias Teknologi budidaya tektat guna empang dan haplopolis untuk lokal Penelitian pola makan sehat
2.	Peningkatan keterediaan pangan beragam, aman, dan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> Stasiun inovasi makanan termasu, hasil laut dan perikanan Gerakan Keamanan Pangan 2.500 komunitas desa 130 Pasar aman dan pangan berbahaya Pertambahan areal budidaya produk 2.500 ha Teknologi produksi pangan dan hasil pengolahan ikan desa Teknologi pengolahan rumput laut untuk bahan baku pembuatan kapsul dan selole film Teknologi produksi pati termodifikasi sebagai bahan baku aneka produk pangan yang Aman dan Bergizi 1 buah 1 Draf SKKNI Industri Pangan Ikan 1 Draf SKKNI Industri Fermentasi Daging

Gambar 3.15
Kejutan
Peningkatan
Mutu Pangan,
Keamanan,
Keberagaman
Pangan dan
Gizi Masyarakat

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Perluasan Produksi Padi dan Pangan Lain	
1.	Referensi subsidi pupuk dan lain-lain, penganggaran Desa Mandiri Baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. menyusun nomenklatur reformasi kebijakan subsidi pupuk dan benih 2. Mengidentifikasi petani penerima subsidi pertanian 3. Pengalokasian pasokan pupuk, benih dan pestisida pertanian yang cukup 4. Penyusunan mekanisme baru reformasi subsidi pupuk dan benih (pilot project) 5. Pengalokasian 8,6 juta ton pupuk bersubsidi 6. Pengalokasian 200 Desa Mandiri Baru
2.	Rehabilitasi dan perluasan unit dan lokasi terasitulasi DAS hulu, pembangunan waduk dan embung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan pembangunan unit dan lokasi terasitulasi 1000 hektar 2. Pembangunan bendungan/waduk 38 waduk 3. Pembangunan 77 ribu hektar tanggulrigasi baru 4. Rehabilitasi 218 ribu hektar irigasi 5. Pembangunan 242 embung 6. Rehabilitasi dan pembangunan hulu DAS prioritas dan Kesatuan Pengelolaan Air (KPA) 15.000 ha 7. Pembangunan dam pengendali 15 unit, dam penahan 4.000 unit dan gullyplug 8.000 unit
3.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas 100 unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) 2. Sertifikasi profesi 1.450 orang tenaga kerja bidang pertanian 3. Fasilitas 50.000 orang unit 70.000 Wilayah Kerja Pengolahan Perikanan 4. Peningkatan jumlah unit pelatihan 2.000 unit, BPP di kecamatan 5. Pendidikan menengah pertanian di SMK-PP bagi 10.335 siswa 6. Bantuan P4S 18.485 siswa SMK-PP
4.	Mevaikan statistik pertanian/ perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan statistik pertanian, meliputi fokus statistik produksi, konsumsi, stok, biaya usahatani dan harga 2. Penggunaan teknologi yang tepat dalam pembalakan statistik
5.	Intensifikasi sawah baru dan perluasan areal pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Cetak sawah 144 ribu ha 2. Perluasan areal sawah baru untuk pemukiman sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha 3. Perluasan areal budidaya kaselai 400 ribu ha, tebu 300 ribu ha, cabai 150 ribu ha, bawang merah 500 ribu ha, dan sagu 1,7 juta ha 4. 18.000 rumah rumah keluarga terasitulasi iklim dan pemukiman akurasi 65%-75% 5. 1 model terasitulasi iklim dengan resensi 10 Krt
6.	Integrasi dan konservasi lahan dengan sertifikasi lahan (PRONA)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan 80 juta persil lahan pertanian 2. 263 pelaksanaan review audit lahan 3. IGT verifikasi luas baku sawah di 16 provinsi sentra produksi padi 4. Integrasi SP98 dan SP98 lit dalam RTRW di 9 provinsi
7.	Teknologi peningkatan produktivitas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi padi 1,6 juta ha, jagung hibrida 1,5 juta ha, dan kedelai 300 ribu ha 2. Penanaman tanaman pangan 4 juta ha 3. Desentralisasi pembenihan 100 desa budidaya benih 150 desa sagnan tanaman obat dan 150 desa perdesaan perikanan
8.	Optimasi dan pertambahan kesuburan lahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Lahan Rawan Gambut Terpadu 5.000 ha 2. Teknologi pemuliharaan kesuburan lahan es perdesaan 18 unit 3. Pemantapan lahan pertanian traktor motor (ganyaman) 100 ribu ha
9.	Bantuan alat dan mesin pertanian/irigasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keseluruhan 83.025 Unit alat dan mesin

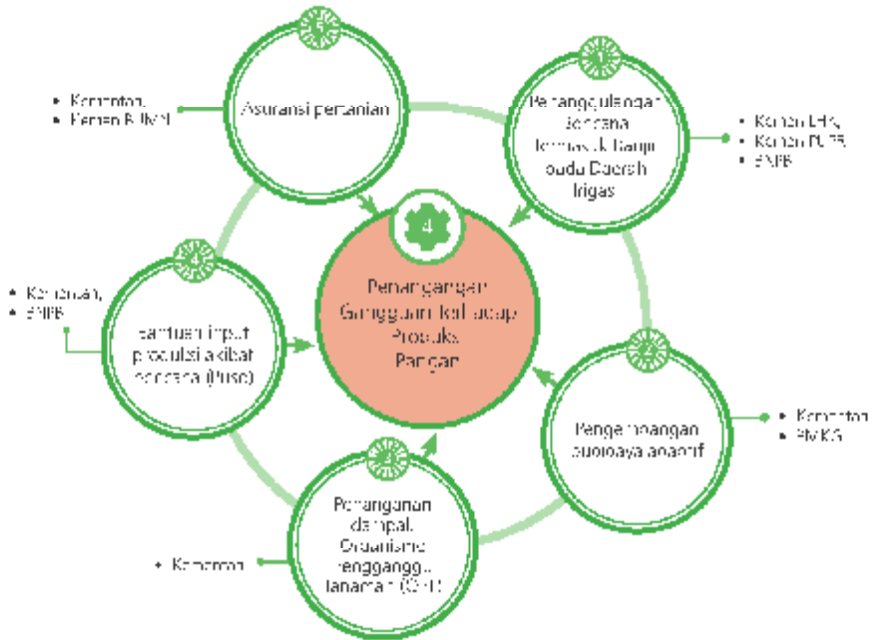
Tabel 2.50
Kegiatan Prioritas dan Indikator Bedak Lahan dan Pangan Lain



Tabel 4.31
Gagasan
Gagasan
Gagasan
Gagasan
Gagasan
Gagasan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	
1.	Reformasi bantuan pangan bagi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • 2 rumus keadilan/Inovasi reformasi Kestora • 1 rumus keadilan BUKAN untuk bantuan pangan • Penyusunan pelepasan pasar transisi nasional yang selaras dengan mekanisme bantuan pangan • Penyusunan mekanisme penyaluran program bantuan pangan
2.	Perbaikan Mekanisme Operasi Pasar dan Pengendalian Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah usaha masyarakat 2,2 juta unit • Sistem informasi pemerseren hasil kepastian dan berkeadilan 1 paket • Program pangan 450 unit Usaha Pangan Masyarakat (UPM) Model Indonesia (IIE) • Model pangan Distribusi Pangan Masyarakat atau 403 gabungan kelompok tani • Pengembangan sistem informasi harga yang real time dan condusif • Memanfaatkan mekanisme operasi pasar pangan
3.	Perbaikan Kebijakan Inovasi dan Tata Niaga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan impor pangan yang harmonisasi dengan kebijakan pangan nasional • Amendemen Laboratorium pemeriksaan pangan yang akan dilaluliskan • Peningkatan transformasi kebijakan impor pangan • Perubahan kebijakan impor pangan menjadi pendekatan nilai untuk beberapa komoditas
4.	Cadangan Pangan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan cadangan pangan • Inovasi struktur dan LK BUKAN dalam rangka meningkatkan kemampuan cadangan pangan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Implementasi Sarana dan Prasarana serta Pembinaan Regulasi Perdagangan, Retail, dan Logistik Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi 172 Desa Rakyat • Pembangunan 33 unit Banguel Postaport • Pembangunan 5 unit Cold Storage Hortikultura



Sumber: 3.47 Kegiatan Perangangan Gangguan terhadap Produksi Pangan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Perangangan Gangguan terhadap Produksi Pangan	
1.	Perencanaan dan Berencana termasuk Banjir pada Daerah Iridas	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana perikanan dan perikanan serta produksi pangan 31,8 km • Rehabilitasi tanggul tanggungan banjir 5,2 km
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaderisasi tanah 5 sistem irigasi • 15 varietas unggul baru padi, jagung, kedelai serelia dan akaki • Informasi iklim untuk pertanian di 33 Provinsi • 6 formula dan produk pertanian ramah lingkungan • 10 rekomendasi kebijakan insentif dan antisipatif sesuai aktual permasalahan pertanian • Penilaian SLE untuk penyuluhan pertanian 1.000 Penyuluh 	
3.	Peningkatan dampak Organisasi Pengganggu lanaman (OPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Monev Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 10.750 ha • Cerdikan pengendalian OPH 260 kali • 16 rekomendasi dampak perubahan iklim • 119 unit fasilitas laboratorium dan klinik • 769 ribu sertifikat pencadangan masuk dan menyetujui hama penyakit yang masuk dan menggalkan peningkatan produksi pangan • 160 orang di 33 Provinsi (luar DKI Jakarta) mengkuti sekolah tentang iklim pangan
4.	santun input produksi alat pertanian (Iuse)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dampak perubahan iklim (OPH) 10 ha

Tabel 3.42 Kegiatan Perangangan Gangguan terhadap Produksi Pangan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Asuransi pangan	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan terhadap resiko pangan melalui asuransi pertanian 1,5 juta ha. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bisnis strategis, pengalihan daya saling dan sinergi, pengalihan sinergi, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan: Badan Usaha Milia Negeri di sekitar jasa keuangan jasa survei dan konsultan di Pulau

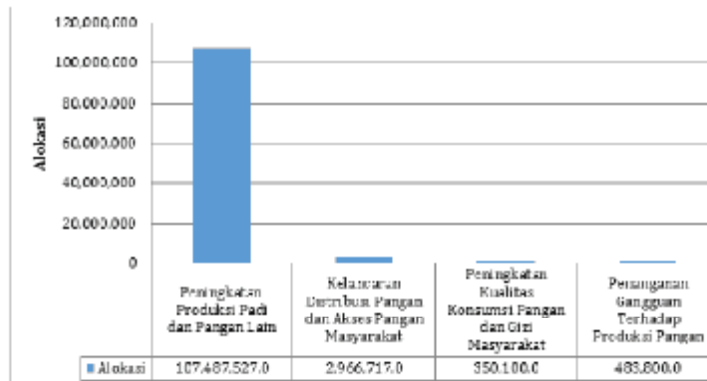
Persebaran Wilayah

Gambar 3.48 Peta sebaran pembangunan waduk baru dan lanjutan serta Desa Mandiri Benih



Alokasi Pendanaan

Gambar 3.49 Alokasi Anggaran Monev dan Nasional Kedaulatan Pangan Tahun 2017 dari Program Pertanian



3.2.2 MARITIM DAN KELAUTAN

Kemaritiman dan kelautan merupakan salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang menekankan peran laut sebagai sumber kesejahteraan dan kepentingan bangsa ke depan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan posisi geografis dan geo-ekonomi yang strategis memiliki kandungan sumber daya laut yang besar. Pembangunan kemaritiman dan kelautan ini mencakup spektrum yang luas sehingga perlu digarap secara terintegrasi dan holistik. Untuk itu diperlukan pentahapan yang realistis didalam mencapai sasaran-sasaran besarnya didukung oleh arah kebijakan yang tepat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1 Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim						
-	Menyelesaikan perjanjian/ kesepakatan/ pulau kecil ke PBB	13.466	750	500	2.000 pulau selisih	Selesai tahun 2017
-	Tingkatkan status maritim antarnegara (PIAG)	10 negara perundingan	8 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	Perundingan 10 negara (Majlis)
2 Pemerantasan IUU Fishing						
-	Meningkatkan setoran seluruh perusahaan	52%	66%	71%	78%	87%
3 Membangun Korektivitas Nasional						
-	Pengembangan kebijakan untuk menunjang tel. laut	24	24	24	24	24
-	Pengembangan kebijakan kelayakan	110	11	13	15	170 (kumulatif)
-	Pembangunan (penyeleenggaraan) kapal perikanan	30 unit	30	30	0*	104 (kumulatif)
4 Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan						
Produksi hasil kelautan - juta ton						
-	Ikan (angkup dan buo daya)	28,5	33,7	35,4	39,4	43-50
-	Perikanan laut	10,6	12,6	14,8	16,0	18,8
-	Perikanan air tawar	10,1	10,6	11,1	11,4	15,1
-	Garam	2,5	3,3	3,5	3,8	4,5
-	Pengembangan perikanan perikanan	21 unit	22 unit	22 unit	22 unit	24 unit
-	Luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	17,3 juta ha	17,8 juta ha	18,0 juta ha	20 juta ha

Tabel 3.30
Sasaran
Umum
dan Arah
Kebijakan
Maritim dan
Kelautan

*) Pada tahun 2017 tidak ada pembangunan baru kapal angkutan laut perikanan, hanya melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan modal asing

Gambar 3.50
Arah Kebijakan
Meningkatkan
Kemampuan
dan Kelautan

Arah kebijakan

1. Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
2. Peningkatan industri perikanan dan hasil laut
3. Perbaikan Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut serta wisata bahari
4. Peningkatan keselamatan nelayan, pembudidaya ikan dan pelambak garam
5. Peninggulangan dan penyelesaian *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* dan keamanan laut
6. Penetapan batas laut, penamaan pulau dan pengepakan pulau-pulau kecil

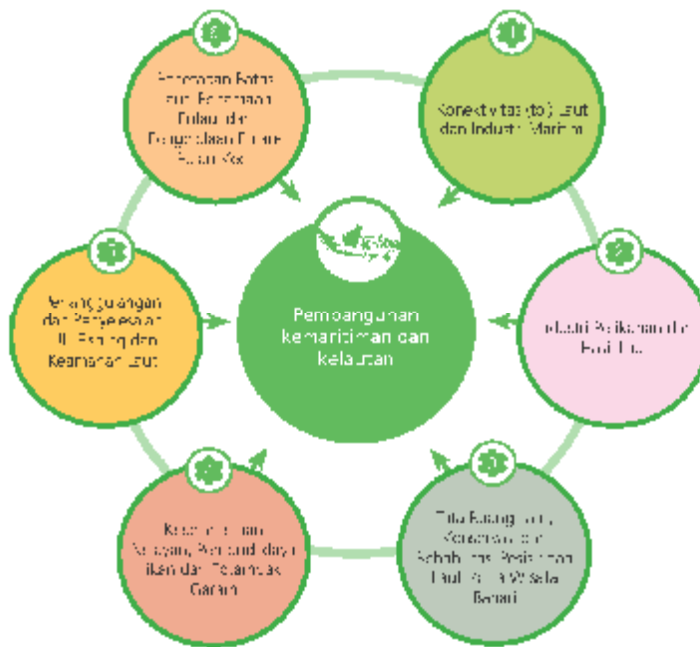
**Kebijakan terkait
Revolusi Mental**

1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim
2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan di arah maritim
3. Peningkatan mutu pendidikan

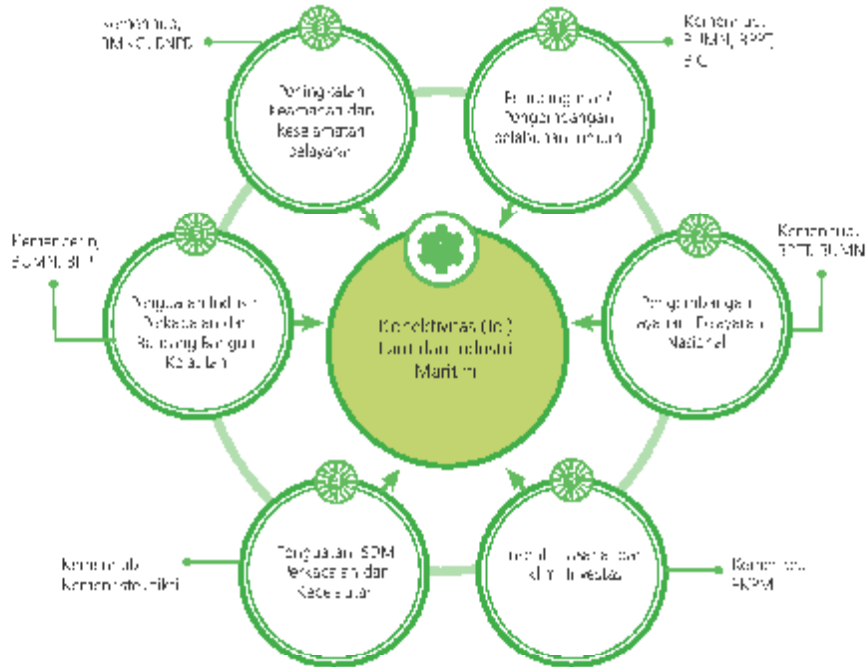
Program Prioritas

Gambar 3.51
Meningkatkan
Kemampuan
dan Kelautan

- Fokus Nasional
- Fokus Pesisir
- Fokus Perikanan



Kegiatan Prioritas

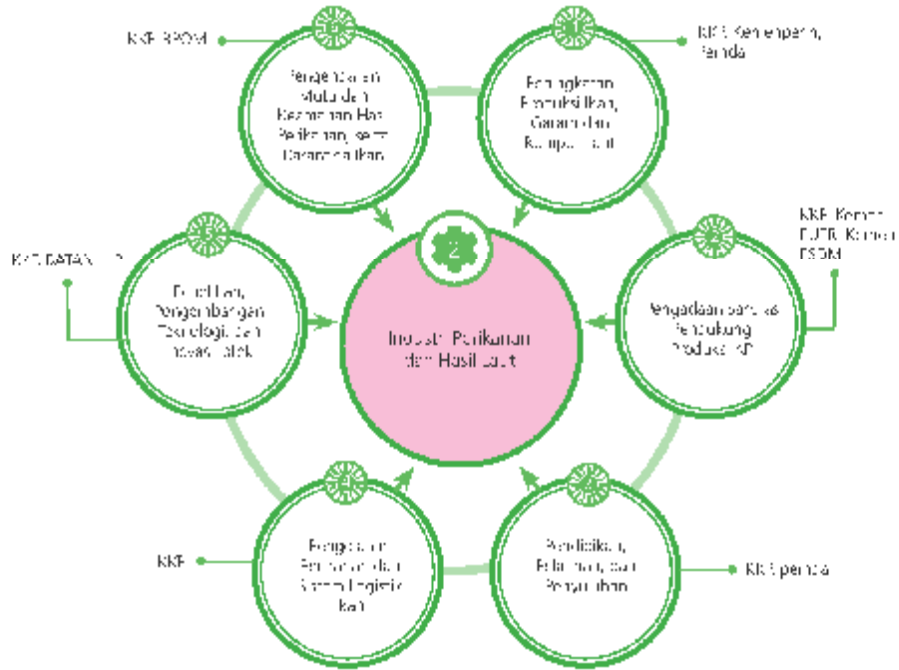


Gambar 3.52 Kegiatan Prioritas Konektivitas (ToI) Laut dan Industri Maritim

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
I. Konektivitas (ToI) Laut dan Industri Maritim		
1.	Pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum	• 24 lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan laut
2.	Pengembangan Layanan Melayaran Nasional	• Subsidi angkutan barang pascakutane • Pembangunan sebanyak 15 Unit Kapal Kontainer 100 TEU • Timbunan kapal dan angkutan kargo dan kuantitas layanan pelabuhan point-to-point
3.	Insentif Usaha dan iklim Investasi	• 1 dokumen rencana kebijakan rencana pengembangan infrastruktur pelayaran RUPFR terpadu • 3 zona inklusi pada kawasan strategis yang diadukung
4.	Penguatan SDM Perkapalan dan Kelautan	• 225.725 orang lulusan Pelatihan SDM Perkapalan Laut dan Kapal Laut 6 bulan
5.	Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan	• Madau Plan Klaster Galangan kapal dan perbaikan kapal • Draft Master Plan dan I-DEP crane kapal 100 TEU • 1 rumusan kebijakan mendukung Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan
6.	Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Kelautan	• 11 pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang, dengan cakupan 75-80%

Gambar 3.53 Indikator Kinerja Utama Konektivitas (ToI) Laut dan Industri Maritim

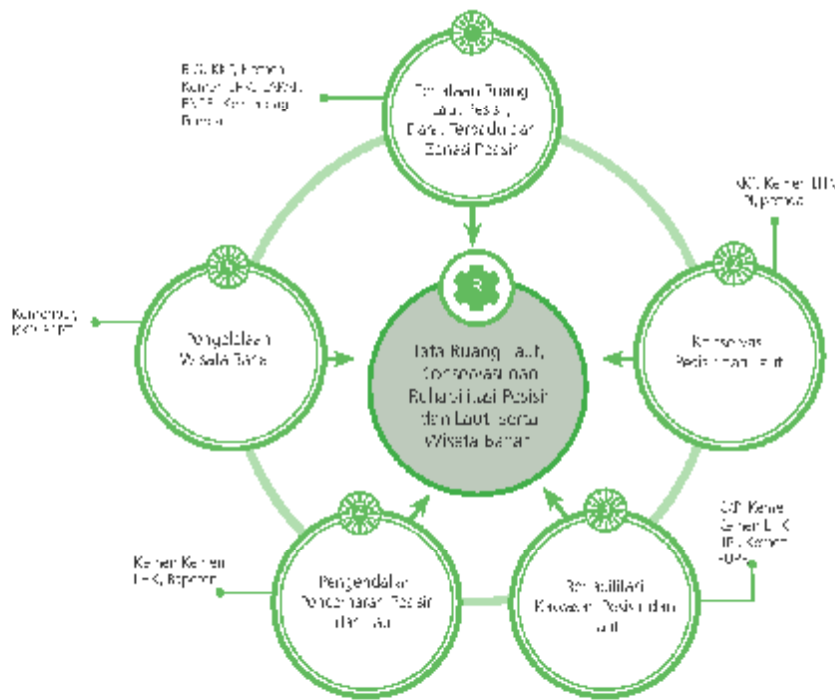
Gambar 3.58
Kegiatan
Koridor
Perikanan dan
Hasil Laut



Tabel 3.40
Kegiatan
Koridor
Perikanan dan
Hasil Laut

No	Program/Kegiatan Prioritas	Target
2.	Industri Perikanan dan Hasil Laut	
1.	Peningkatan produksi ikan, garam dan hasil laut	<ul style="list-style-type: none"> 2000 unit kapal perikanan yang terbangun 10.000 unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan 30 banyolan pembangunan bobolahan perikanan darat termasuk mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Beresed (SKB) 100 kawasan labun pait yang terbangun 12 juta esan umum akses dukungan di Dink Kabupaten (asas) Daerah (UFTA, FTD) 300 kelompok penerima peralatan dan mesin perikanan audioaya 40 kawasan audioaya yang operasinya mampu dioperasionalkan 100 lokasi pembudidayaan budidaya ikan (termasuk bioflok) 25 lokasi pakan mandiri yang dibangun 65% kualitas garam KIP terhadap total keseluruhan 24.000 balokan garam yang difasilitas Bantuan mesin dan peralatan industri pengolahan rumput laut pada tingkat usaha
2.	Pengadaan sarana pendukung produksi KIP	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 paket konversi bahan bakar bensin ke bahan bakar LPG untuk kapal nelayan kecil
3.	Pendidikan, pelatihan, dan pengujian	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 masyarakat nelayan dan perikanan yang lebih siap sahat 70.000 kelompok produksi ternak/saha yang berhasil

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Pengelolaan perikanan dan sistem logistik ikan	<ul style="list-style-type: none"> • 20 gudang beku cold storage; • 1 pasar ikan terintegrasi • 51 lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan • 52 lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan
5.	Penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi iptek	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian stok perikanan di 11 WPP dan 8 daerah umum perairan • 8 sarana dan prasarana penelitian (0) termasuk 3 kapal pemantauan 1 kapal riset • 18 inovasi teknologi perikanan yang dikembangkan • 2 data penelitian teknologi perikanan dan kearifan lokal Indonesia • lokasi ekosistem yang teridentifikasi sebagai penyerap karbon
6.	Pengendalian Mutu dan Keselamatan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan	<ul style="list-style-type: none"> • 80% penyusutan ikan esistik yang mencapai masuk ke dalam wilayah RI • 278 lokasi yang dibebaskan dari penyebaran penyakit ikan karantina • 1.325 sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (SJMCP) yang diterbitkan • 74% cakupan pengawasan wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi • 153.000 sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan



Gambar 2.7
Regulator
Terkait
Pengelolaan
Konservasi
Perikanan
Laut, serta
Wisata Bahari

Tabel 3.36
Kegiatan
Pencapaian
Tata Ruang
Laut, Konservasi
dan
Rehabilitasi
Pesisir dan
Laut, serta
Wisata Bahari

No.	Program/Kegiatan/Pencapaian	Indikator
3.	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> 12 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan RSN yang memiliki rencana zonasi 8 provinsi yang memiliki Informasi Geospasial (IGIS) (K-1) eksistensi pesisir dan kepulauan lautnya 8 provinsi yang memiliki rencana zonasi 8 Provinsi yang terfasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWPUPK) Provinsi Kontrol, pemantauan, dan evaluasi terhadap dampak lingkungan laut yang operasional untuk pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim terlaksananya review kelayakan dan trajektoria kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional (1 <math>=</math> 5) dan zonasi pesisir (1-115)
2.	Konservasi pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> 30 Kawasan Konservasi Perairan yang memiliki pemeliharaan dan kualitas lingkungannya 19 keanekaragaman hayati laut yang ditingkatkan populasinya, dilindungi dan dilestarikan Kawasan maritim karang yang masuk kategori sehat Pemulihan pemeliharaan 5 kawasan mangrove di 7 lokasi di Sumatera dan Jawa sebagai kawasan ekowisata pesisir 10 unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) non taman nasional pada kawasan pesisir dan laut terbentuk dan beroperasi terjalinnya efektivitas pengelolaan taman nasional (20-15) dan kawasan konservasi non taman nasional (10 unit RZWPUPK) di pesisir dan laut di tingkat lokal serta keserasuan sistem hayati Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di taman nasional dan kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut sebanyak 2%
3.	Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> 3 pulau yang berhasil untuk rehabilitasi kawasan pesisir/tanaman laut 25 Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim 10 kawasan pesisir yang direstorasi Pemertanian terapan karang hias yang sama dengan kondisi 2014 30 km panjang pemertanian pantai yang diwujudkan 3 Penerapan Teknologi Pengaman Pantai, termasuk Teknologi Movable Apung untuk Breakwater 40 kawasan (aman, terumbu karang, dan optikasi pantai) rehabilitasi mangrove strukturnya Rehabilitasi kawasan hutan mangrove seluas 1.000 hektar
4.	Pencapaian perkembangan pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> 2 Pilot Project (PA) domestik di perkampungan nelayan 2 kawasan pesisir (Teluk Jakarta) yang menurun secara ekonomisnya 13 energi di lokasi pemertanian laut yang memantulkannya di tingkat nasional
5.	Pencapaian Wisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> 6 Kawasan yang dianggur/dikembangkan sarana prasarana untuk wisata bahari 7 dan destinasi pariwisata yang dilakukan destinasi wisata 103.100 wisatawan mancanegara berkunjung Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan wisata alam pesisir pada 15 kawasan taman nasional laut dan 18 unit kawasan konservasi non taman nasional

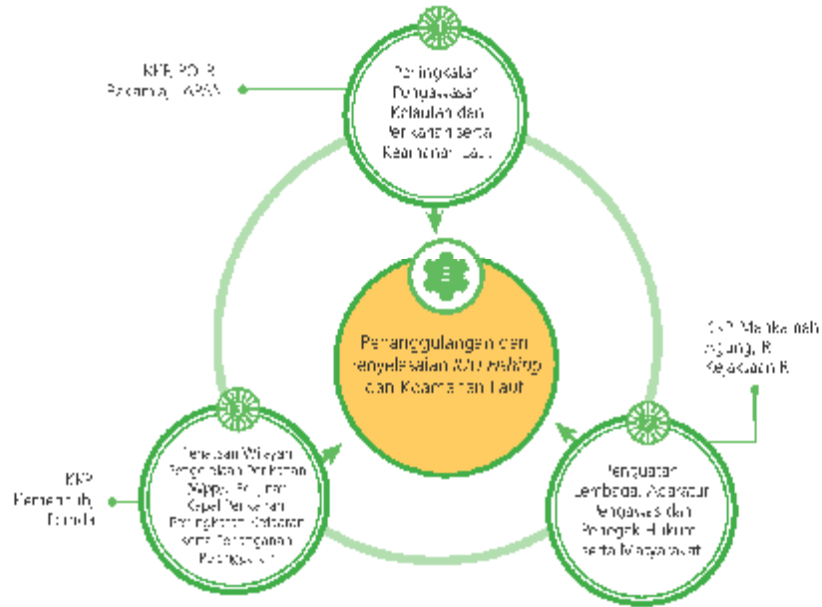


Gambar 3.55 Kegiatan Prioritas Kesejahteraan Nelayan, Pemudidayaan, dan Petambak Garam

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Kesejahteraan Nelayan, Pemudidayaan Ikan, dan Petambak Garam	
1.	Pengembangan dan pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KPLN-nya	<ul style="list-style-type: none"> • 110 kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi
2.	Peningkatan keberagaman dan pendungan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000.000 orang nelayan yang terdidukung
3.	Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • 2.100 kelompok usaha nelayan yang meningkatkan kapasitasnya • 800 kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya atau membangun budidaya • 160 juta usaha hasil skala dan non skala yang memfasilitasi investasi • 25.000 keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif • 25 Kooperasi/sertha usaha mikro/UKM yang diperkuat sistem bisnisnya
4.	Sistem informasi kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Sentra Nelayan yang terintegrasi Sistem Informasi Nelayan • 1 Sistem Informasi perikanan hasil perikanan • 6 Mode Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor Kelautan • Operasionalisasi sistem otomatisasi zona potensi perikanan ikan (ZITP) • 550 orang di 11 provinsi mengikuti Sekolah Lapang Petambak Garam

Tabel 3.57 Kegiatan Prioritas Kesejahteraan Nelayan, Pemudidayaan, dan Petambak Garam

Tabel D.58
Segitran Prioritas
Meningkatkan
dan Penyelesaian
WU Fishing dan
Keamanan Laut



Tabel D.58
Segitran Prioritas
Meningkatkan
dan Penyelesaian
WU Fishing dan
Keamanan Laut

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sesungguhnya
5.	Peranggulan dan Penyelesaian WU Fishing dan Keamanan Laut	
1.	Meningkatkan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut	<ul style="list-style-type: none"> 150 hari occasional kapal pengawas 120 hari occasional boarder patrol 1 kapal pengawas yang dibangun 1.000.000 kegiatan patroli di wilayah perairan 17 operasi bersama lanla berintegrasi nasional
2.	Mengurangi pelanggaran, aparaturnya pengawasan dan penegak hukum, serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 80 orang IPK, 100 orang/Anasir Berhimpun dalam kelautan dan perikanan serta keamanan 1.000 Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 100 polisi khusus penanganan insidir dan kasus laut yang komprehensif
3.	Pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), perijinan kapal perikanan, peningkatan keselamatan serta penanganan pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> optimisasi dan integrasi sistem perizinan pusat daerah berdasarkan 15 lokasi inisiasi pembentukan kelembagaan pengendalian WPP di 2 wilayah 9 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terakreditasi sebagai daya ikan 750 kapal perikanan yang mendapat sertifikasi keselamatan kapal ikan

Persebaran Wilayah

Gambar 3.58
Pengembangan
Pelabuhan
Strategis Tol Laut
2017

24 Pelabuhan Strategis Tol Laut 2015-2019



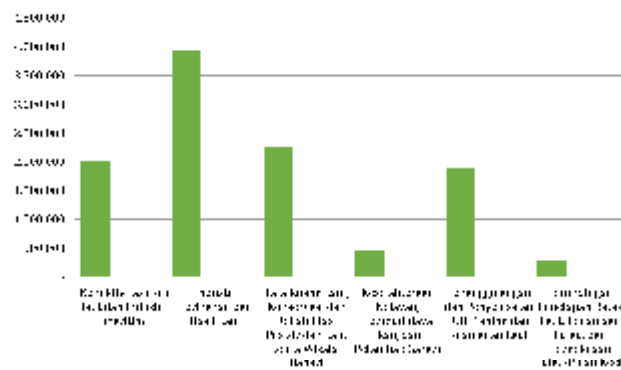
20 Pulau-Pulau Kecil Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

Gambar 3.59
Pengembangan
Pulau-Pulau Kecil
Sentra Kelautan
dan Perikanan
Terpadu



Alokasi Pendanaan Program Prioritas

Gambar 4.60
Alokasi
Anggaran
Kemudahan
dan Keluaran
Terpadu dan
Sentra Perikanan
Terpadu



Catatan: KKD terintegrasi dan terpadu yang terdapat di 20 April 2016 (belum termasuk DAK)

3.2.3 KEDAULATAN ENERGI

Penyediaan energi akan selalu menjadi tantangan karena terbatasnya pasokan energi primer dalam 5 tahun ke depan. Perlu dilakukan optimalisasi dari kemampuan pasokan yang ada termasuk optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta meningkatkan kontribusi sumber energi baru dan terbarukan termasuk bahan bakar nabati (BBN) dan panas bumi. Dari sisi pemanfaatannya perlu terus ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor. Masalah penyediaan energi yang memadai dengan menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu saja menyebabkan upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi perlu diprioritaskan.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No.	Indikator	2014 <i>baseline</i>	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPIMN 2019
1	Rasio Elektrifikasi	84,1%	87,5%	90,2%	92,75%	96,6%
2	Konsumsi Listrik Perkotaan (KWh)	843	914	985	1.058	1.200
3	Produksi Sumber Daya Energi					
	• Minyak Bumi (ribu BM ¹ hari)	789	788	830	750	700
	• Gas Bumi (ribu GCM ² hari)	1.455	1.194	1.145	1.110	1.205
	• Batubara (juta Ton)	438	393	410	413	400
4	Penggunaan Dalam Negeri (DMC)					
	• Gas bumi Dalam Negeri	57%	58%	61%	62%	64%
	• Batubara Dalam Negeri	15,6%	16,1%	16,5%	16%	16,0%
5	Pemantauan FSBU/ Regasifikasi LNG <i>kecuali yang bernilai komisi</i>	2	1	2	1	2
6	Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)	11.950	13.458	15.000	15.364	18.000
7	Pemantauan SFBG (unit)	13	18	30	25	15
8	Jaringan Gas Kota (klasifikasi)	7/16.549 ¹⁾	2/16.000 ²⁾	33/171.000	12/110.000	45/171.000
9	Pos Uji dalam Gamut Energi (PS)	8	10	11	15	16

Label 2.10
Sasaran
Perencanaan
Pemerintah
Medan
Gubernur
Sumatera
Utara

Keterangan

¹⁾ Mula-mula pada tahun 2014 dan 2015 target nasional. Perusahaan swasta juga memiliki peran signifikan dengan kehadiran dan hibah pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 14.100 km.

²⁾ Harga mencakup jumlah SFG yang dibangun melalui APBN.

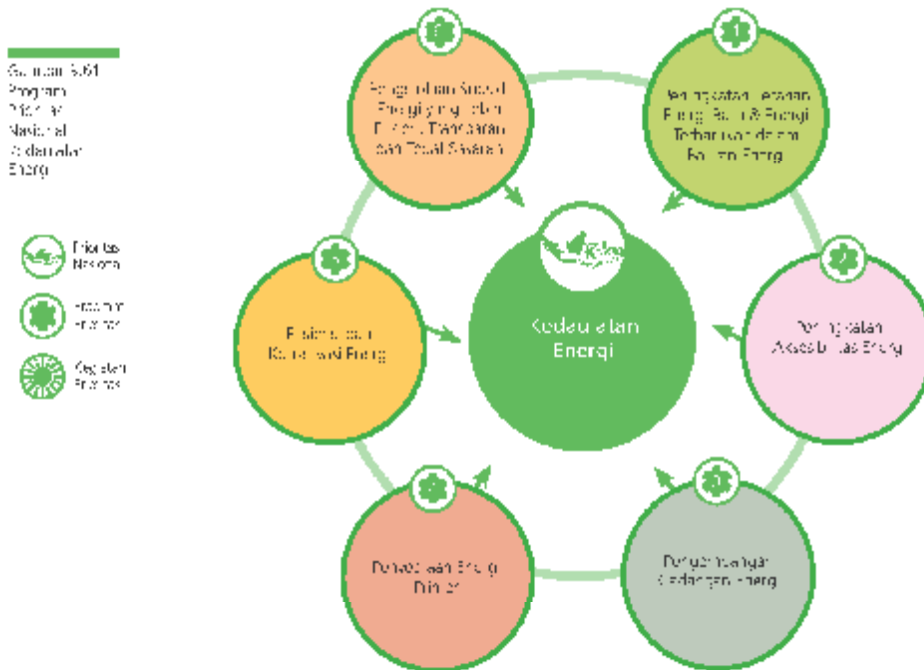
Arah Kebijakan

1. Meningkatkan produksi energi primer
2. Meningkatkan cadangan energi
3. Meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi
4. Meningkatkan aksesibilitas energi
5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi

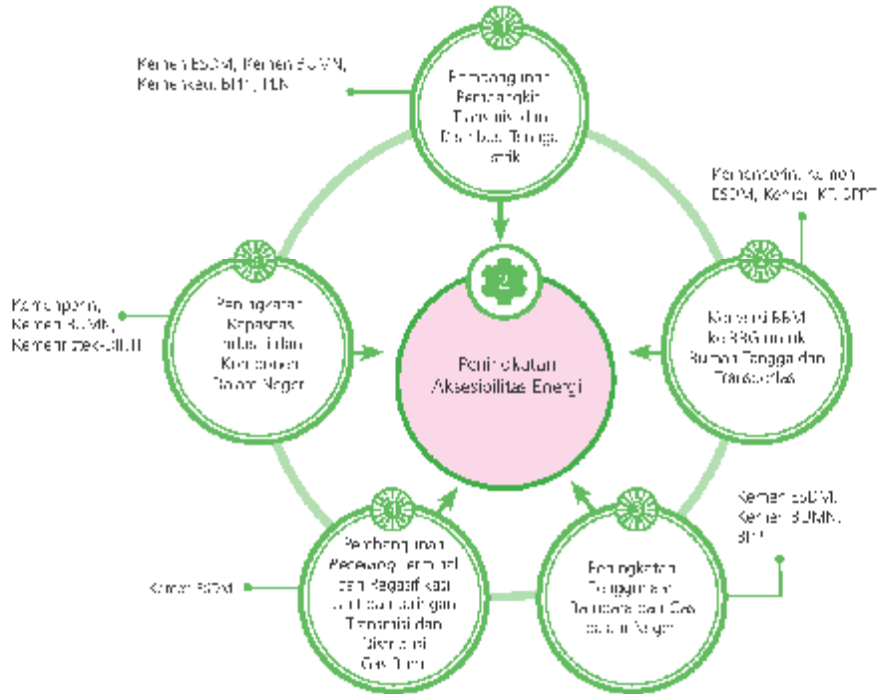
Kebijakan terkait Revolusi Mental:

- Meningkatkan tata kelola (good governance) sumberdaya energi
- Memanfaatkan energi secara efisien
- Melayani B2B/B2C energi yang memusnahkan belianqan
- Peningkatan partisipasi publik
- Peningkatan mutu dan efisiensi sektor energi

Program Prioritas



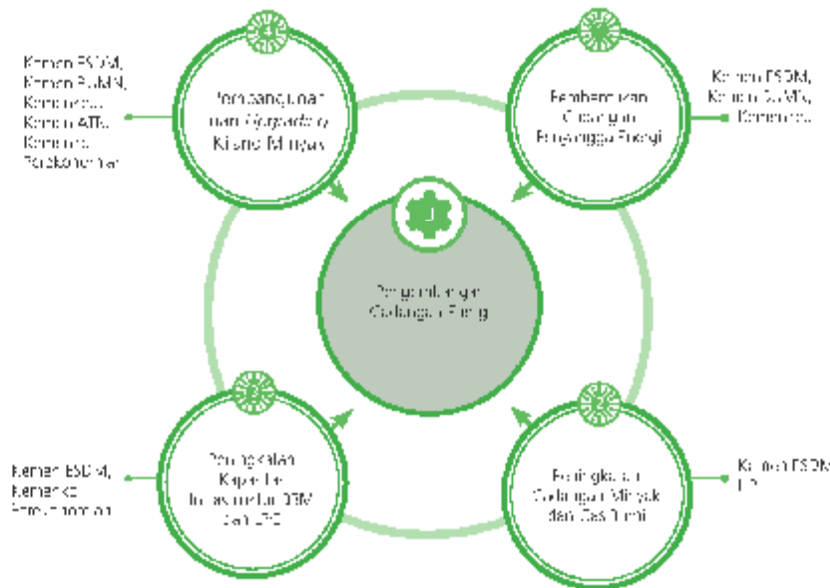
Gambar 3.63
Rencana
Strategis
Peningkatan
Aksesibilitas
Energi



Tabel 3.12
Rencana
Strategis
Peningkatan
Aksesibilitas
Energi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Peningkatan Aksesibilitas Energi	
1	1. Pemanggaan, pemangkit, transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas pemangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) sebesar 6.49 MW Meningkatnya rasio elektrifikasi sebesar 92,75% Meningkatnya konsumsi listrik per kapita sebesar 1.056 kWh/kapita Terbangunnya Gardu Induk kapasitas pemangkit sebesar 26.410 MW Terbangunnya jaringan Transmisi dan distribusi sebesar 10.026 KVA/km
2	2. Konversi BBM ke BGG untuk Rumah tangga dan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya 2 unit SPFG (APEN) Terpenuhi nya kebutuhan BGG dan CNG sebesar 10 MMSCFD Konversi Bahan bakar bensin ke bahan bakar LPG untuk kapal nelayan kecil sebanyak 10.000 kapal Konstruksi pemangkit Mini LUK (termasuk subunit) dan 100% feeder line 20" dan pemangkit LCNE stations sebanyak 4 unit @0,3 MMSCFD Terbangunnya jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jaringan gas kota sebanyak 110.000 km Terselesaikannya paket pengadaan LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro sebanyak 517.030 paket Terselesaikannya paket pengadaan LPG 3 KG sebanyak 100.000 paket di Papua Terbangunnya 2 unit WCV project pemanfaatan tabung AMC mini LUK Penyelesaian pilot project pemanfaatan gas untuk sektor rumah tangga, industri, dan transportasi sebesar 30%

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Peningkatan Penggunaan Bahan-bahan Gas dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Persentase akresi gas untuk domestik sebesar 60% Persentase pemantaatan sarana gas untuk domestik sebesar 76% Implementasinya proses gasifikasi, terutama yakni termal yang 1 sesuai 100% Kelanjutan pembangunan <i>pilet dryer underground coal gasification (UCG)</i> 100% Penerapan pemecah cyclone pada boiler HPLU (100%)
4.	Perbaikan jaringan terminal dan kegasfikasian dan Distribusi Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya jaringan pipa transmisi dan distribusi dedicated sebesar 195 km Perbaikan dan ekspansi transmisi dan distribusi gas bumi sebanyak 70.327 km Terbangunnya LNG receiving terminal sebanyak 1 unit
5.	Penyediaan Ketersediaan Industri dan Komponen Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Investasi kas negara BUMN melalui industri Rumusan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan jumlah produksi BBM Pertamina, gas (FGN) dan listrik PLN Peyanan jasa teknologi Recayasa Desain dan Sistem teknologi (RNBSP)

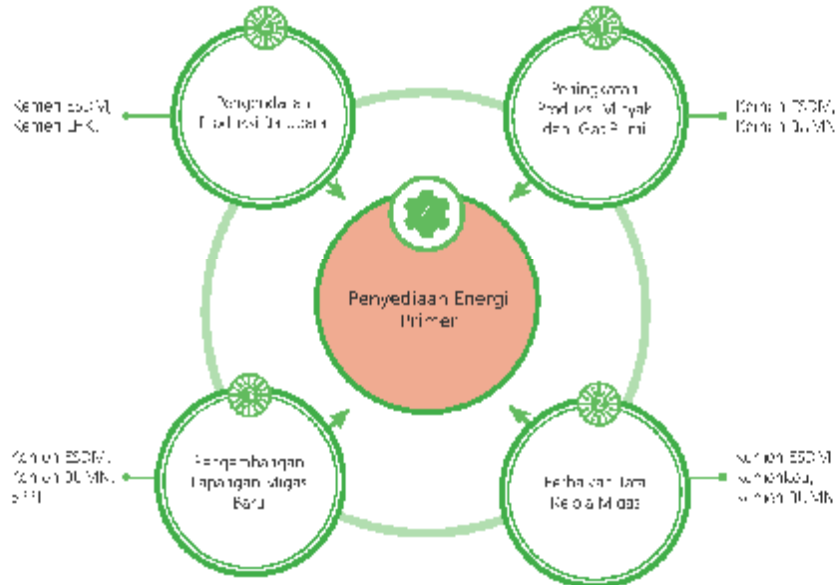


Gambar 3.11
Kegiatan
Peningkatan
Cadangan
Energi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Pengembangan Cadangan Energi	
1.	Perbaikan Cadangan Penyanga Energi	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Penyanga Energi
2.	Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan minyak bumi sebesar 8,285 MMSTB Cadangan gas bumi sebesar 140 TSCF
3.	Penyediaan Ketersediaan Infrastruktur BBM dan LPG	<ul style="list-style-type: none"> 9 lokasi reklamasi wilayah kumulatif nasional Kapasitas tangki penyimpanan LPG sebesar 5 (lima) juta ton Kapasitas tangki penyimpanan BBM sebesar 60,5 juta KL
4.	Perbaikan dan Upgrade Kilang Minyak	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan pelaksanaan HED dan UEDD pembangunan kilang minyak (80%) Keberlanjutan <i>Wof dryer</i> kilang minyak (55%)

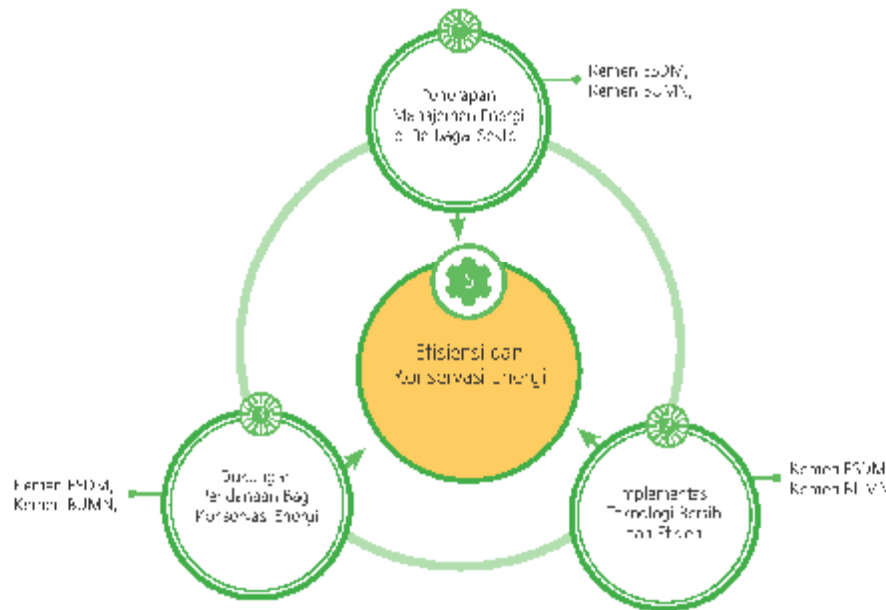
Gambar 3.12
Kegiatan
Perbaikan
Cadangan
Energi

Gambar 5.45
Kegiatan
Prinsipal
Penyediaan
Energi Primer



Tabel 2.7
Data dan
Prinsipal
Penyediaan
Energi primer

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4	Penyediaan Energi primer	
1	Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Produksi Minyak dan Gas Bumi sebesar 1.86 juta barrel per hari 4 wilayah kerja/WK's apiteleng
2	Perbaikan Tata Kelola Migas	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang mengacu kepada kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan meningkatkan pengusahaan jenis BBM umum - BBM non subsidi, yakni 110.000 barrel per hari (BPH) sebesar 13,5 juta KL, dan JBU sebesar 43,5 juta KL Royal UL Migas dan penyusunan lima Rancangan Peraturan Pemerintah
3	Pengembangan Lapangan Migas Baru	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan survey seismik 2D sepanjang 4.250 km Kegiatan survey seismik 3D sepanjang 3.000 km Eksplorasi 40 unit sumur Penerapan 89.88 BBOH sumberdaya migas konvensional non konvensional Dimulainya 2 wilayah kerja konvensional dan 4 wilayah kerja non konvensional baru Penandatanganan 4 EKS migas konvensional dan 4 EKS migas non konvensional
4	Peningkatan Produksi Batubara	<ul style="list-style-type: none"> Produksi batubara sebesar 41,3 juta ton

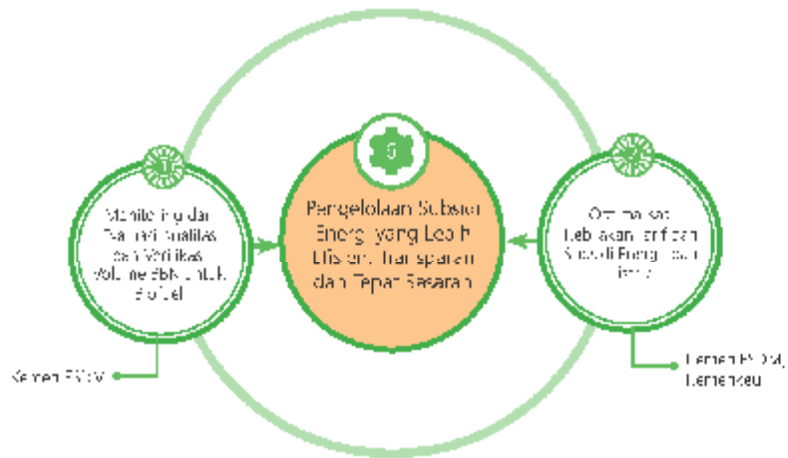


Tabel 3.65
Kegiatan
Fasilitas
Efisiensi Dan
Konservasi
Energi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Efisiensi dan Konservasi Energi	
1	Penerapan Manajemen Energi di Berbagai Sektor	<ul style="list-style-type: none"> Penghematan energi dan air di instansi dan lembaga Pemerintah/Perusahaan sebanyak 68 instansi pemerintah Peminatan dan Pengawasan Manajemen Energi 100 perusahaan mencapai konservasi energi 85.000 TOE/ta di industri
2	Implementasi Teknologi Berbasis Efisien	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian Limas Gas Rumah Kaca (LGR) di sektor energi sebesar 1%. Pembangunan center of excellence energy bersih di Bali Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas di Bandung, Bone Bolango dan Parigi Moutong Retrofitting PJU di salib gas, Medan dan Kota Bharu Demikian juga akan diupayakan untuk sistem otomasi
3	Dukungan Pendanaan Bagi Korporasi Energi	<ul style="list-style-type: none"> Jalankan skema kemitraan sektor industri dengan pemerintah (K.A. Investment Growth Audit) sebanyak 2 objek Terselenggaranya mekanisme dan pelaksanaan pemberian insentif dana ketahanan energi sebanyak 1 miliar Terselenggaranya pendanaan pembiayaan investasi efisiensi energi bagi industri asal beaungpandan

Tabel 3.75
Kegiatan
Fasilitas
Efisiensi Dan
Konservasi
Energi

Gambar 3.67
Rencana
Pengelolaan
Subsidi
Energi yang
Lebih Efisien,
Transparan dan
Tepat Sasaran



Tabel 3.46
Rencana
Pengelolaan
Subsidi
Energi yang
Lebih Efisien,
Transparan dan
Tepat Sasaran

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
6	Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan dan Tepat Sasaran	
1	Monitoring dan evaluasi Kualitas dan Kinerja Utama (KIKU) industri tarifed	<ul style="list-style-type: none"> tercapainya pemenuhan spesifikasi EBT dalam negeri sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tercapainya target persentase nilai dalam (KIKU)
2	Optimalisasi kebijakan tarif dan insentif energi baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> tersusunnya Formulasi Harga, Besaran, serta pelaksanaanya penerapan Subsidi Listrik terlaksananya subsidi listrik yang tepat sasaran tersusunnya Formulasi Harga, Besaran, serta terlaksananya penerapan Subsidi/insentif pengembangan Energi Baru Terbarukan

Gambar 3.68
Peta Sebaran
Pembangunan
Energi PLT EBT



Sumber: KESDM, diolah

3.2.4 PEMBANGUNAN PARIWISATA

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama Nasional Pembangunan Pariwisata

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9,4 juta	9,7 juta	12,0 juta	15,0 juta	20,0 juta
2	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	28,0 juta	28,5 juta	29,0 juta	29,5 juta	27,5 juta
3	Devisa (dalam miliar) kurs Rp/12.000	133,9	150	177,8	187,9	260

Arah Kebijakan:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara.
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri.
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran.
4. Pembangunan Ketenagakerjaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

- Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungannya yang nyaman bagi wisatawan.
- Pelayanan yang ramah dan menyenangkan.
- Penegakan hukum dan disiplin.

Program Prioritas

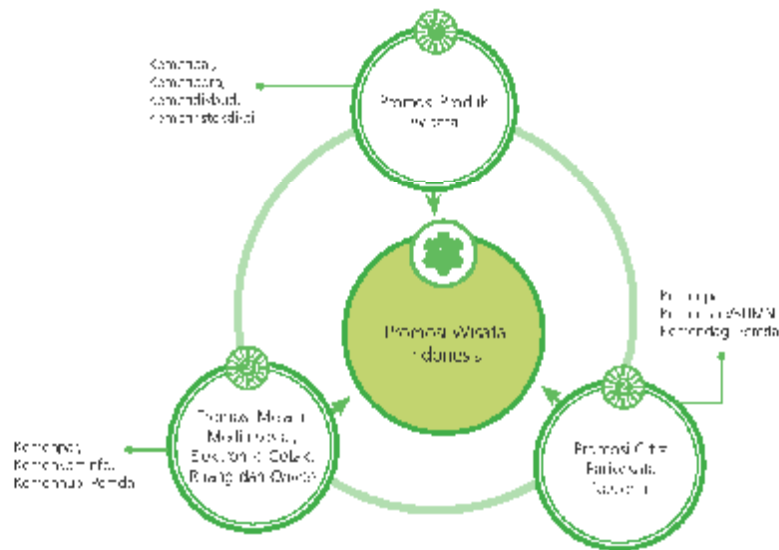
Program pembangunan pariwisata nasional adalah sebagai berikut:

Paragraf 3.7 Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia

- Pemasaran Lokal
- Pemasaran Negeri
- Kegiatan Transnasional



Kegiatan Prioritas

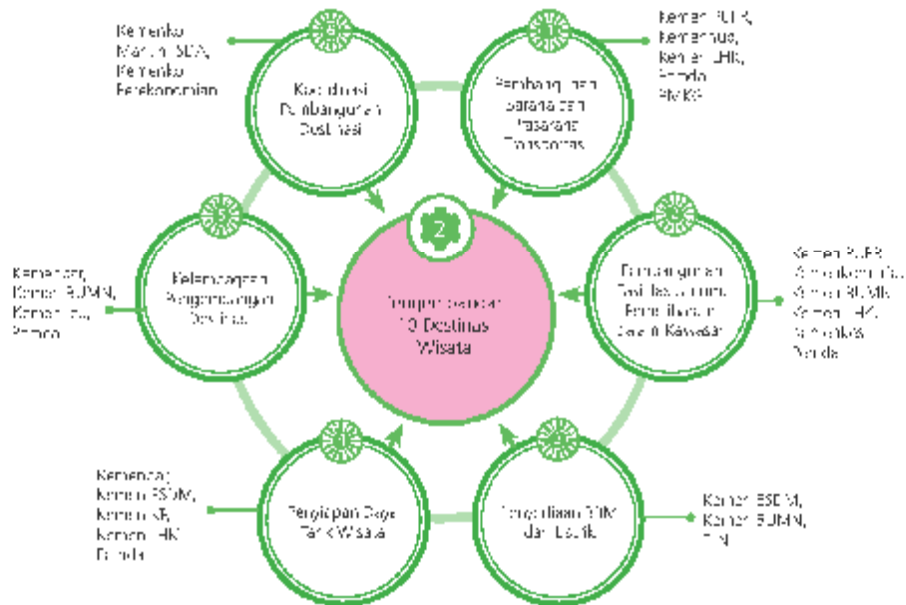


Sumber: SKP
Sugilar,
Tjandjaja,
Promosi
Wisata
Indonesia

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Promosi Wisata Indonesia	
	1. Promosi Daerah Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) Terlaksananya business dan studi tour kerjasama pemasaran pariwisata nusantara Meningkatnya kajian strategi dan analisis data pasar pariwisata nusantara Meningkatnya pengembangan pariwisata dengan pasar nasional Terlaksananya koordinasi dan koordinasi wisatawan dengan instansi dan pemerintah Meningkatnya citra pariwisata destinasi wisata prioritas Danau, oba dan sekitarnya
	2. Promosi Citra Pariwisata Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) Meningkatnya Citra pariwisata Nusantara
	3. Promosi Melalui Media Massa, Elektronik, Cetak, Ruang dan Online	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) Meningkatnya Citra Pariwisata Nusantara

Tabel 4-28
Sugilar,
Tjandjaja,
Promosi
Wisata
Indonesia

Tabel D.7a
Rencana Kerja
Kementerian
Perencanaan
Strategis
Nasional
Tercakup
10 Destinasi
Wisata



Tabel D.7b
Rencana Kerja
Kementerian
Perencanaan
Strategis
Nasional
Tercakup
10 Destinasi
Wisata

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Pengembangan 10 Destinasi wisata	
A. Danau Toba dan sekitarnya		
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun fasilitas sarana dan prasarana pariwisata • Peningkatan jalur wisata Api Medan Kuala Namu - Pematang Siantar • Pengembangan Bandara Uluwatu Silangit • Peningkatan Jalan Panji - Baras Kab. Samudra - Pangasinan - K • Peningkatan dan Peningkatan Jalan Pangasinan - Amasats - Lombok - Lombok - Danau Ronggo - Ter - Pangasinan - Mandailing - Danau Ronggo - dan Jalan Tobing Tinggi - Pematang Siantar - Pangasinan • Peningkatan Jalan Tol Batu Mejan - Kusur - Namu
2	Pembangunan Fasilitas Umum Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya masterplan pengembangan destinasi Danau Toba • Sarana prasarana umum yang aman dan nyaman yang layak yang dioptimalkan dan ditingkatkan fungsional kondisinya • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata • Peningkatan SPAN - KEMENKUMPERINDUSTRI 25/10/2016 • Peningkatan sarana wisata alam yang layak dan memadai di RW • Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata alam di hutan lindung pada OPD • Terbangunnya 12 poskestas yang melayani destinasi wisata
3	Kenyamanan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Danau Toba dan sekitarnya • Peningkatan jumlah samudra pada sumbernya di lokasi destinasi wisata nasional melalui busa daur ulang (recycle) sebanyak 10 ton/hari • Penyusunan desain tata kota dan peningkatan lingkungan wisata dengan WA (wisata) - Loka (loka)

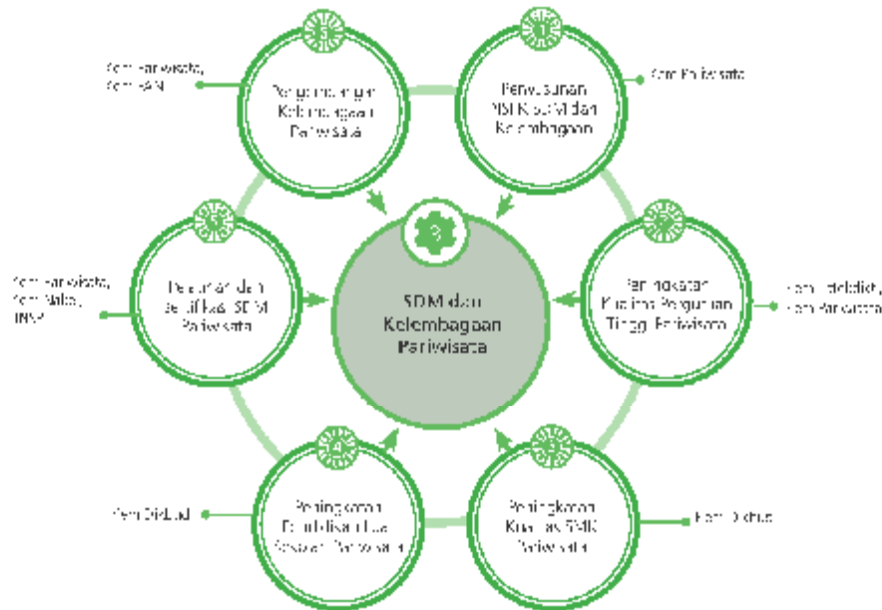
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan BTS yang beroperasi dan Desa <i>broadband</i> ▪ Peningkatan informasi lokasi keragaman warisan dan perlindungan geologi ▪ Peningkatan pariwisata melalui <i>Google Maps</i> ▪ Digitalisasi Dana Desa untuk air ▪ Terjenganya fungsi kawasan sumber air sebagai bagian destinasi pariwisata ▪ Menjaga kawasan destinasi pariwisata dari banjir
4.	Kolektibilitas (Pengembangan Destinasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pengembangan destinasi wisata Danau Toba ▪ Meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi kawasan sekitarnya
5.	Koordinasi Pengembangan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan destinasi pariwisata dengan menggunakan dana DSA ▪ Terwujudnya <i>revenue</i> dan <i>kebijakan</i> terpadu dan terkoordinasi di destinasi wisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya
B. Kawasan Borobudur dan Sekitarnya		
1.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transoortas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo ▪ Perluasan Bandara Juanda-Surabaya Sole ▪ Peningkatan kapasitas Bandara Ahmad Yani Semarang ▪ Pembangunan dan Penguasaan Prasarana dan Fasilitas pendukung Kota Baru di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai kawasan masuk menuju Bandara ▪ Pembangunan Jalan Mutiara - Surab/Bb, Prok D, Yogyakarta ▪ Peningkatan Jalan Lintas Yogyakarta - Pambanem (Bts, Prok, Jateng) ▪ Pembangunan Jalan Loggia Durenung ke arah Uluwatu Klungkung melalui desa-desa di kawasan Pambanem - Jembrana
2.	Pengembangan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemasaran pengembangan destinasi borobudur dan sekitarnya ▪ Peningkatan sarana wisata alam yang layak dan nyaman di kawasan ▪ Terwujudnya <i>Business</i> yang melayani destinasi wisata
3.	Peningkatan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Borobudur dan sekitarnya ▪ Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata nasional melalui pusat data yang <i>dynamic</i> ▪ Penyediaan BTS yang beroperasi dan Desa <i>Broadband</i>
4.	Kolektibilitas (Pengembangan Destinasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pengembangan destinasi wisata borobudur ▪ Meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi kawasan sekitarnya
5.	Koordinasi Pengembangan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan destinasi pariwisata dengan menggunakan dana DSA ▪ Terwujudnya <i>revenue</i> dan <i>kebijakan</i> terpadu dan terkoordinasi di destinasi wisata prioritas kawasan Borobudur dan sekitarnya
C. Kawasan Labuan Baji		
1.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transoortas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kapasitas Bandara Komodo, Bandara Frans Seda Mauriere, Bandara H. Aroeboesman, dan Bandara Frans Sales Lega ▪ Pembangunan Jalan Labuan Baji - Melawati ▪ Pembangunan Jalan Rumbung - Kota Komodo ▪ Pembangunan Jalan Melawati - Bts Kota Rumbung ▪ Pembangunan Jalan poros tengah NTT

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya masterplan pengembangan destinasi Labuan Bajo Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata alam di hutan lindung pada 12 KPH Terbangunnya 4 puskesmas yang melayani destinasi wisata
3	Penyediaan Day Trip Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Gunung Bujur Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan Taman Nasional Komodo Perencanaan toilet dan sewage facility Pantai Pink, Labuan Bajo Terbangunnya destinasi wisata budaya (sanctuary) konsep klan-klan rumah adat sebagai daya tarik wisata di LX Penyediaan BTS yang beroperasi di Desa Gredobond Tersebutnya informasi akses keragaman warisan dan perlindungan geologi Penyediaan akses broadband internet
4	Koordinasi Pembangunan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor di Tersusunnya rekomendasi kebijakan percepatan penyelesaian masalah destinasi wisata prioritas Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur
D. Tanjung Kelayang - Belitung		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan terminal, pemenuhan standar runway strip dan perbaikan kawasan pemukiman di Bandara Lingsihjendro Pembangunan Jalan Akses Bandara - Kawasan Pariwisata (Sp. K.11a - Tj. Fundan) sepanjang 40 Km
2	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya masterplan pengembangan destinasi dan trip Kelayang Terbangunnya 3 puskesmas yang melayani destinasi wisata
3	Penyediaan BBM dan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Revisi perencanaan pembangkit PLN di Belitung tahun 2016-2017: <ol style="list-style-type: none"> PLTU Belitung Unit 2 kapasitas 16,5 MW MTH Belitung kapasitas 25 MW DITO DDO kapasitas 10 MW Revisi Proyeck pembangkit 35.000 MW (2018): <ol style="list-style-type: none"> PLTMG Belitung Pesek 20 MW/IPP
4	Penyediaan Day Trip Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas destinasi wisata Tanjung Kelayang Penyediaan BTS yang beroperasi di desa Gredobond Tersebutnya informasi akses keragaman warisan dan perlindungan geologi
5	Koordinasi Pembangunan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rekomendasi sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang - Belitung dan kebijakan percepatan penyelesaian masalah destinasi wisata prioritas Tanjung Kelayang - Belitung Melakukan studi kelayakan kawasan K. K. Nasional di Kerinci Perkebunan
E. Kawasan Wakatobi		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan Bandara Matahara, Bandara Laludu, dan Bandara Heli Amboi Rekonstruksi Jalan Lelimum - Kemaru (Domaga Ferry) Pembangunan Jalan Akses Bandara - Telabuhan (Wandi - Telabuhan - Bandara)
2	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya masterplan pengembangan destinasi Wakatobi Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata alam di hutan lindung pada 1 KPH Terbangunnya 2 puskesmas yang melayani destinasi wisata

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Penyediaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas destinasi Wisata Wakatobi Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan taman nasional Wakatobi Terwujudnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke lokasi wisata nasional melalui pusat outbound yang terpadu Penyediaan BTS yang beroperasi dari Desa Broadband
4.	Koordinasi Pemoanganan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi kebijakan dan kebijakan pengendalian jumlah kunjungan wisatawan prioritas Wakatobi
F. Kawasan Bromo, Tengger, dan Semeru (BTS)		
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas bandara Abdulrahman Saleh Mangrove Bandara Juanda Perbaikan Jalan Talok - Gunung - Jenggling dari sepanjang 5 Km Terwujudnya jumlah jalan akses wisata di dalam kawasan TN BTS sebesar 24,3 km* Perbaikan jalan kelayakan - tesa
2.	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan mesra dalam negeri dan pariwisata di kawasan Bromo - Tengger - Semeru Meningkatnya sarana dan prasarana wisata alam yang layak dan memadai di TN prioritas Nasional destinasi wisata Terwujudnya buskemas yang melayani destinasi wisata
3.	Penyediaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Bromo - Tengger - Semeru Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan taman nasional Penyediaan BTS yang beroperasi dari Desa Broadband Terwujudnya informasi lokasi keberagaman warisan dan perlindungan geologi Penyusunan desain tata ruang peningkatan kunjungan wisatawan ke WA Gunung, Gunung, TWA Jeng, dan WTA tesa
4.	Koordinasi Pemoanganan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan destinasi wisata prioritas di kawasan Bromo - Tengger - Semeru Koordinasi dengan Kementerian LHK
G. Kawasan Kepulauan Seribu		
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Bandara Husein Sastranegara - tita
2.	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan pengembangan destinasi Kepulauan Seribu Terwujudnya buskemas yang melayani destinasi wisata
3.	Pengembangan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Kepulauan Seribu Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan taman nasional Kepulauan Seribu Pengembangan dan operasinya Suaka satwa Garudawati spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di TN kepulauan Terwujudnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke lokasi wisata nasional Kepulauan Seribu Penyediaan BTS yang beroperasi dari Desa Broadband Terwujudnya informasi lokasi keberagaman warisan dan perlindungan geologi Penyusunan desain tata ruang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke WA Angke Kapuk
4.	Koordinasi Pemoanganan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi kebijakan dan kebijakan pengendalian jumlah kunjungan wisatawan prioritas Kepulauan Seribu

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
H. Kawasan Tanjung Lesung dan Pengembangan KKK		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pembangunan jalan telekomunikasi Kuas Maja-tangkal Biting-Merak, Jamban KA Kuas Maja-kangkas Liting-Wiro sebanyak 4 jembatan, dan 1 jembatan KA Barakas Biting - Sewan - Mliris • Rehabilitasi jalur KA Rangas-tung Labuan (KMB) • Pelebaran jalan Lebak Selatan (M. Era Birangeun - Simoang - Sp. Bayan - Cloaretok) • Pemodernan jalan Serang - Bojonegara - Mada-sluas - S. S. L. • Pelebaran Citerus - Tanjung Lesung dan Bayah - C. Saronek - Bts. Prov. Jabar
2	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya masterplan pengembangan destinasi Tanjung Lesung • Terbangunnya 10 puskesmas yang melayani destinasi wisata • Terbangunnya 1 RS terutama di Cioenglang
3	Penyediaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Tanjung Lesung • Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada musimnya di lokasi destinasi wisata nasional model unggulan dan unggulan (priority center) • Penyediaan BTS yang beroperasi dan Desa Broadband • Tersedianya informasi lokasi keragaman warisan dan perlindungan geologi • Penyusunan desain tata kota dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Komunitas
4	Koordinasi Pembangunan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Dewan KKK Nasional di Kementerian Koordinator Perekonomian
I. Kawasan Mandalika dan Pengembangan KKK		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemadangan Hsipel Laut Lember • Pengembangan kapasitas bandara V. Kaharudin dan Bandara Udaya Lombok Baru • Revitalisasi Jalan Gili - S. - Tanjung • Perencanaan Jalan Koroang - Mastegik • Pelebaran Jalan W. J. Praya - Kuta • Penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan (leas landas dan penerbangan) secara online dan real time, dengan akurasi 100%
2	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya masterplan pengembangan destinasi Mandalika • Terbangunnya 9 puskesmas yang melayani destinasi wisata
3	Penyediaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Mandalika • Penyediaan BTS yang beroperasi dan Desa Broadband • Tersedianya informasi lokasi keragaman warisan dan perlindungan geologi
4	Koordinasi Pembangunan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Dewan KKK Nasional di Kementerian Koordinator Perekonomian
J. Kawasan Pulau Morotai dan Pengembangan KKK		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemadangan Bandara Kuanang Kso • Pelebaran Jalan EREBERE - SDFI sepanjang 10 Km • Penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan (leas landas dan penerbangan) secara online dan real time, dengan akurasi 100%
2	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya masterplan pengembangan destinasi Morotai
3	Penyediaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Pulau Morotai • Penyediaan BTS yang beroperasi dan Desa Broadband

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Koordinasi Pemangunan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Dewan KHE, Nasional, dan Kementerian Koordinator Perekonomian
K. Kawasan Pesisir Selatan - Mandeh		
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan ring road akses pariwisata Manado-Sungai Pinang
2.	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyoang...lanjutan pembangunan fasilitas hotel di kawasan Mandeh dan sekitarnya
3.	Penyediaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan bangunan di kawasan pariwisata • Pemeliharaan daerah resapan air



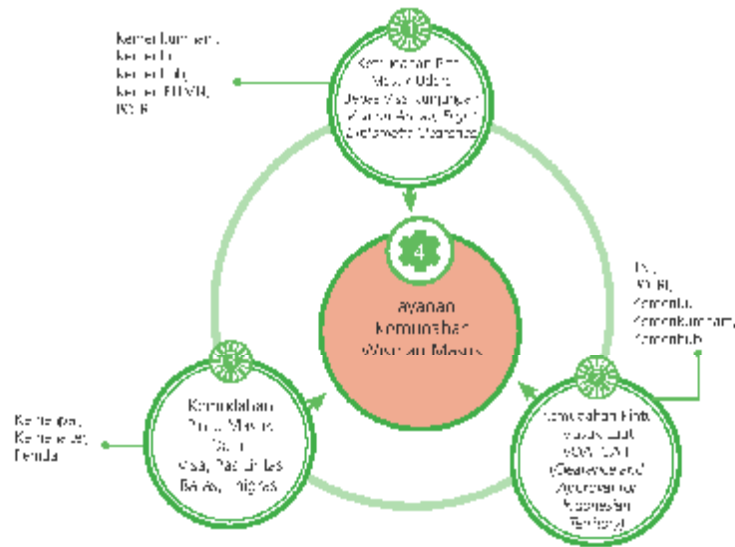
Gambar 2.7
Pegawai
Pusat
SDM dan
Kelembagaan
Pariwisata

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3. SDM dan Kelembagaan Pariwisata		
1.	Penyusunan NSRK SDM dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah jenis pekerjaan pariwisata yang disusun NEK hanya sebanyak 15
2.	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata di Medan, Bandung, Bali, dan Makassar • Mempercepat pemantauan pendidikan tinggi pariwisata di Kabupaten Sumedang dan Lombok, NTB
3.	Peningkatan Kualitas SMK Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan SDM lulusan SMK bidang pariwisata
4.	Peningkatan Pendidikan dan Sekolah Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah yang mencapai Program Peningkatan Mutu (Peningkatan ISO dan SMF)
5.	Latihan dan sertifikasi SDM Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi • 100.000 tenaga kerja pariwisata, 1.000 peserta pelatihan EOP

Tabel 2.8
Pegawai
Pusat
SDM dan
Kelembagaan
Pariwisata

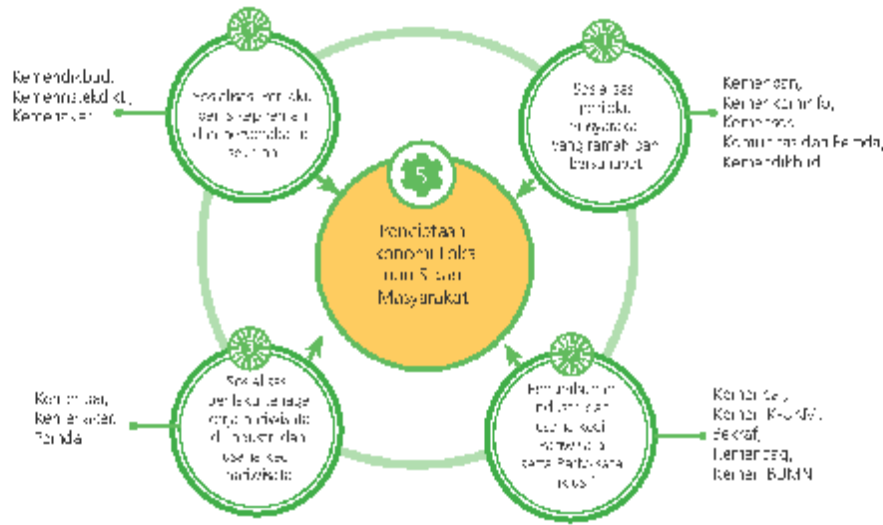
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah SDTA pariwisata yang tersertifikasi di 10 destinasi wisata (terdapat dalam Prioritas Nasional Pelayanan Pendidikan) Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga sertifikasi usaha pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan industri pariwisata
6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi (DMO) Pengembangan kelembagaan pembangunan destinasi wisata prioritas non-GRK - badan otorita yang beroperasi

Gambar 4.71
Segitiga Prioritas
by BAK
Gubernur
Wahidin Lailan.



Tabel 4.7
Segitiga
Prioritas
Layanan
wisatawan
Masuk

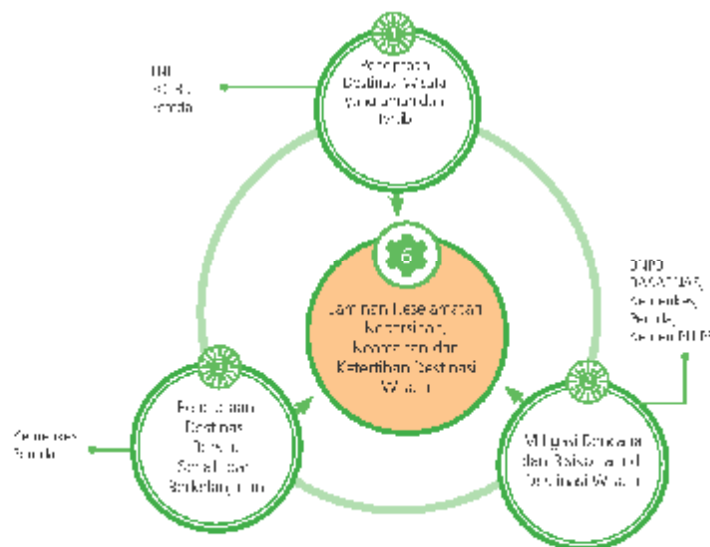
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4	Layanan Kemudahan Wisatawan Masuk	
1.	Kemudahan Pintu Masuk Negara Bebas Visa Kunjungan (Visa on Arrival, Right of Landing Clearance)	<ul style="list-style-type: none"> Terberikannya fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 75 negara berdasarkan Perpres Nomor 104 tahun 2015
2.	Kemudahan Pintu Masuk Laut (VOA, CAI (Clearance and Approval for Indonesian Territory))	<ul style="list-style-type: none"> Terberikannya fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 75 negara berdasarkan Perpres Nomor 104 tahun 2015
3.	Kemudahan Pintu Masuk Darat Visa, Fasilitas Darat, Imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Terberikannya fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 75 negara berdasarkan Perpres Nomor 104 tahun 2015



Cambar 5.26 Kegiatan Prioritas Penciptaan ekonomi lokal dan sikap Masyarakat

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat	
1.	Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya sadar wisata di masyarakat 10 destinasi wisata Meningkatnya sadar wisata oleh siswa-siswa sekolah
2.	Pertumbuhan industri dan usaha kecil Pariwisata serta Pariwisata Industri	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas hotel di kawasan Danau Toba dan sekitarnya tersedianya taxi dan travel wisata beraturan
3.	Sosialisasi perilaku tenaga kerja pariwisata di industri dan usaha kecil pariwisata	Jumlah destinasi yang menjadi sasaran sosialisasi industri dan usaha kecil pariwisata di 10 destinasi prioritas
4.	Sosialisasi Perilaku dan sikap ramah dan bersahabat di sekolah	Jumlah destinasi yang menjadi sasaran sosialisasi perilaku dan sikap ramah dan bersahabat di sekolah di 10 destinasi prioritas

Tabel 5.27 Kegiatan Prioritas Penciptaan Ekonomi lokal dan sikap Masyarakat



Cambar 5.27 Kegiatan Prioritas Penguatan Ketahanan Komunitas, Kebersihan dan Keterampilan Wisatawan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
R	Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Kecerdikan Destinasi Wisata	
1.	Peningkatan Destinasi Wisata yang Aman dan Terlib	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keamanan objek wisata khusus di 10 destinasi wisata prioritas nasional Desa destinasi aman dan nyaman di 10 destinasi wisata prioritas nasional
2.	Mitigasi Bencana dan Risiko Lain di Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya jumlah badan papun bencana sebanyak 10 destinasi wisata prioritas nasional
3.	Pencapaian Destinasi Bersih, Sehat, dan Berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan sampah lingkungan di berbagai lokasi destinasi prioritas nasional

Persebaran Wilayah

Gambar 3.78
Peta Persebaran Wilayah



3.2.5 PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI (KEK)

Dukungan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa terwujud dalam kebijakan pembentukan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pembentukan KI dan KEK ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berlandaskan kepada penciptaan nilai tambah pada produk industri berbasis hasil bumi (hilirisasi).

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Sasaran yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dijabarkan kedalam rencana tahun 2017 dengan memperhatikan realisasi capaian tahun 2015 dan perkembangan capaian tahun 2016

NO.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1. Sasaran Percepatan Pertumbuhan Industri						
1.	Pertumbuhan Industri (%) - Realisasi - Proyeksi	4,70 (4,83)	6,10 (4,73)	6,90 (5,40)	7,40 (6,7 - 8,5)	8,00 (8,00)
2.	Kontribusi dalam PDB (%) - Realisasi - Proyeksi	20,40 (21,1)	20,80 (20,04)	21,00 (20,9)	21,10 (21,7)	21,60 (21,7)
2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK						
1.	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa	/	/	11 tahun = 3 zona	10 tahun = 1 zona	12 tahun = 2 zona
2.	Kawasan Industri di Luar Jawa	n.a	n.a	n.a	/	/

Tabel 2.17
Sasaran
Industri
Membina
Kawasan
Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi dan
Kawasan
Industri
2017

ARAH KEBIJAKAN:

Arah Kebijakan Pertumbuhan Industri:

1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa
2. Fomento per populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha usaha besar dan sedang dan 20 ribu usaha kecil
3. Peningkatan daya saing dan produk bisnis industri nasional (peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per tonase kerja)

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi berbasis pengolahan SDA
2. Percepatan pembangunan koridor infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kelembagaan
5. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan terpadu Satu Pintu (SP1P) dan pemeneran model Fiskal dan non Fiskal

**Kebijakan terkait
Revolusi Mental:**

1. Promosi mentoring dan pembinaan asalkan didukung dalam regulasi
2. Peningkatan ketertarikan dan percepatan realisasi perantara bisnis
3. Peningkatan hukum dan disiplin

Strategi Industrialisasi

Strategi industrialisasi dirancang memanfaatkan sumber-sumber keunggulan Indonesia sebagai berikut:

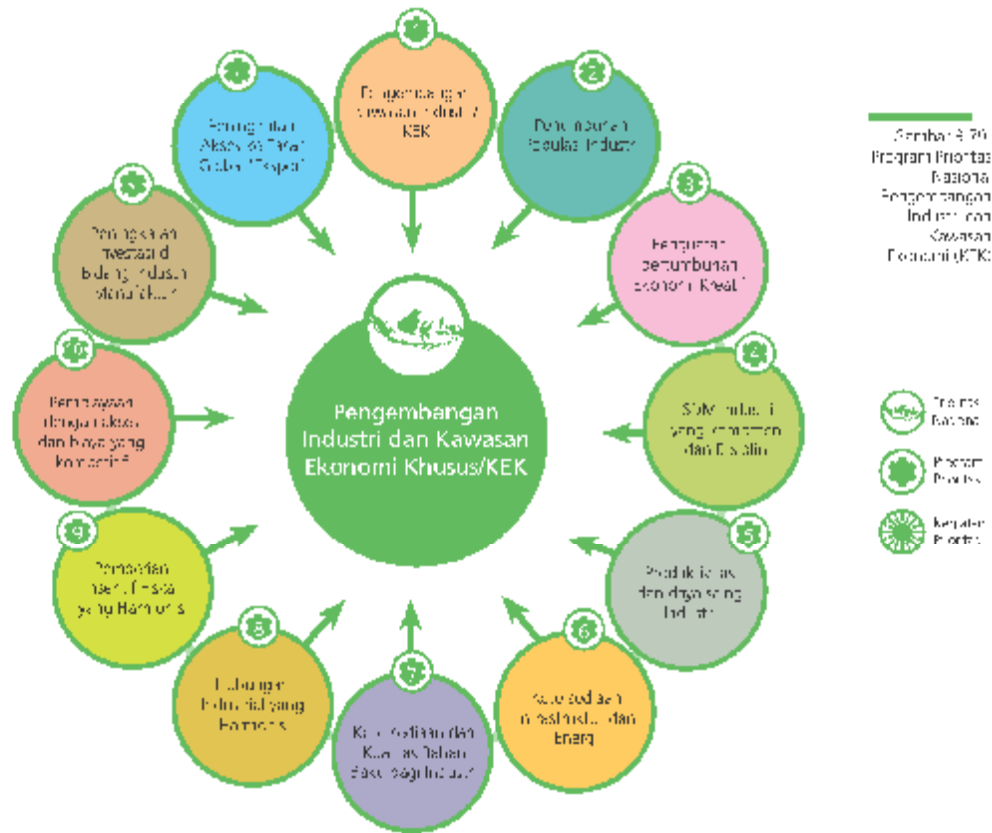
1. Potensi sumber keunggulan biaya (*cost advantage*) adalah: (1) sumber daya alam yang meliputi hasil-hasil pertanian, perkebunan, kelautan, kehutanan, dan mineral tambang; serta (2) jumlah penduduk yang besar sebagai
2. Potensi sumber keunggulan produk (*differentiate advantage*), yang masih perlu dibangun: (1) keanekaragaman hayati sebagai basis pengembangan ekonomi hijau/biru; (2) keanekaragaman budaya yang sebagai sumber inspirasi pengembangan ekonomi kreatif; (3) masyarakat yang sudah berpendidikan sebagai basis pengembangan ekonomi berbasis inovasi
3. Untuk memanfaatkan keunggulan tersebut, maka pilihan industrialisasi di Indonesia adalah: (1) industri yang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam; (2) industri untuk pemenuhan kebutuhan domestik; (3) industri yang memanfaatkan keunggulan biaya untuk ikut dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*); (4) membangun kemampuan mewujudkan industri yang memanfaatkan keunggulan produk
4. Aglomerasi industri ditumbuhkan dengan membangun kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu:
 - Pulau Jawa difokuskan pada industri barang-barang konsumsi yang padat karya dan padat teknologi, termasuk industri kreatif;
 - Di Luar Pulau Jawa utamanya untuk industri pengolah sumber daya alam;
 - Batam dan sekitarnya sebagai pusat industri yang masuk dalam Jaringan Produksi Global karena berlokasi dekat dengan simpul logistik dunia (Singapura).

Industrialisasi adalah proses yang lama dan berkelanjutan, untuk itu dibutuhkan kebijakan makro untuk mendukungnya yaitu upaya untuk:

1. Menjaga daya beli masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan secara berkeadilan agar pasar domestik tumbuh.
2. Mendorong terjadinya akumulasi dan peningkatan faktor-faktor produksi yaitu:
 - Peningkatan dan akumulasi modal fisik melalui investasi. Untuk kemandirian ekonomi, perlu digalakkan tabungan masyarakat.
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar menjadi sumber kompetensi inti usaha usaha produksi. Sebagai penggerak industrialisasi, lulusan pendidikan teknik baik tingkat menengah, vokasi, maupun pendidikan tinggi perlu terus ditingkatkan
3. Meningkatkan akses ke sumber teknologi baru, baik melalui pengembangan di dalam negeri ataupun melalui adopsi teknologi dari luar.
4. Meningkatkan partisipasi dalam perdagangan global.

Program Prioritas

Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus mencakup dua belas Program Prioritas, yang disajikan pada Gambar 3.79. Dari setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas dalam Gambar 3.80 sampai dengan Gambar 3.89.

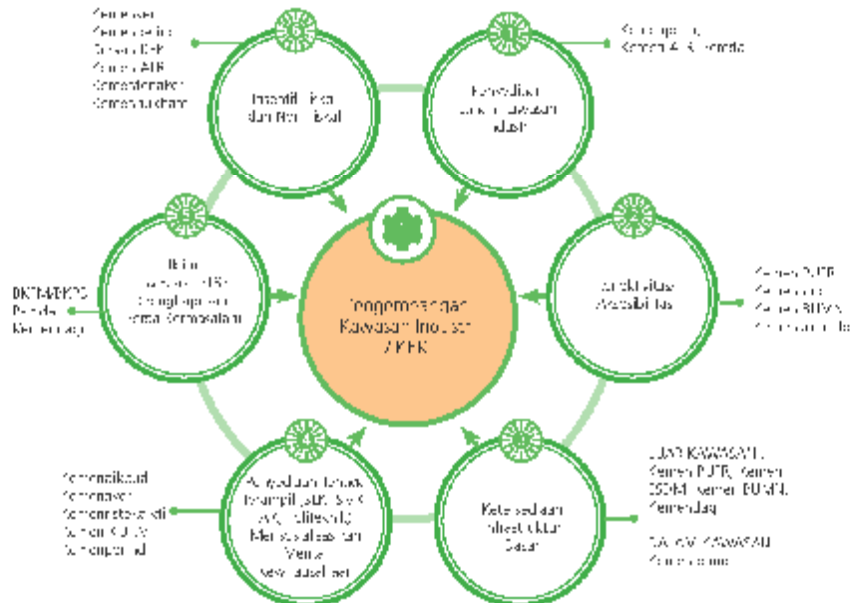


* Untuk informasi selengkapnya, lihat lampiran pada lampiran I.

Untuk mendukung Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri, program prioritas diprioritaskan untuk: (1) memusuhkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa melalui pembangunan 14 kawasan industri dan 8 Kawasan Ekonomi Khusus, (2) pertumbuhan jumlah industri sekitar 9.000 berskala besar dan sedang, (3) peningkatan produktivitas dan daya saing industri, (4) SDMI industri yang kompeten dan disiplin, (5) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif, (6) ketersediaan infrastruktur dan energi, (7) jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri, (8) hubungan industrial yang harmonis, (9) pemberian insentif, (10) akses pembiayaan dan biaya yang kompetitif. Sedangkan program prioritas lain akan dibahas lebih lanjut dalam prioritas nasional lainnya.

Kegiatan Prioritas

Carita 3.82
Figam
Warta
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK



Carita 3.83
Segitiga
Warta
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1. Pengembangan Kawasan Industri/KEK		
A. KI dan KEK Bitung		
1.	Penyediaan Lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Perataan dan Pematangan Lahan seluas 92,92 ha Penyediaan Lahan Dasar Skala 1:1.000 untuk Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Lahan Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya Pembebasan Lahan untuk Pembangunan jaringan KANAL Manado Bitung sepanjang 10 km terselenggaranya layanan informasi secara publik skala pelayanan dengan tingkat akurasi 80 - 95%
3.	Ketersediaan infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan akses ke dalam kawasan sepanjang 6 km Terselenggaranya rumah susun untuk MBR sebesar 550.000 unit yang dilengkapi dengan PSJ berstandar
B. KI dan KEK Palu		
1.	Penyediaan Lahan Kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Lahan Dasar Skala 1:1.000 untuk Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Terselenggaranya informasi perencanaan sumber daya lahan Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Lahan Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Lahan Ruang (RDTR) di sekitar KI

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Penerapan sistem transportasi Bandara Mutiara Palembang • Tersedianya layanan informasi cuaca publik skala kecamatan dengan tingkat akurasi 85 - 95% • Pembangunan flyover Kano dan sepanjang 77,5 m • Penggantian jembatan awal Linao sepanjang 51,4 m • Pembangunan Jalan tol Kar Kuala Palembang dan 21 Km • DED Pembangunan Jalur KA lintas Pekanbaru - Pekanbaru - Medan
A.	Ketersediaan Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses sepanjang 2,2 km dan jalan lingkungan sepanjang 4 km • Pembangunan Akses (Access) Main Drilling sekitar 1.000 liter/sek • Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTPE) sebesar 3.000 liter/sek
C. KI Bantaeng		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI • Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI • Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan informasi cuaca dan satelit dan akses lahan
A.	Ketersediaan Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses dalam kawasan industri sepanjang 500 m
4.	Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, AK, Politeknik) Mensosialisasikan Mental Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan akumulator komunitas • Pemertahanan ruang kelas, ruang serbaguna, laboratorium dasar dengan rumah dinas
KI Teluk Bintuni		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Daerah yang Diprioritaskan • Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI • Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
A.	Ketersediaan Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Struktur Jalan Mareh - Bantun 1.55014-MAREH-BANTUN sepanjang 20,13 km • Peningkatan Struktur Jalan Mareh - Winesa sepanjang 10 km
KI Buli		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Daerah yang Diprioritaskan • Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI • Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
KI Morowali		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI • Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI • Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruksi jalan behadopi - Sata Sultra sepanjang 12,8 km • Pengembangan bandara Morowa yakni penambahan runway dari 1.040 m menjadi 1.400 m

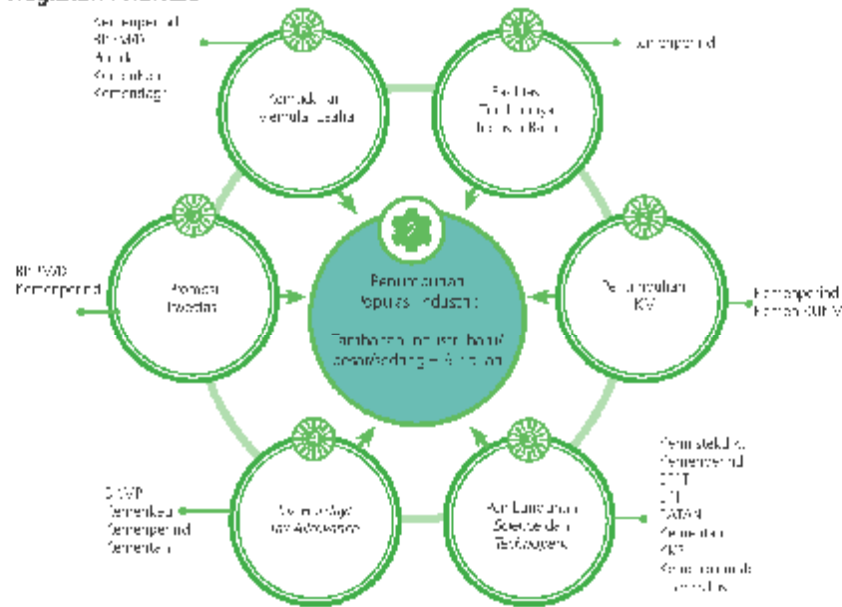
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik) mensosialisasikan mental kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Terbarukan ya bud teknik dan sarannya di dalam kawasan
5.	Inentif Fiskal dan Non-Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> Inentif fiskal bagi industri pendirian yang baru
KI Kohawe		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peta Dasar Skala 1:500 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Daerah yang Dierikanaskan Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Jalan Pahlara Ets Kota Kenduri sepanjang 7 km Penyediaan layanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas
KI Jorong, Tanah Laut		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peta Dasar Skala 1:500 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Daerah yang Dierikanaskan Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Ambungan-Jajau Pecah sepanjang 20 km Pembangunan Jalan Akses Keluar-Masuk dengan lebar 5,11m Pelaksanaan Jalan KE Asam-Asam – Kinua sepanjang 4,08 km Pelaksanaan Jalan Budi Fat – Ets Kota Pahlara sepanjang 3 km Pelaksanaan Jalan BLS Kota Pahlara - KE Asam-Asam sepanjang 3,08 km
KI dan KTK Sei Mengke		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peta Dasar Skala 1:500 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan lebar 10 km Penyediaan layanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas
4.	Penyediaan tenaga terampil dan ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik) mensosialisasikan mental kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan tenaga terampil dan ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik) mensosialisasikan mental kewirausahaan
5.	Inentif Investasi/pendaftaran usaha baru	<ul style="list-style-type: none"> Reseprehabilitasi dan bersiap-siap untuk memulai usaha
6.	Inentif Fiskal dan Non-fiskal	<ul style="list-style-type: none"> Inentif fiskal bagi 2 industri pendirian yang baru
KI Kuala Tanjung		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peta Dasar Skala 1:500 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Estasiun KA Tanjung Gudang, Kuala Tinggi dan Peleabuhan Kuala Tanjung antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Penyediaan layanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas
KI Kepulauan		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kapasitas bandara Karaci Osman Rekonstruksi kuas Siduk - Keraoang sepanjang 2 km Pengembangan layanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas
KI Batulicin		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Behasilisasi Bandara Candi Ngambir Alam
KI Landa, Mendor		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan boro dalam kawasan sepanjang 1,9 km
3.	Integrasi Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana air baku
Kawasan Industri Tanggamus		
4.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KI Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
KEK MBTK		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KEK Evaluasi Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KEK Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Teraksananya Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Malay (Umur & CPO) Rekonstruksi akses pelabuhan Malay sepanjang 3 km Peningkatan kapasitas penerbangan internasional sebanyak 4.5 juta

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
KEK Tanjung Aji-api		
1.	Penyediaan lahan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KIK • Evaluasi Rencana Rencana Detail tata Ruang (RDTR) di sekitar KIK • Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2.	Konektivitas/Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya layanan informasi ruang publik skala kecamatan dengan tingkat akurasi 60 - 75%
3.	Ketersediaan infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Fasilitas Listrik • Pembangunan Jaringan Transmisi

Gambar 3.81 Kegiatan Prioritas Pembangunan Kawasan Industri

Kegiatan Prioritas

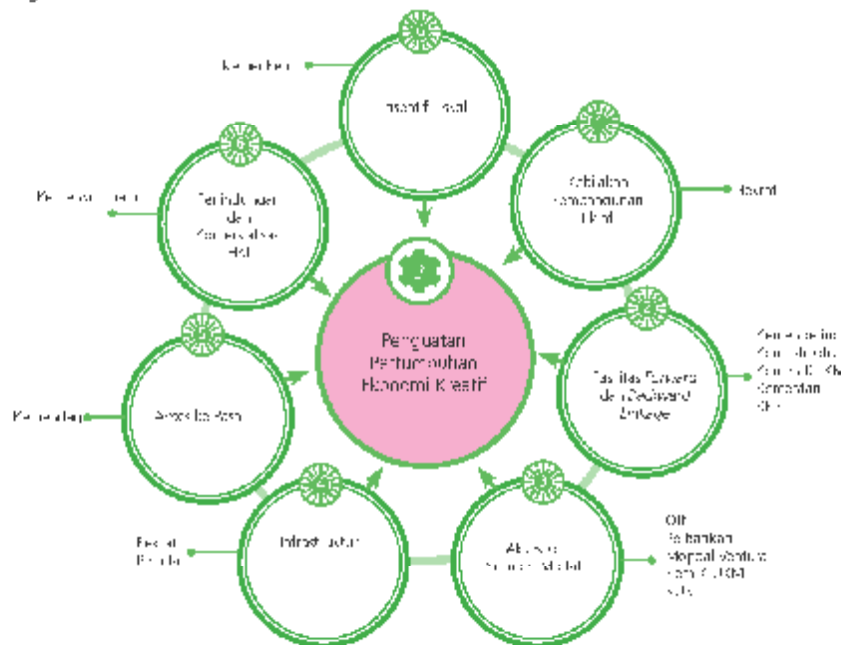


Tabel 3.56 Kegiatan Prioritas Peningkatan Populasi Industri

No.	Program / Kegiatan Prioritas	Sasaran dan Indikator
2. Peningkatan Populasi Industri		
1.	Fasilitas Tambahnya Industri Baru	Tersedianya pilot project pabrik pengolahan karet dan tepung non-gandum
2.	Peningkatan IKM	Penjualan 28 ton/tahun
3.	Peningkatan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana kawasan industri • Lanjutan pembangunan kawasan industri dan kawasan industri eksisting yang memenuhi kriteria
4.	Tax holiday / tax allowance	Penyediaan rekomendasi kepastian insentif fiskal di subsektor Agribisnis tanaman karet
5.	Promosi Investasi	Terdapatnya promosi investasi produk industri di luar negeri
6.	Kemudahan Memulai Usaha	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akses KUR kepada pelaku industri agro

Kebijakan Sektor Pilihan Tahun 2017	
<p>Industri Tekstil dan Produk Tekstil (IPT)</p> <p>Fokus kerja akan untuk mengembangkan sektor IPT sebagai menyerap 1,3 juta tenaga kerja dilakukan melalui peningkatan ekspor, investasi, peningkatan kualitas SDM pekerja industri TPT. Pada tahun 2017, Kementerian Perindustrian akan mengoperasikan <i>buffer stock</i> kapas di Cikarang Jawa Barat dan <i>cluster</i> <i>Cluster</i> bahan baku di Gresik dan Surabaya. Insentif pendanaan pelatihan (Pudik 5.0) Kementerian Perindustrian akan mengadakan <i>Diklat Pelatihan Sertifikasi Perencanaan (Diklat 3-in-1)</i> terhadap 12.500 tenaga kerja sektor IPT di Surabaya dan Jakarta.</p> <p>Dukungan pengembangan industri IPT dari Kementerian Embargo akan dilaksanakannya proses penitipkan akses produk TPT ke pasar global (Kementerian Perdagangan), pengamalan pasar bebas negara tetangga produk IPT ilegal (Ditjen Bea Cukai Kementerian Perdagangan) dan layanan insentif fiskal (Kementerian Keuangan).</p>	<p>Industri Petrokimia</p> <p>Sektor hulu industri petrokimia menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga pertumbuhan ketahanan bahan baku energi yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Hasil kajian menunjukkan, penurunan harga gas sebesar 10 persen menjadi USD 9,5/mmbtu akan meningkatkan PDB sebesar Rp. 46 triliun dan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk 69 ribu orang.</p> <p>Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN akan berkoordinasi untuk meningkatkan akses gas alam untuk pasar domestik, menstabilkan harga jual gas kepada industri domestik dan memajukan <i>flexible</i> dan <i>transparansi</i> distribusi gas menuju lokasi industri.</p> <p>Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator bidang perekonomian akan menyiapkan <i>the</i> <i>seamless</i> sebagai kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis Petrokimia.</p>

Kegiatan Prioritas



No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	
1.	Kebijakan Pembangunan Ekstr	<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya 6000 pelaku ekonomi kreatif dalam infrastruktur kreatif Terdapatnya mencapai 16 Sub-sector Kreatif

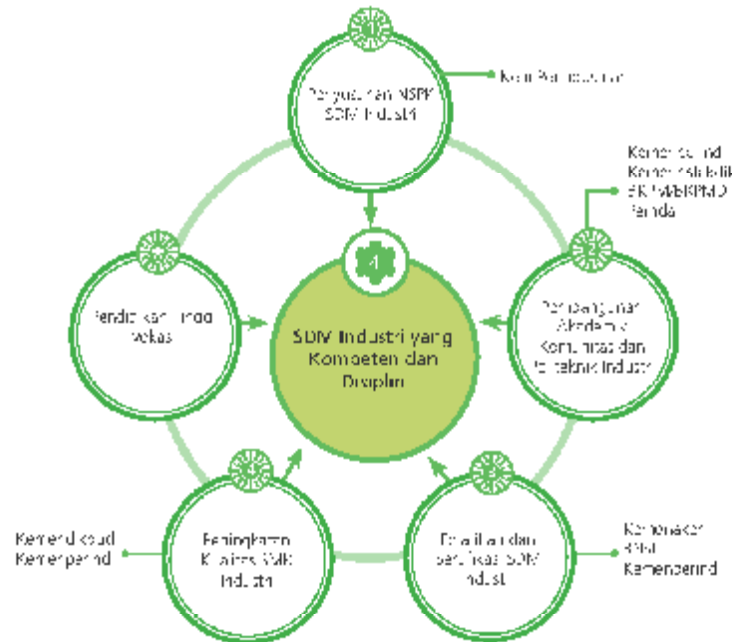
Gambar 3.42
Kegiatan
Prioritas
Penguatan
Pertumbuhan
Ekonomi
Kreatif

Label 3.57
Kegiatan
Prioritas
Penguatan
Pertumbuhan
Ekonomi
Kreatif

2. Fasilitas Riset dan Sirkulasi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatuker dan jasa logistik yang difasilitasi infrastruktur sebanyak 3.000 orang Jumlah pelaku ekspor kreatif yang memanfaatkan infrastruktur IK sebanyak 1.500 orang
3. Akses ke Pasar	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah modal kerja yang dihasilkan 200 Milya ke atas 20 ribu pelaku industri kreatif Pengaliran modal berombak Rp. 600 Milyar kepada 60 ribu pelaku industri kreatif
4. Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> fasilitasi infrastruktur fisik ekonomi kreatif fasilitasi infrastruktur IK ekonomi kreatif
5. Akses ke Pasar	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan 3000 pelaku industri Pelaksanaan dukungan teknis terhadap 1400 pelaku relaksasi kebijakan cukungan pembuka akses pasar
6. Perindungan dan Komersialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Industri yang melindungi ekonomi kreatif 100% terpelaksanaan dan dimonitoring, memonitoring, mempromosikan merk dan inovasi kreatif
7. Inovasi	tersusunnya anggaran kebijakan insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif

Kegiatan Prioritas

Salah satu kegiatan prioritas SDM Industri yang terdapat di Display



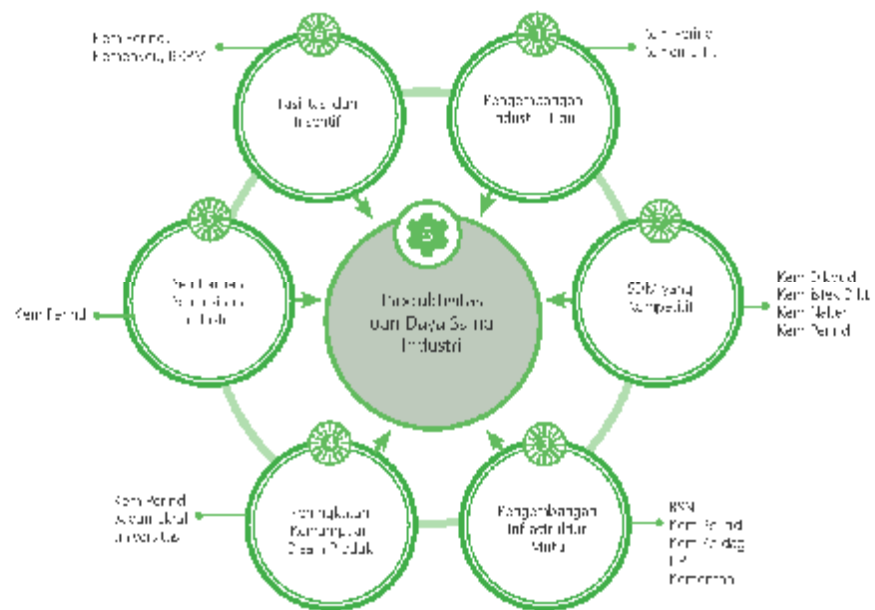
* Kegiatan Prioritas Teknik dan Pendidikan Profesi dan Akademik dilaksanakan oleh Pendidikan

Salah satu kegiatan prioritas SDM Industri yang terdapat di Display

No.	Program / Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin	
1.	Pengaliran NSPK SDM Industri	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya standar kompetensi kerja tenaga kerja industri dalam rangka pemangangan infrastruktur kompetensi – 20 SPKRI

No.	Program / Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Peningkatan Akademi Kemitrasn dan Politeknik industri	• Tersedianya peralatan <i>Atankhops</i> , Laboratorium dan TUK untuk Akademi Komunitas Industri berbasis kompetensi di Kawasan Industri di berbagai dan Banten
3.	Pelatihan dan Sertifikasi SMK rendah	• Meningkatnya kompetensi Pelaku Usaha Industri Kreatif bagi 40.000 orang, 300 orang asosiasi dan 30 SMP dan ITI
4.	Peningkatan Kualitas SMK industri	• Tersedianya Gedung dan Lahan Pendidikan berbasis Industri berbasis kompetensi antara lain di 10 lokasi • Tersedianya SMK Industri Terampil yang Komprehensif dan Siap Kerja melalui Pendidikan Kejuruan Industri di 8 SMK Berbasis Sertifikasi dan Komunitas - 4.491 siswa

Kegiatan Prioritas



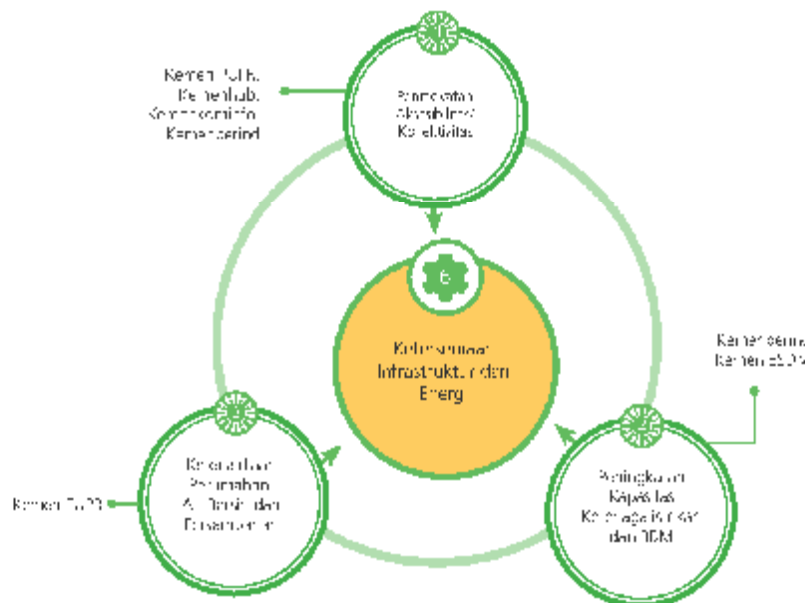
Gambar 2.8 Kegiatan Prioritas Produktivitas dan Daya Saing Industri

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Produktivitas dan Daya Saing Industri	
1.	Pengembangan Industri Baru	• Tersedianya infrastruktur industri hijau - 4 Skala Industri Hilir - 4 SIH, 70 industri, dan 30 usaha • Meningkatnya produksi, umlah industri yang memenuhi baku mutu penanganan air limbah dan emisi hingga mencapai 1500 industri • Meningkatnya produksi umlah industri yang memngkat betasungunya tuk me lakukan rehabilitasi pasokan yang pada 80 industri dan meningkat kinerja tata kelola airnya di ekosistem gambut pada 27 industri

Tabel 2.58 Kegiatan Prioritas Produktivitas dan Daya Saing Industri

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Fasilitasi dan Insentif	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah materi/center Asia Kuku dan Bufferstock sesuai • Kesiapan internasional terkait membuka akses sumber daya industri internasional dan jaringan produksi global – 3 kesnekata • Tersedianya layanan informasi, Pesat, Nomor dan Pamoran B2B KM • Tersedianya pemanfaatan dan penerapan insentif kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri di 72 bidang usaha di 11 daerah dasar industri • Tersedianya layanan sosial ekonomi online untuk mendukung pertumbuhan industri pertanian pertanian • Terwujudnya Kerjasama Lisensi Hasil Paten dengan target 10 lisensi • Tersedianya hasil inovasi teknologi dalam rangka alih teknologi – target 45 inovasi

Kegiatan Prioritas



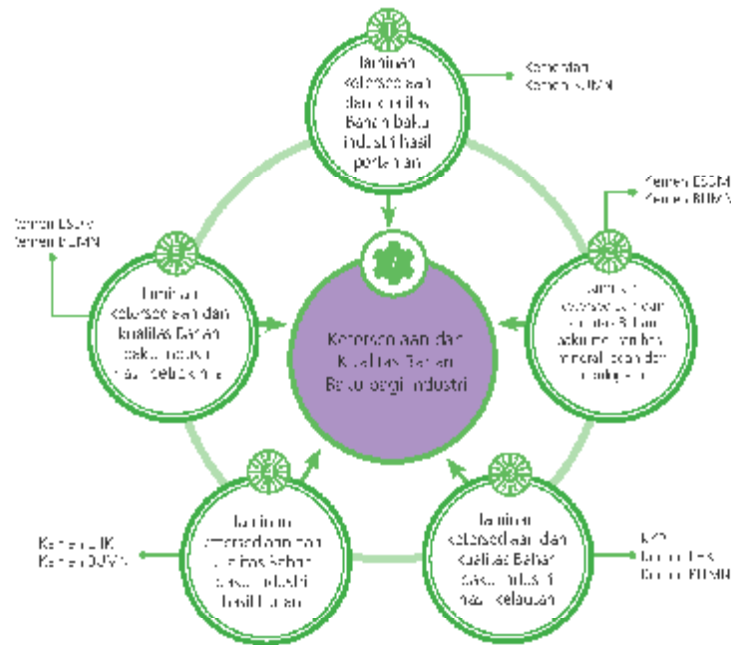
Gambar 3.25
Kegiatan Prioritas Ketersediaan Infrastruktur dan Energi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
6.	Ketersediaan Infrastruktur dan Energi	
1.	Peningkatan Aksesibilitas/ Konnektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitas pelabuhan laut umum dan CPO Marby • Pengembangan lapangan pelabuhan Tg. Api-Api • Pembangunan fasilitas pelabuhan Pelebaran Dangkalan Jorong • Peningkatan dukungan pemerintah Proyek KIPSI Infrastruktur Pesisir
2.	Peningkatan Kapasitas Ketersediaan Listrik dan BBM	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya 10000 bakti, misal kebijakan BUMH
3.	Ketersediaan Perumahan, Air Bersih dan Gas Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi 7.165 tenaga konstruksi

Tabel 3.66
Kegiatan Prioritas Ketersediaan Infrastruktur dan Energi

Kegiatan Prioritas

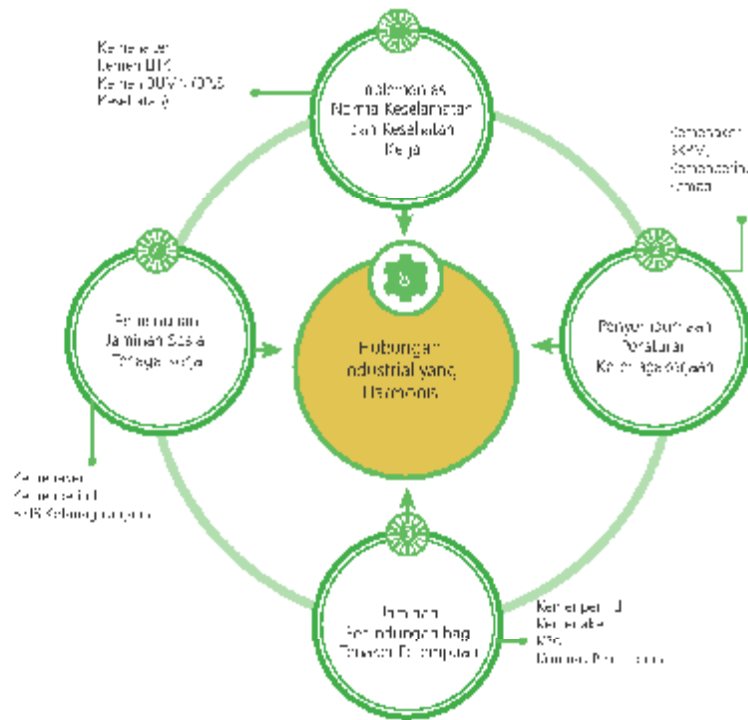
Gambar 3.66 Kegiatan Prioritas Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku bagi Industri



Tabel 3.61 Kegiatan Prioritas Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku bagi Industri

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
7.	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku bagi Industri	
1.	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Tumpukan pangan tanaman pangan dan penggerak dasar seluas 1 juta hektar, kakao, sawit, kopi seluas 32 ribu ha • Pengembangan tanaman semusim dan rempah (jangkrik, pala, lada, nilam, kapas, tembakau) seluas 5,3 ribu ha
2.	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Mineral, Batubara dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan kebijakan BUMN menouduhng ketersediaan bahan baku industri strategis
3.	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan kebijakan BUMN mendukung ketersediaan bahan baku industri hasil kelautan
4.	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi kayu kelas I dan kelas II menjadi sebesar 5,8 juta m³ dan hutan kelas seluas 33 juta m² dari hutan kelas II dan seluas 20 juta m² dan hutan rakyat • Peningkatnya produksi komoditas HHBK menjadi sebesar 2,2 juta m³ • Pembentukan forest-based cluster industry sebanyak 4 unit di lokasi hutan yang produktif dan investasi sebesar 100 miliar untuk industri kehutanan • Peningkatnya produksi kayu olahan menjadi sebesar 20,5 juta m³ dan sebesar 1 miliar legalisasi kayu • Peningkatan bahan baku untuk industri berbasis pertanian dan perikanan (C4) dan hasil perikanan dan perikanan • Peningkatnya produksi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah (100 industri)
5.	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan dan pemenuhan perusahaan 4 kelas HK

Kegiatan Prioritas



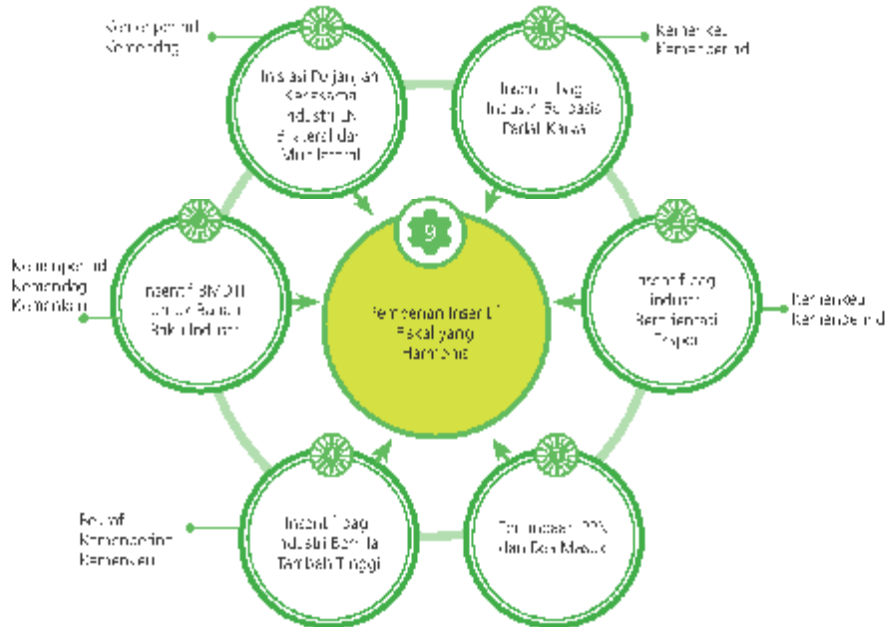
Tabel 3.87
Rencana
Prioritas
Hubungan
Industrial yang
Harmonis

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Hubungan Industrial yang Harmonis	
1.	Implementasi Norma Keselamatan dan Keselamatan Kerja	Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan norma ketenagakerjaan utama sebanyak 2500 perusahaan yang menerbitkan norma ketenagakerjaan
2.	Peningkatan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkatnya cakupan kepesertaan SJS Ketenagakerjaan sektor formal 45 juta orang dan sektor informal 1 juta orang
3.	Peningkatan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan	Talukannya penerapan peraturan revisi peraturan ketenagakerjaan (UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2/2004 tentang Hubungan Industrial)
4.	Perbaikan Peraturan Ketenagakerjaan	

Tabel 3.88
Rencana
Prioritas
Hubungan
Industrial yang
Harmonis

Kegiatan Prioritas

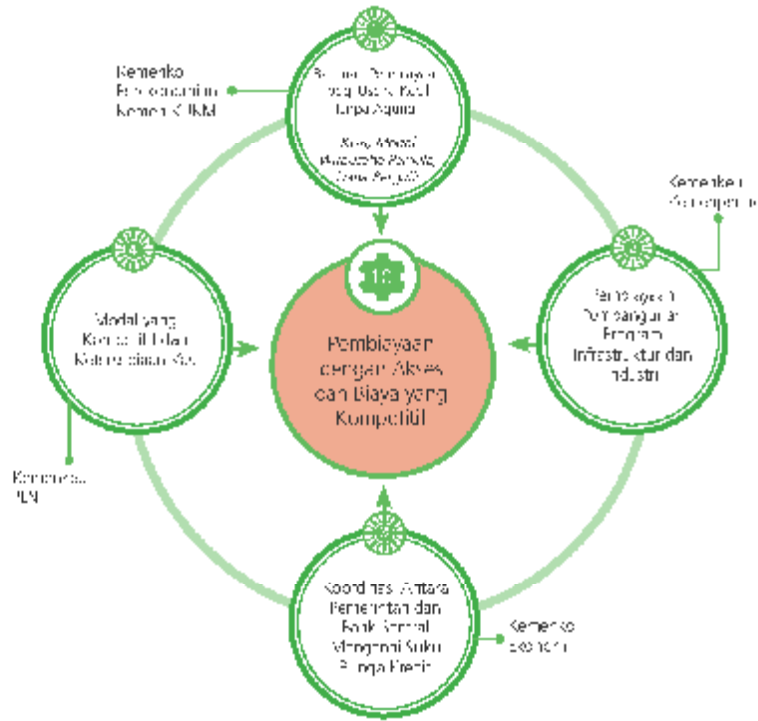
Selama 5,88 triliun anggaran MFR 2016, 1,2 triliun akan dihabiskan untuk kegiatan Harmonis



Tabel 3.68 Kegiatan Prioritas Harmonis

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
9.	Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis	
1.	Insentif bagi Industri Berbasis Paksi Kuasa	• Implementasi PP No. 9 Tahun 2016
2.	Insentif bagi industri berorientasi ekspor	Jumlah bidang industri yang difasilitasi baik fiskal maupun non fiskal sebanyak 22 bidang usaha di 11 daerah
3.	Penundaan PPN dan PPh Masukan	• Perumusan kebijakan terkait PPN (rancangan peraturan mengenai kemampuan dan status pinjaman kepada asosiasi/lembaga terkait)
4.	Insentif bagi Industri bernilai tambah tinggi	• Fasilitas infrastruktur kepada >500 pelaku industri kreatif
5.	Insentif bagi industri untuk bahan baku industri	• Rekomendasi pengamanatan industri dalam negeri
6.	Insentif Perjanjian Kerjasama Industri Lokal dan Multinasional	• Promosi Produk dan Jasa Industri ke Pasar Internasional • Peningkatan akses pasar industri internasional dan tingkat representasi pertumbuhan IDN di perdagangan internasional • Meningkatkan persentase usaha Indonesia yang terapan di dalam perjanjian ekonomi dan keuangan regional dan bilateral

Kegiatan Prioritas



Gambar 3.10
Kejelasan
Prinsip
Pembiayaan
dengan
Akses
dan Biaya
yang
Kompetitif

No.	Program / Kegiatan Prioritas	Sasaran
10. Pembiayaan dengan Akses dan Biaya yang Kompetitif		
1.	Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya volume dan kualitas penyyaluran dana bergulir bagi KUMKM untuk mendukung pengembangan KHK di 5 Provinsi Meningkatnya akses pembiayaan bagi kapasitas dan Jalinan Milik Kecil untuk mendukung dan membantuan KEK bagi 1.360 wirausaha per desa
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kerjasama pembiayaan untuk mendukung pengembangan KHK bagi 1.570 usaha mikro Terwujudnya pembiayaan melalui kebijakan pembiayaan melalui kredit ke KUR
2.	Pembiayaan Pembiayaan Program Infrastruktur dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Rumusan kebijakan perundang-undangan terkait pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPI) yang usulkan
		<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional (2 MSP)

Tabel 3.64
Kejelasan
Prinsip
Pembiayaan
dengan
Akses
dan Biaya
yang
Kompetitif

No.	Program / Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Konektivitas antara Pemerintah dan Bank Sentral mengenai Suku Bunga Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses terhadap kebijakan yang terkait dengan bidang UMKM • Meningkatkan kemampuan kelas menengah kecil dengan bidang UMKM

Persebaran Wilayah

Gambar 3.90
Persebaran
Wilayah



Jumlah Kawasan Industri yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 adalah sejumlah **14 Kawasan Industri** di luar Jawa, yaitu 7 kawasan industri di Bagian Barat Indonesia dan 7 kawasan industri di bagian Timur Indonesia. Dari ke-14 kawasan industri yang direncanakan tersebut, kawasan industri yang masuk ke tahap pembangunan selanjutnya dilaksanakan dengan kriteria :

1. Status hukum lahan sudah *clean and clear*
2. Sudah memiliki perusahaan perintis (*anchor investor*)
3. Adanya komitmen dan dukungan pemerintah daerah

Bila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka pembangunan kawasan industri tersebut dilakukan secara terbatas.

Jumlah KEK yang sudah terbentuk hingga Juni 2016 berjumlah 9 KEK. Lokasi KEK yang berisikan dengan Kawasan Industri berjumlah 3 KEK yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Palu, dan KEK Bitung. Sedangkan Lokasi KEK yang berisikan dengan destinasi pariwisata berjumlah 4 KEK yaitu KEK Tanjung Lesung, KEK Mendelika, KEK Morotai dan KEK Tanjung Kelayam. Dua KEK lainnya adalah KEK Tanjung Api Api dan KEK Macy Baluta Trans Kalimantan (MEK).

3.3 PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

3.3.1 ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian target tingkat kemiskinan 9,5-10,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPU) sebesar 9,1-9,4 persen, sasaran pemerataan antarkelompok pendapatan dijabarkan dalam Tabel 3.85

No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Penciptaan lapangan kerja					
	a. Pencapaian lapangan kerja (orang)	1,75 juta	181,2 ribu	± 2 juta	± 2 juta	± 2 juta
	b. Tenaga kerja formal (%)	40,1	42,1	43,8	46	51
2.	Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja					
	a. Pendidikan kerja (orang)	523.870	815.705	810.000	1.100.000	1.200.000
	b. Sertifikasi (orang)	1.511.950	93.813	125.000	260.000	400.000
3.	Peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan kewirausahaan					
	a. Dukungan pendanaan usaha (orang/ unit usaha)	12.290	31.540/	31.067/	31.280/	43.000/
		657.720	58.785	84.015	73.441	97.000
	b. Kewirausahaan (orang)	31.000	70.400	112.500	103.240	150.000
	c. Peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)					
	• Subsidi KUR (Rp triliun)	3,1	3,0	10,5	10,5	diferensikan kemudian
	• Target Penyaluran (Rp triliun)	17	30	105-110	105-110	diferensikan kemudian
	d. Kontribusi modal anggota koperasi (persen)	32,7	53,0 (target)	53,5	54	55
4.	Akses terhadap pelayanan dasar					
	a. Kepemilikan akta lahir	64,00%	72,50%	74,00%	75,00%	77,10%
5.	Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan					
	a. Bantuan luran jaminan kesehatan/ individu	66,1 juta	66,2 juta	92,1 juta	94,1 juta	104,2 juta
	b. Bantuan tunai bersyarat/ PKH (keluarga)	1,8 juta	1,1 juta	6 juta	6 juta	8 juta
	c. Bantuan pendidikan/ KIP (anak usia sekolah)	11,5 juta	20,3 juta	21,5 juta	21,5 juta	21,6 juta
	d. Transkripsi BPJS-RA MUTU (jasa bantuan kesehatan)					
	• Sasaran (Keable Keluaraga)	15,2 juta	14,2 juta	14,5 juta	15,8 juta	15,8 juta

Tabel 3.85
Sasaran Antar-
kelompok
Pendapatan
Tahun 2017

No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
	• Jumlah daerah yang menerapkan bantuan program melalui swakelola layanan kesehatan di tingkat	-	-	-	41 Kota	300 kab/kota
e	Pekerja informal dan TKI yang memiliki jaminan kesehatan (jawa)	9,1 juta	15,0 juta	19,2 juta	37,8 juta	60,4 juta
f	Pekerja informal dan TKI yang memiliki jaminan ketenagakerjaan	-	1,5 juta	5,2 juta	10 juta	12,4 juta

Ke arah 2019
arah
kebijakan
arah
sempok
pendapatan
tahun 2017

Arah Kebijakan

- Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasikan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas:
 - Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas
 - Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang sadar kaya
 - Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi
 - Hubungan industri yang harmonis
- Pengembangan ekonomi produktif
 - Meningkatkan akses modal dan layanan kredit mikro
 - Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha
 - Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha
- Perluasan pelayanan dasar melalui:
 - Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana
 - Pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar
- Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif:
 - Efektivitas program Bidik Miskin
 - Penataan asistensi sosial: KIS, KIE, dan KKS
 - Perluasan cakupan keasertaan jaminan sosial
 - Integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial

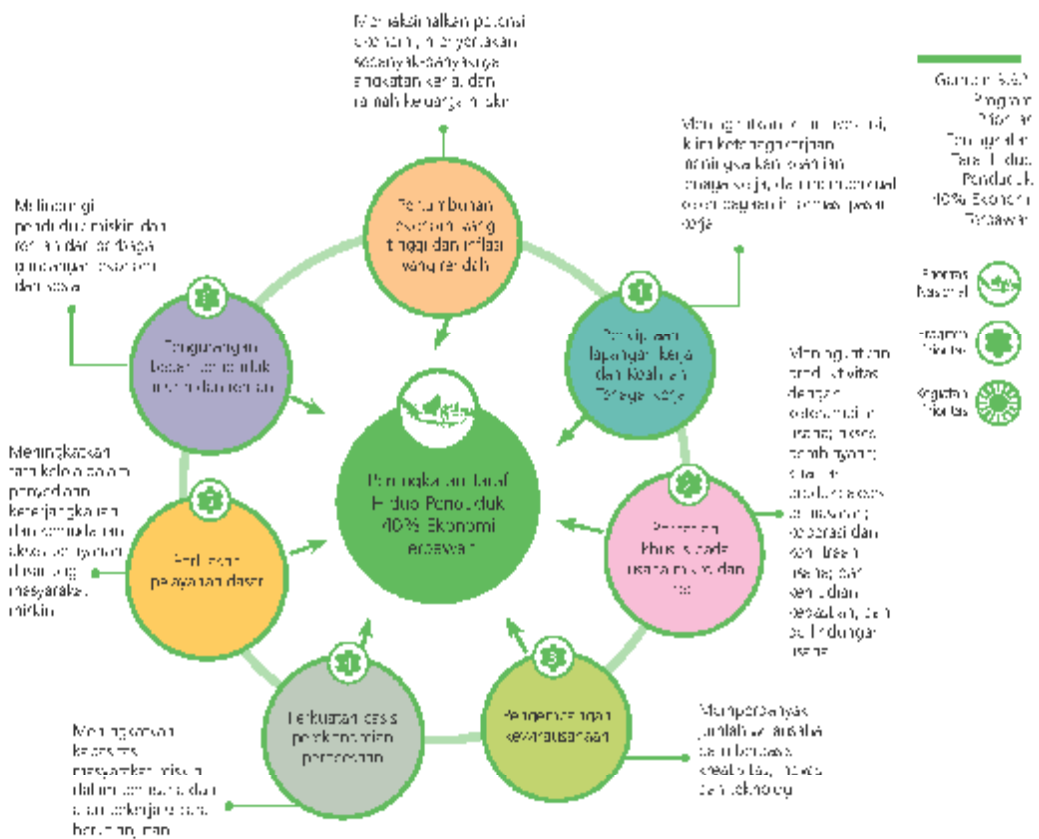
Kebijakan terasah: Revolusi Mental

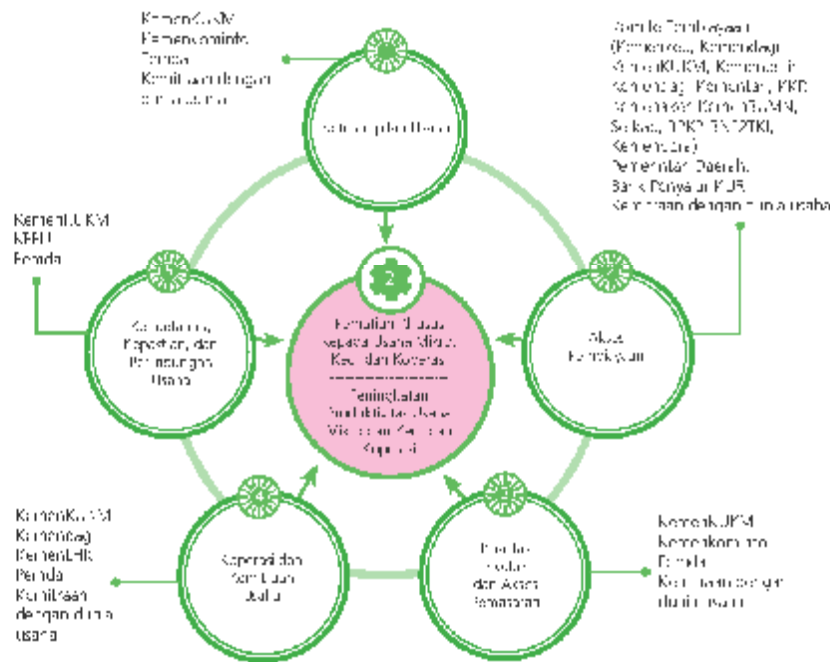
- Redesain program yang memungkinkan perubahan *mindset* masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri dan bermartabat
- Mengadakan program sosial yang mempromosikan masyarakat miskin ke lapangan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana
- Mempromosikan seliaoritas sosial di masyarakat
- Peningkatan standar dan disiplin

Program Prioritas

Peningkatan pendapatan kelompok penduduk 40 persen terbawah menggunakan pendekatan holistik dan tematik yaitu dengan meningkatkan koordinasi multi kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Upaya koordinasi ini dilakukan secara terintegrasi dengan cara memutus siklus ketimpangan antargenerasi melalui : (i) penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja, (ii) memperbaiki akses pelayanan dasar, dan (iii) memastikan perlindungan bila terjadi goncangan. Strategi ini dilaksanakan melalui 6 program prioritas.

Program Prioritas

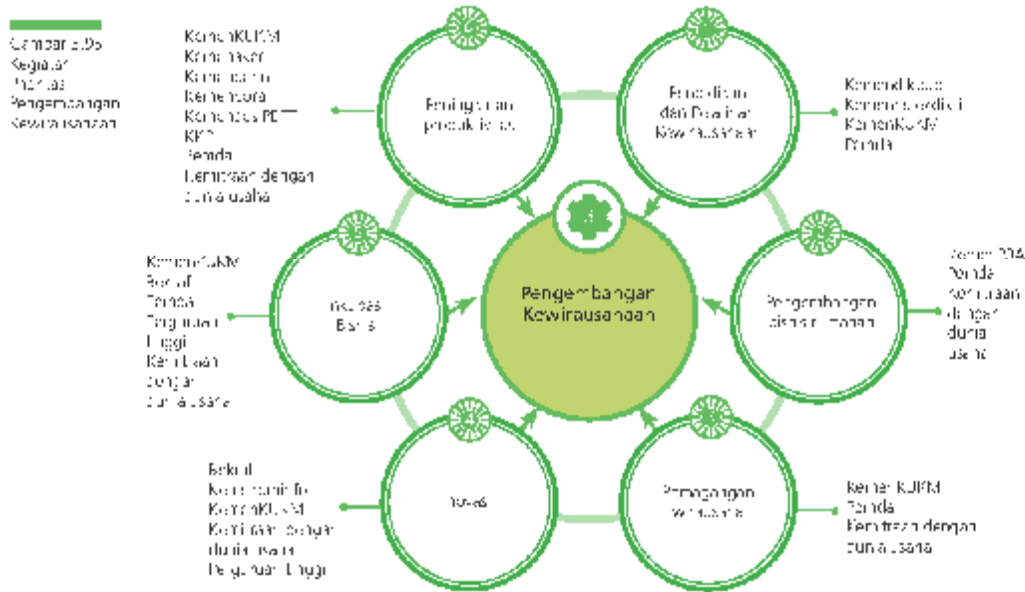




Gambar 5.94
Struktur
prioritas
terhadap
kegiatan
usaha mikro,
kecil dan
koperasi

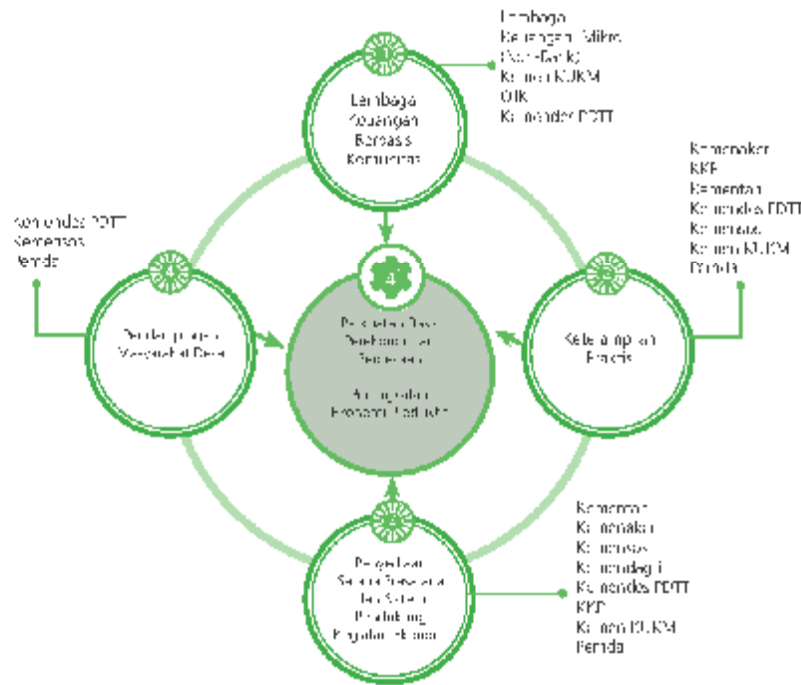
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Perbaikan Kualitas kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi	
1.	Peningkatan Usahawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan keterampilan manajemen, teknis/lokasi dan perkeoperasian bagi 21.280 orang SDM usaha mikro, kecil dan koperasi • Dengan anggaran 1.100 miliar (100% dari APBD) untuk pelatihan dan dukungan operasional bagi 49.710 UKM/KM • Pendampingan usaha bagi 20.000 UKM/KM melalui PLUT
2.	Akses Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 100-120 triliun • Penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 1 triliun • Peningkatan kapasitas pembiayaan (KAPM) KUR/PLUT/layah, dan UKM melalui Bank dan lembaga keuangan pembiayaan • 1.054 pendampingan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan koperasi
3.	Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan produktivitas bagi 152 KUMKM • Penerapan standarisasi mutu sertifikasi produk, merek dan kemasan oleh 1.050 KUMKM • Revitalisasi 30 pasar tradisional yang dikelola koperasi • Penataan 300 peoegang kaki lima
4.	Inovasi dan Komirasi Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan perkeoperasian bagi 700 koperasi dan 350 kelompok ors-koperasi • Fasilitas kredit baru, termasuk sertifikasi aset dan modal usaha senilai nilai usdtk. bagi 300 KUMKM • Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pembiayaan masyarakat bagi 1.350 kelompok tani hutan dan 150 unit koperasi kelompok tani hutan yang dikelola
5.	Kemampuan, Kapasitas, dan Peningkatan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan anggaran operasional usaha bagi 36.000 usaha mikro dan kecil • Pendampingan restrukturisasi usaha bagi 300 UKM/KM

Tabel 5.97
Kegiatan
Prioritas
Perbaikan
Kualitas Usaha
Mikro,
Kecil dan
Koperasi



Tabel 3.08
Tipe 3
Pembangunan Kewirausahaan

NO	Kegiatan Prioritas	Sasaran
1. Pengembangan Kewirausahaan		
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Kurikulum kewirausahaan di benclidiken normal dan non normal Pemasyarakatan kewirausahaan bagi 3.000 orang Pelatihan bagi 40.000 tenaga kerja muda non aoi wirausaha
2.	Pendampingan Bisnis Rumahhan	<ul style="list-style-type: none"> Inkubasi, pelatihan dan pendampingan usaha rumahhan bagi 1.000 orang
3.	Pemagangan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> fasilitasi praktik usahamagang di perusahaan bagi 1.000 orang
4.	Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi infrastruktur TIK bagi 7.500 wirausaha Pengembangan 1.200 techpreneur
5.	Inkubasi Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi 20 inkubator bisnis dan teknologi Fasilitasi 3.000 tenant inkubator bisnis dan teknologi
6.	Peningkatan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> fasilitasi dan numuhan wirausaha baru bagi 85.820 orang, termasuk bantuan <i>seed money</i> Penciptaan 1.000 orang wirausaha sosial Peningkatan produktivitas bagi 10.000 wirausaha

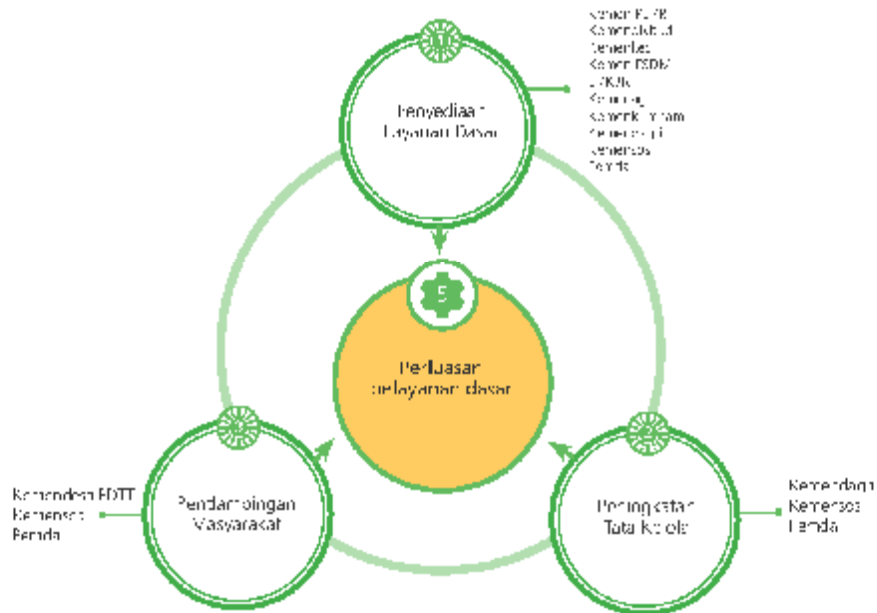


Tabel 3.95
Gugatan
Penguatan
Basis Perekonomian
Perdesaan

No	Keputusan Prioritas	Sasaran
4.	Penguatan Basis Perekonomian Perdesaan	
1.	Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia bentuk modal bagi lembaga keuangan Mikro Agri Bisnis (UKMA) Meningkatnya kualitas keanggotaan koperasi dan tata kelola KUKM untuk mendukung kemitraan rakyat
2.	Keterampilan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pelatihan sertifikasi dan sertifikasi dan sertifikasi bagi rumah tangga miskin sasaran dalam pengembangan ekonomi produktif
3.	Peningkatan Sarana Pesisaranaan Sistem Pendukung Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya alat pemangkas listrik dan alat bantu pemangkas lahan yang terjangkau dan operasionalitas Terbangunnya kawasan permukiman permukiman yang di atas dan terintegrasi
4.	Pendampingan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga dengan bantuan modal perantara Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan di tingkat dan tingkat dan tingkat desa

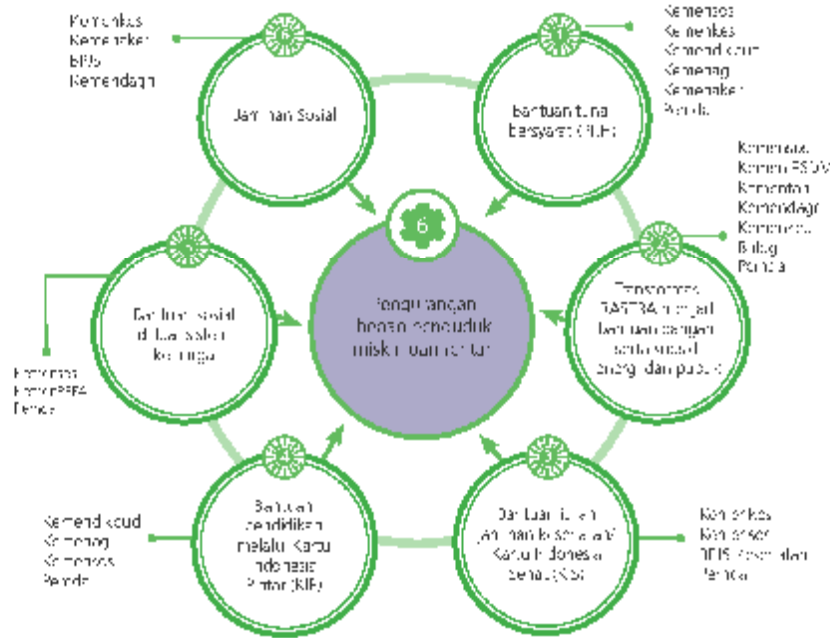
Tabel 3.99
Penguatan
Basis Perekonomian
Perdesaan

Gambar 3.97
Kegiatan
Pilot -
Perluasan
Pelayanan
dasar



Tabel 3.10
Indikator
Prioritas
Perluasan
Pelayanan
dasar

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Perluasan pelayanan dasar	
1.	Penyediaan Layanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Keselengkapan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar (SDU) penduduk (sarung, alat, alat rumah tangga dan perlengkapan rumah) • Besar-kucunya bantuan pemukiman perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah • Pelayanan kesehatan dasar (PKD) di daerah terpencil dan sangat terpencil • Peningkatan akses terhadap pemenuhan hak dasar (kardus, alat bantu, kartu identitas) bagi masyarakat miskin • Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber pembiayaan • Pembangunan dan perbaikan infrastruktur air limbah
2.	Peningkatan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin • Peningkatan akses pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin termasuk di antara kelompok rentan • Pengembangan Sistem Layanan dan Bantuan Terpadu (SLBT)
3.	Pemberdayaan Masyarakat	<p>terfasilitasinya pelayanan pemenuhan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (Generasi Sehat Cerdas), pembangunan pemukiman, dan pelayanan dasar lainnya</p>



Gambar 3.58 Kegiatan Program Pengurangan Beban penduduk miskin dan rentan

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
6.	Perencanaan Beban Penduduk Miskin dan Rentan	
1.	Bantuan tunai bersyarat (PKH)	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan tunai bersyarat bagi 6 juta keluarga miskin Pelatihan Pemenuhan Perinkatan Kemandirian Keluarga (PK2) bagi 2.105 pendamping Penarikan 17.000 pekerja anak dan bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (PTA)
2.	Transformasi BAN-BA menjadi bantuan pangan, serta subsidi energi dan pupuk	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan subsidi energi bagi 15,8 juta keluarga miskin dan rentan Implementasi pendanaan subsidi pangan di 34 provinsi Pelaksanaan bantuan pangan melalui layanan keuangan digital di 41 kota Subsidi listrik rumah daya 450 VA dan 900 VA bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan Subsidi pupuk 5,8 juta ton
3.	Bantuan tunai jaminan kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan tunai bagi 94,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional melalui KIS Verifikasi dan validasi data
4.	Bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pendidikan bagi 21,6 juta anak usia sekolah dan kurang mampu Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan rentan
5.	bantuan sosial di luar sistem subsidi	<ul style="list-style-type: none"> bantuan kebutuhan dasar bagi 150 ribu korban bencana sosial bantuan darurat bagi 100.000 korban bencana alam nasional Rehabilitasi sosial bagi 18.000 Warga Bepas, Indonesia rampung keadilan perdagangan orang Marshall bagi 3.000 penyandang disabilitas bantuan kebutuhan dasar spesifik perempuan bagi 1.000 pemukiman di daerah perbatasan
6.	Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan kesempatan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan terutama pekerja informal dan TKI Integrasi data kependudukan dan ketenagakerjaan Monitoring dan evaluasi terpadu

Tabel 4.71 Kegiatan Prioritas Pengurangan Beban penduduk miskin dan rentan

Persebaran Wilayah

Gambar 3.99 Pengembangan BLK dan Standardisasi Kompetensi Kerja 2017



Gambar 3.100 Pengembangan PLUT KUMKM dan Dukungan Operasional Inkubator



Gambar 3.101 Sebaran Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)



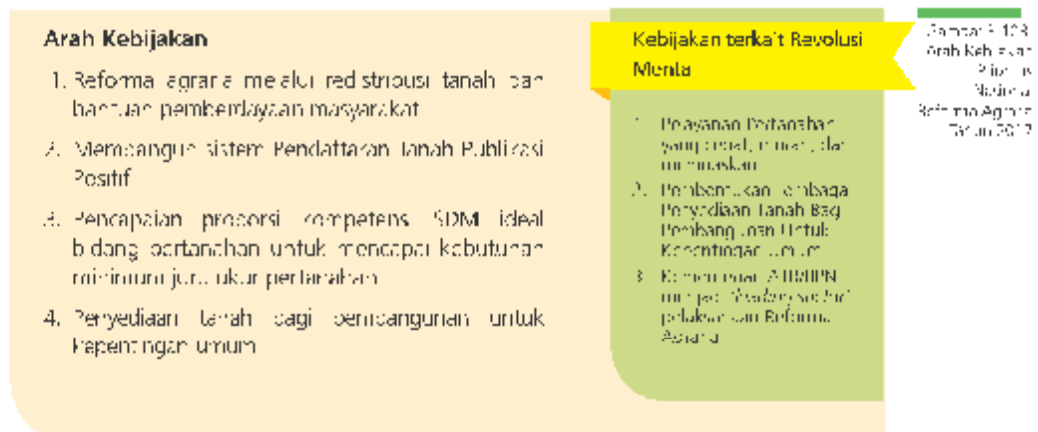
3.3.2 REFORMA AGRARIA

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Tabel 3.72
Sasaran Umum
Policies
Nasional
Reforma
Agraria Tahun
2017

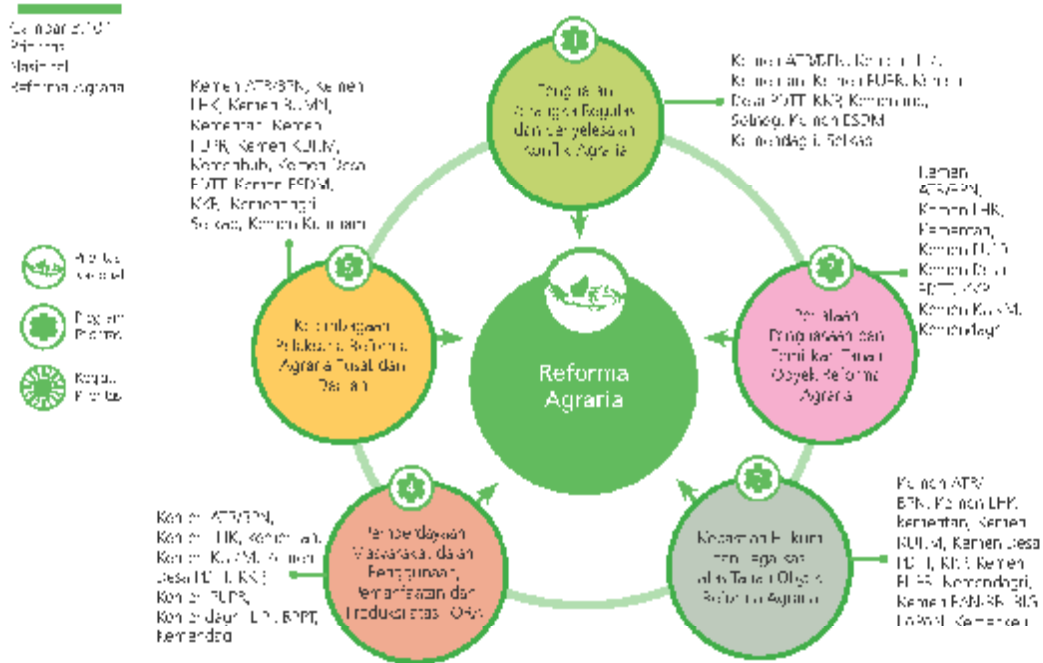
No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran AKPI- RP, MPR 2019
A. Tersedianya sumber tanah obyek Reforma Agraria (ORA)						
1.	Bidang dan Kawasan yang di inventarisasi	151.270 ha	147.400 ha	2.464.400 ha	2.464.400 ha	10 juta ha
2.	Luas izin tilasi kawasan hutan yang akan dilepaskan	-	-	-	-	4 juta ha
3.	Data penerbitan dan pendayagunaan tanah terantar	231.400 ha	253.465 ha	253.465 ha	253.465 ha	1 juta ha
4.	Sertifikat HAT (hak Atas Tanah Bidang)	888.130 Bidang	0 ha	973.000 ha	973.000 ha	3,9 juta ha
B. Pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset (reforma aset)						
1.	Bidang tanah yang didistribusikan	158.029 Bidang	107.100 Bidang	1.098.211 Bidang	1.098.211 Bidang	4,5 juta ha
2.	Sertifikat HAT (hak Atas Tanah Bidang)	888.130 Bidang	0 ha	1.125.000 ha	1.125.000 ha	4,5 juta ha
C. Meningkatnya Keadilan Hukum Hak Atas Tanah						
1.	Tertakutnya octa permana mencakupnya beta dasar/ mencakupnya perantara/ mencakupnya perantara tanah/ KDKM, dll	-	2.800.000 ha	2.050.000 ha	2.050.000 ha	13,4 juta ha
2.	Sertifikat HAT (hak Atas Tanah Bidang)	888.130 Bidang	1.550.800 ha	1.550.800 ha	1.550.800 ha	7 juta ha
3.	Tertakutnya beta dasar teknik	-	37.811,32 km	37.811,32 km	37.811,32 km	180.055,5 km
4.	Jumlah sistem informasi hukum di bidang agraria dan tata ruang	-	17 provinsi	17 provinsi	17 provinsi	34 Provinsi
D. Meningkatnya Pelayanan Pertanahan						
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan/ program/ anggaran/ nalar/ informasi/ kebijakan/ undang tata kelola/ kepegawaian/ Kementerian/ AN/BBN	-	Penyusunan analisis abstrak	Penyusunan 2.717 juta ulur	Penyusunan ulur	30% dari total anggaran Kementerian/ AN/BBN
2.	Sistem teknologi operasional pelayanan tata ruang dan lahan pertanian dengan berkeanjutan	430 kantor pertanian	539 kantor pertanian	539 kantor pertanian	539 kantor pertanian	539 Kantor Pertanian
E. Meningkatnya Keastian Ketersediaan Lahan Bagi Pemanggunan Untuk Kepentingan Umum						
1.	Jumlah lahan di bidang agraria dan tata ruang	-	1 provinsi	1 provinsi	1 Provinsi, terbentuknya lembaga penyediaan tanah	Tersusunnya anggaran pembentukan lembaga penyediaan tanah

No	Indikator	2014 <i>Baseline</i>	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
2.	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program reforma tanah	-	-	-	0,25	Menjalankan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh Lembaga Penyelenggaraan tanah di lokasi Proritas



Program Prioritas Nasional

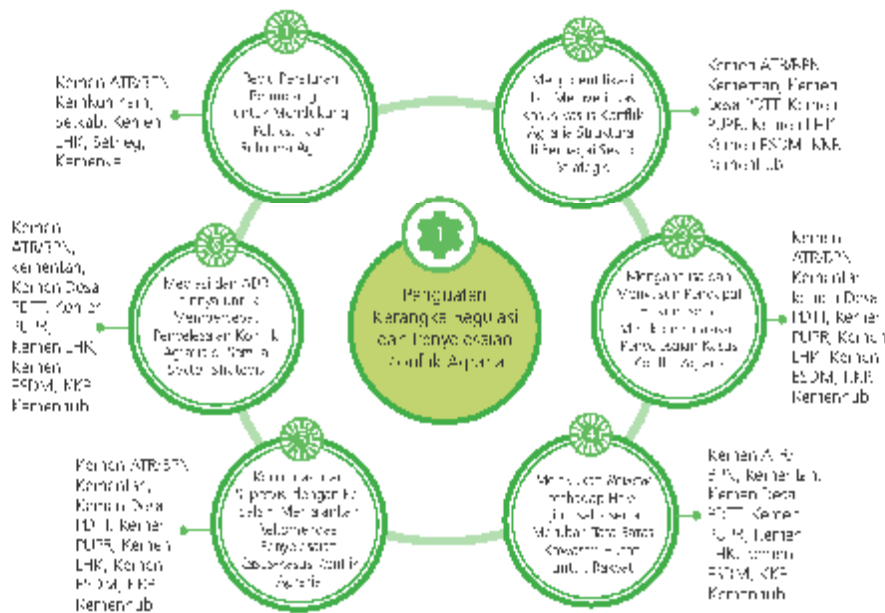
Prioritas Nasional Reforma Agraria mencakup lima Program Prioritas, yang disajikan pada Gambar 3.104. Dari setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas seperti dalam Gambar 3.105 sampai 3.109.



11.3.1. Program Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

Program prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, diluncurkan untuk mendukung pelayanan pertanahan dan upaya penyelesaian konflik tanah yang bersifat struktural untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) Revisi Peraturan Perundangan untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria; (ii) Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis; (iii) Menganalisa dan Menyusun Pendapat Hukum serta Merekomendasikan Penyelesaian Kasus Konflik Agraria; (iv) Penyusunan *Review* terhadap Taktik/Inisiatif Usaha serta Merubah Tata Kelola Kawasan Hilir untuk Rakyat; (v) Koordinasi dan Supervisi dengan KL dalam Merjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria; dan (vi) Mediasi dan ADR lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis.

Kegiatan Prioritas



Gambar 11.5
Kegiatan Prioritas Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	
1.	Revisi peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria	1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Peraturan Menteri (PM)
2.	Memperhatikan kasus-kasus permasalahan kasus-kasus konflik agraria struktural di berbagai sektor strategis	300 kasus
3.	Menganalisa dan menyusun pendapat hukum serta merekomendasikan penyelesaian kasus konflik agraris	40 kasus
4.	Melakukan pemowahan hak/judicial sertifikasi untuk lahan-lahan kawasan hutan untuk rakyat	1.5K
5.	Koordinasi dan sinergi dengan FAJ dalam menjalankan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik agraris	1.216 kasus
6.	Meningkatkan ADR lainnya untuk memperoleh penyelesaian konflik agraria di semua sektor strategis	344 kasus

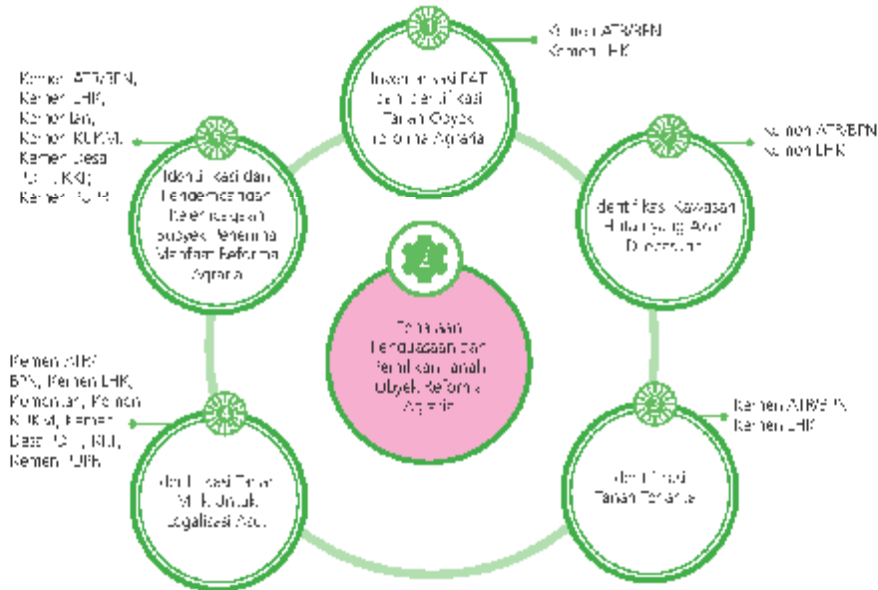
Gambar 11.6
Kegiatan Prioritas Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

11.3.2. Program Prioritas Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

Program Frontas Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi tanah sebagai sumber obyek pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset dalam kerangka reforma agraria melalui: (i) Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4) dan identifikasi tanah obyek Reforma Agraria; (ii) identifikasi Kawasan Hutan yang akan Dilepaskan; (iii) Identifikasi dan Redistribusi HGU basis dan tanah terlantar; (iv) Identifikasi tanah milik untuk legalisasi aset masyarakat miskin; dan (v) Identifikasi dan pengembangan kelembagaan stakeholder penerima manfaat Reforma Agraria.

Kegiatan Prioritas

Uraian dari 06 Kegiatan Prioritas Penataan Pengusahaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria



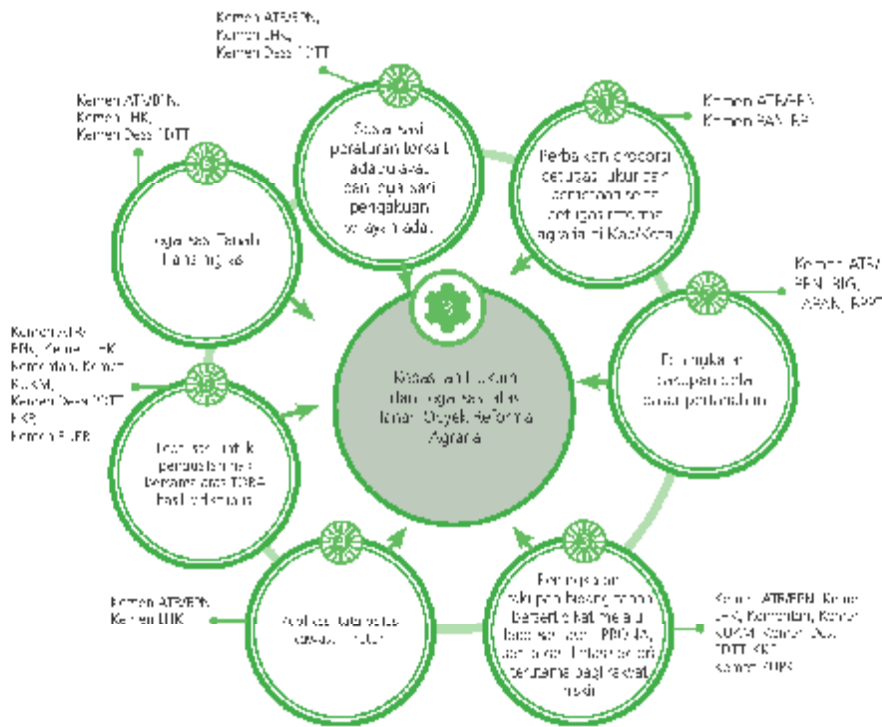
Tabel 0.74 Kegiatan Prioritas Penataan Pengusahaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Penataan Pengusahaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	
1.	inventarisasi MTK dan identifikasi tanah obyek reforma agraria	265.000 bidang
2.	identifikasi kawasan hilirisasi dan duplikasi	108.637 bidang
3.	identifikasi tanah transmigrasi	481.500
4.	identifikasi tanah MTK untuk legalisasi aset	6.000.000 bidang
5.	identifikasi dan pengomposan keembalaan subjek reforma agraria	444 setkar

11.3.3. Program Prioritas Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria

Program Prioritas Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria, dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam kerangka reforma aset yang dilaksanakan melalui: (i) Perbaikan prosedur pengukuran dan penelaahan serta pelugas reforma agraria di Kab/ Kota, (ii) Peningkatan cadangan dana dasar pertanahan; (iii) Peningkatan cakupan bidang tanah bersertifikat melalui legalisasi aset (FRONA, sertifikasi lintas sektor, terutama bagi rakyat miskin); (iv) Publikasi tata batas kawasan hutan; (v) Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi; (vi) Legalisasi untuk tanah transmigrasi; dan (vii) Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat.

Kegiatan Prioritas



Tabel 75
Kegiatan
Terdapat
dalam
Terdapat
Terdapat
Terdapat
Terdapat

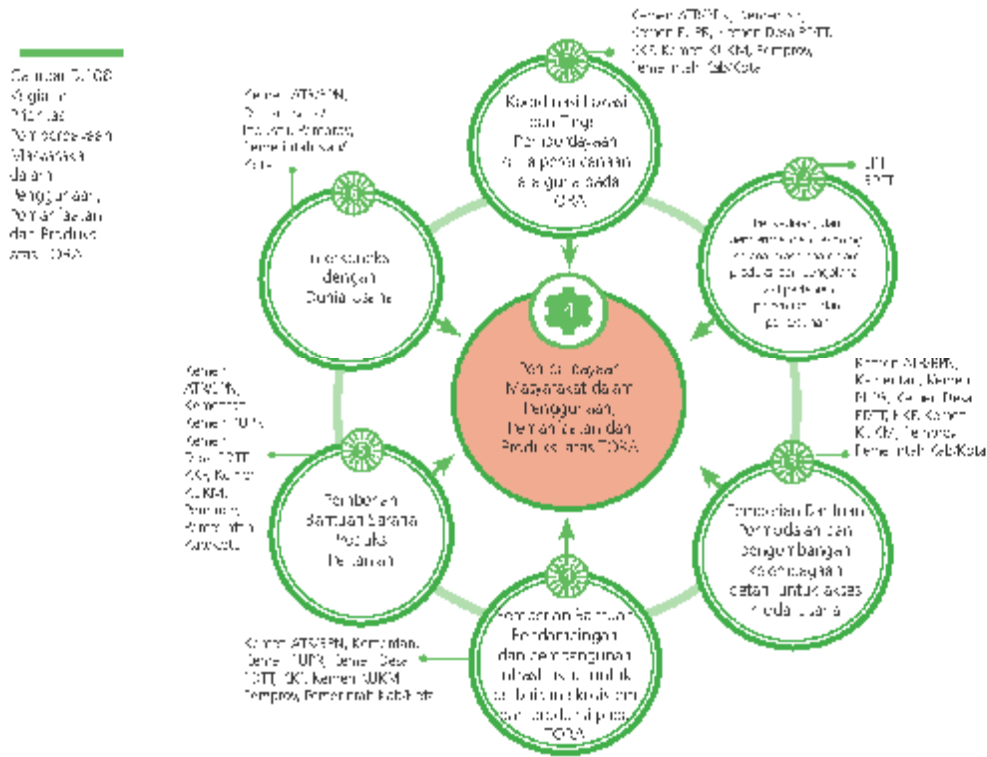
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria	
1.	Perbaikan proporsi batas ukur dan pemetaan serta pengusahan agraria di Kabupaten	2.000 orang
2.	Meningkatkan rancangan perancangan perantara	120.000 dan 522.000 ha
3.	Meningkatkan rancangan bidang tanah dan sertipikat melalui legalisasi dan (PRONA, sertifikat, dan sektor) terutama bagi rakyat miskin	800.000 sertifikat
4.	Publikasi tata batas kawasan hutan	900 km
5.	Legalisasi untuk sertipikat hak bersama atas OGA hasil industri	80.000 bidang
6.	egalisasi tanah transigrasi	10.000 bidang
7.	Sosialisasi peraturan terkait anahulayat dan pengalihan hak milik	17 provinsi

Tabel 75
Kegiatan
Terdapat
Kegiatan
Terdapat
Terdapat
Terdapat

11.3.4. Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, dilakukan dalam rangka memberikan reforma akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima reforma aset dalam kerangka reforma agraria yang dilaksanakan melalui: (i) Koordinasi Lokasi dan Target Pemberdayaan; (ii) Pengembangan Teknologi Pertanian dan Pengolahan; (iii) Pemberian Bantuan Permodalan; (iv) Pemberian Bantuan Pendampingan; (v) Pemberian Bantuan Sarana Produksi Pertanian; dan (vi) Interkoneksi dengan Dunia Usaha

Kegiatan Prioritas



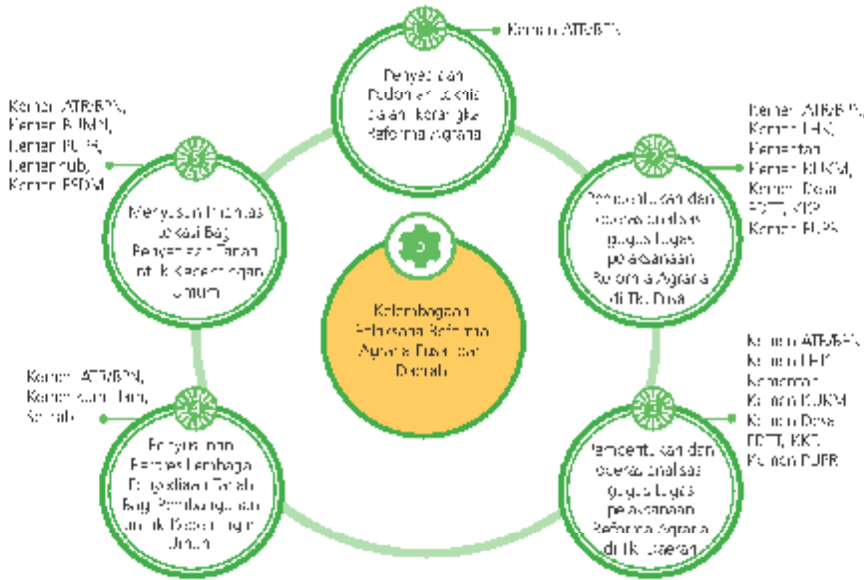
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA	
1.	Koordinasi lokasi dan Target Pemberdayaan serta penentuan target penerima TORA	200 Kantor pemanahan
2.	Penyelesaian, dan pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan	5 kegiatan
3.	Pemberian Bantuan Permodalan dan pengembangan usaha untuk akses modal usaha	20 Kantor pemanahan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Penyediaan tenaga dan tenaga kerja dan peningkatan infrastruktur untuk pertanian berbasis dan produksi pada TORA	317 penerima
5.	Sekolah lapang petani survey penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan hasil guna lahan produksi	3 kegiatan
6.	Intensifikasi	1 kegiatan

11.3.5. Program Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Program Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah bertujuan untuk menyiapkan kelembagaan pelaksanaan reforma agraria baik di tingkat pusat maupun daerah melalui: (i) penyediaan pedoman teknis dalam kerangka reforma agraria; (ii) pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan reforma agraria di tingkat pusat; (iii) pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan reforma agraria di tingkat daerah; (iv) penyusunan peraturan prosedural lembaga penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (v) penyusunan prioritas lokasi bagi penyediaan tanah untuk kepentingan umum.

Kegiatan Prioritas



Gambar 3.170 Kegiatan Prioritas Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah

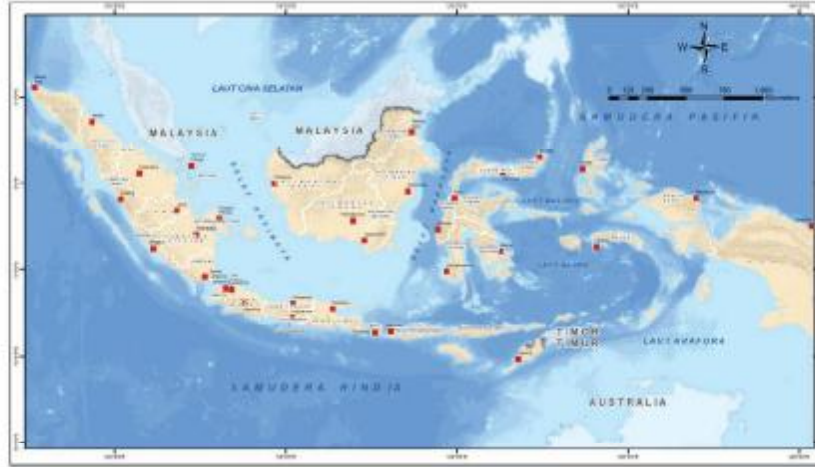
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah	
1.	Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka Reforma Agraria	1 jilid
2.	Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan reforma agraria di tingkat Pusat	1 tim

Tabel 3.76 Kegiatan Prioritas Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Pembentukan dan koordinasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di 13 Daerah	33 tim
4.	Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1 Perpres Lembaga Penyediaan Tanah
5.	Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 data

Persebaran Wilayah

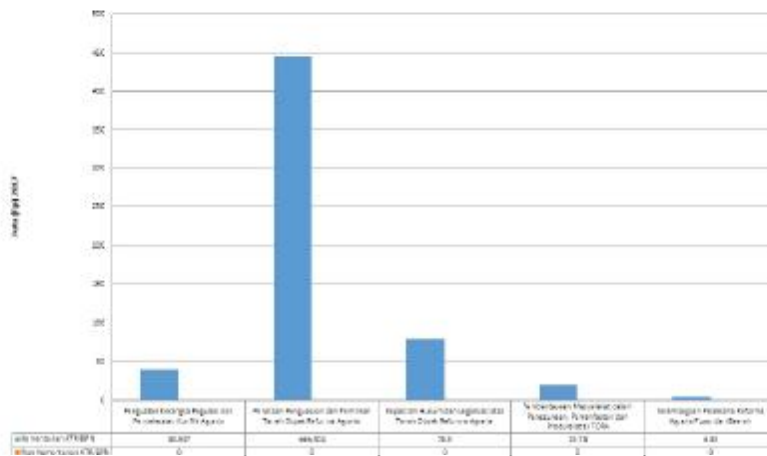
Gambar 3.110 Persebaran Wilayah Reforma Agraria RKP 2017



Reforma Agraria RKP 2017
 ■ 2017: Seluruh Wilayah Indonesia

Alokasi Pendanaan Program Prioritas

Gambar 3.111 Alokasi Anggaran Prioritas Nasional Reforma Agraria Tahun 2017 Berdasarkan Sektor dan Program Prioritas



Catatan: Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional Reforma Agraria tahun 2017 bersumber dari Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/SPP.

3.3.3 DAERAH PERBATASAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, maka arah pembangunan kawasan perbatasan negara adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Tujuan pembangunan tersebut difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan melalui Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di perbatasan negara diwujudkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3/111 lokasi prioritas	+50 Lokasi +3 PKSN	+100 Lokasi +7 PKSN	+100 PKSN +150 Lokasi +7 PKSN	+100 PKSN +187 Lokasi +16 PKSN
2	Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	10	30	50	42 pulau-pulau terluar termanfaatkan

Tabel 3.77
Sasaran
Pembangunan
Kawasan
Perbatasan
Negara

Arah Kebijakan

1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan
2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

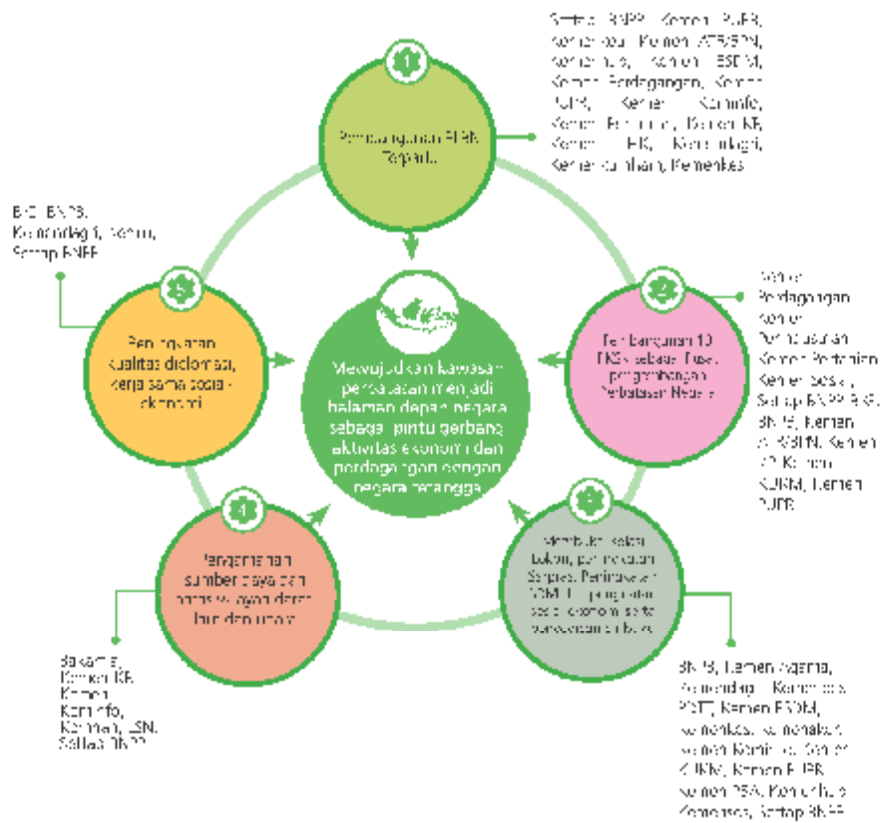
1. Mempertahankan stabilitas dan ketahanan pertahanan, integritas, kedaulatan, keamanan dan keamanan di pos lintas batas Negara (PLBN)
2. Menubuhkannya dari cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan sebagai belakang namun menjadi standar dan depan negara

Gambar 3.112
Arah Kebijakan
Kawasan
Perbatasan
Negara

12.2 Program Prioritas

Struktur 5.15
Program
Prioritas
Nasional Daerah
Kebudayaan

- Peta Indonesia
- Gedung
- Pohon

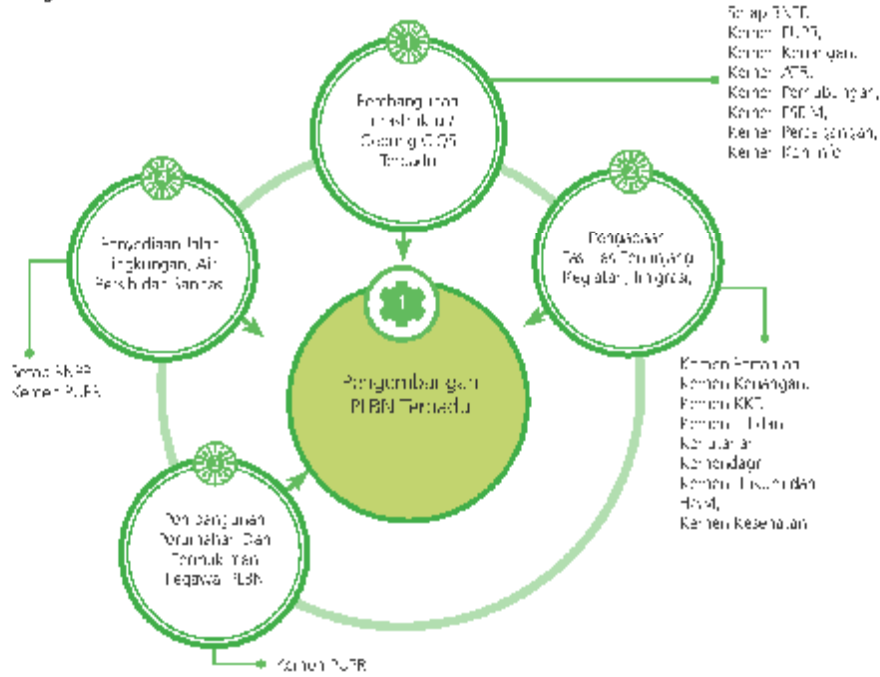


Kegiatan Prioritas

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu adalah salah satu program prioritas dari prioritas nasional Daerah Perbatasan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2015.

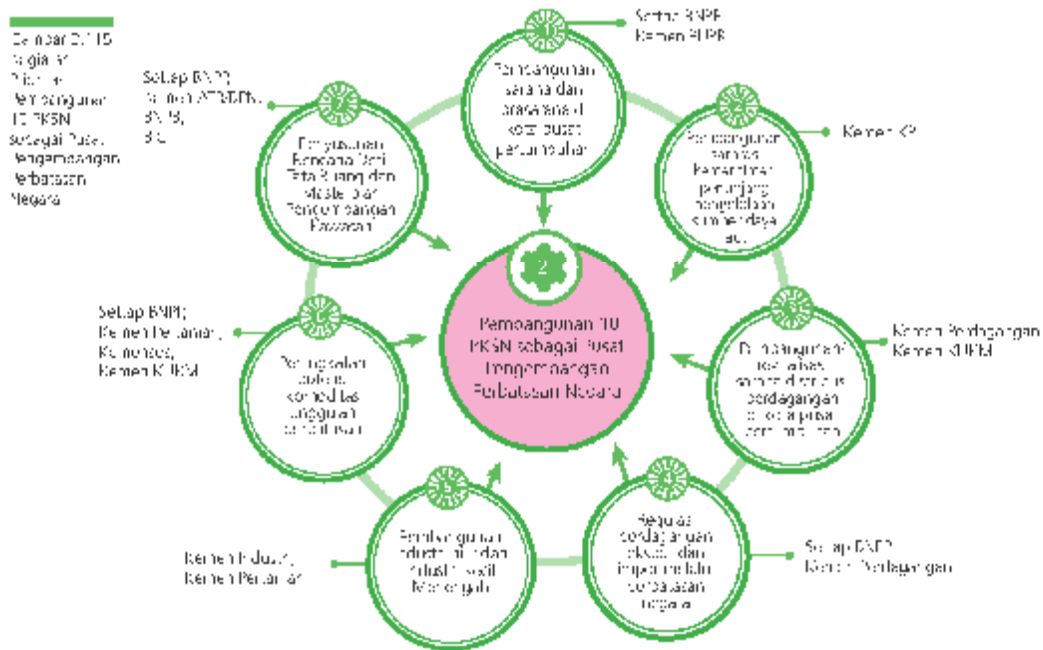
Kegiatan Prioritas



Tabel 77
Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
PLBN Terpadu

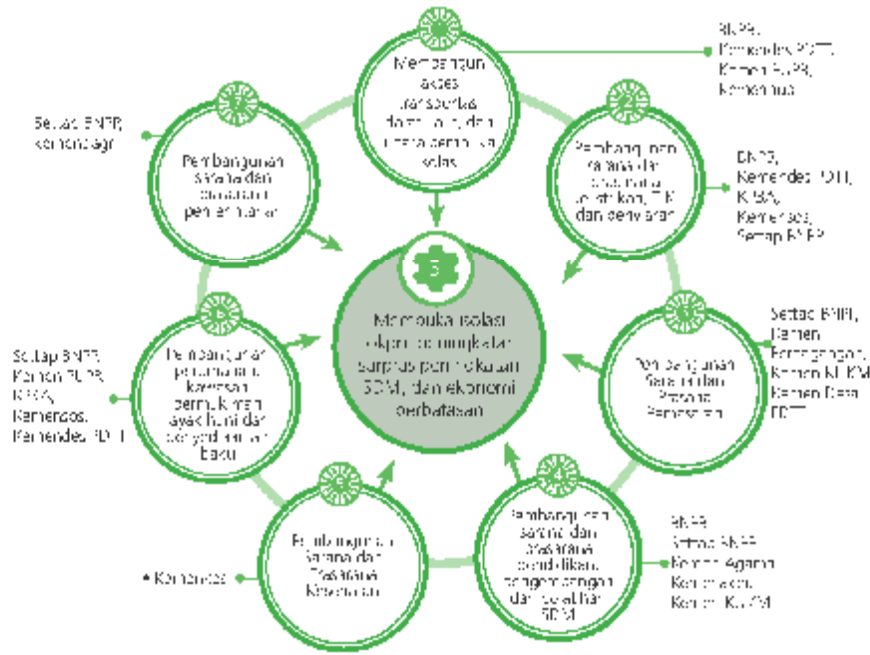
No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Pembangunan PLBN Terpadu	
1.	Pembangunan Fasilitas Umum dan CIBZ Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 5 PLBN Terpadu (fokus pada Inpres 0 th. 2015 dengan target akhir 7 PLBN di tahun 2017) 7 PLBN dengan sarana CIBZ
2.	Penyediaan Fasilitas Pemungutan Kegiatan Custom, Impor, <i>Goods and Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kelulusan penggunaan layanan 94 Lahan kasutina 40% di 2017
3.	Peningkatan Perumahan dan Pemukiman Legawa-LSH	<ul style="list-style-type: none"> 17 Komplek perumahan pegawai Legawa-LSH
4.	Penyediaan Jalanan, Drainase, Air Bersih dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana untuk air baku dan sanitasi di Legawa-LSH

Tabel 78
Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
PLBN Terpadu



Daftar 4.79
Sejarah
12.02
Perdagangan
10 PKSN
sebagai Pusat
Pengembangan
Perbatasan
Negara

No	Program/Kegiatan/Prioritas	Sasaran
1.	Pemaanganan 10 PKSN sebagai Pusat pengembangan Perbatasan Negara	
1.	Peningkatan sarana dan prasarana di kota pusat pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> 431 Km presesi dan peningkatan jalan Nasional
2.	Pemaanganan sarana kemaritiman dan tunjang pengelolaan sumberdaya laut	<ul style="list-style-type: none"> 25 Unit Kapal Perikanan (10-30 GT) 31 PPKI yang terbangun infrastruktur seluler
3.	Pemaanganan sarana sarana distribusi perdagangan di kota pusat pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> 10 Unit pasar tipe C dan D di PKSN 4 Unit revitalisasi pasar rakyat
4.	Kegiatan perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara	<ul style="list-style-type: none"> 1 Peraturan perdagangan impor 2 Kegiatan perdagangan internasional
5.	Pemaanganan inovasi hilir dan industri kecil menengah	<ul style="list-style-type: none"> 16 unit teknologi pengolahan sumberdaya pertanian
6.	Peningkatan sarana komoditas unggulan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> 18 modal pengembangan pengolahan hasil pertanian 81 Fasilitas IKM dalam proses/terwujud
7.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> 51 RTR Kawasan Perbatasan dan 10 RTR pendukung PKSN 1 Perpres RTR Perbatasan Negara



Gambar 2.116 Kegiatan Prioritas untuk membuka isolasi lokpri, meningkatkan sarana, Peningkat SDM dan penguat sosial ekonomi serta penyediaan air baku

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Membuka isolasi Lokpri, peningkatan Sarana, Peningkat SDM dan penguat sosial ekonomi serta penyediaan air baku	
1.	Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara serta akses jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 100 bus perintis • Pembangunan 24 lamina akses jalan perbatasan • Pembangunan pelatihan perbatasan • Pembangunan jalan nasional, non status dan jalan paralel perbatasan
2.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, RT, dan RW	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 63 RTD • 10.000 rumah perbatasan • 20 lokasi akses perdagangan internasional
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	• Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
4.	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pelatihan SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan • Pelatihan penanggulangan bencana • Pelatihan bahasa Inggris
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan layanan kesehatan 28 unit • Pembangunan 5 Rumah Sakit Pratama • Penyediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas Kabupaten Perbatasan • Peningkatan tenaga kesehatan bersaschim
6.	Pembangunan perumahan, kawasan permukiman layak huni dan penyediaan air baku	<ul style="list-style-type: none"> • 500 Ha Kawasan Permukiman Khusus • Pembangunan 4.534 rumah khusus • Bantuan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni lainnya
7.	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • 8 unit kendaraan operasional • 40 Unit sarana pemerintahan di 14

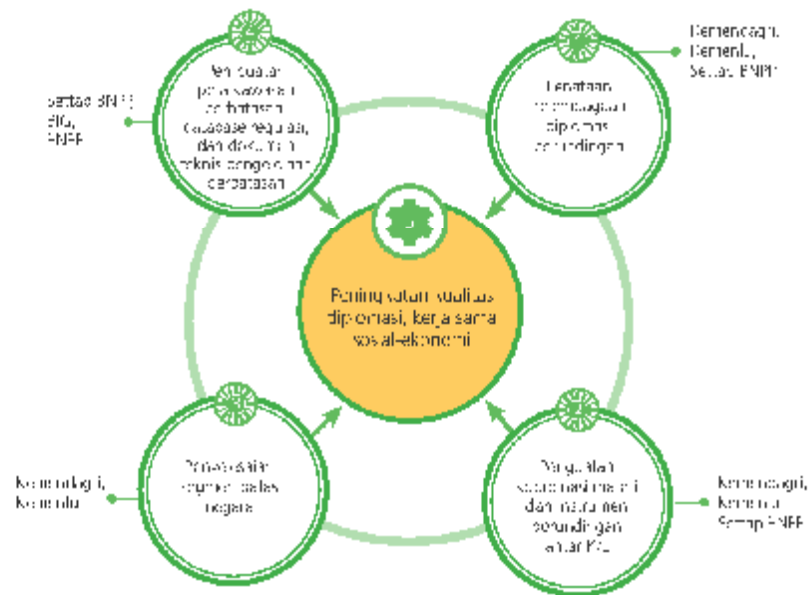
Tabel 2.80 Kegiatan Prioritas untuk membuka isolasi lokpri, meningkatkan sarana, Peningkat SDM dan penguat sosial ekonomi serta penyediaan air baku

Tabel 3.17
Rujukan
Materi
Pengamanan
Sumber Daya
dan Batas
Wilayah Darat,
Laut, dan Udara



Tabel 3.8
Rujukan
Materi
Pengamanan
Sumber Daya
dan Batas
Wilayah Darat,
Laut, dan Udara

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara	
1.	Kerjasama internasional pengamanan kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi penggunaan spectrum frekuensi radio
2.	Pembangunan Pos TNI dengan fasilitas pengamanan berbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 51 pos darat dan 14 kapal • Pembangunan Barisan Hankam jalur perintis, darat, laut, pangkalan dan mass transit
3.	Bandwidth pengamanan batas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Operasi pengamanan informasi • 50 Unit kapal pengawas • Pengawasan di exit dan entry point • Operasi bersama bilateral
4.	Pemantauan, pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Unit terna pengantar batas negara • Pemeliharaan tanda batas di 80 Km batas negara



Gambar 2.113
Pegawai
Pemerintah
Pusat dan
Pegawai
Pemerintah
Provinsi

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi	
1.	Penataan kelembagaan diplomasi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • 80% penyelenggaraan perundingan dasar • 10 K/L yang terlibat dalam perundingan perbatasan • Efisiensi anggaran pelaksanaan perundingan
2.	Penguatan koordinasi materi dan instrumen perdagangan antara K/L	• 10 Pertemuan multilateral membahas materi dan instrumen perdagangan
3.	Analisis dan pengembangan kebijakan	• 5 kebijakan perdagangan vital
4.	Pembuatan peta kawasan perbatasan, database populasi, dan cakupan teknis dan kualitas perbatasan	• 2 NIP Data Basis Negara (DBN) serta analisis data dan rekomendasi lapangan

Tabel 4.42
Kegiatan
Prioritas
Perdagangan
dan
Kerjasama
Sosial-Ekonomi

Persebaran Wilayah

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara berfokus pada pembangunan Pembangunan PLBN, Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan pembangunan lokasi prioritas kecamatan perbatasan negara. PKSN berpotensi menjadi pusat kegiatan masyarakat, pusat pelayanan lintas batas, simpul konektivitas dan fungsi – fungsi keterkaitan pengembangan kawasan lainnya terhadap lokasi prioritas di sekitarnya, termasuk integrasinya dengan pembangunan PLBN sebagaimana amanat Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2015. Pada tahun 2017, 7 (tujuh) PLBN yang ditetapkan, antara lain: Entikong, Nanga Badau, Paloh Aruk, Skouw, Wini, Mota'ain dan Motamasin serta PKSN yang ditangani berfokus pada 10 PKSN (5 di darat dan 5 di laut), yaitu : Sabang, Ranai, Aruk, Entikong, Nanga Badau, Nunukan, Tahuna, Saumlaki, Atambua, dan Jayapura, termasuk pengembangan lokasi prioritas di dalam dan sekitar PKSN maupun 187 Lokpri dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

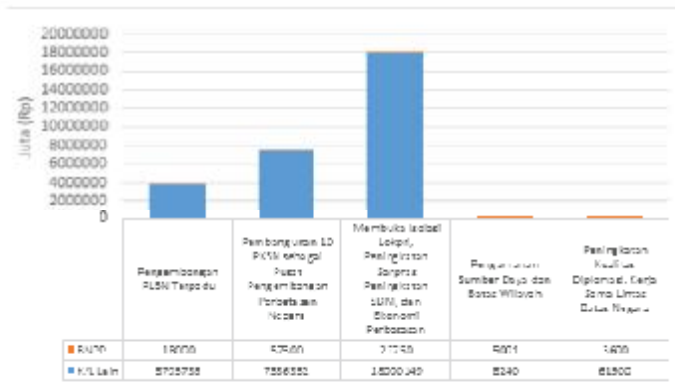
Gambar 3.119
Peta Sebaran
PKSN, PLBN,
Lokpri



Catatan: berdasarkan rekapitulasi SIMU tanggal 26 Maret 2016 pukul 13.00 (belum termasuk DAK, belum semua alokasi kegiatan masuk dalam SIMU, dan belum termasuk kegiatan K/L pada PN lainnya yang berlokasi di daerah perbatasan)

Alokasi Pendanaan

Gambar 3.120
Alokasi
Pendanaan



3.3.4 DAERAH TERTINGGAL

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan perwujudan dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya Nawacita Ketiga (3), yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Melalui kebijakan ini diharapkan ada dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk % 20%)	114*	106*	100*	42
2	Ketersertaan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,16%	8,96%	7,07%	7,17%	7,44%
3	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	18,6%	16,0%	15,4%	14,9%	14,0%
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	69,5	69,1	69,5	69,8	69,6

Salah 3.112
Sasaran umum
Tercapai
Kebijakan Daerah
Tertinggal 2017

* Sesuai sasaran 1000 desa setiap tahun. Sesuai RPJMN dan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pencapaian sasaran tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pada 11 Februari 2016, Presiden Jokowi 42 daerah tertinggal tahun 2016 merupakan 1000 dari 80 kabupaten/kota.

Arah Kebijakan

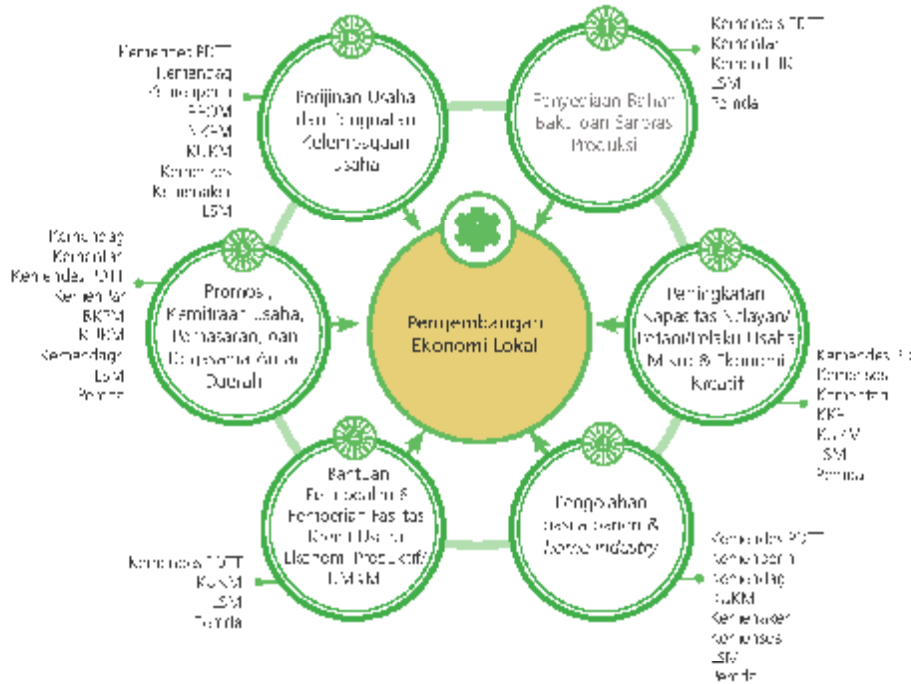
1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas
2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan
3. Pemenuhan kesetaraan pelayanan dasar publik
4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SEM yang berkualitas

Kebijakan terkait Revolusi Mental

1. Peningkatan kapasitas masyarakat di daerah tertinggal untuk meningkatkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat
2. Membangun semangat kompetisi untuk menajaratifitas nggala
3. Meningkatkan kualitas sistem

Salah 3.113
Sasaran umum
Pembangunan
Daerah
Tertinggal

Kegiatan Prioritas



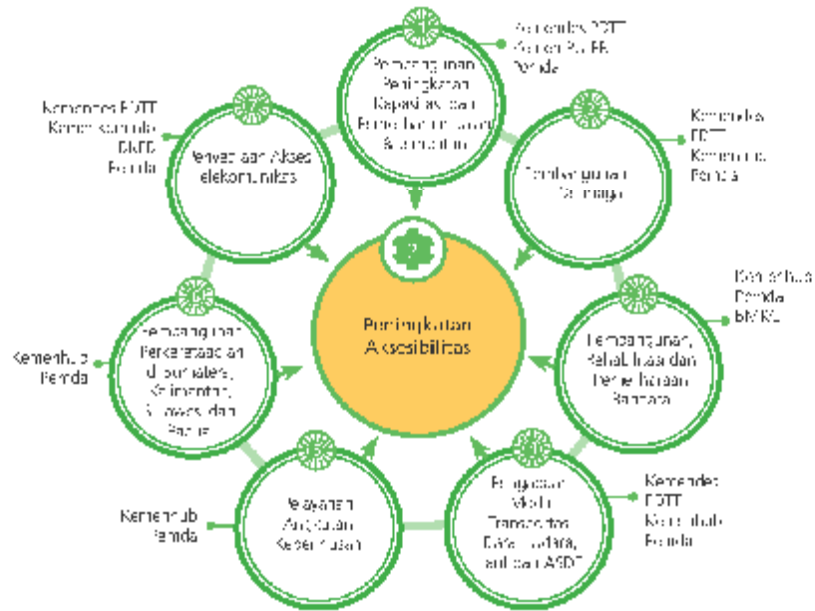
Gambar 3.115 Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Lokal

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Prioritas Pengembangan Ekonomi Lokal	
1.	Penyediaan bahan Baku dan Sertifikasi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan bibit pertanian dan perikanan di 49 kabupaten terdampak 58 pasar tradisional 30 pusat produksi lokal 20 empong rigasi dan 10 sub empong 13/75 kapal perangkap ikan
2.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan/Instansi Usaha Mikro & Ekonomi Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Inyeksi dan kapasitas pelayanan/instansi usaha mikro dan ekonomi kecil di 49 kabupaten terdampak Pelatihan kewirausahaan di 45 kabupaten terdampak Peningkatan pelayanan koordinasi unggulan di 49 kabupaten terdampak Peningkatan penguatan kapasitas bagi 3.777 warga komunitas adat tradisional (KAT)
3.	Peningkatan Pemasaran & Promosi Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan alat pemasaran di 49 kabupaten terdampak Bantuan alat pengolahan di 49 kabupaten terdampak Pemagangan sentral UKM di 49 kabupaten terdampak
4.	Bantuan Permodalan & Pemeliharaan Fasilitas Usaha dan Fasilitas Produksi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan permodalan untuk usaha mikro di 49 kabupaten terdampak
5.	Promosi, Peminaan Usaha, Pemasaran, dan Kolaborasi Antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 122 pasar tipe C dan D Peningkatan 45 koperasi pengelola pasar rakyat Peningkatan pemasaran melalui grup usaha 100 UMKM
6.	Perijinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan 100 kelompok ors koperasi asilnas 100 akta koperasi

Tabel 3.116 Indikator Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Lokal

Kegiatan Prioritas

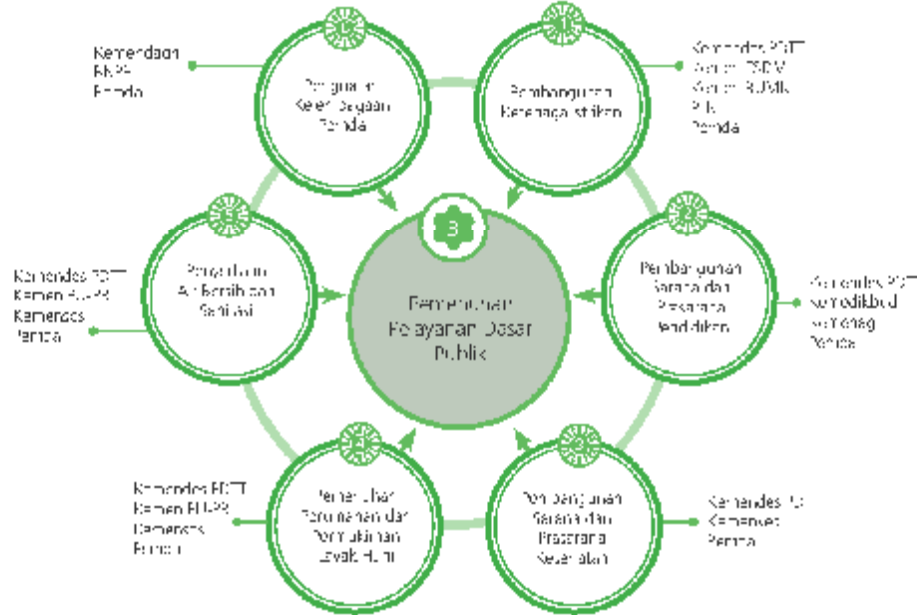
Gambar 116
Kegiatan
Prioritas
Peningkatan
Aksesibilitas



Tabel 2.84
Kegiatan
Prioritas
Peningkatan
Aksesibilitas

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Peningkatan Aksesibilitas	
1.	Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> 1.185 Km jalan 81 unit jembatan Jalur dan rambu evaluasi rencana di 27 kabupaten/kota
2.	Peningkatan Domogru	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemangunan domogru di 7 lokasi Pengembangan dan pemangunan pelabuhan di 12 lokasi
3.	Peningkatan, Rehaalitas, dan Pemeliharaan Bandara	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan/tingkatkan 48 lokasi Pengelolaan layanan informasi cuaca pemeliharaan dengan akurasi > 90% di 1 bandara Penyediaan layanan informasi cuaca ekstrem skala kabupaten dengan akurasi > 85% di 2 provinsi Pengelolaan layanan Informasi Cuaca untuk penanganan non-episodus di 5 bandara
4.	Pengadaan Moda Transportasi Darat, Udara, Laut dan ASDP	<ul style="list-style-type: none"> 48 unit kapal pemusung 23 unit kapal perang
5.	Layanan Angkutan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> 200 unit bus pariwisata 100 unit kapal wisata Susuki 250 treyek kepariwisataan angkutan darat Susuki 217 treyek kepariwisataan angkutan udara Susuki 100 treyek kepariwisataan angkutan laut
6.	Peningkatan Keterkaitan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua	<ul style="list-style-type: none"> Jalur SA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Rute pelayanan perhubungan susut untuk angkutan kereta api
7.	Penyediaan Akses telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 37 unit radio telekomunikasi terpasang Sistem perngatan di Labencanaan di 27 kabupaten/kota

Kegiatan Prioritas



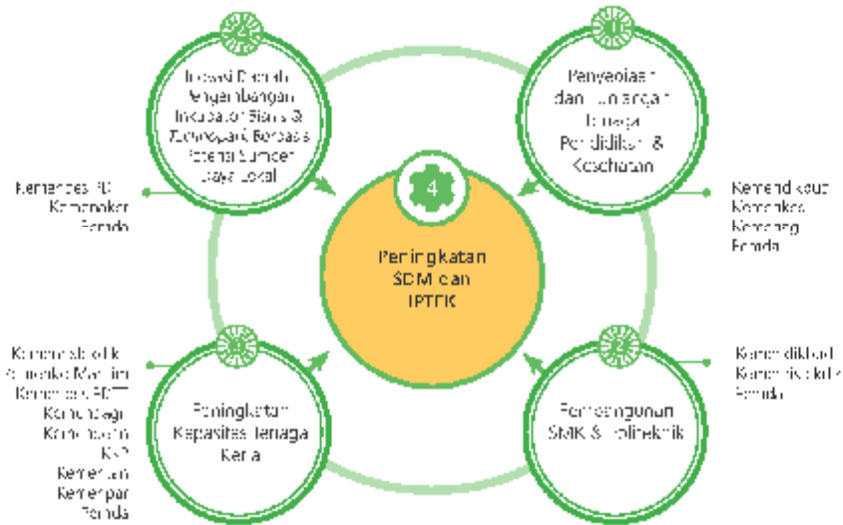
Tabel 3.117
Pemenuhan
Pelayanan Dasar
Publik

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik		
1.	Pengembangan Ketersediaan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 100 unit HB di 40 kabupaten tertinggal Pembangunan 1.5 terpusat 2.7 unit di 12 kabupaten
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 20 sarana sekolah 40 SMK di daerah 3T 120 SD-6MI satu atap 20 SMP berasama Rentalitas 300 MW; 200 MW; 100 MW Rentalitas 145 rumah
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana, prasarana dan alat (EPA); Puskesmas di 257 kab tertinggal Pelayanan kesehatan kesehatan di 19 kabupaten tertinggal Penyediaan pelayanan kesehatan standar di 124 Puskesmas di daerah tertinggal
4.	Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> 30.000 rumah swadaya bers. Peningkatan kualitas 80.000 rumah swadaya Peningkatan 4.634 rumah khusus beserta 15% penunjangnya Rumah asri 2.059 HK warga Komunitas Adat (pendiri KAD)
5.	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> 55.820 Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (sumbu perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan banjir/pertanian/pulau terpencil) Pembangunan sarana air bersih bagi 3.800 KK di 39 kabupaten Pembangunan 54 sarana MCK di lingkungan KAT
6.	Penguatan Kelembagaan Pemca	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi fungsional dan teknis, serta aparatur pemca untuk 41 kab tertinggal Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di 122 kab tertinggal Terseleksi PTSP yang Prima di 40 kab tertinggal

Tabel 3.85
Pemenuhan
Pelayanan Dasar
Publik

Kegiatan Prioritas

Gambar 3.118
Peningkatan
SDM dan IPTEK



Tabel 3.86
Peningkatan
SDM dan IPTEK

No	Program/Kegiatan Prioritas	Susunan
4	Peningkatan SDM dan IPTEK	
1.	Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis & Kewirausahaan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan 3.000 Guna Guna Dana - (G.G.D) • Didukung 1000 Guna Guna Dana • Tunjangan untuk SD dan SMP di 40 kabupaten tertinggal • Tenaga kesehatan PTT Kemendagri yang mengikuti seleksi CPNS-BK di lingkungan Kemendagri daerah tertinggal sebanyak 414 tenaga • SDM Kesehatan yang tersertifikasi kesehatan teknis dan fungsional sebanyak 14.700 SDM kesehatan tenaga
2.	Pembangunan SMK & Politeknik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SMK di 45 kabupaten tertinggal • Pembangunan laboratorium SMK di 9 kabupaten tertinggal
3.	Peningkatan Kapasitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tenaga kerja di 49 kabupaten tertinggal • Pelatihan 10.000 Tenaga Kerja • Mengisi 55.000.000 (55 juta) di daerah tertinggal
4.	Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis & Kewirausahaan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat riset pengembangan produk

Persebaran Wilayah

Berdasarkan Perpres No 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat 122 kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal dengan mengacu pada 6 (enam) kriteria ketertinggalan. Penentuan prioritas penanganan daerah tertinggal per tahun mempertimbangkan bobot indeks ketertinggalan yang paling berat. Pada tahun 2017 prioritas penanganan daerah tertinggal difokuskan pada 54 kabupaten. Dalam rangka meningkatkan integrasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan di daerah tertinggal, terdapat 5 kabupaten tertinggal pada tahun 2017 yang dijadikan lokasi terintegrasi lintas sektor. Penentuan 5 kabupaten tertinggal tersebut mempertimbangkan keterkaitan antara daerah tertinggal dengan kawasan strategis, serta

memperhatikan karakteristik wilayah, antara lain merupakan kawasan perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, rawan pangan dan daerah kepulauan. Pada sebanyak 122 kabupaten tertinggal, 54 kabupaten tertinggal yang prioritas ditangani tahun 2017 dan 5 kabupaten tertinggal tertinggal terintegrasi terdapat pada gambar berikut.



Gambar 3.113
Peta Persebaran
Kabupaten
Tertinggal

NO	KABUPATEN	EKONOMI	SDM	INFRASTRUKTUR	AKSESIBILITAS	KKD*	KD**
1	Sigi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Sulawesi Tenggara	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Sulawesi Tenggara	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pangkalant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Makassar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dugay	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Indragiri	✓	✓	✓	✓	-	✓
9	Arut	✓	✓	✓	✓	-	✓
10	Harau	✓	✓	-	✓	✓	✓
11	Sarangani	✓	✓	-	✓	✓	✓
12	Wander	✓	✓	-	✓	✓	✓
13	Makassar	✓	✓	✓	-	✓	✓
14	Lombok Tengah	✓	✓	✓	-	✓	✓
15	Makassar	✓	✓	✓	-	✓	✓
16	Yogyakarta	✓	✓	✓	-	✓	✓
17	Makassar	✓	✓	✓	-	✓	✓
18	Cupang	✓	✓	✓	-	✓	✓
19	Dea	✓	✓	✓	-	✓	✓
20	Lombok Utara	✓	✓	✓	-	✓	✓
21	Makassar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Yogyakarta	✓	✓	✓	-	-	✓
23	Nagasaki	✓	✓	-	-	✓	✓
24	Ende	✓	✓	-	-	✓	✓
25	Ende	✓	✓	-	-	✓	✓
26	Topu	✓	✓	-	-	✓	✓
27	Ulu	✓	✓	-	-	✓	✓
28	Kyau	✓	✓	✓	✓	-	-

Tabel 3.87
Ciri-ciri
Kabupaten
Tertinggal
Prioritas tahun
2017

3.3.5 DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, telah mengedepankan desa sebagai fokus pembangunan nasional 2015-2019. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi acuan dalam pembangunan desa, untuk membangun dengan kekuatan masyarakat desa dan pemerintahan desanya sesuai dengan hak asal-usul, hak tradisional maupun kewenangan berskala lokal dengan dukungan program-program sektor, sehingga menjadi desa yang mandiri, kuat, maju, demokratis dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan pengawalan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya secara sistematis, konsisten dan berkeanjutan dengan melaksanakan konsolidasi Lintas K/L dan pusat-daerah dalam perencanaan, fasilitasi, supervisi dan pendampingan dalam pelaksanaannya, serta memastikan redistribusi sumberdaya (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumberdaya lainnya) kepada desa dapat berjalan secara efektif sebagai bentuk upaya dukungan nasional untuk mendorong penguatan kemandirian desa.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Pengurangan Desa tertinggal Menjadi Desa Berkembang		500 desa	1.500 desa	3.000 desa	5.000 desa
2.	Peningkatan Desa Berkembang Menjadi Desa Mandiri	--	200 desa	600 desa	1.200 desa	2.000 desa
3.	Meningkatnya Produktivitas Desa Kota Melalui Pemangunan Ekonomi HULU-HILIR dan Pengelaaan Kawasan Perdesaan untuk Mendempat Kemandirian Desa	--	14 kawat		14 kawat	39 kawat
4.	Pembangunan dan Penguatan Kawasan Transmigrasi untuk Percepatan desa tertinggal menjadi berkembang		14 Kaw 7 SP	43 Kaw 22 SP	86 Kaw 43 SP	144 Kaw 72 SP

Tabel 3.90
Sasaran Umum dan Arah Kebijakan Desa dan Kawasan Perdesaan 2014

Arah Kebijakan

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi
2. Perbaikan SDM, Pemberdayaan, dan Model Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi
4. Penguatan Pemerintahan Desa
5. Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkeanjutan
6. Penguatan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendempok Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa Kota
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

Kebijakan terkait: Revolusi Mental

1. Penguatan masyarakat desa yang bersahaja, produktif, dan inovatif
2. Memperkuat nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa dan desa untuk optimis pembangunan desa
3. Penguatan hukum dan pengawasan oleh masyarakat desa
4. Fasilitasi dan pendampingan untuk penguatan pemerintahan desa dan kader masyarakat desa menuju desa mandiri
5. Penguatan daya saing ekonomi desa dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan

Tabel 3.118
Arah Kebijakan Program Prioritas Desa dan Kawasan Perdesaan

Gambar 5.12* Program Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

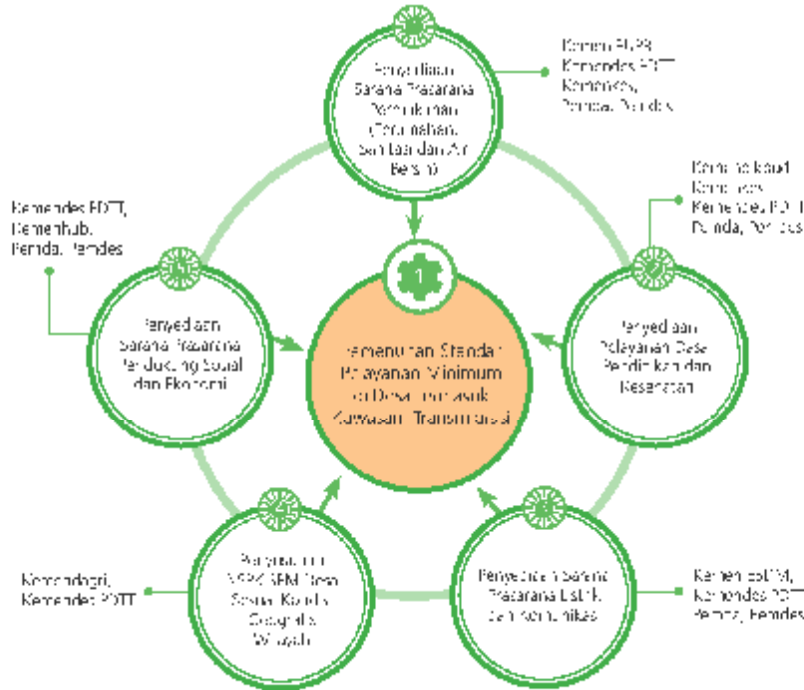
-  Fasilitas Rukun
-  Kegiatan Utama
-  Kegiatan Pendukung

Program Prioritas



Kegiatan Prioritas

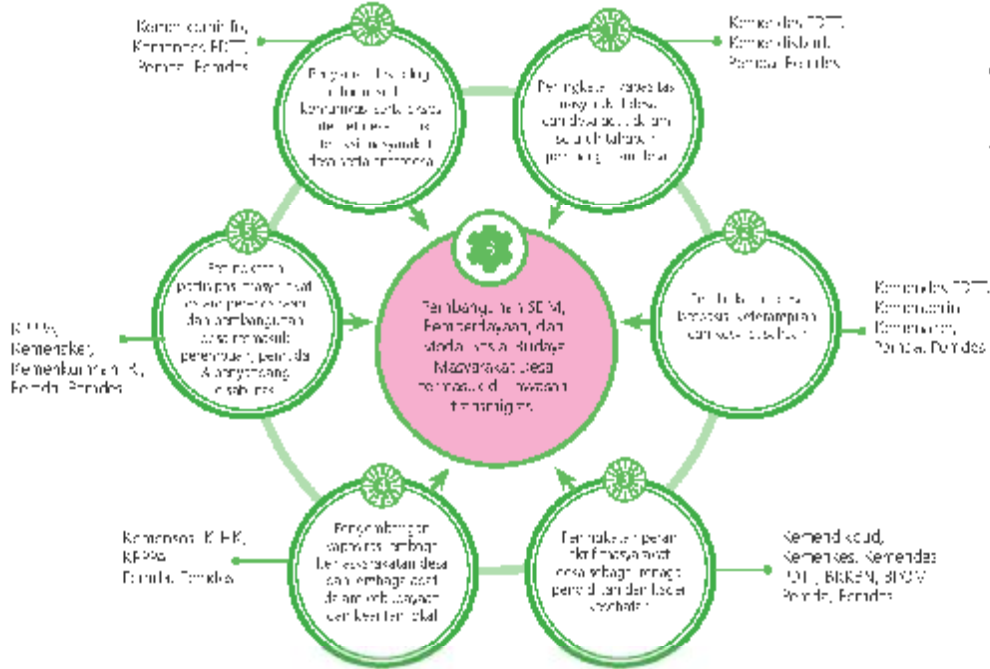
Gambar 5.13* Kegiatan Prioritas Pembangunan Standar Pelayanan Minimal di Desa dan Kawasan Perdesaan



No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan transmigrasi	
1.	1. Penyediaan sarana Kawasan Pemukiman (Perumahan, Sanitasi dan Air Bersih)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas rumah swadaya 419.177 rumah tangga • 2.868 rumah penyediaan akses jalan • 401.320 Sambungan Rumah (SR) SPAM • Peningkatan kualitas 84 unit sarana air bersih • Pelaksanaan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) 35.000 desa/kecamatan • Peningkatan kualitas 144 unit sarana sanitasi
2.	2. Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan 140 ruang kelas PAUD dan 3.000 bantuan sarana pembelajaran untuk Lembaga PAUD • Pembiayaan 100 lembaga PAUD terpadu di daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) • Pembiayaan 1.015 ruang kelas SD bantuan rehabilitasi 5 RT/ruang kelas SD • 2.430 guru TK/TKLB di 3T dan 100 guru TK/TKLB di SP Transmigrasi yang menerima tunjangan khusus • 9.464 guru Dikdas di 3T dan 100 guru Dikdas di SP Transmigrasi yang menerima tunjangan khusus di 3T • Pelaksanaan pemeliharaan Desa Melakukani Kampanye 100 desa • 100 tenaga kesehatan perugas khusus individu di SP Transmigrasi
3.	3. Penyediaan sarana Kawasan Listrik dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan 48 unit tenaga listrik dan angka Energi Baru Bersih • Pembiayaan energi listrik 25,41 MVA • 10.950 KM pemasangan jaringan transmisi dan distribusi • 6.383 MVA kapasitas pembangkit yang diamban • Penyediaan perangkat sistem informasi desa secara gratis di 500 desa
4.	4. Penyusunan NSPK ERM Desa Sesuai Kondisi Geografis Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Keakraban yang menentuakan prosedur hukum terkait NSPK SPV Desa • Penyusunan NSPK SPV Desa tentang pengembangan sarana komunikasi, transportasi, penunjang ekonomi desa, elektrifikasi, dan telekomunikasi desa
5.	5. Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Sosial dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsionalisasi 728 unit rumah (Pasar, Balai Desa, rumah petusak, rumah ibadah, poskades, gudang, kantor unit, rumah KUPPI di kawasan transmigrasi • 157 unit operasional Irigasi/teknologi Sungai dan dan Pemukiman (MOT) yang di desa • 33 unit pemukiman di desa/kecamatan/kecamatan 6 sektor pembangunan dermaga danau • 416 km panjang jalan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi • 302 km dana desa lahan usaha produktif di Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.1
Kegiatan Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Prioritas



Gambar 3.123
Pegawai
Moral
Kerjasama
SDM,
Membantu,
dan Mena
Karya
Masyarakat
Desa, termasuk
di kawasan
transmigrasi

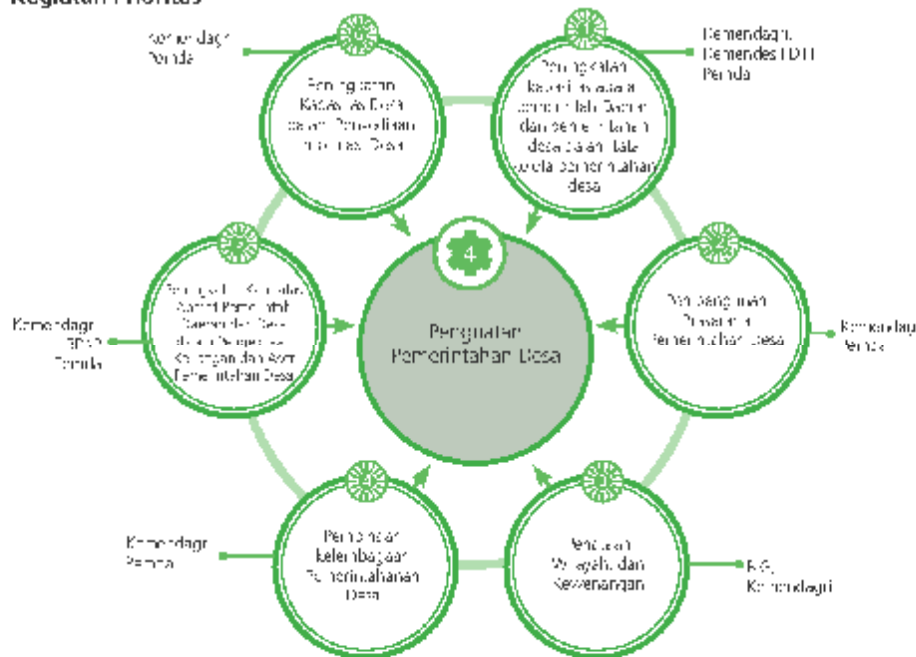
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan transmigrasi	
	1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat Dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi 120 Desa Adat • Pelaksanaan pendampingan oleh 18.000 tenaga pendamping
	2. Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan bagi 2.000 orang • Pelatihan keterampilan usaha wanita bagi 500 orang • Diklat pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan bagi 20.000 orang untuk sektor industri prioritas

Tabel 3.93
Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
SDM,
Pemberdayaan,
dan Modal
Sosial Budaya
Masyarakat
Desa termasuk
di kawasan
transmigrasi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa Sebagai Mitra Pembangunan Kedarifatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses masyarakat ke layanan pendidikan dan kesehatan melalui Generasi Sehat Cerdas di 1.208 desa perbatasan dan 1.741 desa lain-lain C4C • Peningkatan pelayanan KB/KIK/Puas 1 kampung KB/ketuturan • Pendidikan 10.530 orang Guru PAUD lokal di 2.775 desa terakreditasi PAUD • Penyaluran tenaga pendidikan, kesehatan, mental sprituasi, dan seni sebanyak 183.341 • Memperbaiki program KIKIK pada 1 kampung KIKIK dan lain-lain PKKBD/PUU/PPKBD sesuai masyarakat
4	Pengembangan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Dalam Koordinasi dan Keaktifan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan 10 kelompok usaha hutan adat • Menemukan Community Watch/Sejahtera Berkegiatan dan Penanganan Bencana/Proana/Perdagangan Orang di 115 desa • 68 desa lokasi siap untuk bencana • 32.947 terumbu karang bencana
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Desa Termasuk Perencanaan, Pembiayaan, dan Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan UK untuk akses informasi tentang perlindungan perikanan dan anak baca SD kelomok keperempuan • Peningkatan kapasitas 500 orang anggota lembaga adat dalam koordinasi dan keaktifan lokal yang sesuai dengan dan pedulian anak
6	Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Akses Internet Desa Untuk Interaksi Masyarakat Desa Serta Antamara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dasar Transceiver (radio) 215 • Penyediaan akses broadband internet di desa • Peningkatan Desa Berkegiatan • 10.000 agen perubahan informatika untuk pemberdayaan masyarakat berbasis UK • Pengembangan sistem informasi terpadu dalam pengembangan desa, kawasan perencanaan, napan terencana, daerah terdampak, transmigrasi serta pusat usaha

Kegiatan Prioritas

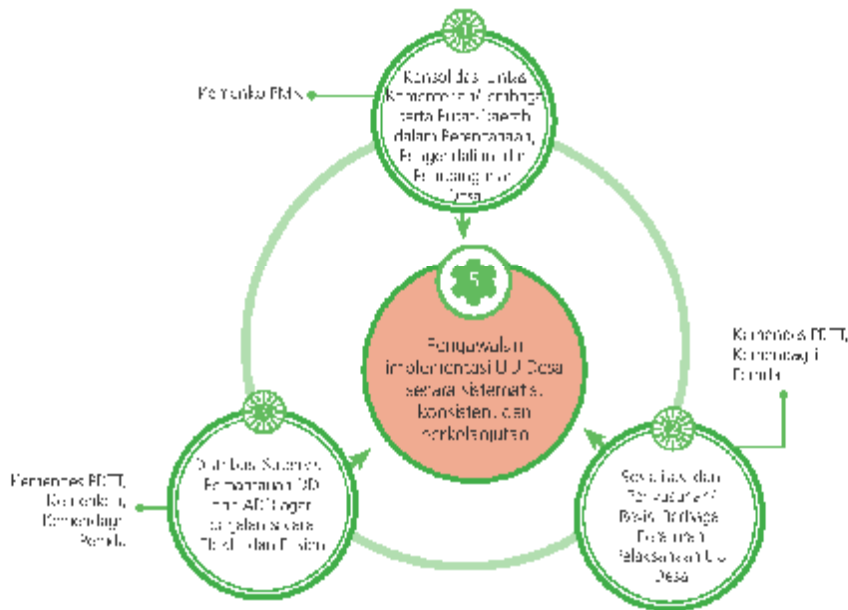
Generasi 2045
 Kegiatan
 Prioritas
 Anggaran
 Pemerintahan
 Desa



No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • 200 desa mengelola keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa • 60 desa memiliki IWL (minimal 10%) terhadap total pendapatan desa • 50 desa mengelola aset desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset desa • 100 Project Format Birokrasi Hemdes di 10 provinsi • 10.000 Desa yang memiliki sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa di basis aplikasi
6	Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> • 40% desa menyediakan data secara online

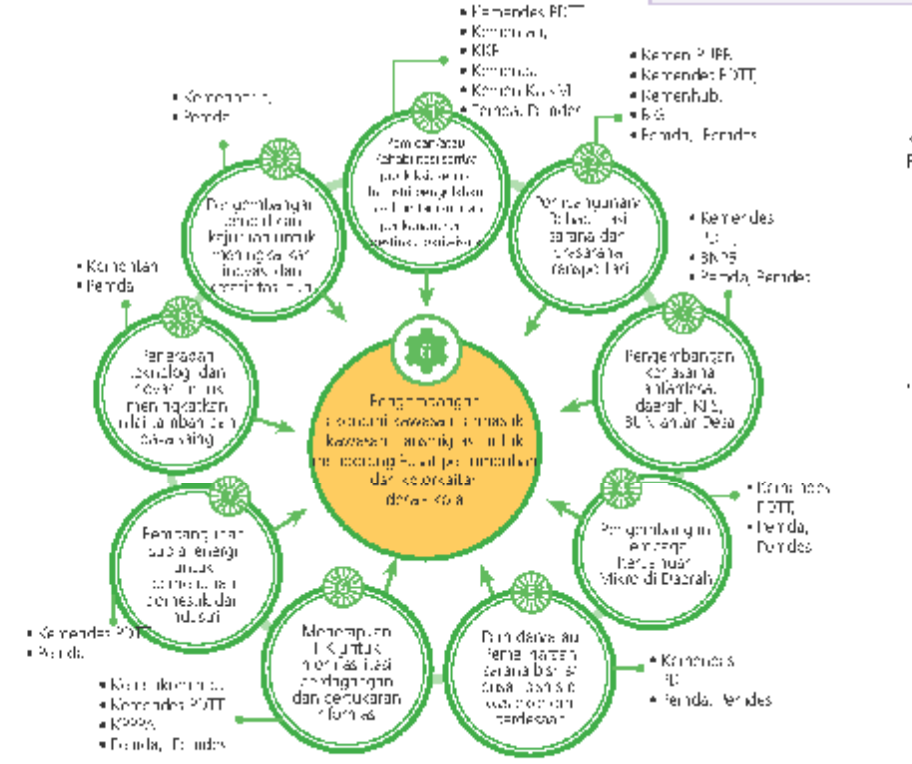
Kegiatan Prioritas

Keberhasilan 25 kegiatan prioritas tercapai tergantung pada implementasi UJ Desa secara konsisten, berkelanjutan, dan menyeluruh.



No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan	
1.	Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Perencanaan, Pengoasian, dan Pemoangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi kebijakan untuk membidayakan kawasan perdesaan 2. Rekomendasi usulan kebijakan tentang ombudsman desa 3. Rekomendasi kebijakan untuk membidayakan masyarakat
2.	Sosialisasi dan Penyuluhan/ Riset Berbasis Penelitian Pelaksanaan UU desa	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan peraturan daerah Desa Adat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Peraturan di 432 Kota/Kota
3.	Distribusi, Supervisi, Pemantauan/ DUK dan ADD agar berjalan secara Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> Indeks pemerataan antara Daerah sasaran 0,73 Supervisi Keparahan APD tempaup pada kawasan desa di 34 provinsi 31 provinsi memiliki tingkat kepatuhan daerah pada sistem Monitoring Aksi Pengoasian dan Pembinaan Desa Komunitas sebesar > 30%

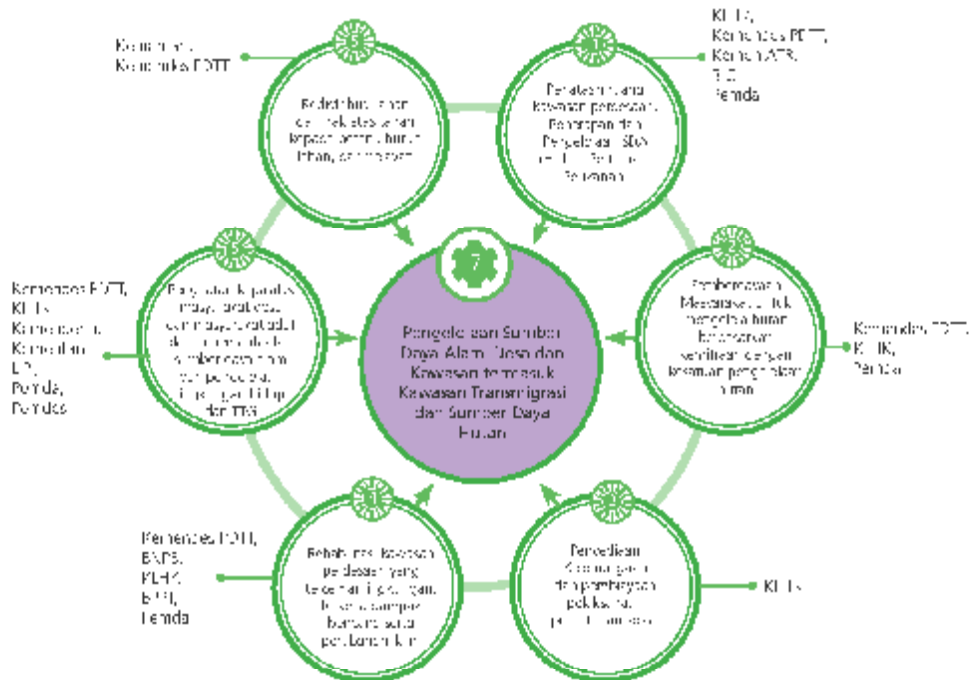
Gambar 1.95
Kategori
Pribadi
Pengawasan
Implementasi
UU Desa secara
sistematis,
konsisten, dan
berkelanjutan



Gambar 1.106
Kategori
Pengembangan
ekonomi
kawasan
desa untuk
meningkatkan
pertumbuhan
dan ketahanan
desa $> 40\%$

Tahun 2016 Tingkat Prioritas Pengembangan ekonomi kawasan perkotaan sasaran utama mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
	6.	Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa - kota	
	1.	Peningkatan nilai atau Rehabilitasi Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan, Serta Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • 110 Kawasan sentra/kampung nelayan yang dikelola dan dikembangkan • 115 Kawkos yang memenuhi syarat sebagai destinasi berbasis perikanan atau daya • 10 destinasi wisata budaya yang dikembangkan dan memperkuat nilai sejarah dan budayanya • 10 Destinasi Wisata Alam dan Hutan yang dikembangkan meliputi Taman Nasional, Taman Laut Nasional, dan Taman Geologi/Gebir • 500 Kelembagaan koperasi yang diorganisir dalam peningkatan kualitas keanggotaan, keperawatan tata kelola KUMKM • Pelayanan sarana agrokonsin dan Agri industri di 15 Kawasan • Pelayanan 80 lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi yang layak dan layak • 55 Km Panjang jaringan infrastruktur desa/kawasan yang dibangun / direhabilitasi untuk mendukung pertanian, perikanan, dan destinasi pariwisata • 70 Unit Sarana dan Prasarana Air Bersih desa/kawasan untuk mendukung pertanian, perikanan, dan destinasi pariwisata
	2.	Peningkatan kualitas Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi Desa dengan Pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi Lokal/Desa Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • 43.042,7 km perolehan jalan yang diperbaiki • 383.507,7 km panjang jembatan yang diperbaiki • 416 km panjang jalan yang ditingkatkan • 796,3 panjang jembatan yang ditingkatkan • 264 km panjang jalan lingkungan 19 km jalan aspal • 900 km panjang jembatan yang diperbaiki • 14,3 km dukungan jalan nasional • 13 Mesteryan dan DBU Kawasan Perdesaan Prioritas
	3.	Pengembangan Koperasi Antardesa, Daerah, dan Pemerintah Swasta Termasuk Pengelolaan BUM Antardesa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 lembaga dan kelompok masyarakat yang semitra dalam pengembangan agribisnis di kawasan transmigrasi • Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dengan BUMK/ BUMD/Swasta/Perguruan tinggi dalam pengembangan kawasan perdesaan
	4.	Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha	<ul style="list-style-type: none"> • 20 BUMKDes yang terbentuk dan memanfaatkan bantuan
	5.	Peningkatan kualitas Pemeliharaan sarana bisnis/ usaha bisnis di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • 14 unit dasar antar desa yang diorganisir rehabilitasi sarana untuk mendukung usaha bisnis
	6.	Penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi	<ul style="list-style-type: none"> • 15 kelompok yang mampu memanfaatkan fasilitas tentang perdagangan elektronik untuk pemasaran barang dan jasa
	7.	Pengembangan Suatai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kawasan perdesaan yang mendapatkan bantuan 100-100 Kw
	8.	Penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	<ul style="list-style-type: none"> • 187 teknologi spesifik lokal • 65 Model Pengembangan inovasi teknologi pertanian • 241 teknologi yang diimplementasikan ke pengusaha • 56 unit bantuan alat pergilahan perikanan
	9.	Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan daya dan daya saing	<ul style="list-style-type: none"> • 1700 jumlah lulusan Pendidikan Kejuruan Industri di 3 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi • 7 Paket Pelatihan dan Monev • 4493 siswa yang mengikuti Pendidikan Kejuruan Industri • 0,623 Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Teknik Vokasi

Kegiatan Prioritas



Tabel 2.127 Kegiatan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengelolaan termasuk Kawasan Transmigrasi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
7.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	
1.	Penataan ruang kawasan perdesaan, Penataan dan Pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	<ul style="list-style-type: none"> 70 dokumen RPKF rencana pembangunan kawasan perdesaan 100% tambahan penetapan kawasan hutan yang selesai ditetapkan di tahun 2017
2.	Promosi masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemiripan dengan kawasan perdesaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> 270.000 Ha hutan bebas konflik tenurial perijinan air hak 10 desa rawan air
3.	Perbaikan Kelayakan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan sosial	<ul style="list-style-type: none"> 340 kelompok usaha pertanian sosial (KUPS) (Krn, HD, HTS, HR, Hutan Adat dan Kemiripan) yang mandiri 190 unit alat kontrol produktivitas pertanian sosial (Krn, HD, HR, HTS, Hutan Adat dan Kemiripan)
4.	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang terdampak lingkungan, rencana dampak rencana serta perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> 100 keluarga desa yang tangguh bencana 35 kawasan perdesaan rehabilitasi dan dikonservasi 10 desa rawan yang rentan perusakan iklim dengan kajian kerentanan 100.000 ton lahan terkonservasi limbah BE yang diurungkan 8 Ha lahan bekas tambang logam yang diurungkan 37 MW Kawasan transmigrasi desa terpadu dan area dampak lainnya

Tabel 2.127 Kegiatan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengelolaan termasuk Kawasan Transmigrasi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat urban dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	<ul style="list-style-type: none"> • 6,69% desa yang berdayakan pekarangan organik • Peningkatan kapasitas 600 orang kader lingkungan hidup • 51 desa di daerah penyangga Kawasan Konservasi yang memiliki usaha ekonomi produktif • 25.000 Ha luas zona tradisional desa Tani dan Pesional di desa melalui kemitraan dengan masyarakat • Desa di sekitar 149 unit KPM - dikembangkan sebagai mitra produksi hasil hutan • 80 unit KPM yang melakukan pengolahan hasil perkebunan masyarakat desa setempat • 400 orang kader <<, <PA, KSM, KP aktif dalam pengelolaan SDAs lingkungan • 350.000 Ha hutan ekowisata masyarakat dalam bentuk -KWT, HD, HUK dan kemitraan • Pembiayaan 30 kasus usaha kecil dan menengah di kawasan LUT/ SWWT • Pengembangan 20 Kawasan Persebaran berbasis perikanan terpadu
6	Redistribusi lahan dan hak atas tanah ke masyarakat kurang mampu dan miskin	<ul style="list-style-type: none"> • 134,575 Ha luas pembebasan tanah • Pengalihan sertifikat 50.000 bidang tanah • Penyelesaian 70 kasus sengketa • Penyelesaian 21 kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan • Penerbitan sertifikat HPL di 117 lokasi kawasan transmigrasi

Perseragaman Wilayah

Lokasi Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan Persebaran Berdasarkan RPJMN 2011-2019 dapat dilihat dalam gambar berikut:

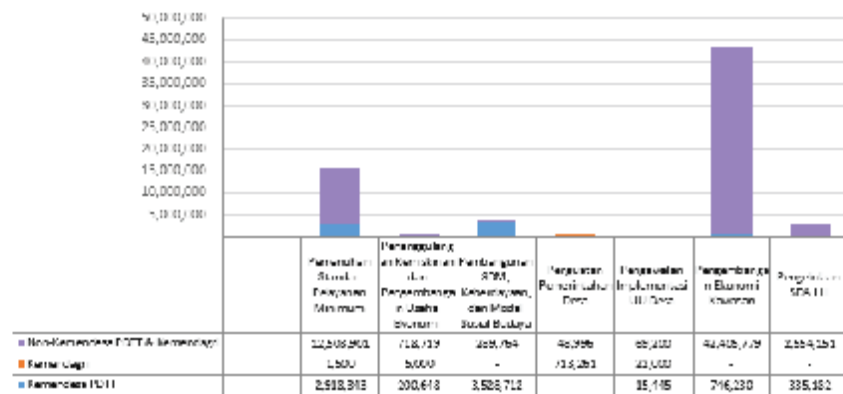
Gambar 3.128 Lokasi Prioritas 5.000 Desa Tertinggal dan 2.000 Desa Berkembang



Provinsi	Target Jumlah Desa 2017 Tertinggal	Berkembang	Provinsi	Target Jumlah Desa 2017 Tertinggal	Berkembang
Ach	390	42	Kabong	99	4
Sulut	282	48	Kalsel	112	10
Sulbar	12	41	Kalm	15	7
Bengkulu	78	5	Kahar	19	1

Provinsi	Target Jumlah Desa 2017		Provinsi	Target Jumlah Desa 2017	
	Tertinggal	Berkembang		Tertinggal	Berkembang
Sumsel	204	19	Sulbar	84	-
Jambi	111	37	Sulsel	18	49
Kep. Babel	4	8	Sutra	134	2
Jambi	52	13	Suteng	97	12
Riau	23	29	Sulut	85	8
Kep. Riau	22	-	Sumbawa	32	3
Banten	43	27	MTB	13	13
Jabar	35	24	NII	252	-
Jateng	57	24	Maluku	38	3
Yogyakarta	-	22	Maluku Utara	50	4
Jatim	95	23	Sabau	52	3
Sul	2	49	Sabau Barat	42	-
Kalim	120	12	OTAI	1.000	1.200

Alokasi Pendanaan Program Prioritas



Gambar 5.119
Alokasi
Pendanaan
Program
Prioritas
Desa dan Kawasan
Perdesaan

Sumber: Alokasi berdasarkan realisasi APBD (angka 25 Maret 2016) (selon dengan data realisasi dan anggaran)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan asas "Desa Membangun" dan "Membangun Desa", di mana "Desa Membangun" memberikan kewenangan kepada Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa beserta masyarakat desa melalui asas pengaturan, pengorganisasian, dan subsidi di dalamnya. Kewenangan kepada Desa ini juga termasuk kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan Desa, yaitu: a) Pendapatan Asli Desa; b) alokasi APBD; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota; d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota; e) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah. Dukungan APBN kepada pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah untuk mendukung penguatan Pemerintah Daerah dalam mendukung kemandirian desa.

3.3.6 PERKOTAAN

Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dimaknai pula dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan atau kota di luar Jawa-Bali. Urbanisasi desa-kota akan semakin meningkat, demikian pula kesenjangan yang menyertainya apabila pembangunan hanya terfokus pada kota-kota atau pada kota-kota di Jawa-Bali. Pembangunan dan penguatan perkotaan di luar Jawa-Bali menjadi fokus pembangunan perkotaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tersebut. Kota-kota perlu disiapkan menjadi Kota Masa Depan yang Berkelanjutan, yang mampu mengelola urbanisasi agar bermanfaat untuk perkembangan kota dan kesejahteraan seluruh masyarakat kota secara berkeadilan. Hal tersebut terutama perlu diwujudkan melalui 4 sasaran pembangunan perkotaan berikut.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Gambar 130
Sasaran Umum
Perkotaan Nasional
Peraturan Menteri
Perkotaan 2017

No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RUMAH 2019
1	Dimunculkannya Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali		1 Kawasan Metropolitan	2 Kawasan Metropolitan	4 Kawasan Metropolitan	5 Kawasan Perkotaan Metropolitan
2	Peningkatan peran dan fungsi sekaligus kemampuan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada		1 Kawasan Perkotaan Metropolitan	2 Kawasan Perkotaan Metropolitan	4 Kawasan Perkotaan Metropolitan	7 Kawasan Metropolitan yang sudah ada
3	Perubahan kota berkembang ke luar Jawa sebagai PKN, PKW dan penyangga urbanisasi di luar Jawa	41 kota belum optimal perannya	1 Kota Otonomi Sedang	5 Kota Otonomi Sedang	10 Kota Otonomi Sedang	20 Kota Otonomi Sedang
4	Dimunculkannya 10 Kota Baru		2 kota baru	4 kota baru	5 kota baru	10 Kota baru

Gambar 130
Arah Kebijakan
Perkotaan
Nasional
Peraturan
Menteri
Perkotaan 2017

Arah Kebijakan

1. Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan
2. Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terapaninya standar pelayanan perkotaan (SPP)
3. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
4. Mengembangkan kota cerdas yang berlaya saing dan berbasis teknologi dan TK
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

- Penguatan kota yang inklusif, menjunjung keberkeadilan, keberagaman, dan keberlanjutan
- Pelayanan terpadu, transparan, efektif dan efisien, berorientasi masyarakat dan keberlanjutan, serta
- Peningkatan kualitas dan efisiensi masyarakat kota
- Mendorong pengetahuan masyarakat kota melalui pendidikan formal dan informal, dan TK
- Penguatan inovasi proses dan inovasi, pelayanan dan pelayanan publik, inovasi organisasi, inovasi perkotaan
- Penguatan budaya yang inklusif, akuntabel, dan partisipatif
- Penguatan inovasi dan kreatifitas masyarakat kota berdasarkan karakter lokalnya

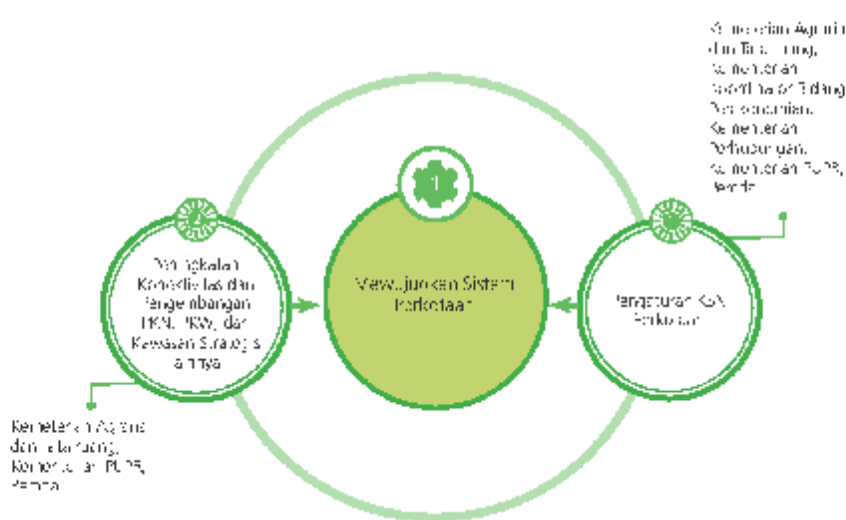
Program Prioritas



Gambar 3.01
Program Prioritas
Pembangunan
Perkotaan "Kota
Layak Huni,
Kota Hijau
Berketahanan,
Kota Pintar
Berdaya Saing"

- Partisipasi Masyarakat
- Inovasi
- Kelembagaan

Kegiatan Prioritas



Gambar 3.02
Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Perkotaan
"Kota Layak
Huni, Kota
Hijau
Berketahanan,
Kota Pintar
Berdaya Saing"

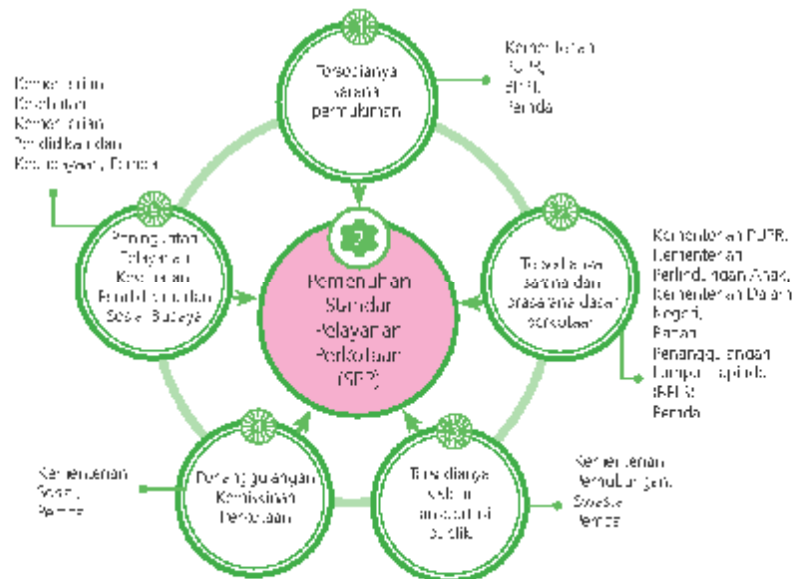
- Kelembagaan
- Inovasi

Kelembagaan
dan Inovasi

Tabel 3.99
Kegiatan
yang
Mewujudkan
Sistem
Perkotaan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1. Mewujudkan Sistem Perkotaan		
1	Pengaturan KSN Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pembangunan perkotaan di 4 KSN Perkotaan (KSN Medanangro, KSN Mammasata, KSN Andotakelohan KVA, Saragaja) 3 Temana Dompok (Tempat Kawasan Metropolitan Baru) 15 Dekumen Studi Kelayakan, DED dan Pembangunan Area Inti, baik pada Kawasan Perkotaan
2	Peningkatan Konektivitas dan Pengembangan PKA, PKA, dan Kawasan Strategis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> 3 dokumen kebijakan, strategis dan program pemataan kawasan perkotaan dan perbatasan kota-kota baru di Kota Madya, Kota Bangang dan Kota Baru Baru Bantuan teknis 15 Kota-kota lain (Peningkatan TET) 8 Rencana dan rencana induk kota-kota baru perbatasan kawasan perkotaan untuk 35 WPS Pembangunan, rehabilitasi/pengembangan 14 terminal bus-tation A Pembangunan 9 (1 km) Jalan KA yang Lingkar Jabodetabek (Wijaya, Pulo, DKL, Lusiata) Pembangunan jalur 25 km MST Jakarta (Coridor North-South) dan Jalur Pembangunan MST Makassar (Coridor East-West) Kualifikasi dan elektrifikasi 17 km Perkeretaapian Komuter KAI Terpadu Kerdus (Keretaapi) Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan Balikpapan - Bukit Tinggi sepanjang 900 m Pembangunan Jalan Bypass Mammasata 1 km Pembangunan Jalan Lingkar Banda Aceh 6 km Pembangunan Jembatan Kuala B. 100 m Pembangunan LRT Jabodetabek sepanjang 43 km Pembangunan jembatan KA antara Makassar - Pangkep sebanyak 13 unit Pembangunan jalur KA elevated di Makassar 3,34 Km Pembangunan pada jalur KA antara Makassar - Pangkep - Selayar DED Perencanaan Jalur KA antara Jayapura - Sorong (termasuk rencana Bandara Sentani (Tahap 1))

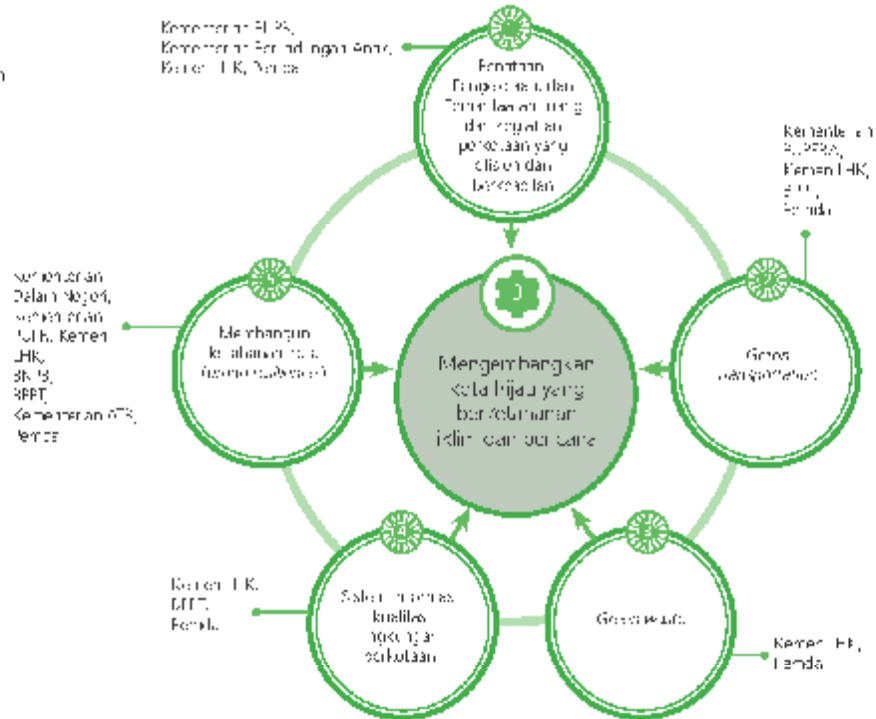
Gambar 3.35
Kegiatan Prioritas
Pemerintah
Sangat
Nyasato
Akses ke SPK



No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2. Penuhian standar pelayanan perkotaan (SPP)		
1	Tersedianya sarana pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan S-P dan pengembangan Kota Layak Huni di 20 kab/kota • Pembangunan 2 Kab/Kota dan rencana teknis di 3 Kab/Kota • Peningkatan kualitas perumahan di 35,42% HA daerah perkotaan • Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan Gedung (KawKota) di 50% kab/kota
2	Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 1.05.260 HA SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan • Pembangunan SPAM Perkotaan sejumlah 251.600 SR • Pembangunan 3.331 PUG SA SPAM di lokasi keramaian • Pembangunan SPAM Regional di 35000 SR • Pembangunan infrastruktur air limbah terpusat skala kotamadya di 10% kab/kota • Pembangunan infrastruktur air limbah terpusat skala regional di 2 kab/kota (2.350 KK) • Pembangunan infrastruktur air limbah terpusat skala kawasan di 33 kab/kota • Pembangunan TPT/SR skala kotamadya di 90 kotamadya • Pembangunan TPA di kotamadya di 49 kab/kota (3.197.000 KK) • Pembangunan TPA Regional di 3 Kab/kota (45000 KK) • Pembangunan infrastruktur drainase di 25 kab/kota (408 ha) • Pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLTU) 38 kotamadya • Pengurangan resiko Lulutan lahar/kebanjiran di 5 kabupaten/kota • Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir 1.100,7 km • Pembangunan Pemeliharaan Yang Dibutuhkan (Mata, Normalisasi, Hoing, Stasiun Pompa dan Kolam Retensi) 28,8 km • Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai yang Dibangun/Ditingkatkan (Breakwater, Seawall) 2,2 km
3	Tersedianya sistem transportasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan 301 unit Bus ERT (Bus Sedeng) dan 184 unit bus ERT bus besar • Pengadaan 1100 unit Angkutan Umum • Pembangunan LRT Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Palembang • Pemasangan SATCS
4	Peningkatan lapangan bisnis dan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya usaha ekonomi produktif bagi 66,1% warga miskin di perkotaan • Pelatihan bagi 1.099 orang meningkatkan usaha ekonomi produktif warga miskin di perkotaan
5	Kondisi layanan kesehatan, terutama di area sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Kabupaten dan Kota yang memiliki omong penyelenggara kursus dan pelatihan sebagai rujukan • 807 PkBM Pemula dan Rumah Bintang yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota • Peningkatan kesakutan kuria masyarakat di perkotaan • 30 Kabupaten/Kota yang melaksanakan uji coba dan Kuesioner Ansa Keket (KI-K) di minimal 50% kecamatan
<p style="text-align: center;">Meningkatkan Kota Yang Layak Huni, Aman, dan Nyaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan hunian terjangkau • Peningkatan sistem sanitasi • Peningkatan air baku, air bersih, sampah dan limbah • Peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan • Peningkatan peran masyarakat komunitas lingkungan kota • Meningkatkan kualitas fasilitas umum dan layanan sektor kehutanan pejalan kaki dan pesepeda, jalan hijau dan aksesibilitas disabilitas • Mengembangkan jasa layanan umum moda transportasi umum • Mengembangkan sistem tiket terpadu dan moda transportasi umum 		

Tabel 3.100
 50) a dan Perkiraan
 Penuhian standar
 pelayanan
 Perkotaan (SPP)

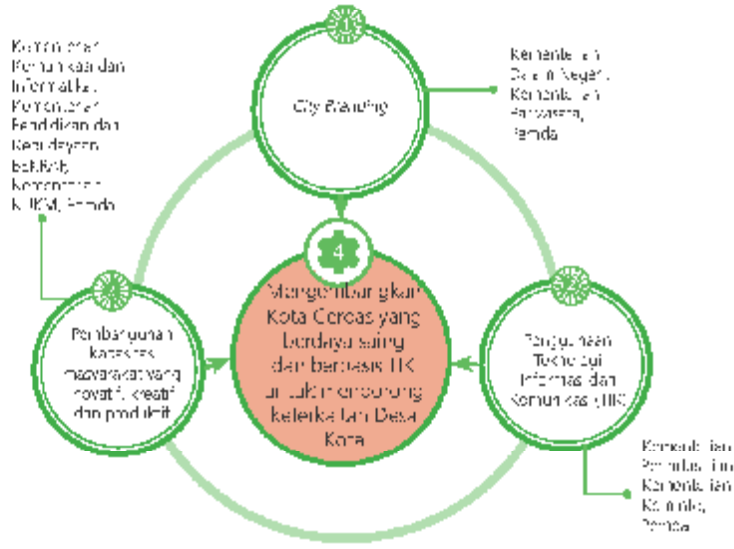
Gambar 3.34
Tajuk 3.101
Membangun ketahanan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana



Tajuk 3.101
Membangun ketahanan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana		
1	Perencanaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berketahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan luas hutan kota sebesar 100 ha • Pengurangan 10% lahan rumah samaah masa subsement
2	Green Building	Peningkatan pemanfaatan berkelanjutan di kota
3	Green Waste	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan sampah di 360 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, topon dan sehat berkelanjutan • Peningkatan infrastruktur air limbah terpusat skala kota di 5 Kota/Kab (≥ 2000 KK) • Peningkatan infrastruktur air limbah terpusat skala komunitas di 11 Kota/Kota (≥ 500 KK)
4	Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana pemantauan kualitas lingkungan perkotaan di 2 kota • Peningkatan status pemantauan perkotaan di 2 kota. <i>Passive Sampler</i> 400 tas/kota
5	Membangun ketahanan kota (<i>urban resilience</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • 15 sub-kota yang teridentifikasi adaptasi, mitigasi, pemenuhan kualitas, dan <i>eco life</i> dan <i>smart city</i> yang di dukung oleh teknologi, EDKIP • Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 20 daerah terdampak ancaman resiko bencana • 20 Komunitas Kebiasaan penanggulangan bencana dan bahaya kesehatan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
	Kota Hijau Yang Berkeadilan iklim dan Berkeadilan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung • Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung • Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung • Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung • Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung • Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung 	

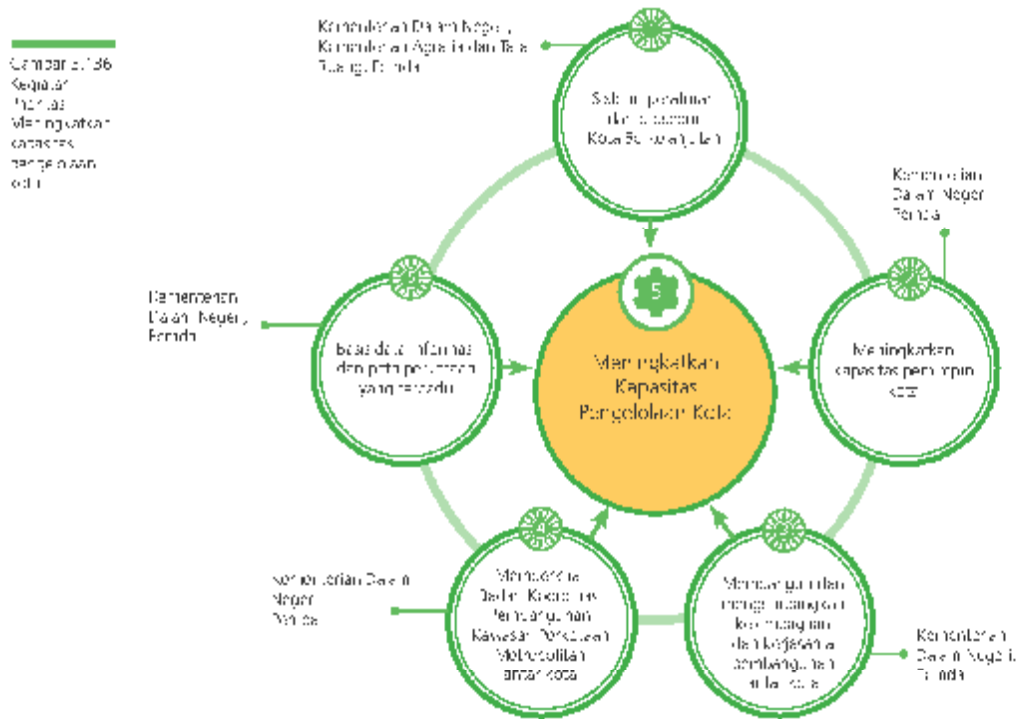


Tabel 3.115
Tipe 4.115
Meningkatkan
Kota Cerdas yang
Berdaya Saing dan
Berbasis IKT

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4. Meningkatkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis IKT		
1	City Branding	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan citra 10 kota sedang sesuai dengan keunggulan daerah/kota • Memahami 250 pemimpin kota terbesar dengan pengelolaan organisasi, kepemimpinan dan 50% berkeadilan
2	Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (IT)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengembangan 5 (lima) Kota Cerdas dan smart city (Smart Industry Cluster (SIC), IKT dan Smart City) • Terkembangkan 40 pusat perbelanjaan dan industri lainnya
3	Pemertanian kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kemitraan -Kemitraan Berkeadilan Berbasis IKT yang Berstandar Nasional, berkeadilan, generatif dan berwawasan pemukiman berkeadilan berkelanjutan (BSP) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota • Pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan pembangunan berbasis keunggulan daerah di 25 super kota berkeadilan mikro

Tabel 3.117
Tipe 4.117
Meningkatkan
Kota Cerdas yang
Berdaya Saing dan
Berbasis IKT

Kota Cerdas Berdaya Saing	
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lingkungan urban dan infrastruktur berbasis teknologi • Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan • Mengembangkan networking informasi perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup berkeadilan • Mengembangkan inovasi kota city branding berbasis keunggulan • Meningkatkan penggunaan pemerintahan • Meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan • Mengembangkan karakter sosial budaya masyarakat untuk meningkatkan modal sosial masyarakat kota • Pengembangan infrastruktur berbasis IKT 	



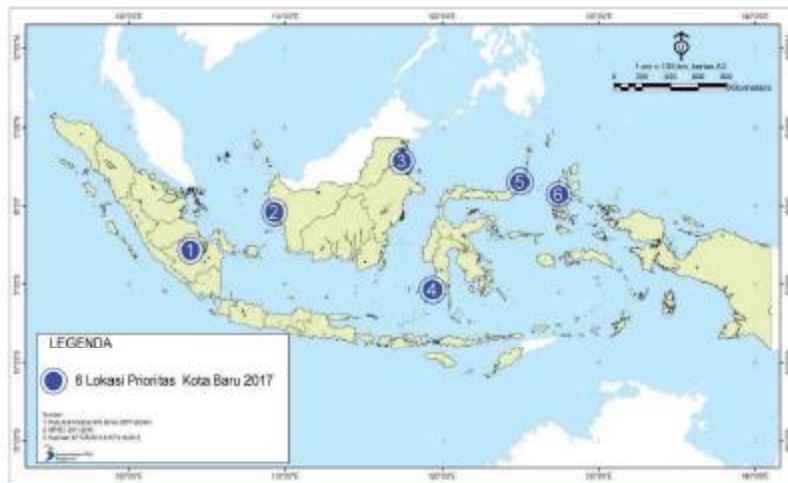
Tabel 5.1.05
Kegiatan
Prioritas
Meningkatkan
kapasitas
pengelolaan
kota

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota		
1	Sistem peraturan dan prosedur (System regulation and procedure)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen NSPK Penyusunan Pedoman (DPU) Kota dan NPKK (Pengaturan Pemerintahan kawasan RTR Kawasan Perkotaan) 1. NSPK Pedoman Pemerintahan Ruang kelurahan KSN
2	Meningkatkan Kapasitas pegawai kota	<ul style="list-style-type: none"> 250 Peminim Daerah perkotaan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kota
3	Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pemanggunan antar kota	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan Sektor kerjasama antar daerah di 8 Kawasan Perkotaan Metropolitan Sistem opy di 14 Kota/Kota Menentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar kota menengah dan kota baru di 10 Kota Sejangka Raya dan jipang
4	Membentuk dan Mengajukan status lantikan kementerian (Formulasi dan Mengajukan status lantikan kementerian Perkotaan Metropolitan)	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan dan mekanisme kerjasama kawasan perkotaan metropolitan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan
5	Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> 7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 kota sedang yang terpadu basis data informasi perkotaan

Persebaran Wilayah



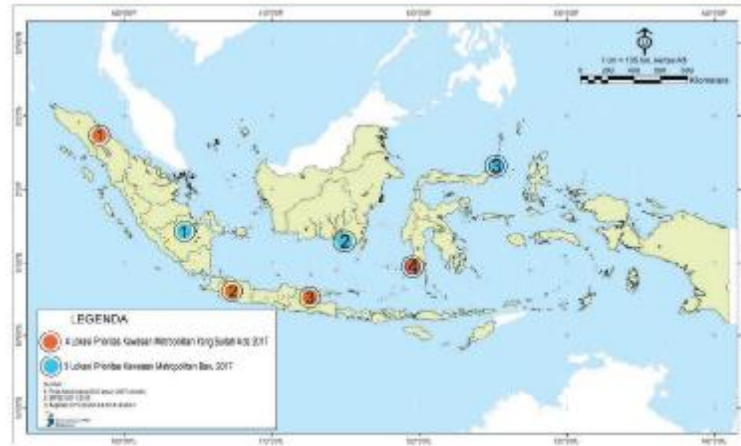
Gambar 3.137
Prioritas Lokasi
Pembangunan
Kota Sedang
Tahun 2017



Gambar 3.138
Peta Prioritas
Lokasi
Pembangunan
Kota Baru Tahun
2017

1. Palembang (Percontohan kota baru untuk mendukung KEK Tanjung Api-Api)
2. Tanjung Selor (Percontohan Kota Baru Pemerintahan)
3. Pontianak (Percontohan Penataan Kota)
4. Makassar (Percontohan Penataan Kota untuk mendukung KSN Mamminasata)
5. Manado (Percontohan kota baru untuk mendukung KEK dan Kawasan Industri Bitung)
6. Sofifi (Percontohan kota baru untuk pemerintahan dan mendukung Kawasan Pariwisata Morotai)

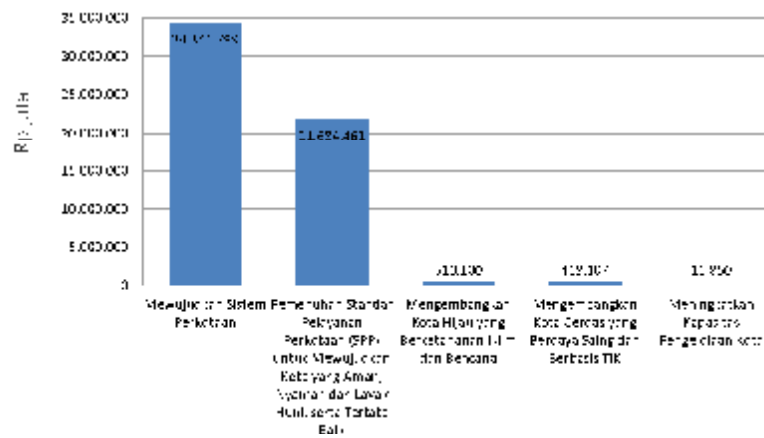
Gambar 3.139
Peta Prioritas
Lokasi
Pembangunan
Kawasan
perkotaan
Metropolitan
tahun 2017



- Kawasan Perkotaan Metropolitan Baru:**
1. Kawasan Perkotaan Patungraya Agung (Kota Palembang, Kab. Banyuwangi, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir)
 2. Kawasan Perkotaan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kab. Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut)
 3. Kawasan Perkotaan Bimindo (Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado)
- Kawasan Perkotaan Metropolitan yang Sudah Ada:**
1. Kawasan Perkotaan Mebidangro (Kota Medan, Kab. Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo)
 2. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat)
 3. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosila (Kota Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan)
 4. Kawasan Perkotaan Maminasata (Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Sungguminasa, Kab. Takalar)

Alokasi Pendanaan

Gambar 3.140
Alokasi
Pendanaan
Pembangunan
Kawasan
Perkotaan



Catatan:
Alokasi berdasarkan rekapitulasi SMAU tanggal 25 Maret 2016 (belum semua alokasi regional diunggulkan)

3.3.7 KONEKTIVITAS

Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas nasional di seluruh Indonesia, dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil. Konektivitas nasional meliputi pembangunan jaringan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika secara terpadu untuk memperlancar distribusi barang dan informasi, menekan biaya transportasi dan biaya logistik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan memperkuat daya saing nasional.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
a.	Perwakilan Palubuhan Non Komersial (ekspat)	163	40	45	40	163 (kumulatif)
b.	Rata-rata <i>Availability time</i> (hari)	7,8	5,6	4,5	4,5	3,4
c.	Investasinya jalan tol (Rp. Jam-jarak-jalan-januar (km))	454,43	186,98	519,49	400,9	1.258 (kumulatif)
d.	Investasinya jalan baru (km)	1.268	512	490	500,5	2.680 (kumulatif)
e.	Pengembangan jalan tol (km)	820	135	101	2,3	1.000 (kumulatif)
f.	Tersedianya bandara baru / peningkatan bandara yang ada	-	1	10 (lanjutan)	15 (lanjutan)	15 (kumulatif)
g.	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek)	76	86	93	140	195
h.	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek)	181	210	219	337	387
i.	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)	113	216	228	240	263
j.	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek)	206	217	236	324	470
k.	Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)	3	4	4	4	5
l.	Meningkatnya Pangsa pasar angkutan umum (%)	29	34	36	38	39
m.	Berkembangnya jaringan kereta api di kawasan (kota)	7	8 (kumulatif)	5 (kumulatif)	7 (kumulatif)	10 (kumulatif)
n.	Berkembangnya sistem BRT dan Transi (kota)	17	17 (kumulatif)	20 (kumulatif)	33 (kumulatif)	44 (kumulatif)
o.	Menurunnya biaya angkut kendaraan kereta api (kerelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)	0,042	0,039	0,035	0,032	< 0,027
p.	Menurunnya angka fatalitas korban kerelakaan transportasi jalur 75 dari kondisi baseline)	16	10	16	6	50
q.	Jaringan tulang punggung serat optik nasional di sukota kabupaten/kota	372	400 (kumulatif)	442 (kumulatif)	446 (kumulatif)	514 (kumulatif)

Tabel 3.14
Sasaran Umum
Pilar ke-3
Konektivitas
Nasional dan
RPJMN 2019-2019

Gambar 3.41
Arah Kebijakan
Kemampuan
Sistematis
Nasional

Arah Kebijakan

Arah kebijakan konektivitas nasional antara lain:

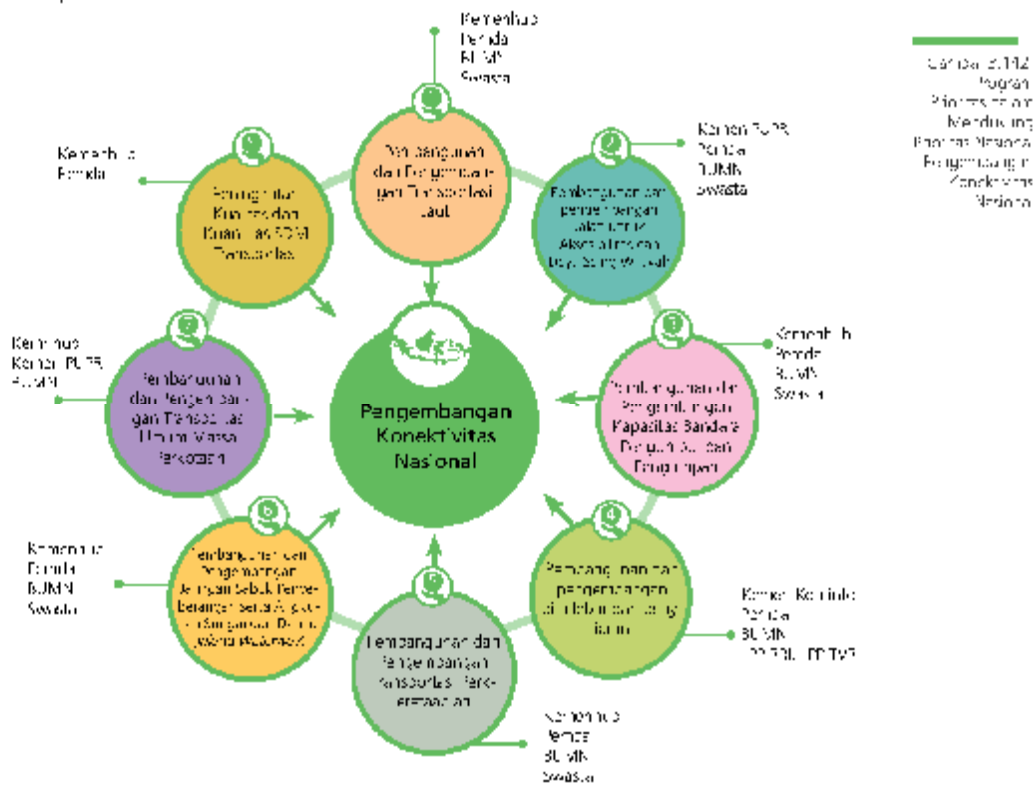
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan terutama pembangunan jalan berbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua, penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan memastikan penyelesaian pembebasan lahan
2. Mempromote penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api terutama Lintas selatan Jawa, jalur kereta api Lintas Sumatera dan Sulawesi serta memulai pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Papua
3. Meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis, seperti Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, serta aksesibilitas pada wilayah terpencil, perbatasan dan daerah tertinggal
4. Mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan melalui pembangunan fasilitas dan sistem angkutan umum massal yang modern, maju, aman, nyaman dan harga yang terjangkau, baik berbasis jalan rel maupun *bus rapid transit* yang terintegrasi dengan simpul simpul transportasi lainnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota
5. Mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas antar pulau (to laut) yang terintegrasi dengan simpul mode transportasi lainnya
6. Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara baik sebagai pengumpul dan pengumpan, terutama bandara pada pintu-pintu utama pariwisata, serta bandara-bandara lainnya untuk mendukung aksesibilitas dan perekonomian wilayah dan penanganan bencana
7. Mendorong pengembangan industri nasional dan pemanfaatan produk industri dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan daya saing industri nasional
8. Meningkatkan standar keselamatan pelayanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan internasional, serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang telah mempertimbangkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan memberikan dampak minimum terhadap lingkungan
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM transportasi yang berkompetensi baik melalui penerapan standar kompetensi dan peningkatan kualitas fasilitas sarana-sarana pendidikan yang mengacu kepada standar internasional
10. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan USO (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband-ready*, yaitu (a) menyusun ulang definisi dan ruang lingkup Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) untuk mengkomodasi pita lebar; (b) melakukan reformulasi kebijakan penggunaan KPU yang lebih berorientasi kepada ekosistem pita lebar; dan (c) memperkuat kelembagaan pengelola Dana KPU.

Kebijakan Terkait Revolusi Mental

1. Pembangunan yang berorientasi kepada reformasi
2. Efisiensi dan efektivitas tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merete dan membangun maritim
3. Meningkatkan hukum dan disiplin

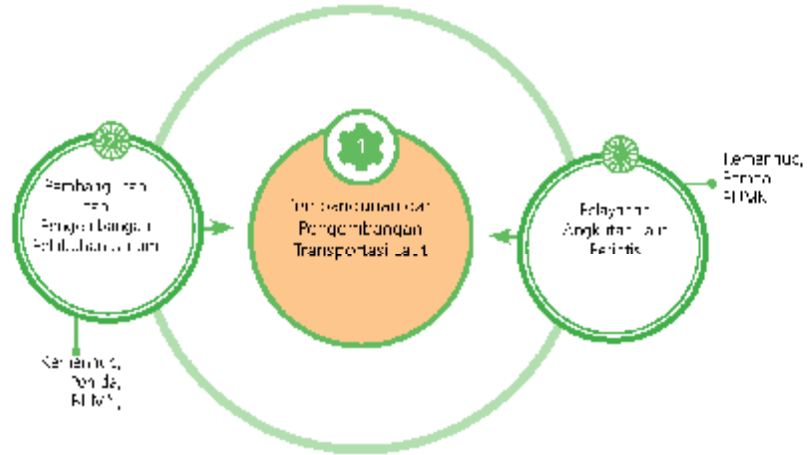
Program Prioritas

Prioritas nasional dalam pembangunan konektivitas mencakup 8 (delapan) program prioritas, yaitu: (1) pembangunan dan pengembangan transportasi laut; (2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah; (3) pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan; (4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran; (5) pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian; (6) pembangunan dan pengembangan penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (*inland waterway*); (7) pembangunan dan pengembangan transportasi umum massal perkotaan; serta (8) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi.



Gambar 2.114
Tugan
Prioritas dalam
Mendukung
Pembangunan
Konektivitas
Nasional

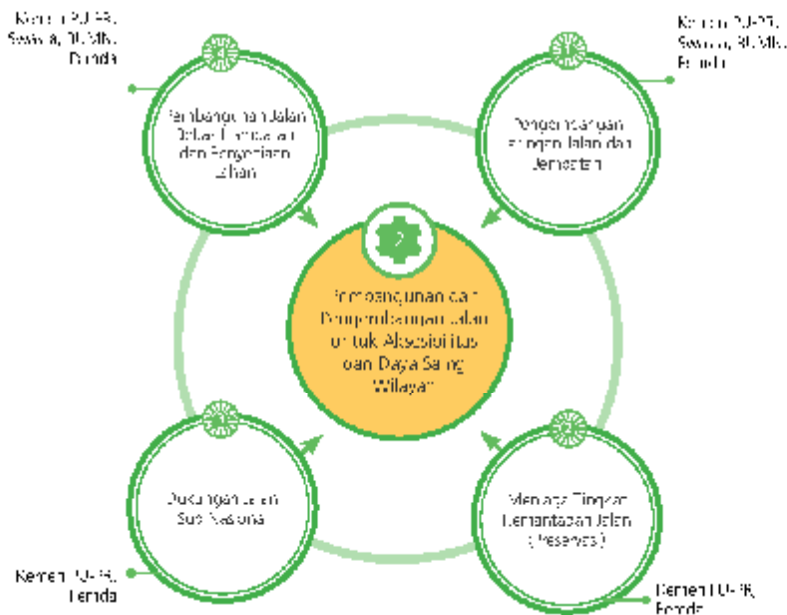
Gambar 3.174
Segitiga
Pelayanan
dan
Pengembangan
Transportasi Laut



Tabel 3.165
Program
Prioritas
dan
Pengembangan
Perairan
Laut

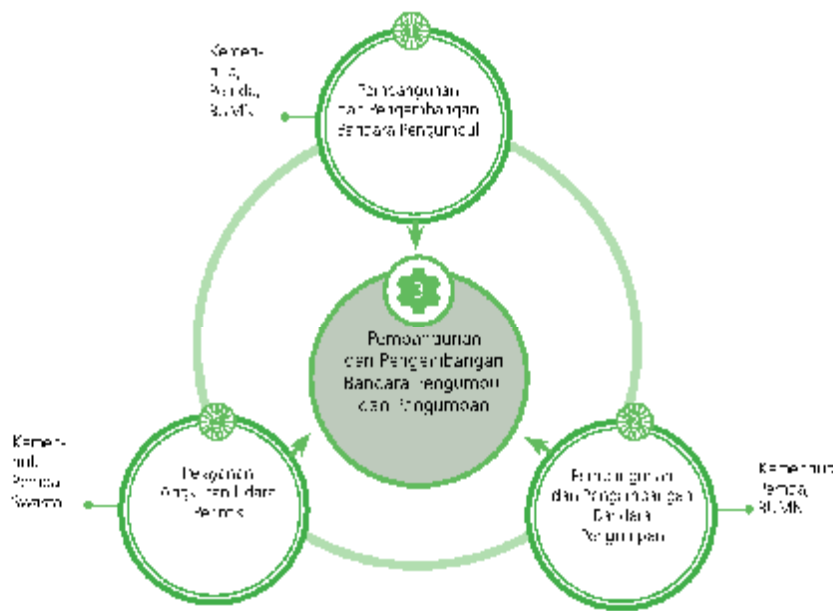
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Laut	
1	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sebulan non komersial di 40 lokasi Rata-rata jessing beroperasi 3-4 hari
2	Pelayanan Angkutan Laut Perintis	Tersedianya subsidi perintis angkutan laut 100 trayak

Gambar 3.174
Kegiatan
Pelayanan
dan
Pengembangan
Jalan untuk
Aksesibilitas
dan Daya Saing
Wilayah



No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Pembangunan dan Pengembangan Jalan untuk Aksesibilitas dan Daya Saing Wilayah	
1.	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dan Pemeliharaan Lulutan	Pembangunan jalan tol sepanjang 200 km (termasuk anjungan tol baru)
2.	Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan baru sepanjang 503,5 km
3.	Meningkatkan Jumlah dan Mutu Jalan (Perkusasi)	Presensi jalan sepanjang 47.017 km dengan kualitas minimum 95%
4.	Dukungan Jalan Sub-Nasional	Penanganan jalan sub-nasional sepanjang 100 km

Tabel 3.116
Kegiatan
Misi
perencanaan
dan Pengembangan
Sektor
Kawasan
Aksesibilitas
dan Daya
Saing Wilayah

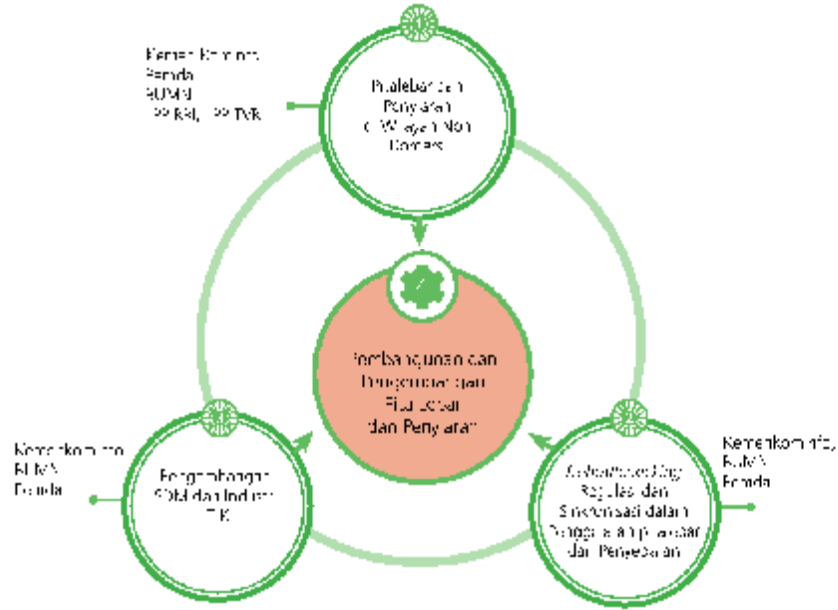


Gambar 3.145
Kegiatan
Misi
Kegiatan
prioritas
Perencanaan
dan Pengembangan
Sektor
Perencanaan
Pengumpan

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Bandara Pengumulan dan Pengumpan	
1.	Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pengumulan	Pembangunan dan Pengembangan bandara di 8 lokasi
2.	Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pengumpan	Pembangunan dan Pengembangan bandara di 101 lokasi
3.	Insentif Aneka dan Usaha Perintis	Jumlah insentif Perintis Aneka dan Usaha 140 milyar

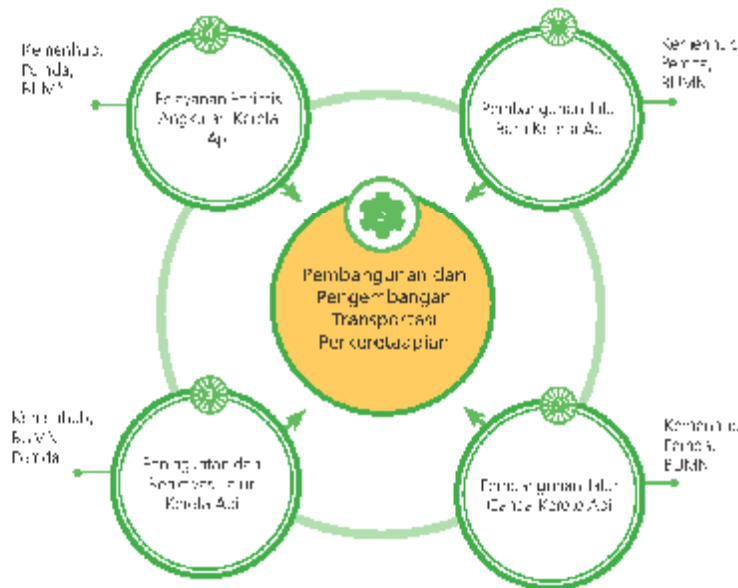
Tabel 3.117
Kegiatan
Misi
Perencanaan
dan Pengembangan
Sektor
Perencanaan
Pengumpan

Tabel 3.116
Rencana
Morfologi
Perencanaan
dan
Pengembangan
Pelayanan
Persebaran



Tabel 3.104
Rencana
Morfologi
Perencanaan
dan
Pengembangan
Pelayanan
Persebaran

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Perencanaan dan Pengembangan Pita Lebar dan Persebaran	
1.	Pelayanan dan Persebaran di Wilayah Non Komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan tulang punggung serat optik nasional di 446 kota dan kabupaten/skota • Penertasan jangkauan siaran 57,04% dan jangkauan populasi 68% dalam negeri (LPF TVR) • Persentase jangkauan siaran 84% dan angka rasio populasi 88% dalam negeri (LPF TVR)
2.	Disinambatkan Teknologi dan Sinkronisasi dalam Pengalokasian Pita Lebar dan Persebaran	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pertambahan cakupan frekuensi siaran 350 Mhz untuk Mobile Broadband mencapai 50%
3.	Pengembangan SDA Industri IT	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah investasi anggaran industri konten, program link and match berdasarkan data dan informasi mencapai 2000 orang

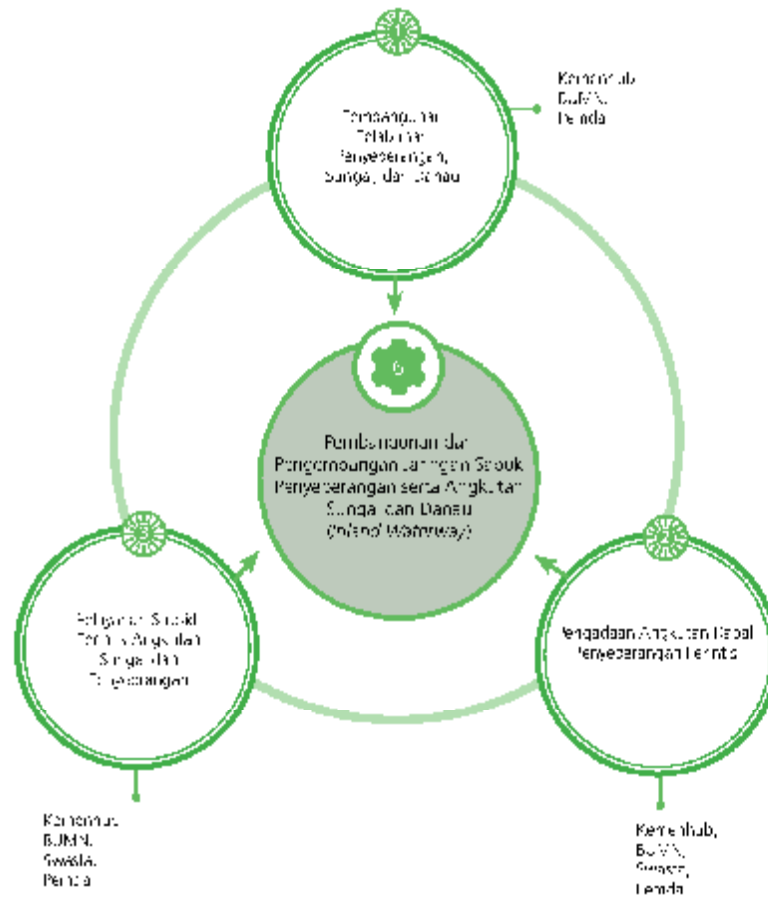


Terdapat 147 kegiatan prioritas dan 11 tindakan strategis yang terdapat pada kerangka

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Pemangunan dan Pengembangan Transportasi Perkeretaapian	
1.	Pembangunan Jalur Baru Kereta Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jalur KA, termasuk jalur ganda sepanjang 647 Km
2.	Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kereta api berkecepatan di 7 kota (kumulatif) • Meningkatkan volume angkut berkecepatan kereta api menjadi 0,032 (kecelakaan per 1 juta km perjalanan kereta api)
3.	Peningkatan dan Reaktivasi Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyediaan akses internet di wilayah non-komersial 800 lokasi • Penyediaan Susirol Perintis Angkutan kereta Api 4 Unit
4.	Pelayanan Prinsip Angkutan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan VCI (Kereta Cepat)

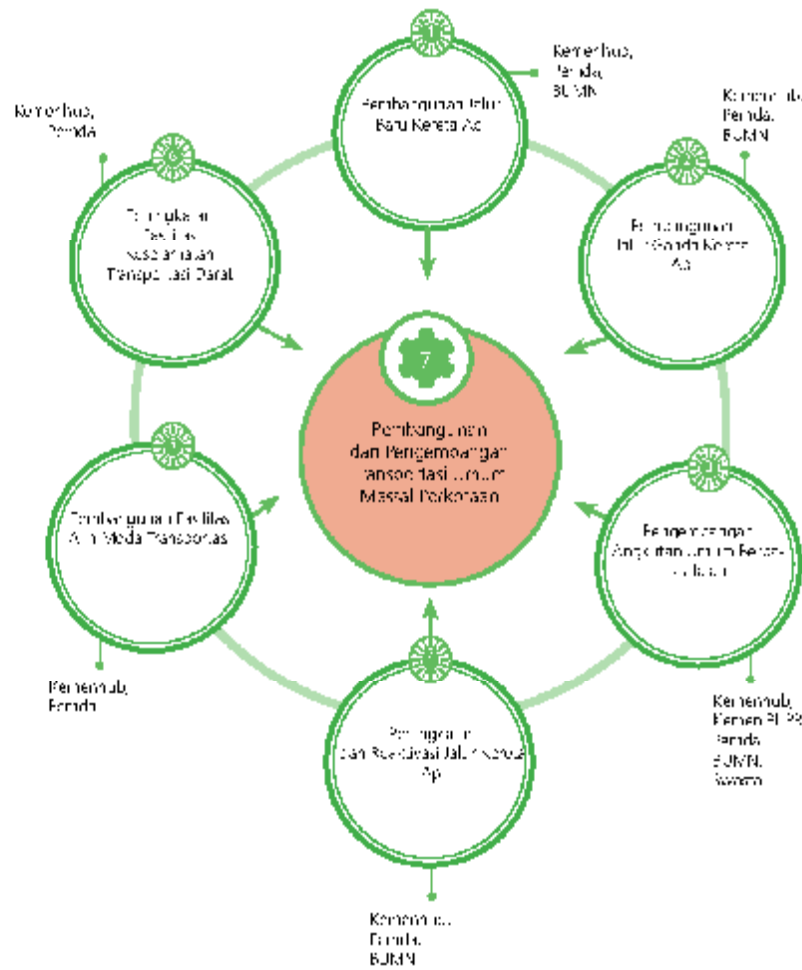
Terdapat 109 kegiatan prioritas dan 11 tindakan strategis yang terdapat pada kerangka

Daftar DUKO Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai Penyelenggara antara Angkatan Sungai dan Darau (MSWAW)



Daftar DUKO Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai Penyelenggara antara Angkatan Sungai dan Darau (MSWAW)

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
6.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Saouk Penyeberangan serta Angkutan Sungai dan Darau (MSWAW)	
1.	Pemertanian Polaouhan Pengembangan, dan Darau	terbangunnya 15 unit Penyediaan 15 Unit
2.	Pengadaan Angkutan Kapal Penyeberangan Perintis	tersedianya 12 Kapal Penyeberangan Perintis
3.	Dikembangkan dan S Angkutan Sungai dan Penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya 15 unit Penyediaan 15 Unit tersedianya 15 unit Penyediaan 15 Unit tersedianya 15 unit Penyediaan 15 Unit



Lampiran 110
Regulator
horas
Pembangunan
dan Pengembangan
Transportasi
Jalur Masa
Berkehadiran

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
7.	Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Umum Masal Perkotaan	
1.	Pembangunan Jalur Baru Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Angkutan Massal Cepat Berbasis Rel (MRT, Jalur Layang Kereta Api, RT, Tram, dan Heliktilasi)
2.	Peningkatan Infrastruktur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kereta perkotaan di kota-kota besar lain (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar)
3.	Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan BRT di 25 kota besar Penyediaan P3C untuk Angkutan Umum Masal Perkotaan
4.	Peningkatan dan Rencanai Jalur Kereta Api	
5.	Pembangunan Fasilitas Angkutan Umum Berbasis Jalan	
6.	Peningkatan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	

Tabel D.111
Kegiatan
horas
Pembangunan
dan Pengembangan
Transportasi
Jalur Masa
Berkehadiran

Gambar 3.110
Slogan
Pilot
Unit (Pilot
Unit) akan
meningkatkan
jumlah SDM
transportasi



Tabel 3.112
Slogan
Pilot
Unit (Pilot
Unit) akan
meningkatkan
jumlah SDM
transportasi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
8.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Transportasi	
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Tersedianya lulusan diklat SDM transportasi bersertifikat berasal dari aparaturnya 72.350 orang
2.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Tersedianya lulusan diklat SDM transportasi bersertifikat berasal dari masyarakat 12.520 orang
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	Tersedianya lulusan diklat SDM transportasi bersertifikat berasal dari masyarakat 25.897 orang dan pesawat latihan 1 unit
4.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	Tersedianya lulusan diklat SDM transportasi bersertifikat berasal dari masyarakat 99.784 orang dan kapal latihan latihan 6 unit

Kegiatan Prioritas

1. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Laut

Pembangunan transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah kepuatan yang baik dan handal akan difokuskan pada implementasi Sistem Tol Laut pada 10 Pelabuhan Hub Strategis dengan tujuan untuk menurunkan biaya logistik dan pemertaan ekonomi; melakukan revitalisasi alayaran rakyat melalui pengembangan *standard design* dan *prototype* PHKA dan metode verifikasi dan asuransi yang sesuai, serta mengembangkan keperintihan dalam kebijakan transportasi laut. Pada tahun 2017 pembangunan kapal angkutan laut perintis, diprioritaskan untuk melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan multiyears.

PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK Mendukung KONEKTIVITAS

Kalimantan

1. Balikpapan
2. Mahakam

Sulawesi

1. Bau-Bau
2. Barrangmene
3. Puputan
4. Palopo
5. Sore
6. Wotahala

Papua

1. Sentani
2. Kaimana
3. Managi
4. Nabire
5. Orlau
6. Wamena

Sumatra

1. Pelabuhan
2. Dinkuh
3. Barus
4. Nibali
5. Dumai
6. Tanjung Moco
7. Padang-Musi
8. Subi
9. Batu Pajang
10. Labuhan Angin
11. Pelabuhan Ketek

Nusa Tenggara

1. Labuhan Baji
2. Dong
3. Rao
4. Kolano
5. Larabuka
6. Numban
7. Sebu

Kep. Maluku

1. Daruba
2. Wayabula
3. Tobelo
4. Tobong
5. Sualafa
6. Saeriki
7. Tul

IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT 2017

Implementasi Sistem Tol Laut pada 5 Pelabuhan Hub Strategis:

- Pengerukan kolam dan alur pelabuhan Hub min - 12m untuk mendukung penggunaan kapal Panamax (3.000 – 4.000 TEUS) yang bergerak dengan rute pendulum

- Sistem Pelayanan di Pelabuhan adalah *WINDOWS* (bukan *first in first out*) dengan produktivitas Bongkar/Muat Max 1 Etmal (24 jam)
- Kapasitas *Container Yard* yang memadai

- Pelayanan pelabuhan pengumpan beroperasi 24 jam, sehingga karantina juga diperlukan 24 jam
- Biaya Bongkar/Muat yang efisien, demonopolisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Gambar 3.151 Pelabuhan Hub dan Feeder Tol Laut dan Konsep Implementasi Tahun 2017

Pengembangan 40 lokasi Pelabuhan Non Komersil

Dwelling time rata-rata 3-4 hari

Subsidi Perintis Angkutan Laut pada 100 trayek

Gambar 3.152 Pelayaran Rakyat

PELAYARAN RAKYAT 2017

Konektivitas Pulau-Pulau Kecil dan Sub Feeder Tol Laut

- Pengembangan standar *design* atau *prototype* kapal PELRA
- Penyusunan skema sertifikasi dan asuransi yang sesuai
- Penusunan skema subsidi operasional PELRA untuk mendukung keberintisan
- *Bottlenecking* peraturan perundangan
- Peningkatan Kapasitas & Sertifikasi SDM PELRA

Revitalisasi Pelayaran Rakyat:

2. Pembangunan dan Pengembangan Jalan untuk Aksesibilitas dan Daya Saing Wilayah

Pengembangan jaringan jalan nasional diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, serta jalan akses terhadap pelabuhan dan bandara. Pembangunan jalan perbatasan direncanakan akan tuntas pada akhir tahun 2019. Sementara itu pembangunan jalan bebas hambatan (tol) difokuskan terhadap percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Jabodetabek, penyelesaian jalan tol Trans Jawa dan Non-Trans Jawa, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung.

Gambar 3.153
Kondisi Jalan di Perbatasan Kalimantan



Pembangunan infrastruktur jaringan jalan diharapkan dapat meningkatkan kecepatan rata-rata pada koridor utama menjadi 2,4 jam per 100 Km. Pencapaian pembangunan jalan baru dan jalan bebas hambatan secara kumulatif sampai tahun 2017 sepanjang 1.444 Km dan 468 Km akan mendukung kenaikan kondisi mantap jalan nasional hingga 96 persen.

Gambar 3.154
Rencana Pembangunan Jalan Tol



3. Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Bandara Pengumpul dan Pengumpan

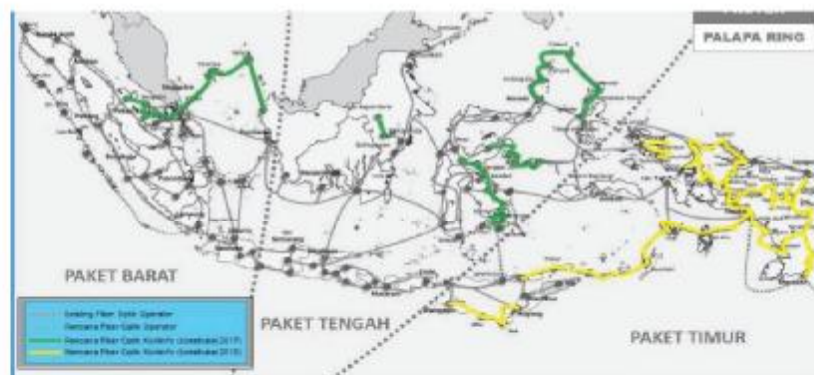
Fokus utama pembangunan bandara adalah melanjutkan pembangunan bandara baru pada 15 (lima belas) lokasi. Dalam rangka mendukung aksesibilitas dan perekonomian wilayah, dilakukan pengembangan bandara dengan perpanjangan landasan pacu untuk dapat didarati pesawat sejenis ATR 42, ATR 72 dan Boeing 737 serta pengembangan terminal penumpang. Sedangkan untuk mendukung penanganan bencana dilakukan peningkatan bandara di daerah rawan bencana sehingga dapat didarati pesawat sejenis Hercules C-130. Selain itu, menyediakan subsidi angkutan perintis untuk 240 rute penerbangan.



Gambar 3.155
Kebijakan
Transportasi
Udara

4. Pembangunan dan Pengembangan Pita Lebar dan Penyiaran

Pembangunan infrastruktur *broadband* dan penyiaran difokuskan melalui tiga prioritas, yaitu: (1) pita lebar dan penyiaran di wilayah non komersil, (2) *debottlenecking* regulasi dan sinkronisasi dalam penggelaran pita lebar dan penyiaran, serta (3) pengembangan SDM dan Industri TIK.



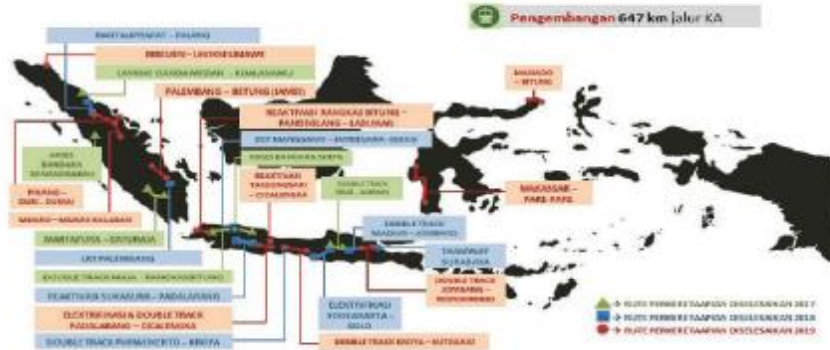
Gambar 3.156
Kegiatan
Prioritas Pita
Lebar dan
Penyiaran

5. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkeretaapian

Fokus utama pembangunan perkeretaapian yang akan dicapai di tahun 2017 adalah penyelesaian jalur ganda lintas selatan Jawa, jalur KA Trans Sumatera antara lain Bireun-

Lhokseumawe, Rantau Prapat-Duri-Dumai-Jambi-Pelambang, Muaro - Muaro Kalaban; jalur ganda Martapura - Baturaja, Jalur ganda dan elektrifikasi jalur KA perkotaan Bandung, dan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta – Solo; Jalur Layang Ganda KA Medan – Bandara Kualanamu; Pembangunan/reaktivasi jalur tram Kota Surabaya; LRT Jabodetabek dan Palembang; *Double-double track* dan elektrifikasi jalur KA lintas Manggarai – Bekasi – Cikarang; Akses Jalur KA ke pelabuhan dan bandara; mempercepat pembangunan Kereta Api Sulawesi pada lintas Makassar-Parepare, Manado - Bitung serta memulai persiapan pembangunan Kereta Api Kalimantan dan Papua.

Gambar 3.157 Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkeretaapian



6. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Sabuk Penyeberangan serta Angkutan Sungai dan Danau (Inland Waterway)

Transportasi penyeberangan berperan sebagai "mobile bridge" serta melayani Short Sea Shipping untuk angkutan penumpang, kendaraan, dan barang. Pembangunan transportasi penyeberangan pada tahun 2017 diarahkan pada penyelesaian Sabuk Utara penyeberangan, serta lintas penghubung antara Sabuk Selatan, Sabuk Tengah dan Sabuk Utara yang terkoneksi dan saling melengkapi dengan moda lainnya (Jalan, Kereta api, Tol Laut, Sungai dan Danau); mempercepat penyelesaian pelabuhan-pelabuhan penyeberangan perintis dan pembangunan kapal perintis; menyediakan subsidi operasi perintis dan memperluas area layanan, serta menambah layanan trip perintis.

Gambar 3.158 Pembangunan Jaringan Sabuk Penyeberangan



Selain itu, pengembangan angkutan sungai dan danau ditujukan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dalam mendukung aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil dan pedalaman yang memiliki sungai-sungai yang dapat dilayari melalui pembangunan dermaga sungai dan danau.

7. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Umum Masal Perkotaan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan transportasi umum masal perkotaan, maka ditetapkan fokus utama sebagai berikut:

- Mengembangkan sistem angkutan umum masal yang modern, maju, aman, nyaman dan harga yang terjangkau baik berbasis jalan rel maupun *bus rapid transit* yang saling terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi lainnya yang didukung penyediaan dana PSO dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan Transportasi Umum Masal Perkotaan.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota melalui membangun jalan lingkar, simpang susun (*flyover*) dan *underpass* untuk mengurangi kemacetan di persimpangan maupun perlintasan agar tidak sebidang dengan kereta api.
- Mengembangkan implementasi pembatasan permintaan perjalanan melalui pemanfaatan teknologi, integrasi dengan perencanaan fasilitas non motorized transport (NMT) dan perencanaan tata ruang lainnya; penataan angkutan umum perkotaan yang telah ada untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan sesuai standar pelayanan minimum (SPM) serta terintegrasi dengan simpul-simpul sistem angkutan umum masal.
- Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui pembentukan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan terpadu lintas wilayah administrasi.



Gambar 3.159
Kebijakan
Transportasi
Perkotaan

8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi

Daam rangka mencapai sasaran terwujudnya sumber daya manusia yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handa serta berorientasi zero accident. Diperlukan strategi untuk mengelola pendidikan, pelatihan bar

penyuluhan transportasi yang profesional untuk menciptakan kapasitas dan kualitas SDM sesuai kebutuhan, serta membangun organisasi yang efektif dengan SDM kompeten, dan sistem informasi yang handal dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Gambar 3.160 Kebijakan Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi



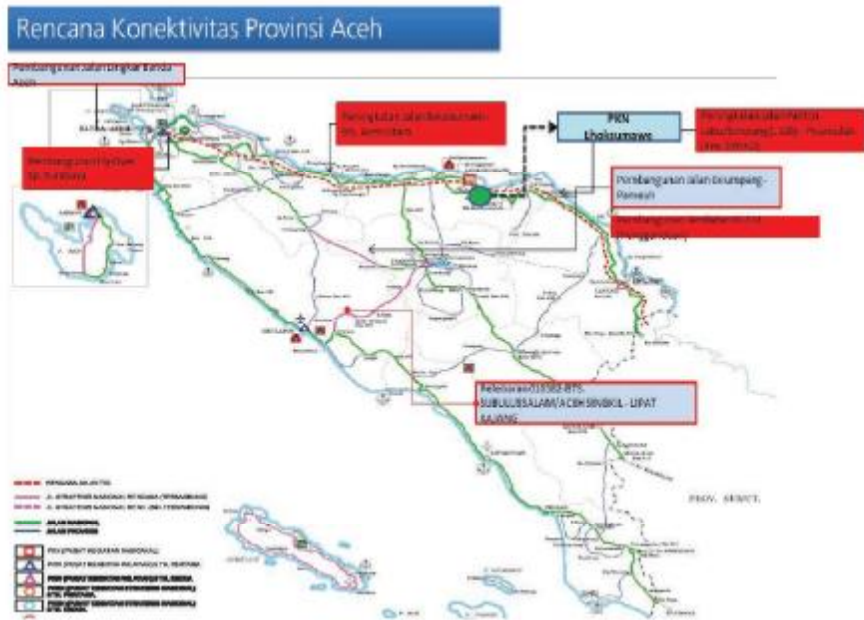
Alokasi Pendanaan Program Prioritas

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.94, alokasi pendanaan yang paling besar ditujukan untuk prioritas pembangunan aksesibilitas yang mendukung kawasan strategis yang akan dilaksanakan baik oleh Kementerian Perhubungan maupun Binamarga, Kementerian Pekerjaan Umum.

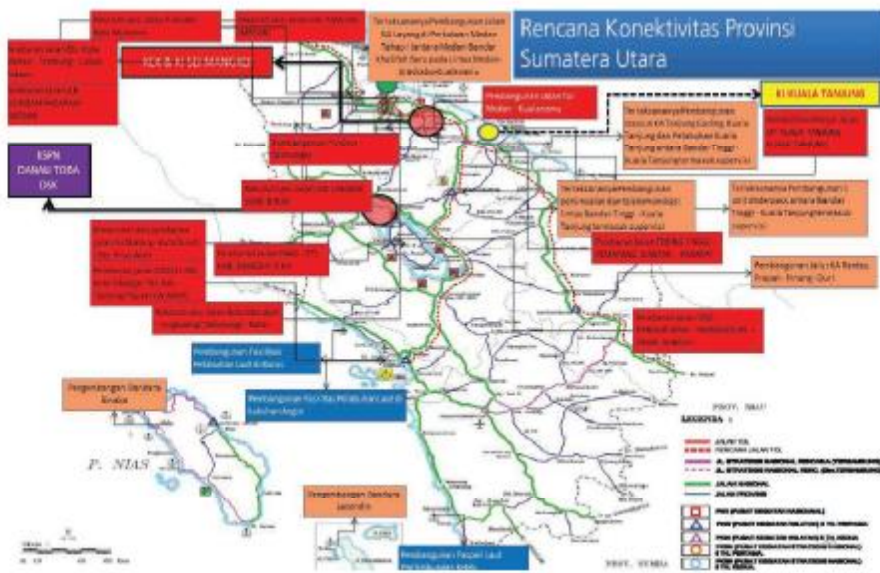
Gambar 3.161 Alokasi Pendanaan Program Prioritas Konektivitas Nasional Dimensi Pemerataan Wilayah



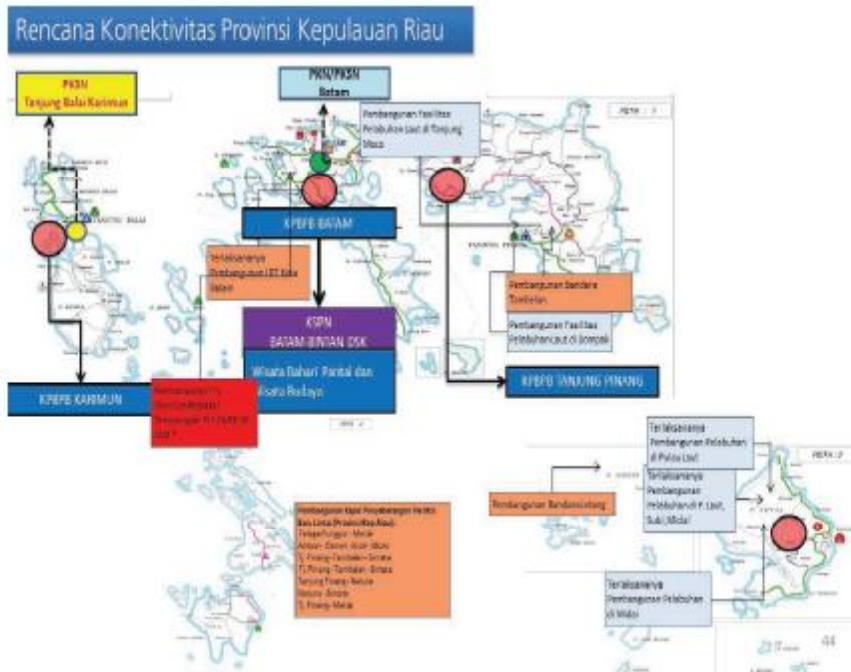
Catatan : Berdasarkan rekapitulasi SIMU dan Pagu Indikatif tanggal 20 April 2016 (belum termasuk DAK dan belum semua alokasi kegiatan yang tidak terakomodir dalam SIMU)



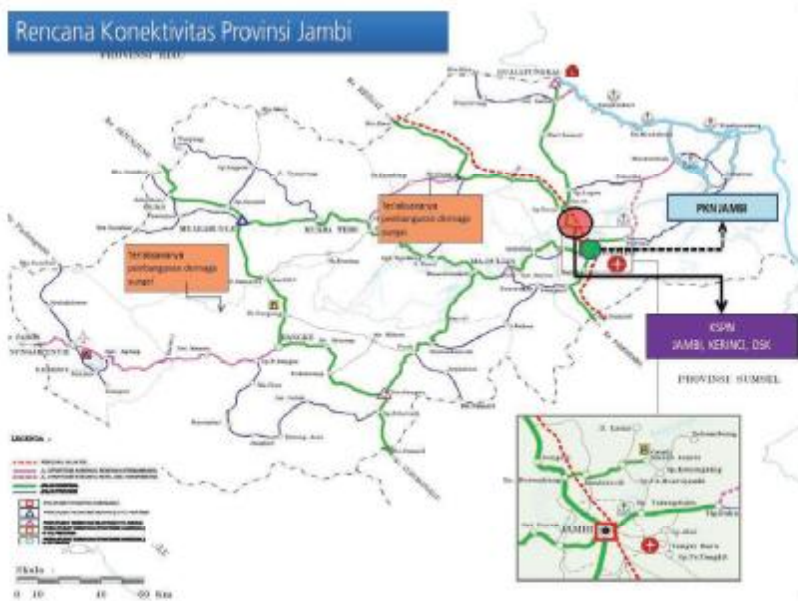
Gambar 3.162 Rencana Konektivitas Provinsi Aceh



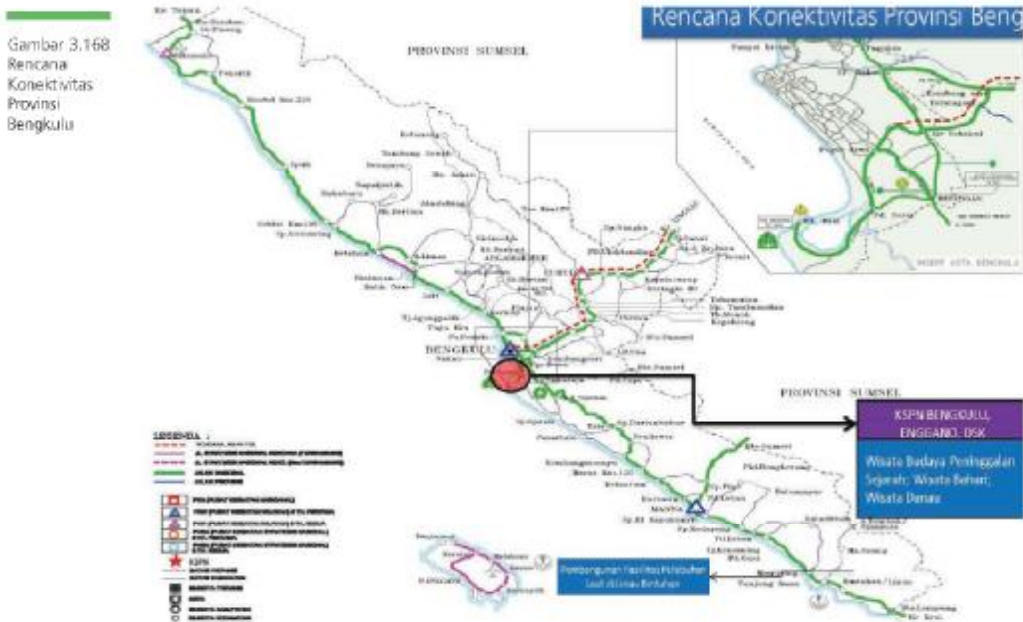
Gambar 3.163 Rencana Konektivitas Sumatera Utara

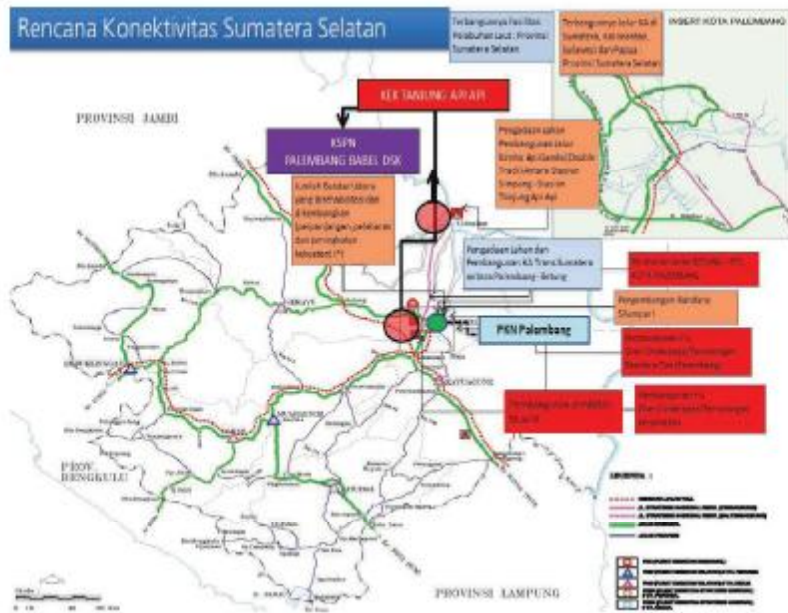


Gambar 3.166
Rencana
Konektivitas
Provinsi Riau



Gambar 3.167
Rencana
Konektivitas
Provinsi Jambi



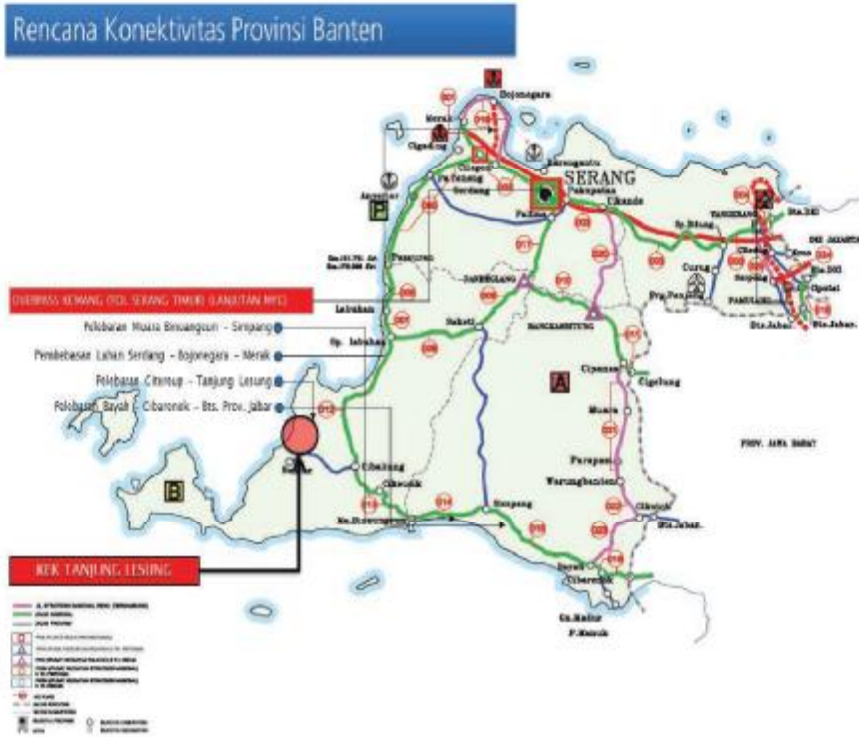


Gambar 3.170 Rencana Konektivitas Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 3.171 Rencana Konektivitas Provinsi Lampung

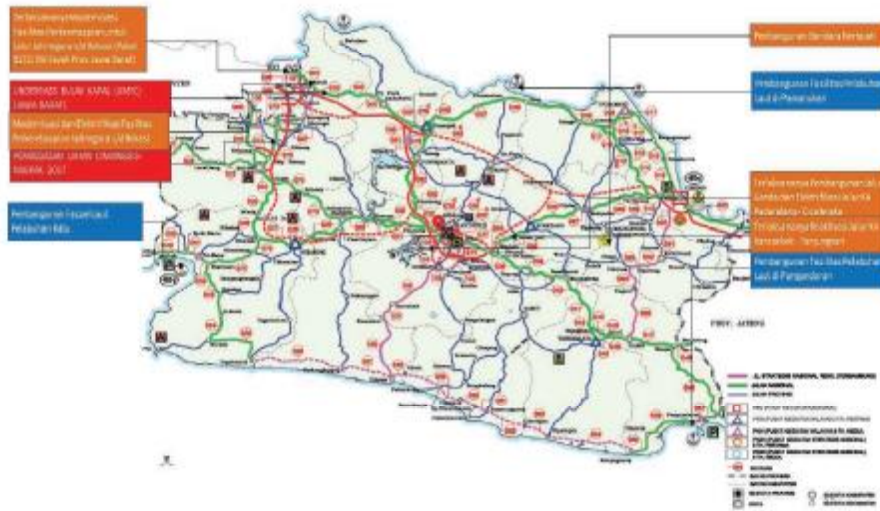
Gambar 3.172
Rencana
Konektivitas
Provinsi Banten



Gambar 3.173
Rencana
Konektivitas
Provinsi DKI
Jakarta



Rencana Konektivitas Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.174 Rencana Konektivitas Provinsi Jawa Barat

Rencana Konektivitas Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.175 Rencana Konektivitas Provinsi Jawa Tengah

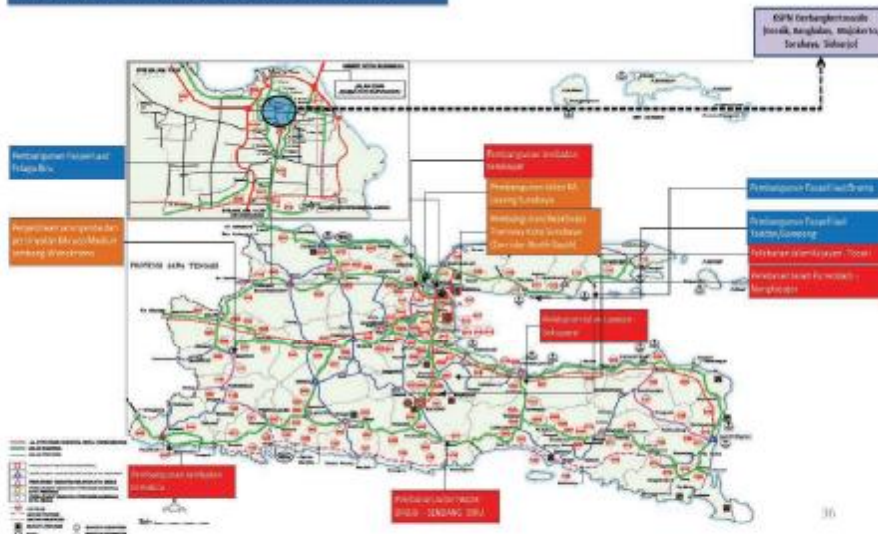
Gambar 3.176
Rencana
Konektivitas
Provinsi DI
Yogyakarta

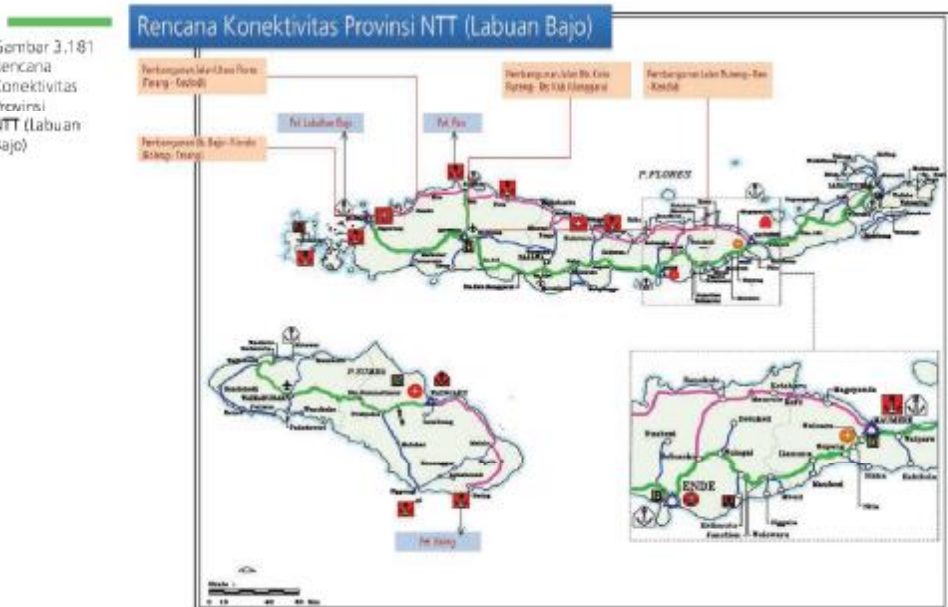
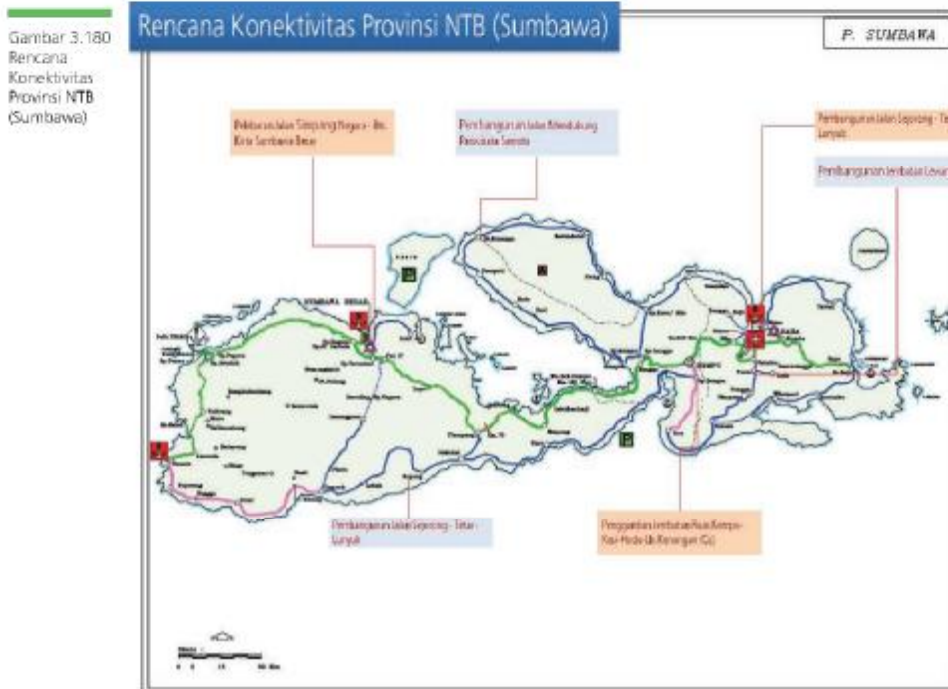
Rencana Konektivitas Provinsi DI Yogyakarta



Gambar 3.177
Rencana
Konektivitas
Provinsi Jawa
Timur

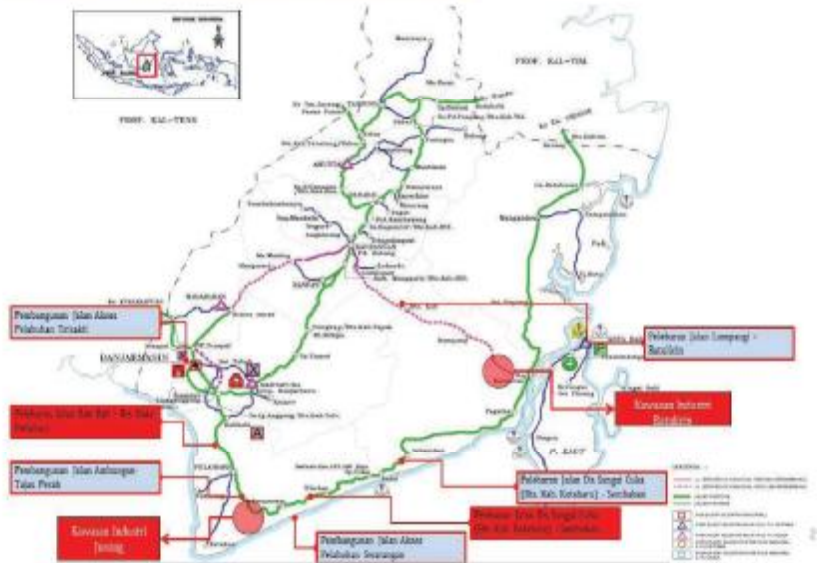
Rencana Konektivitas Provinsi Jawa Timur





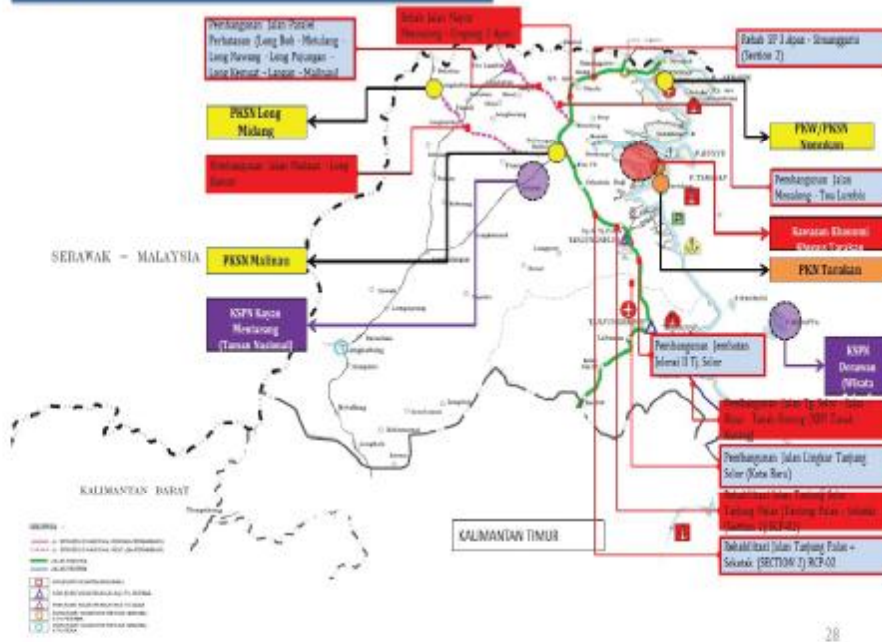
Gambar 3.184
Rencana
Konektivitas
Provinsi
Kalimantan
Selatan

Rencana Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 3.185
Rencana
Konektivitas
Provinsi
Kalimantan
Utara

Rencana Konektivitas Provinsi Kalimantan Utara



3.4 PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

3.4.1 REFORMASI REGULASI, KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

3.4.1.1 Reformasi Regulasi

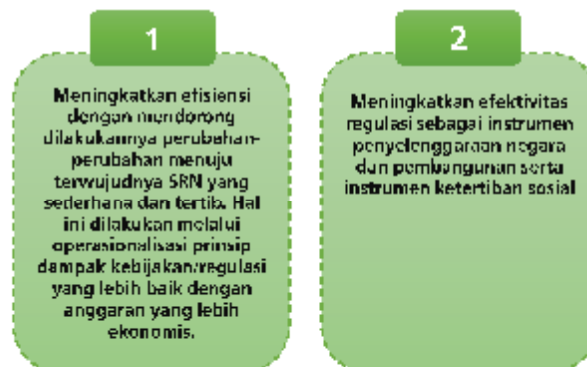
Dari perspektif regulasi, kualitas regulasi yang baik dan kuantitas regulasi yang proporsional merupakan jawaban atas persoalan inefisiensi. Untuk mewujudkan sistem regulasi yang efisien, dibutuhkan suatu tindakan yang disebut sebagai 'Reformasi Regulasi'.

Reformasi Regulasi (RR) adalah perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi, baik secara individual maupun secara integral (terintegrasi dalam suatu sistem regulasi yang komprehensif dan utuh). Definisi Reformasi Regulasi tersebut merupakan definisi umum yang digunakan pada berbagai negara. Tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan kualitas regulasi. Sementara secara jangka panjang, Reformasi Regulasi bertujuan untuk mewujudkan Sistem Regulasi Nasional (SRN) yang berkualitas, sederhana, dan tertib sehingga secara efektif dan efisien akan lebih mampu mendukung upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana ditetapkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun, substansi reformasi regulasi dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya, tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Prioritas Nasional (PN) Reformasi Regulasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 berfungsi memberikan dukungan agar program prioritas dan kegiatan prioritas tiap-tiap Prioritas Nasional dapat dijalankan dengan dukungan regulasi yang tepat serta tidak terhambat oleh regulasi di berbagai tingkatannya. Atas dasar fungsinya yang unik ini, Prioritas Nasional RR melekat pada 23 PN lain yang telah ditetapkan.

Langkah Untuk Mewujudkan Tujuan Reformasi Regulasi

Untuk mewujudkan tujuan Reformasi Regulasi, langkah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah:

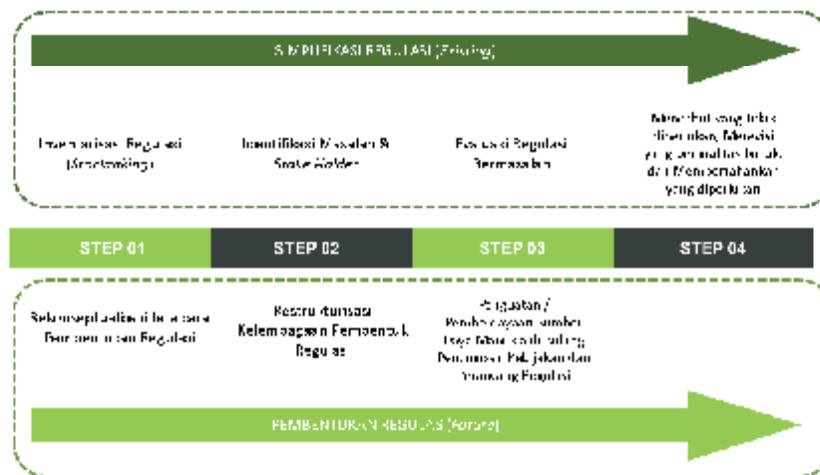




Gambaran Umum Urgensi Reformasi Regulasi di Indonesia

Strategi & Sasaran Umum serta Arah Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Regulasi, diperlukan strategi yang berdimensi rasional. Strategi Nasional Reformasi Regulasi perlu dilaksanakan tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, namun juga di tingkat pemerintah daerah karena pencapaian dari tujuan pembangunan nasional tidak dapat terlewatkan dan peran daerah. Untuk itu, diperlukan pula implementasi dalam bentuk kebijakan dan regulasi di daerah (baca: peraturan daerah).



Gambar Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Indonesia

Untuk menyinkronkan kebijakan dan regulasi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, maka perlu diciptakan Sistem Regulasi Nasional yang sederhana dan terleb untuk mendukung pencapaian sasaran dari Nawacita yang telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
Peningkatan kualitas, penurunan beban, dan jumlah peraturan perundang-undangan*						
1.	Peningkatan kualitas perundang-undangan	47,3	48,1	49,0	54,7	60,0
2.	Penurunan beban peraturan perundang-undangan (skala 1-5)	4,0	4,1	4,2	4,3	3,75

Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan negara.

Regulasi memiliki fungsi utama sebagai pedoman perilaku bagi terselenggaranya dinamika sosial, dalam hal ini baik terhadap kegiatan formal maupun informal; sebagai instrumen pembangunan untuk menggerakkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan; dan sebagai faktor integrasi yang mengintegrasikan wilayah maupun kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan ke dalam suatu Sistem Regulasi Nasional yang merupakan agregasi dari semua regulasi yang ada. Akan tetapi sampai dengan saat ini, banyak regulasi yang justru 'mencekik' masyarakat dan memperlambat pelaksanaan pembangunan baik di pusat dan daerah. Atas dasar itulah peningkatan regulasi merupakan kebutuhan agar beban masyarakat dapat berkurang serta negara dan bangsa dapat memetik manfaat yang lebih besar.

Keefektifan pengelolaan regulasi akan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi, investasi, daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan berkurangnya kerusakan sumber daya alam karena berkurangnya konflik regulasi terutama di bidang sumber daya alam dan regulasi bidang ekonomi atau di bidang pembangunan lainnya. Pada akhirnya, pencapaian pembangunan yang teruang dalam RPJMN dan Nawacita akan mempercepat pemenuhan tujuan bernegara sebagaimana amanah dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Program Prioritas*

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Otonomi Daerah	
	Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Melalui Deregulasi	Adanya kepastian mengenai distribusi kewenangan otonomi tingkat pusat dan daerah
2	Perizinan dan Investasi	
	Pelimpahan Kewenangan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP) melalui Regulasi	Semua kewenangan telah terakumulasi ke TPSP
	Penyederhanaan Perizinan (Sistem Waktu Biaya)	Proses perizinan yang sederhana, cepat waktu biaya
3	Penataan Ruang	
	Harmonisasi Penetapan Kawasan melalui Regulasi Penataan Ruang Pusat dan Daerah	Adanya penetapan kawasan penataan ruang pusat dan daerah yang terintegrasi

*1) Format akan menyesuaikan kesepakatan rapat terakhir

Alokasi Pendanaan

Alokasi Pendanaan dalam Prioritas Nasional Reformasi Regulasi dibutuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan RR. Selain itu, alokasi pendanaan juga mencerminkan dukungan dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan Sistem Regulasi Nasional. Alokasi Pendanaan dirancang dan ditetapkan seefisien mungkin tanpa mengesampingkan tata cara pembuatan peraturan yang baik.

3.4.1.2 Kepastian dan Penegakan Hukum

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Tabel 3.11.3
Tabel Sasaran
Jumlah
Penerima
Nasional dan
Kendaraan dan
Pengadilan
Luaran

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RUPMN 2019
1	Indeks Pemantauan Hukum (Skala 0-11)	0,68	0,68 – 0,69	0,69 – 0,71	0,71 – 0,73	0,75
2	Indeks Korupsi Korupsi (Skala 0-10)	14	16	18	21	25
3	Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 0-10)	1,81	1,94	2,07	2,20	2,25

Tabel 3.11.4
Tabel Sasaran
Arah
Kebijakan
Kepastian dan
Penegakan
Hukum

Arah Kebijakan

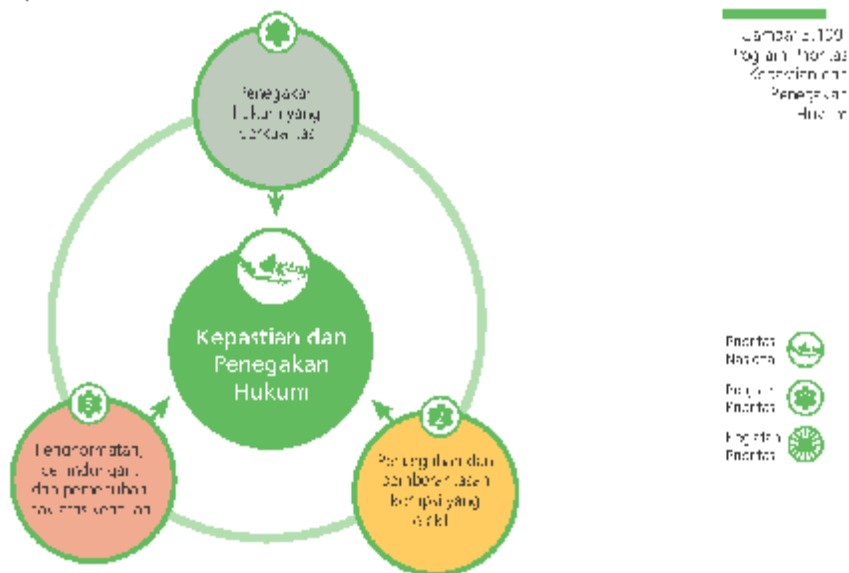
1. Penguatan hukum yang berkualitas melalui: (i) transparansi dan akuntabilitas penggunaan perantara lembaga peradilan; (ii) Sistem Peradilan Pidana Anak berorientasi keadilan restoratif; (iii) pengembangan sumber daya manusia aparat penegak hukum; (iv) pemenuhan hukum; (v) Sistem Peradilan Perdara yang mudah dan tepat; dan (vi) pemenuhan hukum tingkat desa, kecamatan dan tingkat dana pendanaan uang.
2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif melalui: (i) pengurangan keterbacaan anti korupsi; (ii) pencegahan tindak pidana korupsi; dan (iii) harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi.
3. Penguatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan melalui: (i) optimalisasi narasumber hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat; (ii) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (iii) penyelesaian sengketa HAM berat masa lalu; (iv) penegakan HAM dalam rangka penanganan pengaduan pelanggaran HAM; (v) pemenuhan HAM bagi aparat penegak hukum; dan (vi) harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait HAM.

Kontribusi terhadap Prioritas Nasional Lainnya:

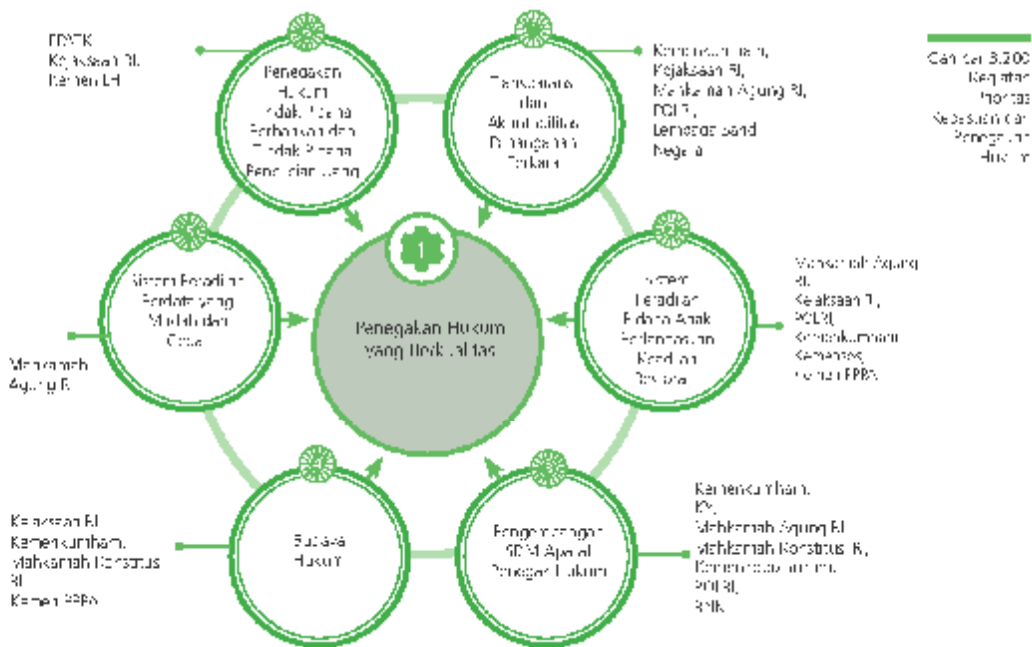
1. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, pada Program Prioritas Pelaksanaan Desentralisasi dan Reformasi Kebijakan Perindustri, Energi dan Daerah.
2. Kesehatan Mental, pada Program Prioritas Pengalihan Hak dan Pengelolaan Politik.
3. Keberagaman dan Kelautan, pada Program Prioritas Penguatan dan Pengembangan UU Kelautan dan Perikanan Laut.
4. Industri Kawasan Industri, pada Program Prioritas Transformasi SDM, Kelembagaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa dalam mendukung Pemukiman Transmigrasi.
5. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, pada Program Prioritas Penguatan Sistem Penyelesaian Narkoba.
6. Penguatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), pada Program Prioritas Peningkatan Populasi.
7. Penguatan Pariwisata, pada Program Prioritas Layanan Komoditas Wisatawan Mancanegara Masuk.

Program Prioritas

Prioritas Nasional Kepastian dan Penegakan Hukum mencakup tiga Program Prioritas yang disajikan pada gambar berikut:



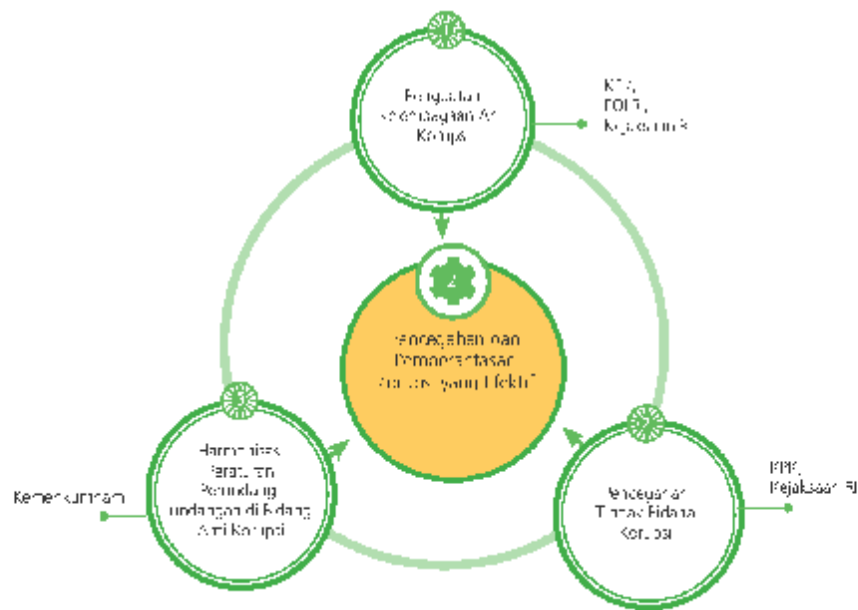
Kegiatan Prioritas



Tabel 3.114
Tetapan
Tetapan
Tetapan
Tetapan
Tetapan

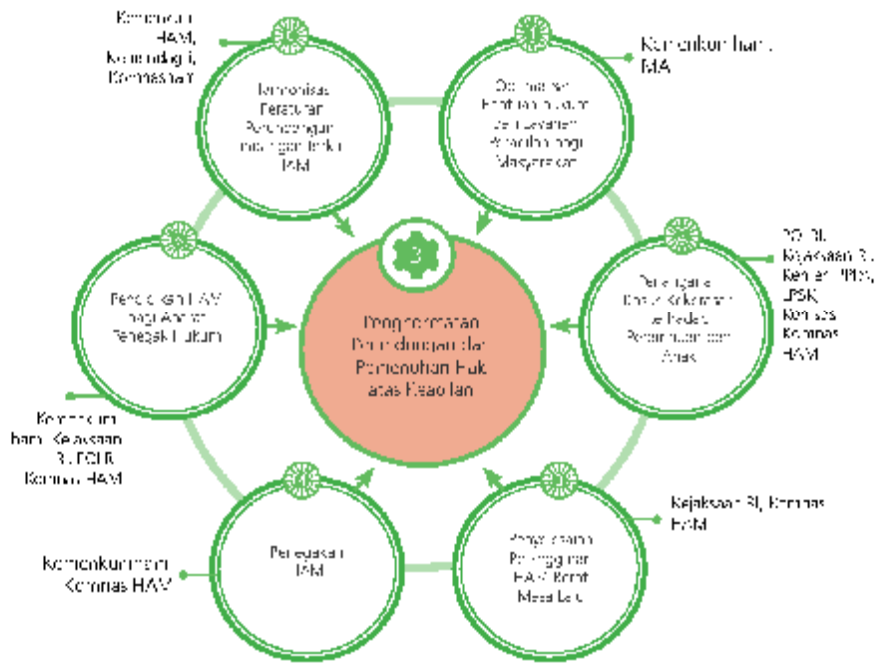
No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
Penegakan Hukum yang Berkualitas		
1	Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara	Filter Project Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPF-TI) di 3 (tiga) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan)
2	Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif	Optimalisasi peran sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) secara terpadu sebagai penanganan perkara SDV Aparat Penegak Hukum (Appakum) yang kompeten dalam penanganan ABH Sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas layanan ABH
3	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	Optimalisasi peran pengawasan dan pemanfaatan hasil pengesahan formal dan digital Pelaksanaan siklus terpadu penanganan perkara bagi Appakum Perubahan pola manajemen pengadilan
4	Budaya Hukum	Pelaksanaan penyuluhan hukum yang efektif Peningkatan dan optimalisasi pemahaman konstiusional masyarakat
5	Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat	Optimalisasi pelaksanaan melalui sistem online court
6	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Lingkungan	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana perusakan lingkungan yang

Lebih dari 201
Kegiatan
Pemerintah
Kendaraan
di
Pemerintahan
Gubernur yang
Teknik



No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Percegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	
	1. Penguatan Kemampuan Anti Korupsi	Optimalisasi fungsi koordinasi dan sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi antar Lembaga
	2. Penguatan Tindakan Pencegahan Korupsi	Peningkatan integrasi antara KIPP, Mitra Promosi, Parta. Dejak, Komunitas dan Swasta, serta Layanan Masyarakat Anti-KKN dan Kejiatan Tim Pengawasan dan Penanganan Pemerintahan dalam Pembangunan (TPP) di Kejati dan Kejari.
	3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Anti Korupsi	Penyusunan B.U.U. terkait TUPKER

Tabel 2.115
Kategori Prioritas
Perencanaan dan
Pembangunan
Korupsi yang
Efektif



Tabel 2.116
Kategori Prioritas
Pengharmonisan,
Perlindungan dan
Penuhuan Hak
atas Keadilan
yang Efektif

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Pengharmonisan, Perlindungan dan Penuhuan Hak atas Keadilan	
	1. Optimalisasi Layanan Hukum dan Layanan Keadilan bagi Masyarakat	Optimalisasi penyaluran dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pencari keadilan Optimalisasi layanan pengadilan bagi masyarakat miskin pencari keadilan
	2. Peningkatan Kualitas Layanan terhadap Penerimaan dan Anak	Penyediaan Penerimaan Terpadu Kasus terhadap Penerimaan (SPP-PKTP) dan Anak Penyediaan sarana prasarana untuk SPP-PKTP

Tabel 2.116
Kategori
Prioritas
Pengharmonisan,
Perlindungan dan
Penuhuan Hak
atas Keadilan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Masyarakat	Tindak lanjut upaya ajuikasi dan non-ajukasi terhadap pelanggaran HAM berat
4.	Penegakan HAM	Optimalisasi kemampuan dan kualitas layanan HAM
5.	Pendidikan HAM bagi Aparat Penegak Hukum	Pelaksanaan dan HAM bagi Aparat Penegak Hukum yang mendukung pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang berprinsip HAM
6.	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait HAM	Pemberubahan peraturan perundang-undangan yang tidak bersesektif HAM

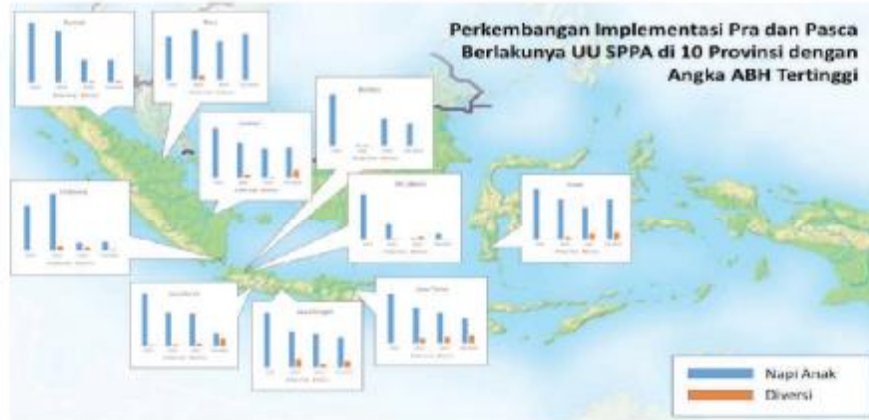
Dimensi Kewilayahan pada Kegiatan Prioritas

Proyek percontohan (*pilot project*) Sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPTTI) akan dilaksanakan di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, sebagaimana Gambar 3.203. Perantaraan provinsi provinsi ini berdasarkan kesediaan dari Satuan Kerja Aparat Penegak Hukum (Satker Apogakum) terkait dalam membangun SPPTTI diantara erbagai komponen Apogakum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Proyek percontohan ini diharapkan menjadi contoh baik untuk kebutuhan integrasi penanganan perkara (khususnya perkara pidana umum). Selain kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung upaya integrasi Sistem Peradilan Pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia pendukung juga dibutuhkan sehingga operasional sistem juga dapat dilaksanakan secara maksimal.

Gambar 3.203
Rencana Proyek
Percontohan
Sistem Peradilan
Pidana Terpadu
Berbasis
Teknologi
Informasi
(SPPTTI)



Upaya koordinasi dan sinergi lintas sektor terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan UU SPPA, penyediaan SDM Apogakum dan SDM non-Apogakum (PK Bapas dan Pekerja Sosial/Peksos) serta penyediaan sarana prasarana dalam rangka implementasi UU SPPA, akan difokuskan terutama pada daerah-daerah dengan angka ABH tinggi, sebagaimana Gambar dibawah ini.



Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, <http://smstap.ditjenpas.go.id/>, diakses tanggal 18 Maret 2016.

Gambar 3.204
Perkembangan
Implementasi
Pra Dan Pasca
Berlakunya UU
SPPA Pada 10
Provinsi Dengan
Angka ABH
Tertinggi

Alokasi Pendanaan

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Belanja K/L (Juta Rp.)
Penegakan Hukum yang Berkualitas	Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Pemasyarakatan	34,149
	Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif	226,325
	Pembinaan SDM Aparat Penegak Hukum Budaya Hukum	181,450
	Budaya Hukum	88,571
	Sistem Peradilan Perdata yang Mutakhir dan Canggih	1,326
	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Pencurian Uang	573,194
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi	464,169
	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	171,192
	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Anti Korupsi	2,016
Penghormatan, Perlindungan dan Pemertanian Hak-hak Keacilior	Optimalisasi dan Lanjut Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat	101,400
	Pertumbuhan Kewajiban dan tanggung Jawab Anak	504,044
	Penyelesaian Anggaran HPM Berat Masa Lalu	13,924
	Perbaikan -AM	15,988
	Pendidikan -AM bagi Asasir Penegak Hukum	17,740
	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang terkait HAM	16,345
Total		2.441.082

Sumber dan cara akses informasi: W. Hilmah, diakses tanggal 18 Maret 2016.

Tabel 3.117
Alokasi
Pendanaan
Prioritas
Kegiatan dan
Perbaikan
Hukum

3.4.2 STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Prioritas nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. *Clearance rate* atau penyelesaian tindak pidana masih berkisar pada angka 56,4 persen di tahun 2015 dan tidak menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Jumlah korban penyalahgunaan narkoba, namun demikian diharapkan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba dipertahankan agar tidak melebihi angka 0,05 persen per tahun. Di wilayah laut, pada triwulan pertama 2016 sudah terdapat lebih dari 50 gangguan keselamatan dan 61 gangguan keamanan atau pelanggaran hukum. Begitu juga dengan ancaman terorisme, sepanjang tahun 2015 terjadi 10 serangan terorisme dari bankan pada awal tahun 2016 sudah terjadi satu serangan bom di Jakarta serta benih-benih WNI di Sinali, Papua terkait gerakan separatisme. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah WNI simpatisan ISIS hingga mencapai sekitar 400 orang sampai awal tahun 2016. Adapun kesadaran akan keamanan informasi di tingkat K/L juga masih rendah, dimana institusi yang melaksanakan pengamanan informasi baru sekitar 20 persen. Di bidang pertahanan, lingkungan strategis negara semakin semakin diperitit ditunjukkan antara lain dengan peningkatan belanja militer berkarakter modern dan berkapabilitas maritim di Asia Timur dan Tenggara.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Tabel 3.4.13
Sasaran Umum
Misi
Nasional
Stabilitas
Keamanan dan
Ketertiban 2017

No	Indicator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RP- JMN 2019
1	Jumlah kejadian terorisme	0	10	1	0	0
2	Jumlah operasi keamanan laut	12	12	12	30	30
3	Laju Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	0,05	0,05	0,04	0,05	0,02
4	Persentase kasus tindak pidana	176.710	178.379	180.379	183.061	185.740
5	Pengeluaran K/L - BI (%)	38,7	43,0	44,5	53,1	71,2
6	Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)	21,1	13,0	41,6	45,5	53,8
7	Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi	15	20	25	30	40

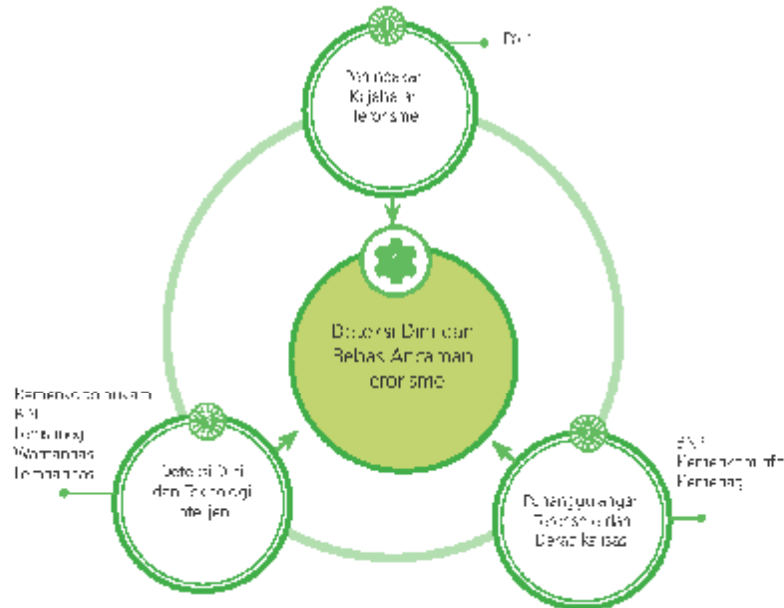
Salinan 5/2016
Pemerintah
Menteri
Kebudayaan
Komunikasi dan
Keterampilan

-  Indikator
-  Program
-  Kegiatan



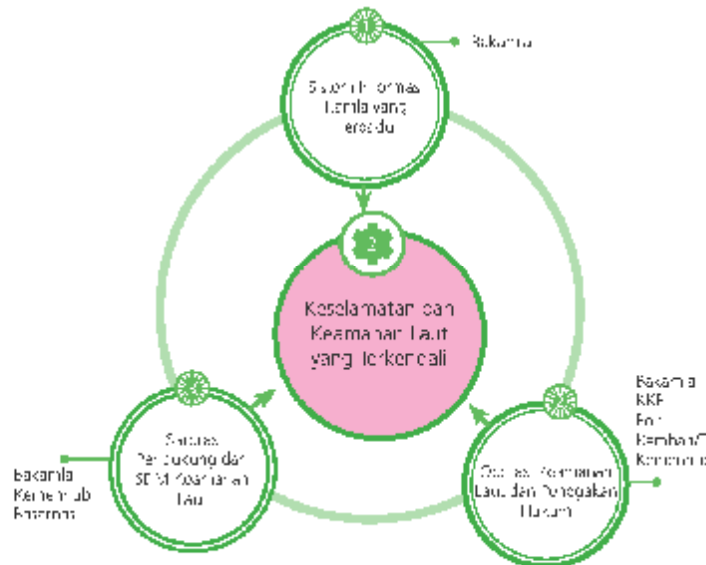
Kegiatan Prioritas

Salinan 5/2017
Pemerintah
Menteri
Kebudayaan
Komunikasi dan
Keterampilan



No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme	
	1. Peninjauan Kejadian Terorisme	<ul style="list-style-type: none"> 5 penyelidikan kasus tindak pidana terorisme; 5 penyelidikan kasus tindak pidana terorisme; 5 peninjauan kasus tindak pidana terorisme; 1 paket pencegahan tindak pidana terorisme; 5 dukungan Satgas/ Gugus Penyelidikan Tindak Pidana terorisme.
	2. Penanggulangan Insiden dan Deteksi Kibisasi	<ul style="list-style-type: none"> 100% penanganan aduan situs internet komunikasi negatif; 15 kali pelaksanaan himbauan/ sosialisasi/ edukasi/ pelatihan/ dan seminar/ konferensi; 500 hari teroris, menten naps, mantan teroris, keluarga, dan jingannya serta perorangan dan kelompok yang berpotensi radikal yang meninggalkan ideology dan kal dan aksi kekerasan
	3. Deteksi Dini dan Intelijen Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> 2.000 laporan Operasi Intelijen Dalam Negeri Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua; 1.000 laporan Operasi Intelijen Luar Negeri (Asia, Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, Eropa); 300 kali pelaksanaan operasi kontra terorisme di dalam negeri; 68 operasi intelijen kontra terorisme luar negeri; 1.978 laporan kontra terorisme; 57 kerjasama kegiatan dan/atau operasi kontra terorisme; 11 Naskah Deteksi Dini (Jelang Politik, Ekonomi, Sosial, dan lain-lain); Dokumentasi Kejahatan Nasional (11 pasal, 14 Propana, 54.93% Kabupaten/Kota); Pengukuran ketahanan regional di 6 negara (Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam); 4 ilmu mendaki kaji/ kajian terkait deteksi dini dan penanggulangan terorisme; 10 SOP pedoman/ prosedur/ kebijakan/ prosedur/ dan wilayah publik dari aksi terorisme yang disusun, diterbitkan dan dilaksanakan; 1 Unit Perencanaan Penukung Operasi Intelijen Teknologi (4000+ strategi/ informasi); Dokumentasi dan Analisa tanggal Tahun III (2016); 3 Survei Timbuk hasil proses analisis data.

Tabel 2.119
Program
Merasa Diksi
dan Bebas
Ancaman
Terorisme

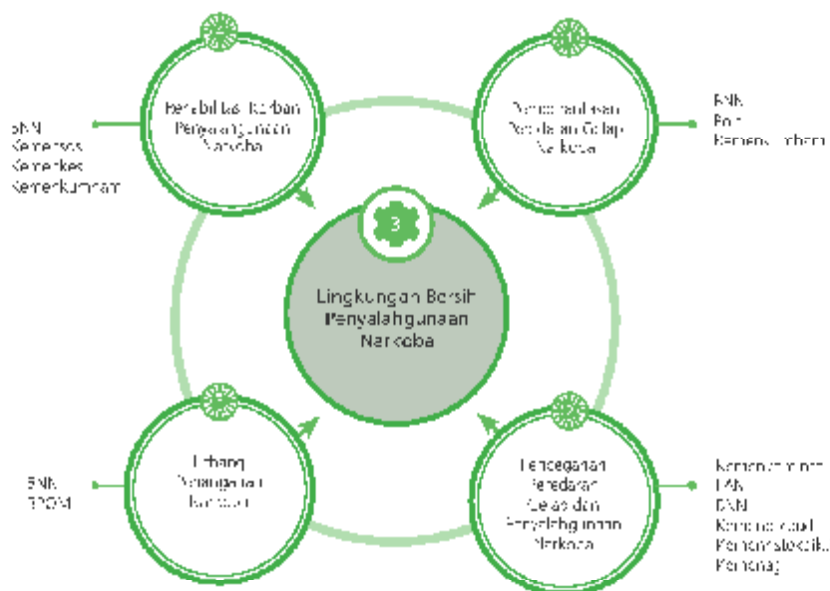


Gambar 2.200
Peringatan
Dini dan
Penegakan
Hukum
Keselamatan
dan Keamanan
Laut yang
terkendali

Tabel 3.120
Terdapat 2000 orang
Militer
Program
Pelayanan
Keamanan
dan Keamanan
Masyarakat
Kendali

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali	
1.	Sistem Informasi Kamla yang Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> 17 bulan layanan sistem Monitoring dan Analisa Keamanan Laut Peningkatan Sistem Pengaliran Informasi Keamanan Laut (BIIS)
2.	Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peaksanaan 27 Operasi Bersama Kamla Terintegrasi Nasional Peaksanaan 4 Operasi Bersama Kamla Terkoordinasi Bilateral Penyelesaian 45 kasus tindak pidana laut Penyelenggaraan 1 Lal. OMS/SP Reguler Penyelenggaraan 1 PS Baku Tahiti Terpadu 150 hari operasional kapal selam di kawasan timur Indonesia kegiatan UU Pelayang dan menas: SDKP & WPP - NR
3.	Salah satu Pencapaian SDM Keamanan Laut	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesiapan (untuk kesiapan) kapal dan personel Peningkatan kesiapan untuk operasi SAR Pengadaan 1 paket Peraturan SAR Peningkatan 32 GMDSS Peningkatan 18 unit Sistem Komunikasi Berlayar Peningkatan 4 kapal Peningkatan 4000 orang Berhimpunan Pelautan (BHP)

Terdapat 2000
Program
Koridor
Pengawasan
Berhimpunan
Penyalahgunaan
Narkoba



No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Lingkungan Bersih: Penyalahgunaan Narkoba	
1.	Demokratisasi Tindakan Sifat: Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> • Dimanfaatkan dan diperbanyak 80% bosangka DPO kasus narkoba dengan melakukan dan melakukan narasumber di PTU. • 57 juta jam masa simpatik kegiatan narasumber dan prekursor narasumber; • 7 kerjasama bilateral/multilateral dalam Pencegahan kejahatan Narkoba; • 4.000 penyedaran kasus narkoba narkoba; • 450 UPT yang melakukan layanan keamanan dan ketertahanan; • 25 UPT LP Narkoba yang memperoleh retribusi pelayanan perimbangan kapasitas rumah; • 1.500 terapis/peserta terapi yang memperoleh layanan rehabilitasi; • Pemurnaan lada/ganja di 1 titik lokasi; • 10 kali pinalatan lada/ganja di 10 (Sepuluh) lokasi; • 810 kali operasi Berantas Sirkuit Narkoba (Bersinar); • 45 Berkas perkara IPN Narkoba; • 19 Berkas perkara IP Prekursor Narkoba; • 400 Berkas perkara IP Narkoba.
2.	Pencegahan Peredaran, Gudang dan Penyalahgunaan Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> • 5 tahun pencegahan narkoba; • Relaksasi Komunitas Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN sebanyak 1.020 kali; • 100% penanganan e-situs internet bermuatan negatif; • 100% kasus TKN tentang integrasi narasumber narkoba dalam kurikulum organisasi ASN.
3.	Tingkat Pencegahan Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2017 di 34 provinsi; • 100% akses sistem informasi pencegahan permasalahan narkoba terintegrasi dan terupdate; • Diterapkannya alibi/obat untuk penyalahgunaan narkoba.
4.	Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> • 5.000 klien yang mengikuti proses pemulihan jiwa lembaga rehabilitasi kemandirian masyarakat; • 3.590 klien peserta rehabilitasi yang mendapat pendampingan keluarga; • 930 korban penyalahgunaan narkoba yang memperoleh rehabilitasi sosial di Panti Sosial Mentrikan Sosial; • 14.047 korban penyalahgunaan narkoba yang memperoleh rehabilitasi sosial di masyarakat; • Pemanggunan 4 media: Penerimaan Kerja Lapangan (PKWL) di Aceh, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat; • 200 pelayanan kesehatan sebagai institusi kesehatan yang dapat diintegrasikan yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan medis pada penyalahgunaan narkoba; • 21.190 klien yang menjalani proses pemulihan esds lembaga rehabilitasi instansi pemerintah melalui rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap; • 274 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan mutu layanan; • 1.370 petugas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh peningkatan kompetensi sebagai konselor dan asesor; • 218 lembaga rehabilitasi kemandirian masyarakat yang mendapat peningkatan teknis dan standarisasi mutu layanan rehabilitasi; • 824 petugas lembaga rehabilitasi kemandirian masyarakat yang mendapat peningkatan kompetensi sebagai konselor dan asesor.

Tabel 2.121
Program
Prioritas
Lingkungan
bersih
penyalahgunaan
Narkoba

Gambar 3.210
Diagram
Pilotin
Pelayanan Prima
Kepolisian

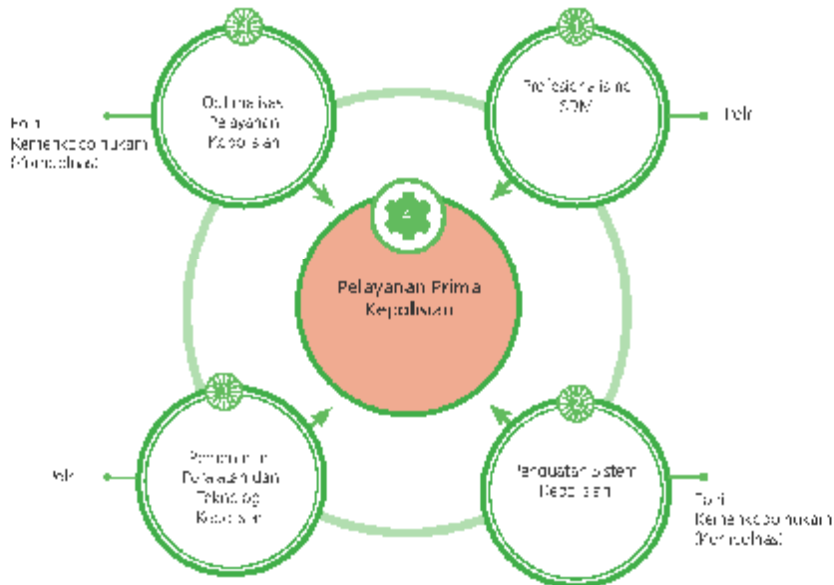
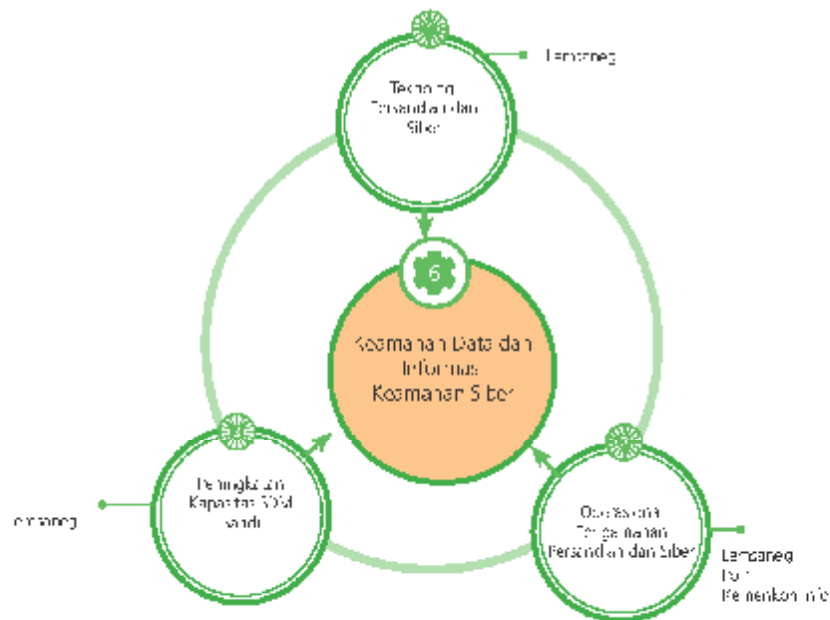


Table 3.122
Tugas dan
Fungsi
Pelayanan Prima
Keolisian

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Pelayanan Prima Keolisian	
1.	Profesionalisme SDM	<ul style="list-style-type: none"> 11.000 orang perempuan berseragam <i>zero growth</i> secara transparan dan profesional 5.161 orang peserta didik teknis, 800 orang peserta didik diaduktura, 37.400 orang peserta didik fungsional, dan 50 orang peserta sertifikasi keahlian 40 buku modul pembelajaran main 5.490 personel yang mengikuti assessment dalam rangka promosi jabatan berkeadilan tingkat Mabes hingga Polres
2.	Penguatan Sistem Keolisian	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian R&D baru Pengujian Penelitian dan Pengembangan Polri, diantaranya menghasilkan prototipe dan pengkajian Alrnabus dan 20 peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar Lintaman internasional
3.	Pemerataan Peralatan dan Teknologi Keolisian	<ul style="list-style-type: none"> 1 paket Jaring Komunikasi Keolisian 1 paket pengadaan alat tulis
4.	Optimalisasi Pelayanan Keolisian	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian 11.000 kasus tindak pidana umum; 1.472 kasus tindak pidana korupsi; 301 kasus tindak pidana korupsi; dan 558 kasus tindak pidana terorisme Penyelesaian 5.668 pemeriksaan barang bukti dan TKP Penyelesaian 230 penanganan kasus IP-0 Penyelesaian 3.761 kasus terkait HPA dan AB- Pelayanan Hutan Kantirimas 44.000 desa Pencegahan 2.500 kelompok potensi masyarakat yang tidak menjaga cartermas Pelaksanaan 424.463 pengamatan, 1.294.470 deteksi, 405.816 pengawalan, dan 1.573.421 pengagaan tugas lainnya Pelaksanaan 1.000.000 Ujawa Lindu Laras

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Pengadaan Alutsista RI dalam rangka pemertahanan TNI	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak efektif untuk 22 jenis Alutsista strategis • Kontrak efektif untuk 40 jenis Alutsista produksi Industri Pertahanan • 24 unit Helikopter pengangkut personel dan logistik • 20 unit Menara Arched • Pengadaan landak Helikopter Apache • 8 jenis Munisi senjata KPI • 1 serbak mual jarak sedang • 14 unit ruhal alutsair • 55 unit ramp
3.	Peningkatan Industri Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan R&D IX • Prototipe medium tank • Transfer of technology ruhal C-703 • Pengembangan R-ran 122 b
4.	Peningkatan sarana Alutsista TNI	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana di 13 wilayah kedarif • Peningkatan 10 demaga • Peningkatan Pangkalan Udara
5.	Peningkatan sarana keamanan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • 31 pos perbatasan darat • 17 posel • Peningkatan 504 km jalur perbatasan • 3 demaga dan 1 runway di Natuna • 2 pangkalan Alutsista • Pangkalan ALUTSISTA • 2 demaga dan 1 landud

Gambar 3.2.12
Tajuk
Tajuk
Tajuk
Kerangka Data
dan Informasi
Keamanan Siber



No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
G. Keamanan Dasar dan Informasi (Keamanan Siber)		
1.	Integrasi Persebaran dan Siber	<ul style="list-style-type: none"> 1 sistem untuk Cyber Security Operation Centre 21 K/L/Dy yang mendapatkan penambahan Perangkat Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) 100% pemenuhan permintaan Otomatis Serifikasi Digital (OSD) 3 Product Kary Mandiri yang dihisikar
2.	Operasional Pemantauan Persebaran dan Siber	<ul style="list-style-type: none"> 100 operasi Sistem Keamanan Informasi Berkelanjutan Pemantauan Infrastruktur Jaring Komunikasi Sani Nasional (JKSN) di 21 K/L/Dy Penguatan pengamanan data informasi penanganan kasus kriminal di seluruh Kementerian / Lembaga Penegak Hukum
3.	Peningkatan Kapasitas SDM Sandi	<ul style="list-style-type: none"> 225 lulusan diklat sandi 80 lulusan sarjana sains terapan (STSN) 10 orang peserta program S2 Teknik Keamanan Informasi

Tabel 3.12- Program Prioritas Keamanan Dasar dan Informasi

Persebaran Wilayah



Gambar 3.213 Persebaran Wilayah Program Prioritas Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme

Indikator	Lokasi				Total
	Sumatera-Kalimantan	Jawa-Bali	Nusra-Sulawesi	Maluku-Papua	
Pengukuran IKN Tk. Kab/Kota	66 Kab/Kota	-	38 Kab/Kota	64 Kab/Kota	-



Gambar 3.214 Persebaran Wilayah Program Prioritas Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali

Indikator	Lokasi						Total
	Sumatera	Jawa	Bali-Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku-Papua	
SBVF	50	75	-	15	30	60	240
GRUPSS	6	10	-	2	4	8	30
RTS	2	-	-	-	-	-	2
QTHR	-	-	-	-	-	-	3

Gambar 3.215
Persebaran Wilayah Program Prioritas Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba



Indikator	Lokasi						Total
	Sumatera	Jawa	Bali-Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku-Papua	
Lab. uji narkoba	1	1	-	1	1	1	5
UPT-LP Narkotika	11	6	1	3	1	1	23
LRIP	82	78	19	28	41	25	273
LRKM	59	104	12	16	24	3	218

Gambar 3.216
Persebaran Wilayah Program Prioritas Pelayanan Prima Kepolisian



Indikator	Lokasi						Total
	Sumatera	Jawa	Bali-Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku-Papua	
RTMC	2	1	-	2	1	-	6
TMC	2	2	-	2	1	-	7
SDC	-	3	-	-	-	-	3

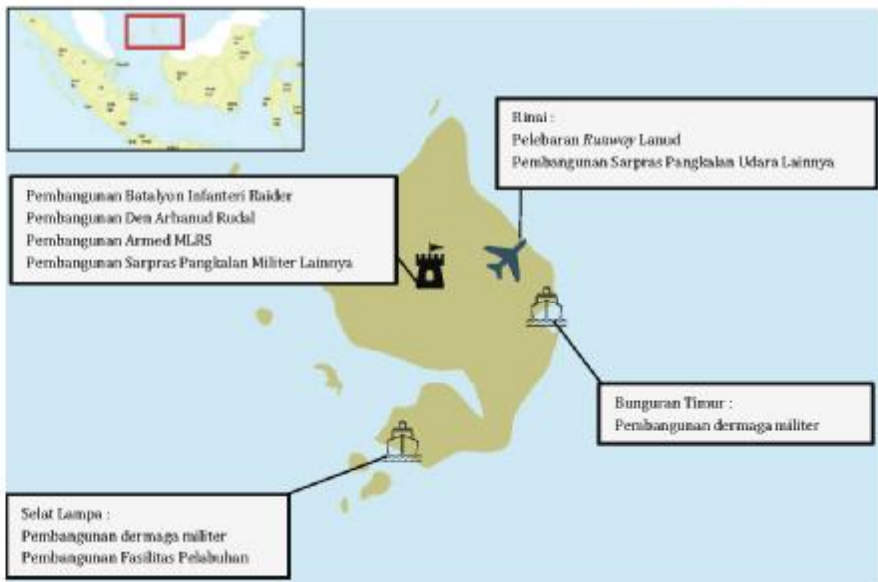


Indikator	Lokasi						Total
	Sumatera	Jawa	Bali-Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku-Papua	
Jumlah Bhabinkamtibmas	11.321	15.169	2.080	4.254	4.480	2.696	40.000

Gambar 3.217
Persebaran Wilayah Program Prioritas Pelayanan Prima Kepolisian



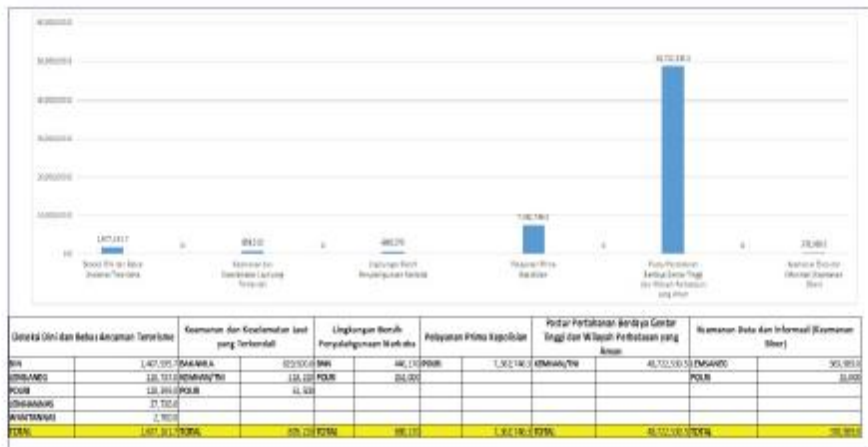
Gambar 3.218
Persebaran Wilayah Program Prioritas Postur Pertahanan Berdaya Gantar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman



Gambar 3.219
Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Indikator	Lokasi						Total
	Sumatera	Jawa	Bali- Nusa	Kalimantan	Sulawesi	Maluku- Papua	
Peserta-peserta TNI			4	17		10	31
Pos perbatasan laut	-	-	3	-	-	3	14
Permaga militer	-	-	1	-	-	3	4
Lanud	-	-	1	-	-	1	2
Jalur perintis	-	-	-	504 km	-	-	504 km
Perkerasan jalur perintis	-	-	-	480,27 km	-	-	480,27 km

Gambar 3.220
Alokasi
Pendanaan
Prioritas
Nasional
Stabilitas
Keamanan dan
Ketertiban



Generasi Diri dan Belanja Anggaran Tersebut	Keamanan dan Kelestarian Lingkungan yang Terkendali	Lingkungan Bersih, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Pelindungan Pesisir Kepulauan	Pedang Perbatasan dan Daya Gairah Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman	Keamanan Baku dan Informasi (Keamanan Siber)
SDN	1.407.000.000.000	800.000.000.000	44.100.000.000	1.407.000.000.000	30.900.000.000.000
SDN/MD	18.100.000.000.000	18.100.000.000.000	20.000.000.000.000		20.000.000.000.000
MD	18.100.000.000.000	18.100.000.000.000	20.000.000.000.000		20.000.000.000.000
MD/MD	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000		20.000.000.000.000
MD/MD/MD	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000		2.000.000.000.000
MD/MD/MD/MD	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000

3.4.3 KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI

Dalam upaya melaksanakan proses pembangunan nasional yang makin demokratis, diperlukan penguatan aspek-aspek demokrasi, termasuk komunikasi dan informasi publik, serta pencegahan konflik dan penanggulangan terorisme. Kondisi umum pembangunan demokrasi tercermin dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia. Dalam hal kebijakan dan politik luar negeri, Indonesia menghadapi dua tantangan utama, yakni bagaimana merespon dinamika internasional sesuai amanat Konstitusi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. Diplomasi Indonesia harus dilaksanakan dengan semakin efektif, dengan memanfaatkan sejumlah capaian penting, utamanya dalam isu keamanan dan stabilitas kawasan; perlindungan WNI/WNI di luar negeri; terutama perera migran; serta diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSS) untuk mendukung pembangunan global dan regional.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi					
	• Indeks Demokrasi Indonesia	63,72	73,04	74,00	74,30	75,00
	• Tingkat saat serokela informasi publik	30%	60%	60%	65%	90%
	• Perorangan yang jumlah konflik antar belakeng s. SARA	n.a	<5	<5	<5	<5
	• Persentase peningkatan daya tangkal masyarakat dari bencana dan salitmas	n.a	20%	30%	40%	60%
	• Tingkat berdaul Indonesia di dunia internasional	n.a	89%	89%	89%	89%

Tabel 10.175
Sasaran Umum dan Arah Kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Arah Kebijakan

- Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil
- Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik kekerasan dan ancaman terorisme
- Peningkatan akses dan kualitas informasi publik
- Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan
- Perlindungan WNI/WNI di luar negeri
- Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
- Pemanjapan peran di ASEAN dan efektivitas politik luar negeri yang bebas aktif

Kontribusi/Kepeskoran Terkait Revolusi Mental

- Penyediaan dan pengelolaan konten informasi yang berkualitas dan transparan menuju k
- Penyediaan dan kapasitas pengelolaan pemilihan umum yang bersih dan jujur
- Peningkatan akuntabilitas lembaga politik dalam mempromosikan sistem demokrasi

Gambar 10.171
Arah Kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Prioritas Nasional

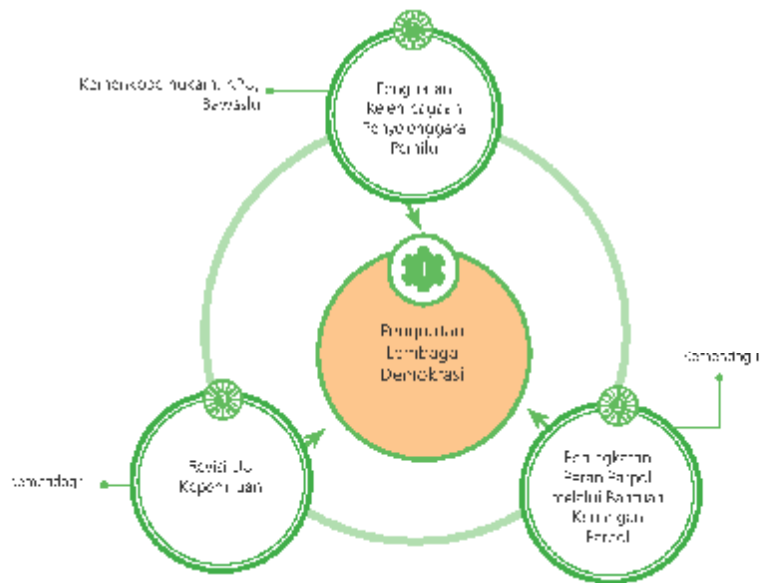
Daftar B.222
Teguh
Mandat
Konsolidasi
Demokrasi
dan Efektivitas
Diplomasi

-  Forum
Kesejahteraan
-  Teguh
Mandat
-  Kegiatan
Prioritas



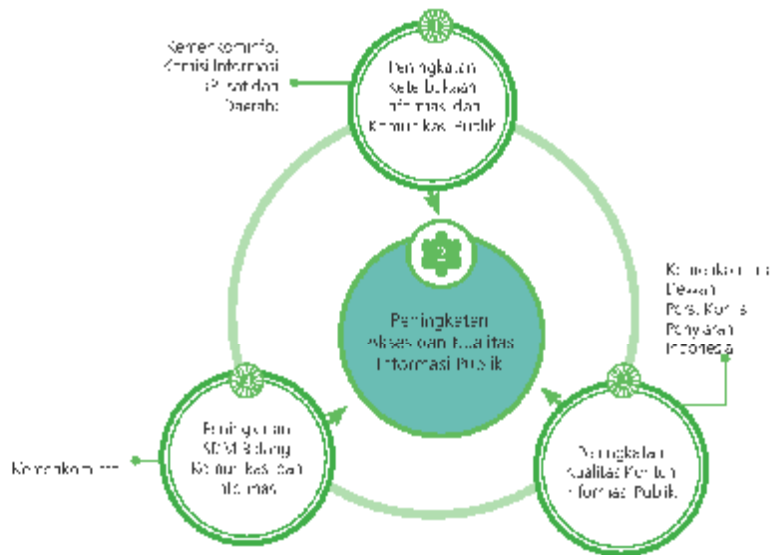
Kegiatan Prioritas

Daftar B.223
Kegiatan
Prioritas
Penguatan
Lembaga
Demokrasi



No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Program Prioritas Pengantar Lembaga Demokrasi	
1.	Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 74,3 • Persentase pemutakhiran data pemilu di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia sebesar 100% • Konsistensi proses penyusunan produk hukum dasar yang dilaksanakan sesuai prosedur sebesar 100%
2.	Peningkatan peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah formal yang menunjukkan peningkatan kemampuan peningkatan kebiasaan sebanyak 10 Forum
3.	Beberapa Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Komisi Pengawas Pemilu

Tabel 3.126 Kegiatan Prioritas Pengantar Lembaga Demokrasi



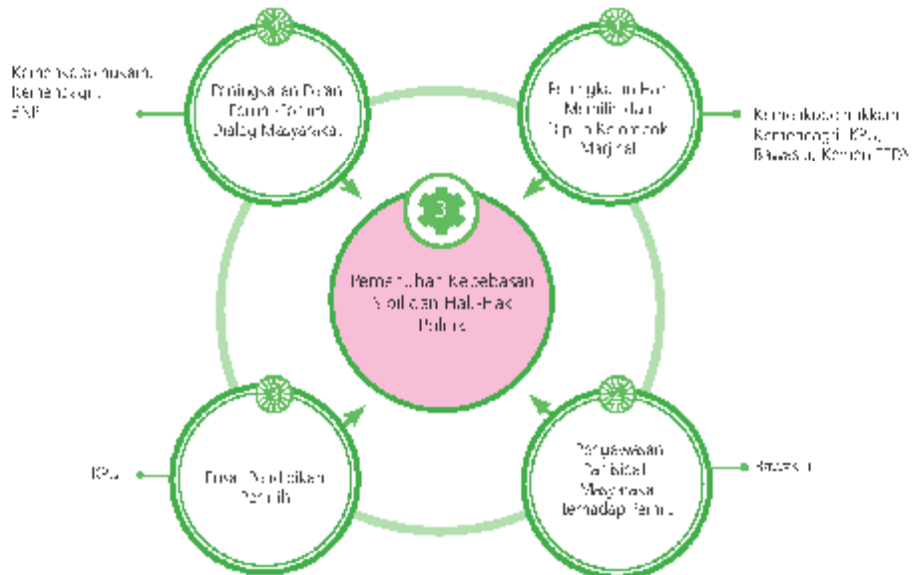
Gambar 3.274 Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Program Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	
1.	Peningkatan Kelembagaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • 85% kasus/Sumbu Kota Kelangkaan Informasi Publik terselesaikan • 70-75 Badan Publik Pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik (memberikan, bahar informasi publik) • 15 Indeks Kelembagaan yang meningkatkan "berlingkup" di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah tertinggal/terdekat/terluas • 700 peserta di tingkat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bersama Bintek Media Komunitas di daerah • 1000 peserta forum diskusi/lokasi/lokasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/Asosiasi masyarakat untuk memenuhi dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya • 250 peserta Bintek PPK untuk meningkatkan kemampuan yang dalam implementasi UU OIP • 3500 orang masyarakat yang meningkatkan kemahitannya tentang UU OIP

Tabel 3.127 Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten siaran • Pemantauan langsung program siaran pada lembaga pengantar yang melakukan siaran dan siaran langsung dan siaran program siaran (P3-SP3) di 13 TV Berlangganan + 20 Radio • 5 Publikasi permingkat (rating) kualitas program siaran televisi di Media Nasional • 1 Dokumen Pedoman Kemudahan Akses • <i>Amid Press Freedom Day</i> di Indonesia (800 peserta)
3.	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • 600 peserta bimbingan teknis dan sertifikasi biaya pelaksanaan <i>public relation</i> • 800 peserta bimbingan teknis dan sertifikasi di tingkat IIR • 450 peserta bimbingan teknis dan sertifikasi komunikasi bagi mahasiswa, profesi, mahasiswa • 285 penerima mahasiswa Dalam Negeri/Luar Negeri • 3000 peserta Peningkatan literasi IIR untuk disabilitas, wanita, dan anak usia sekolah

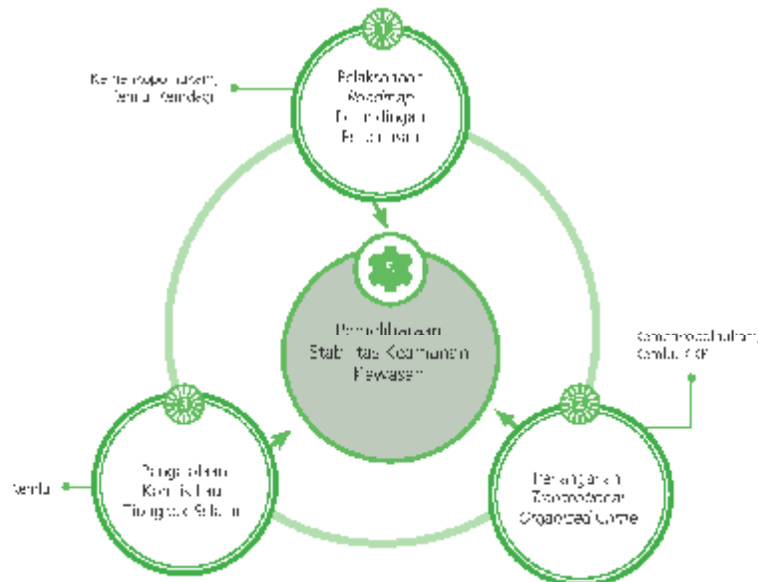
Saluran 5,225 Kegiatan 2017-18
 Anggaran 6,1 miliar Rp dari hasil-hasil NAL



Tabel 3.129
Rujukan Terhadap
Mencegah
Konflik Sosial
dan Kekerasan
Berbasis
Teknologi

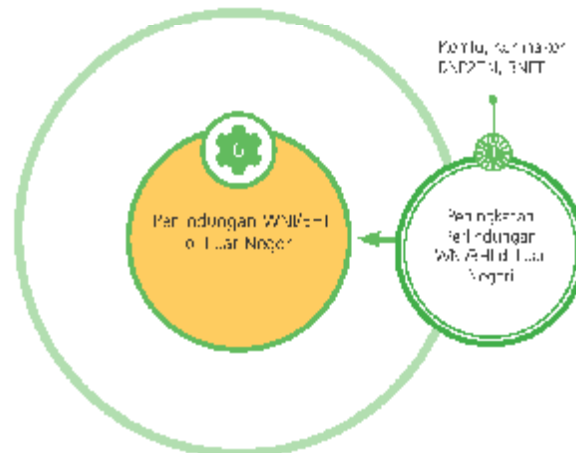
No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Program Prioritas Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Perang Ulangan Terorisme	
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kalangan Aparatur Negara Melalui Pelaksanaan Rencana	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen panduan dan kriteria acuan/aturan/wasbang dan cerbang dalam kebijakan dan regulasi sebanyak 80% daerah jumlah regulasi penerapan wawasan dan cerbang di pusat dan daerah sebanyak 50% Kabupaten 100% Kementerian/lembaga dan 80% Pemerintah daerah yang menggunakan wawasan/karakteristik dalam kebijakan dan regulasi
2.	Penggiatan Forum Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Penggiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait keamanan dan kontifitas di seluruh basis di 34 Provinsi
3.	Penggiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> 12 rekomendasi kebijakan terkait penanganan konflik dan kontifitas peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik di 14 Provinsi memasuki <i>middle success stage</i> di 41 kabupaten/tertinggi memfasilitasi kurikulum bina dame dalam lembaga pendidikan formal dan non formal di 1 kabupaten/tertinggi
4.	Penggiatan Upaya Deradikalisasi dan Kontra Radikal Terorisme	40-75 persentase peningkatan upaya terpadu masyarakat dari pengaruh radikal terorisme
5.	Peningkatan Pencegahan Hukum pada Organisasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> 2 dokumen analisis kebijakan terkait penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa di organisasi yang berskala internasional 82 operasi penindakan dan operasi intelijen dan pencegahan setoran dalam kesiapsiagaan nasional 3 laoran penggalangan informasi intelijen, dukungan dari negara mitra dan pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan multilateral

Gambar 3.277
Kejadian
Pencapaian
Peningkatan
Sensitivitas
Kebijakan
Kebijakan



No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Program Prioritas Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan	
	1. Pelaksanaan Roadmap Perundingan Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> • 80% perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil dilaksanakan • 4 rekomendasi terkait wilayah perbatasan dan tata ruang perbatasan • 4 aturan pelaksanaan nasional hukum dengan kawasan khusus perbatasan, perbatasan dan batas negara serta pulau-pulau kecil berdekatan
	2. Penanganan <i>Transnational Organized Crime</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 80% posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme • 150 hari internasional kapal pemusnah dan upaya pendayagunaan kekuatan UU <i>Palapa</i> dan merujuk SDKP dan WPP - NS • 80% hasil perundingan atau perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan ketertahan yang disepakati
	3. Pengelolaan Konflik Laut HongKong Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • terlaksananya <i>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)</i> secara penuh dan efektif, serta mengawasi <i>Code of Conduct in the South China Sea (COC)</i> melalui kerangka ASEAN sebesar 94%

Tabel 2.150 Kegiatan Prioritas Kementerian Luar Negeri Sektor Keamanan Kawasan

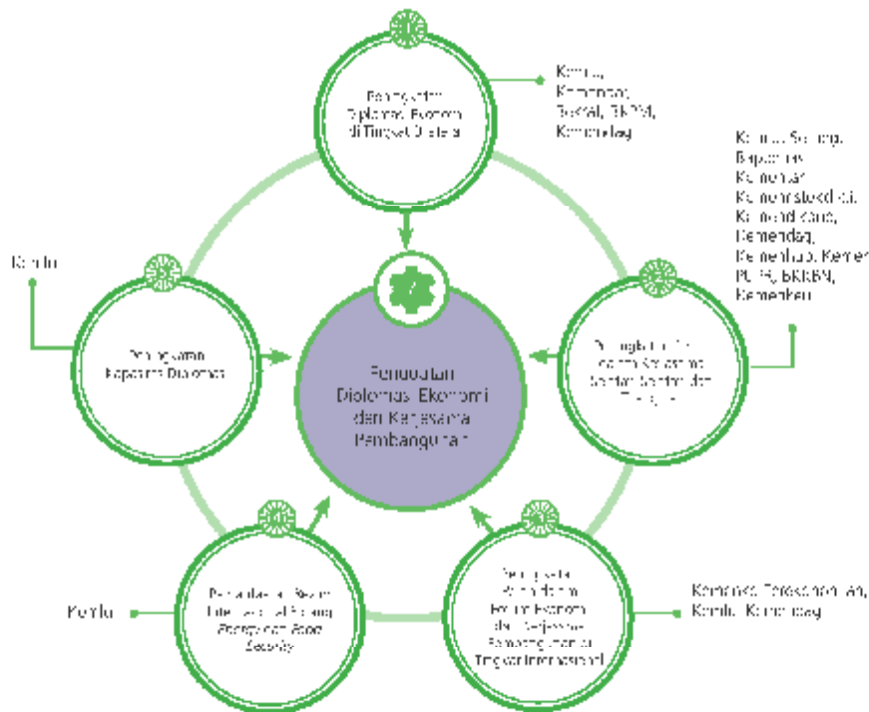


Gambar 2.228 Kegiatan Prioritas Kementerian Luar Negeri di Bidang WPP di Laut Negeri

Tabel 3.121
Kegiatan
Prioritas
Pelindungan
WNI/BNI di Luar
Negeri

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
6.	Program Prioritas Pelindungan WNI/BNI di Luar Negeri	
1.	Pelindungan WNI/BNI di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Skor indeks pelayanan dan pelindungan WNI dan BNI sebesar 74,13 Amandemen UU 39/2004 dan aturan turunannya 1 laporan pembangunan jejaring internasional, menyoroti analisis perkembangan terorisme internasional, ancaman, sharing informasi dan kesempatan untuk investasi bilateral 1 laporan pelindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri (Asia, Timur Tengah dan Eropa) dari ancaman terorisme serta kegiatan antisocial Resolusi DK PBB tentang terorisme Terwujudnya norma kesepakatan bilateral dengan negara tujuan yang memuat perlindungan dan pelayanan konsuler 200 negara

Gambar 3.209
Kegiatan
Terdapat
Kegiatan
Terdapat
Terdapat
Terdapat
Terdapat

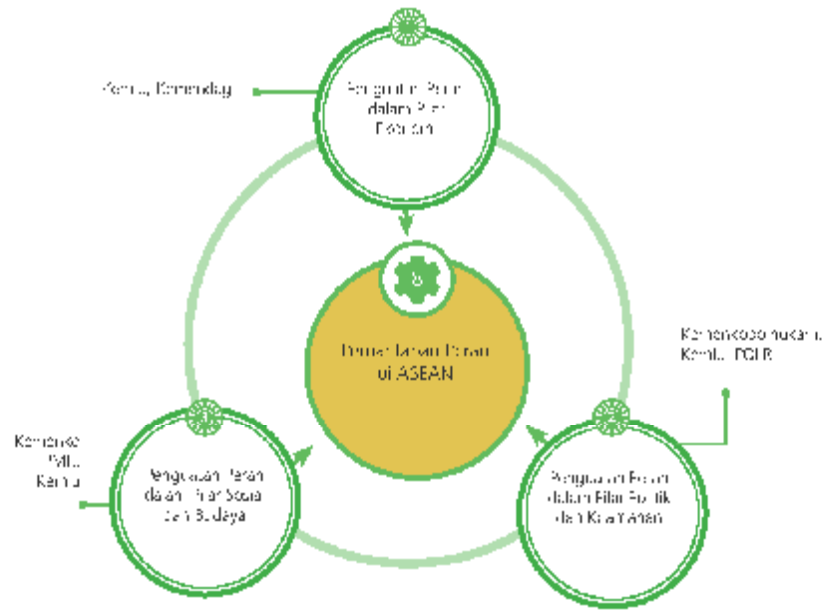


No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Program Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan	
	1. Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral	<ul style="list-style-type: none"> • 38 Kesepakatan di Kawasan Afrika yang ditandatangani • 22 Kesepakatan di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang ditandatangani/dipromosikan • 27 Kesepakatan di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang ditandatangani/dipromosikan • 20 Kesepakatan di Kawasan Timur Tengah yang ditandatangani/dipromosikan • 14 Kesepakatan di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia yang ditandatangani/dipromosikan • 20 Kesepakatan di Kawasan Amerika Utara dan Tengah yang ditandatangani/dipromosikan • 32 Kesepakatan di Kawasan Eropa Barat yang ditandatangani/dipromosikan • 18 Kesepakatan di Kawasan Eropa Tengah dan Timur yang ditandatangani/dipromosikan • Pemula 3 KPK Rute Jalur 3 Negara • 20 kegiatan partisipasi aktif dalam kerjasama sistem untuk meningkatkan benahman modal • 37 isu Hambatan Non-tarif di Negara Mitra Utama dan Mitra Prosedial yang ditangani • Kerjasama Ekonomi Bilateral Komoditas dan Produk
	2. Peningkatan Peran dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	<ul style="list-style-type: none"> • 77% posisi posisi dalam agenda kerja sama teknis melalui mekanisme bilateral dan triangular • Fasilitasi dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri di bidang pertanian • 1 kerangka kerjasama dan NHPK Bidang Metrologi yang disetujui Negara Anggota (Waste Country) • 80 Carta Peta dan 3 Map Penguatan Ulu Perikanan sesuai dengan standar Dikat BPEDM Perhubungan • 1 paket beasiswa Dunia ketiga dan Kerjasama Selatan-Selatan di bidang Sumber Daya Manusia • Peningkatan kapasitas keluarga berencana bagi Filipina • Pelaksanaan kerjasama perikanan di Vietnam
	3. Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan di Tingkat Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • 85% posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, kemiskinan dan lingkungan hidup • Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Regional dan Sub-Regional yang ditandatangani sebesar 100% • Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan yang ditandatangani sebesar 100% • 16 prakarsa/insinerasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional Asia Pasifik dan Afrika yang ditandatangani/dipromosikan • 8 prakarsa/insinerasi Indonesia pada forum kerjasama internasional Amerika dan Eropa yang ditandatangani/dipromosikan • 5 kapasitas pemangku lokal yang dilaksanakan oleh Indonesia pada perundingan APEC dan Organisasi Lainnya • 6 kali penyertaan/modifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum WTO
	4. Pemertanian Rezim Internasional bidang Energy dan Food Security	<ul style="list-style-type: none"> • 90% posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, pertanian, investasi dan FDI

Tabel 5.14.2
Kegiatan
Prioritas
Tingkat
Eplanas
Ekonomi dan
Kerjasama
Pembangunan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Peningkatan Kualitas Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah negara kreditas yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia sebanyak 82 negara • Jumlah negara kreditas yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia sebanyak 29 negara • Persentase peserta ekspor yang memiliki kualifikasi baik dengan predikat memuaskan sebesar 85% • Persentase Pengeluaran dan Penerimaan "terjanjian" internasional di tingkat nasional sebesar 80%

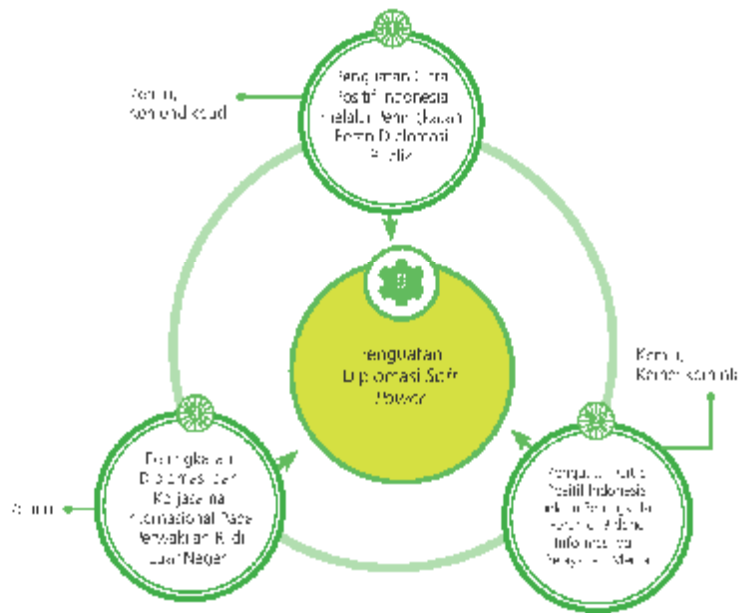
Gambar 2.250
Figu. 2.50
Dit. 2.50
Fentampap
Terand. 2.50



Tabel 3.153
Gingim
Prinip
Yem. 3.153
Yem. 3.153

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
8.	Program Prioritas Pemantapan Peran di ASEAN	
1.	Penguatan Peran dalam Filar Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Saran Kebijakan yang Disetujui untuk Pelaksanaan Kesepakatan ASEAN, termasuk Ekspor, di Tingkat Nasional sebesar 86% • Persentase Disiplin Strategi Indonesia yang dipaparkan di pertemuan lembaga terkait terasial di konsultasi ke DPR pada setiap periode pertemuan internal dan eksternal ASEAN sebesar 85% • Penguatan "Unit AP" Center menjadi AP Center di busan dan 2 pilot project pemantapan AP Center daerah Jawa Barat dan Jawa Timur • Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan dengan negara mitra wisata dan organisasi regional/internasional sebesar 86% • Ayanan selms ASEAN-Indonesia sebesar 82%

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Penguatan Peran dalam Politik dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Rekomendasi terkait Penguatan Peran Indonesia dalam politik dan keamanan di ASEAN • 10 Kesepakatan mengenai kerjasama kapabilitas luar negeri • Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN sebesar 100% • Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan di tingkat Nasional sebesar 66%
3.	Penguatan Peran dalam Politik Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar sosial budaya sebesar 90% • Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya di tingkat Nasional sebesar 66% • Tuntutan rekomendasi kebijakan di bidang wawasan budaya



Tabel 3.231
Regulator Prioritas Penguatan Diplomasi Soft Power

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
9.	Program Prioritas Penguatan Diplomasi Soft Power	
1.	Penguatan Citra Positif Indonesia melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase dukungan kontribusi domestik memfasilitasi dan negara sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia sebesar 100% • Jumlah negara yang memfasilitasi diplomasi budaya Indonesia meningkat ke 46 negara • Persentase kelulusan kontribusi domestik memfasilitasi dan negara sahabat dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia sebesar 100%

Tabel 3.142
Regulator Prioritas Penguatan Diplomasi Soft Power

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Pengujian Citra Positif Indonesia melalui Peningkatan Diplomasi dan Informasi dan Penguatan Media	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan komunikasi publik terhadap kinerja politik luar negeri sebesar 90% 1000 masyarakat Indonesia dan masyarakat asing di luar negeri yang menerima informasi tentang kebijakan pemerintah 10 komitmen penganan informasi dengan organisasi negara asing, lembaga internasional dan swasta asing
3.	Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Persentase publik di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia sebesar 75%

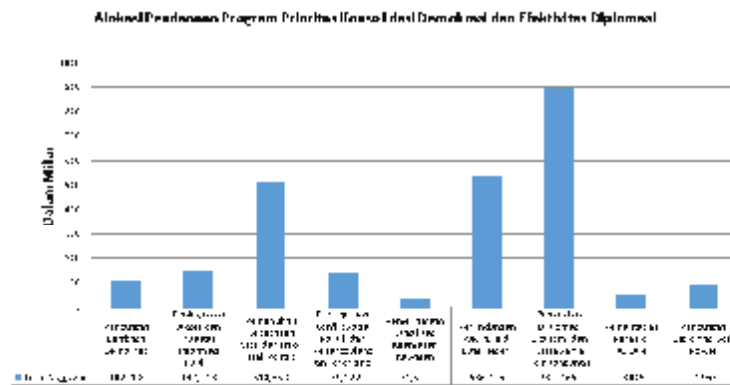
Persebaran Wilayah

Gambar 3.232 Persebaran Wilayah Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi



Alokasi Pendanaan Program Prioritas

Gambar 3.233 Alokasi Pendanaan Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi



Catatan: berdasarkan rekapitulasi VML tanggal 30 Oktober 2016

3.4.4 REFORMASI BIROKRASI

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Sasaran Umum

Ko.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	SKOR P-SAKIP					
	KI	60,24 %	65,14	70 %	75%	80 %
	Enyuk	30,30 %	30,14	48 %	57%	70 %
2	SKOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI					
	KI	47 %	55,14	70 %	81%	90 %
	Enyuk	na	70,14	80 %	80%	90 %
3	TINGKAT KEPATUHAN ATAS UUD, 1959 DAN PERATURAN PERALIHAN KUASA KONSTITUSIONAL					
	Kemeterian	11,24	17,0 %	38,0 %	54,0 %	100,0 %
	lembaga	8,15%	10,0 %	32,0 %	75,0 %	100,0 %
	Enyuk	na	8,00 %	31,75%	52,50 %	100,00 %

*Sumber: Kementerian PANRB, dan Badan PU, Bappenas

Sasaran lain:

Indikator yang digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi adalah:

1. Opini WTP
2. Tingkat kepatuhan UUD
3. Tingkat Kualitas SIP
4. Indeks e-government
5. Tingkat dampak e-governement

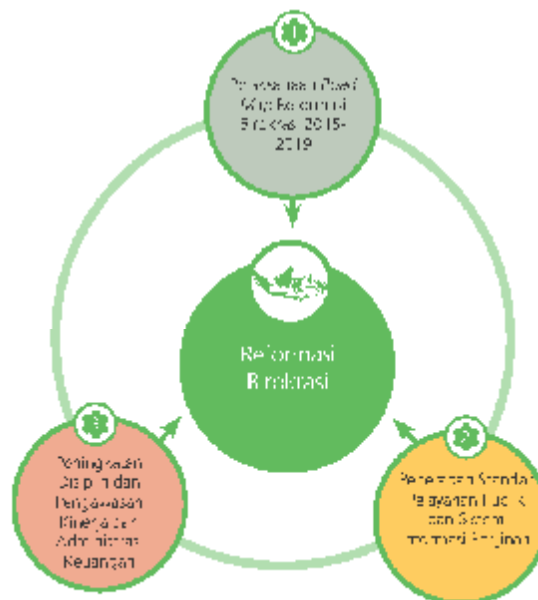
Gambar 3.225
Sasaran Umum
Program
Prioritas
Nasional
Reformasi
Birokrasi

Arah Kebijakan

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi
2. Peningkatan birokrasi yang melayani
3. Peningkatan birokrasi berbasis akuntabilitas

Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi mencakup 3 program prioritas sebagai berikut:



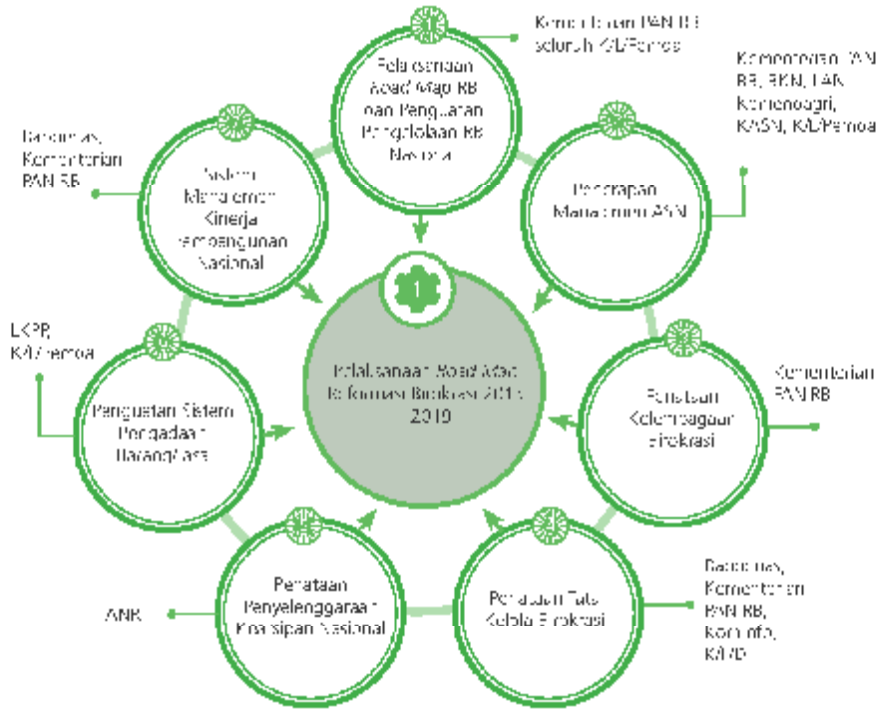
Gambar 3.227
Program
Prioritas
Nasional
Reformasi
Birokrasi

- Prioritas Nasional
- Program Prioritas
- Kegiatan Prioritas

KEGIATAN PRIORITAS

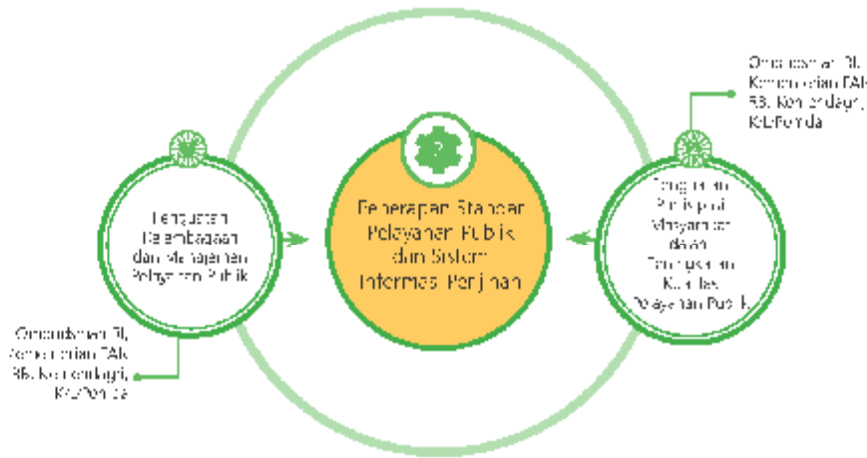
Peaksanaan Road Map RE

Tabel 3.136
Kegiatan
Prioritas
Peaksanaan
Road Map
Reformas
Birokrasi
2015-2019



Tabel 3.135
Kegiatan
Prioritas
Peaksanaan
Road Map
Reformas
Birokrasi
2015-2019

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019	
1	Pelaksanaan Road Map Reformasi birokrasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan road map RB di seluruh KUP/Perdes • Terlaksananya asistensi RE D. 150 instansi pusat dan daerah
2	Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya targetkanalisasi ASN sesuai paragraf pembayangan • Peningkatan kompetensi 4000 Pejabat Pimpinan Tinggi (OPT) • Tercapainya rencana pengembangan ASN di seluruh KUP/Perdes • Peningkatan nilai-nilai ASN Nasional untuk JI
3	Perbaikan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Adu Tutas 27 Lembaga Non Struktural (LNS) • Tercapainya 1 perpres tentang penataan LNE
4	Perbaikan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya master plan dan arsitektur e-government
5	Perbaikan penyelenggaraan Kelembagaan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Berencana 45 simulasi sistem managemen informasi sebagai nasional
6	Pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Tergaungnya 62.500 produk dalam e-catalogue • 610 LPE yang terstandarisasi • Tercapainya jumlah aplikasi functional proppolite 101 sebanyak 3.500 aplikasi
7	Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya non-honlatur seluruh IKU instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi AKIP • Diterapkannya sistem e-governance secara online

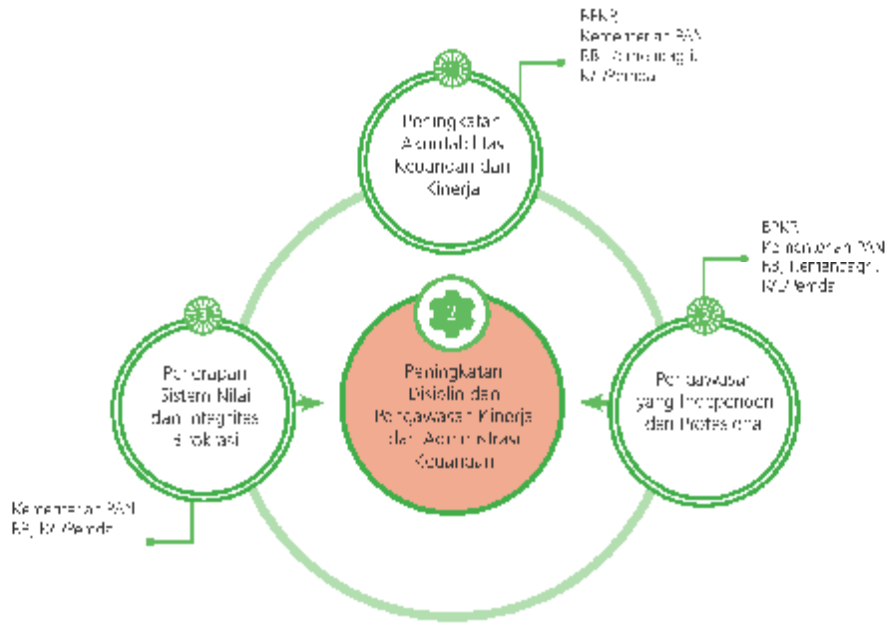


Gambar 3.157
Kategori
Profilas
Pelayanan
Standar
Pelayanan
Publik dan
Sistem
Informasi
Perijinan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan	
1.	Peningkatan kelembagaan dan tata kelola Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Beroperasinya PIA di semua di 51 kabupaten • Pengembangan sistem aplikasi perijinan dan non-perijinan yang di laksanakan kepada TSP, K, K, dan IIZ • Terlaksananya survei kepuasan atas pelaksanaan Jhuanda Jhuanda Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di seluruh K/L/Perda • Terlaksananya tindak lanjut hasil survei keparuhan oleh Ombudsman • 50 persen pelayanan publik yang di capai secara efektif • Diterapkannya SPM dan NSPK sebagai pelayanan publik di seluruh provinsi
2.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasinya seluruh sistem pengacuan K/L/Perda dengan aplikasi IZ/IK • Tersusunnya kebijakan dan pelaksanaan forum sosialisasi publik di bidang pelayanan publik • Tereleaksananya seluruh pengacuan masyarakat atas pelayanan publik

Tabel 3.158
Kategori
Profilas
Pelayanan
Standar
Pelayanan
Publik dan
Sistem
Informasi
Perijinan

Gambar 3.238
Rujukan
Materi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Sinaran
Administrasi
Keuangan



Tabel 3.177
Rujukan
Materi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Sinaran
Administrasi
Keuangan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan	
1	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh seluruh K/P/Perma Adopting dan 2/3 kabupaten yang menerapkan zona AHDU total waktu
2	Pengawasan yang Independen dan Profesional	<ul style="list-style-type: none"> 100% monitoring atas rekomendasi hasil pengawasan PK yang ditindaklanjuti
3	Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan e-CASN dan penanganan dan anjuran konflik kepentingan Pencanangan zona integritas di K/P/Perma

Persebaran Wilayah



Program Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan oleh seluruh KLUPemda, dengan dikoordinir oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Gambar 3.239
Persebaran
Wilayah
Program
Integrasi
National
Reformasi
Birokrasi

Alokasi Pendanaan

Alokasi Pendanaan Program Prioritas Reformasi Birokrasi



Gambar 3.240
Pendanaan
Prioritas
National
Reformasi
Birokrasi

* Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penerima Anggaran Bersama di Direktorat Jenderal Sp. 199.210.00.44/keu Data diambil dari aplikasi sistem informasi Multiiterasi pertanggal 26 Maret 2016 pukul 19.00

3.5 PEMBANGUNAN EKONOMI

3.5.1 PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Pada tahun 2017, investasi tetap didorong sebagai penggerak ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih produktif. Dalam rangka pencapaian target investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong investasi tumbuh dengan laju yang tinggi.

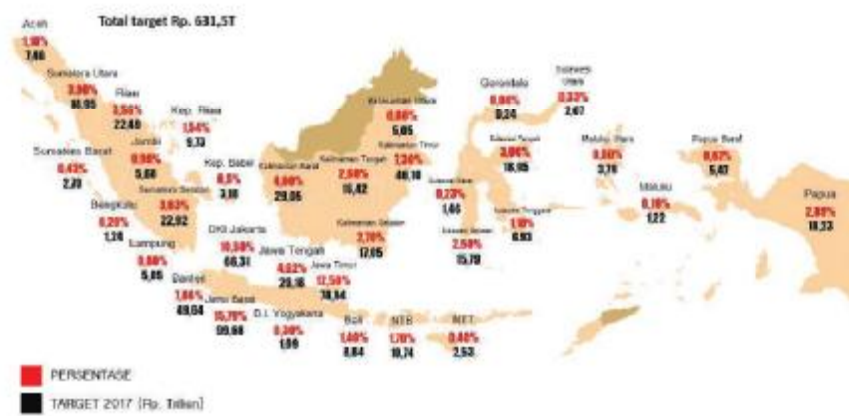
Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Tabel 3.138
Sasaran
Prioritas
 Nasional
Perbaikan Iklim
Investasi dan
Iklim Usaha

No.	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Peringkat Indonesia pada EoDB	120	109	40	35	30
2.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,6	5,1	5,2	6,0-6,6	12,1
3.	Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)*	463,1	519,5	594,8	631,5	933,0
4.	Kontribusi PMDN (%)	33,7	33,8	35	36,3	38,9

*) Yang dicatat oleh BKPM

Gambar 3.241
Sebaran Target
Realisasi
Investasi
Berdasar
Provinsi



Gambar 3.242
Arah Kebijakan
Prioritas
 Nasional
Perbaikan Iklim
Investasi dan
Iklim Usaha

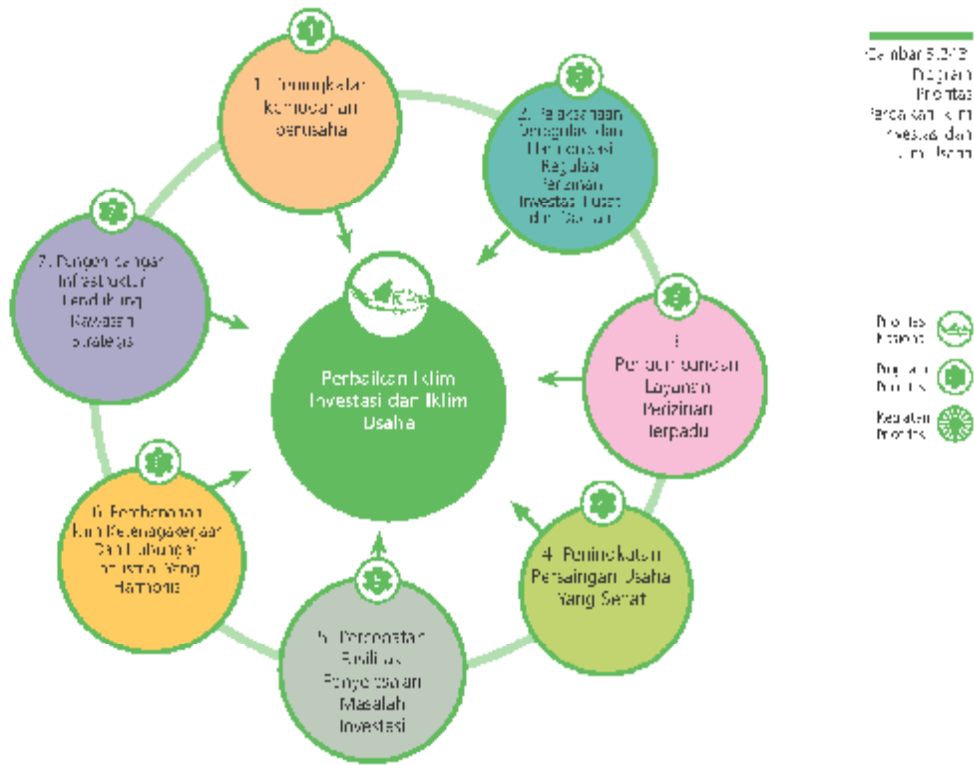
Arah Kebijakan

Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia

**Arah Kebijakan Pendukung
Revolusi Mental**

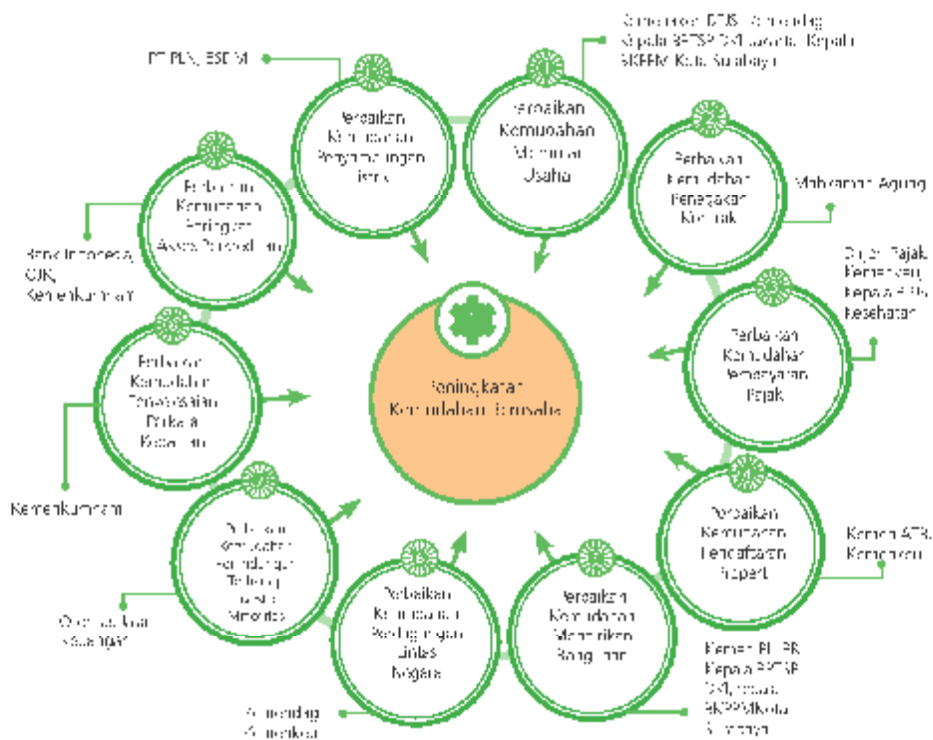
1. Penyediaan layanan publik prima, cepat, murah, terintegrasi, transparan, dan akuntabel (pelayanan berbasis data)
2. Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat

Program Prioritas



Kegiatan Prioritas

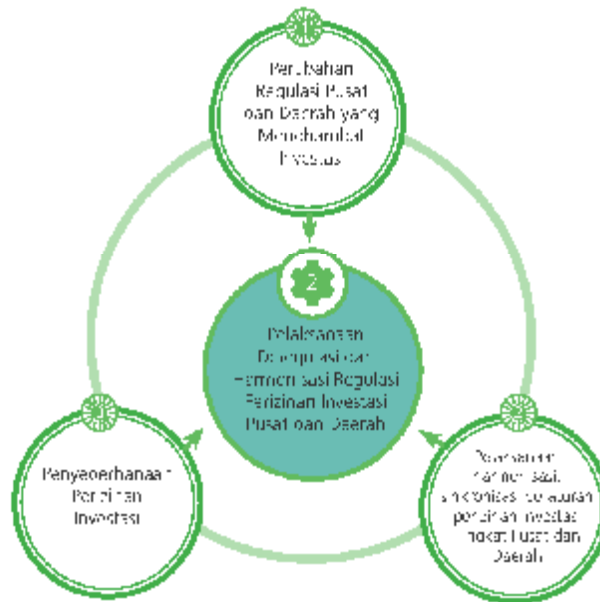
Gambar 4.244
Kegiatan
Prioritas
Peringkatan
Kemudahan
Berusaha



Tabel 4.245
Kegiatan
Prioritas
Perbaikan
Kemudahan
Berusaha

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
Peringkatan Kemudahan Berusaha		
1	Perbaikan kemudahan memulai usaha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu memulai usaha 1 hari, biaya prosedur dan biaya Rp. 1.200.000,- (Rp.810) Persyaratan pendaftaran dan izin usaha perdagangan yang disederhanakan menjadi 1 prosedur Jumlah penerbitan SK-PT dan Easien Hukum Sosial berdasarkan permohonan sebanyak 150.000 SK
2	Perbaikan kemudahan Peringkat Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu penyelesaian kontrak menjadi 58 hari, 11 dokumen dan biaya pendaftaran peringkat kontrak (pendaftaran di kantor sebesar Rp.100.000)
3	Perbaikan kemudahan Pemayaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu kemudahan pembayaran pajak menjadi 166 jam per tahun, prosedur pembayaran (online) menjadi 3 kali
4	Perbaikan kemudahan Pendaftaran Hak Atas Tanah (HGB)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu Pendaftaran Hak Atas Tanah (HGB) selama 3 hari, prosedur pendaftaran sebanyak 3 prosedur dan biaya pendaftaran hak atas tanah sebesar 5 persen dari nilai properti
5	Perbaikan kemudahan Mendirikan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu mendirikan bangunan 35 hari, jumlah prosedur mendirikan bangunan 3 prosedur dan persentase biaya terhadap nilai bangunan 11 persen

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Perbaikan Semuahaan Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Waktu impor (import compliance) 140 jam dan waktu ekspor (export compliance) 72 jam
7.	Perbaikan Perumahan Terhadap Investor Mancanegara	<ul style="list-style-type: none"> Indeks verifikasi kepatuhan dan resolusi menjadi 8 (dari 10), indeks tata kelola pemangku kepentingan menjadi 7 (dari 10) dan indeks kekeluargaan berlingkungan investor menjadi 7,5 (dari 10)
8.	Perbaikan Kemudahan dan penyelesaian perkara sengketa	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu penyelesaian perkara sengketa menjadi 244 hari dan 7 prosedur penyelesaian
9.	Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks keamanan kredit 8 dan cakupan informasi kredit 100% (100%) Jumlah penempatan sertifikat jaminan fidusia terbesar berjumlah sebanyak 5.000 sertifikat
10.	Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah waktu penyambungan listrik 20 hari, prosedur penyambungan 4 prosedur, dan biaya penyambungan sebesar 11% beban dari income per capita



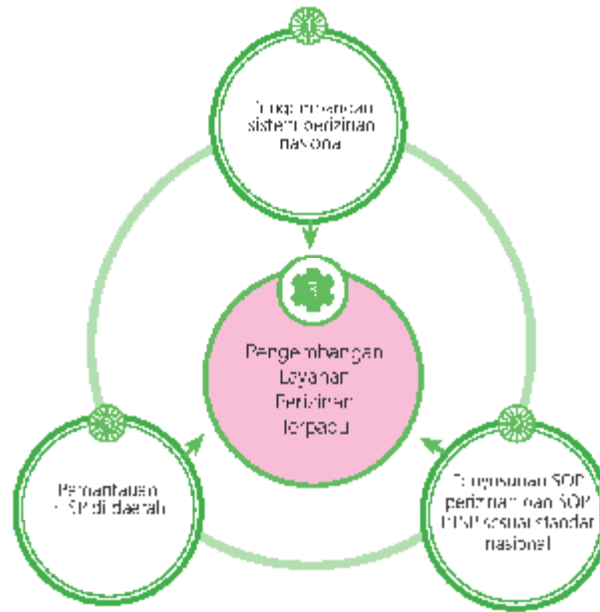
Gambar 3.245 Kegiatan Prioritas Perdagangan Internasional Dengan Sistem Harmonisasi Regulasi Perizinan Investasi Pusat dan Daerah

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Pelaksanaan Deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perizinan Investasi Pusat dan Daerah	
1.	Perubahan regulasi pusat dan daerah yang mendukung investasi	<ul style="list-style-type: none"> 100% pembatalan semua dan perkara yang menghambat investasi dan perizinan yang tidak harmonis

Tabel 3.140 Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perizinan Investasi Pusat dan Daerah

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Implementasi harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/kecamatan lembaga dari daerah	<ul style="list-style-type: none"> 100 persen daerah yang melakukan de-regulasi dan harmonisasi terhadap peraturan pajak daerah dan provinsi 80 persen kabupaten/petaturan bundar dan kabupaten/provinsi yang berorientasi yang diharmonisasikan Rekomendasi simplifikasi peraturan perizinan dan pelayanan publik sektor prioritas (berorientasi ekspor dan padat karya) Rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat nasional yang diharmonisasi dan sinkronisasi untuk 34 provinsi
3	Penyediaan layanan perizinan investasi	<ul style="list-style-type: none"> 100% implementasi rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi untuk meningkatkan peringkat Indeks Ease of Doing Business 2014 yang peringkatnya Rumusan kebijakan untuk perbaikan pelayanan dan proses perizinan di pusat dan daerah 100% rekomendasi kebijakan Timnas PEP dalam rangka mempercepat fasilitasi penyelesaian masalah PPH yang ditindak lanjuti

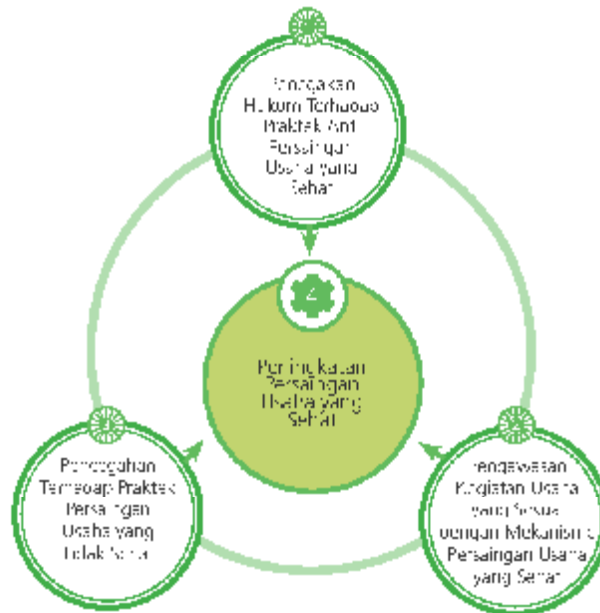
Gambar 3.246
Kegiatan
Pelayanan
Pengembangan
sistem
Perizinan
Terpadu



Gambar 3.241
Kegiatan
Pelayanan
Pengembangan
Layanan
Perizinan
Terpadu

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	
1	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya paket pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang diimpor/kan ke semua PISP Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, serta LHK dan P12 50 PISP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta K12 dan P12 yang terintegrasi dengan EPIFISE dan Tracking System Pengadaan Support Center dan storage serta paket annual technical support (ATS) software Pengembangan sistem informasi kearsipan komitmen PPA/PMON dengan HMI & V

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Penyusunan SOP pelayanan dan SOP PMS sesuai standar nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya satu buku SOP pelayanan persatu usaha, pembinaan dan fasilitas penanaman modal
3.	Pembinaan FTSP di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • 50 FTSP diutamakan model di daerah zona distrik atau zona pengembangannya • 50 kabupaten/kota yang memiliki PMS yang prima

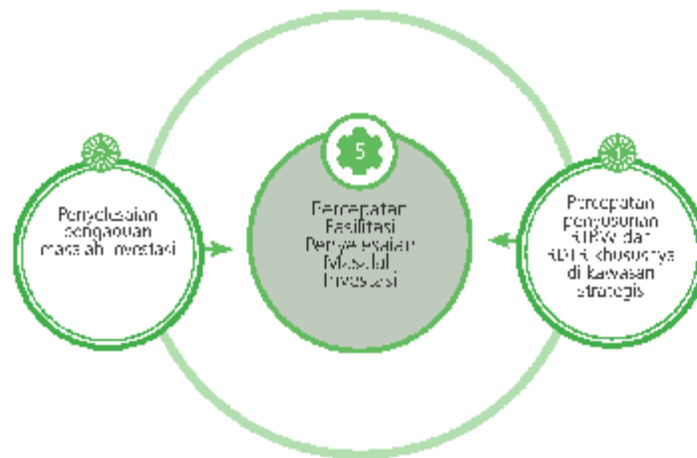


Gambar 3.27
Kegiatan
Prioritas
Peningkatan
Persaingan
Usaha yang
Sehat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
4	Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat	
1.	Pencegahan Hukum Terhadap Praktik Anti Persaingan Usaha yang Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • 50% urusan KPPJ yang dikeluarkan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung selesai dengan tahun berjalan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan perkara persaingan usaha • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan, litigasi, dan eksekusi perkara persaingan usaha • Terlaksananya 3 pengawasan langsung inspeksi terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
2.	Penguasaan Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Mekanisme Persaingan Usaha yang Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya 20 pembinaan struktur usaha dan pengawasan perilaku pelaku usaha • 1 laporan pengawasan kemitraan koperasi dan UMKM
3.	Pencegahan Terhadap Praktik Persaingan Usaha yang Tidak Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya 100 penilaian merger dan akuisisi • Tersedianya 10 saran dan pertimbangan terhadap kebijakan sektor strategis

Tabel 3.14
Kegiatan
Prioritas
Peningkatan
Persaingan
Usaha yang
Sehat

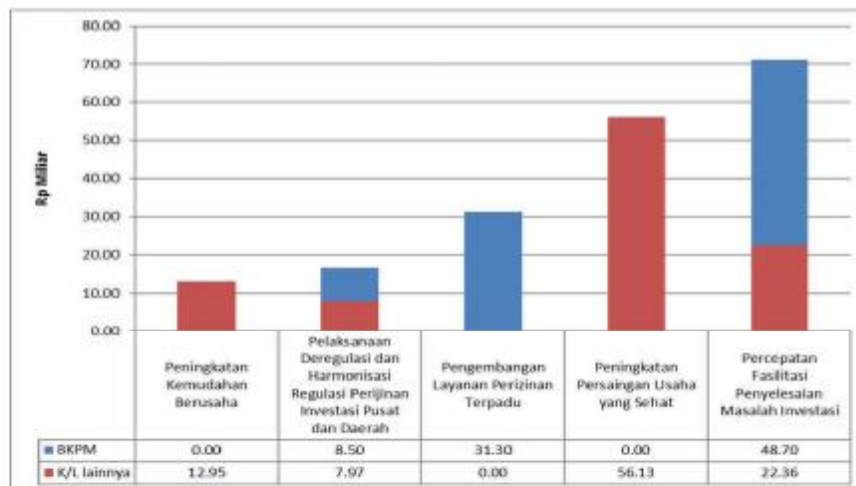
Gambar 3.148
Kegiatan
Prioritas
Percepatan
Penyelesaian
Masalah
Investasi



Gambar 3.149
Kegiatan
Prioritas
Percepatan
Penyelesaian
Masalah
Investasi

NO	Kegiatan Prioritas	Sasaran
5	Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi	
1	Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan teknis kepanitiaan pemerintah daerah dalam penyusunan dan peninjauan kembali RTRW dan penyusunan RDTR di 8 KEK • Tersusunnya materi teknis RDTR kabupaten/kota di sekitar 5 SKK • Terlaksananya pembinaan pembina teknis penyusunan RDTR di sekitar 14 kawasan industri nasional • Tersusunnya materi teknis RDTR kabupaten/kota di sekitar 3 kawasan industri prioritas
2	Penyelesaian pengaduan masalah investasi	<ul style="list-style-type: none"> • 17 Perusahaan yang ditasfasi penyelesaian masalah penanganan modal di wilayah I, 17 perusahaan di wilayah II, 16 perusahaan di wilayah III dan 24 perusahaan di wilayah IV • Tersesainya 2 permasalahan investasi bidang infrastruktur • Fasilitas penyelesaian permasalahan aspi terkait investasi di kawasan
6	Pembinaan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang Harmonis**	
	*Alat Program: Prioritas Antar Kelompok Pekerjaan	
7	Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Kawasan Strategis**	
	*Alat Program: Prioritas Kolektifitas	

Alokasi Pendanaan



Gambar 3.249
Alokasi
Anggaran
Perbaikan Iklim
Investasi dan
Iklim Usaha

Catatan : berdasarkan rekapitulasi SIMU tanggal 26 Maret 2016 untuk K/L lainnya berdasarkan rekapitulasi trilateral meeting tanggal 3 Mei 2016 untuk BKPM

3.5.2 PENINGKATAN EKSPOR NON MIGAS

Pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai pulih menjadi momentum yang baik bagi pelaku usaha dalam negeri untuk beralih dari pasar dalam negeri menjadi berorientasi ekspor, khususnya untuk produk nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada peningkatan konsumsi masyarakat.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Sasaran

Tabel 3.144
Sasaran Umum
Prioritas
Nasional
Peningkatan
Ekspor Non
Migas

No.	Indikator	2014 (base- line)	2015*	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%)	-2,6	-9,8	5,3	7,0-10,4	12,3
2.	Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB (%)	2,6	2,6	2,8	2,9	3,5
3.	Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor (%)	41,3	39,5	47,0	51,0	65,0

Keterangan *) angka realisasi

Gambar 3.250
Sebaran
Sasaran Ekspor
Nonmigas
Berdasarkan
Provinsi



Gambar 3.251
Arah Kebijakan
Prioritas
Nasional
Peningkatan
Ekspor Non
Migas

Arah Kebijakan

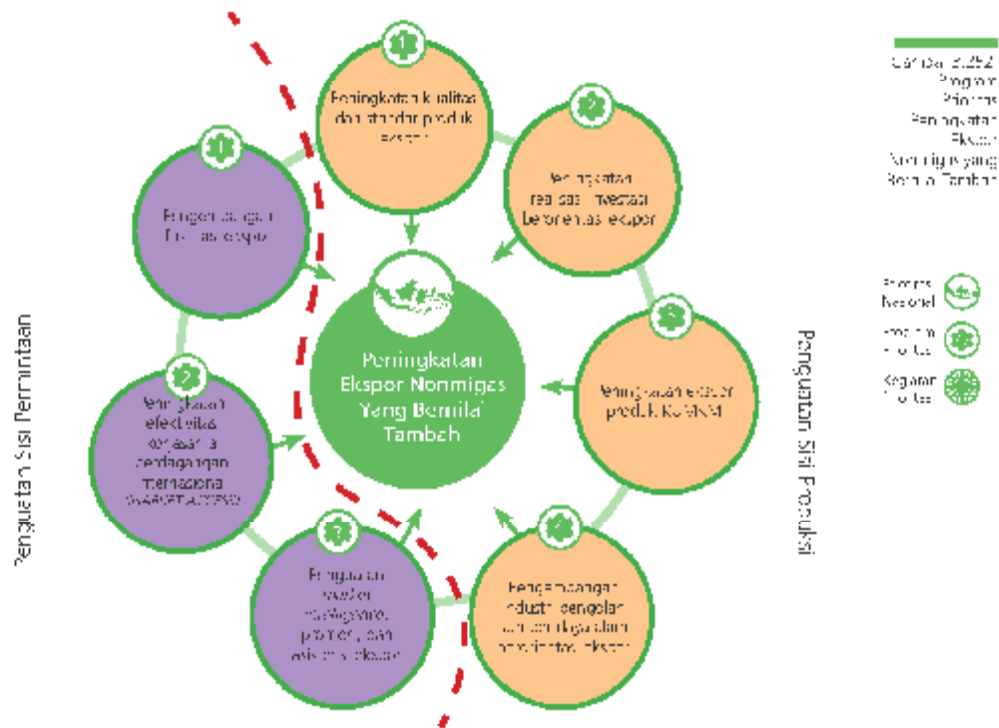
Peningkatan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih diversitas, serta meningkatkan peran aktor Pemerintahan Daerah dalam mendorong potensi produk ekspor daerah.

Strategi Pokok

1. Penguatan Sisi Produksi Produk Ekspor Nonmigas
2. Penguatan Sisi Promosi dan Ekspor
3. Penetapan target ekspor provinsi untuk mendorong potensi ekspor

Program Prioritas

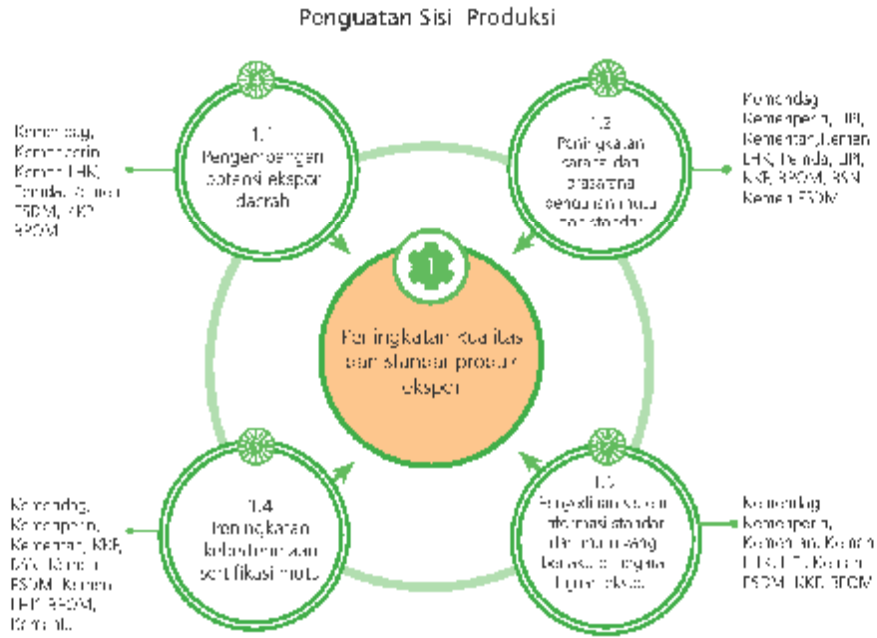
Upaya peningkatan ekspor nonmigas akan dilakukan melalui 7 (tujuh) program prioritas seperti yang ditunjukkan dalam Gambar berikut.



¹ Kulas dan Kegiatan Peningkatan Program Prioritas 4 (Pengembangan Industri) pengabdian masyarakat di tingkat internasional dan internasional dilaksanakan secara mandiri pada kegiatan ini untuk membantu meningkatkan industri dan kawasan ekonomi khusus Kawasan Industri.

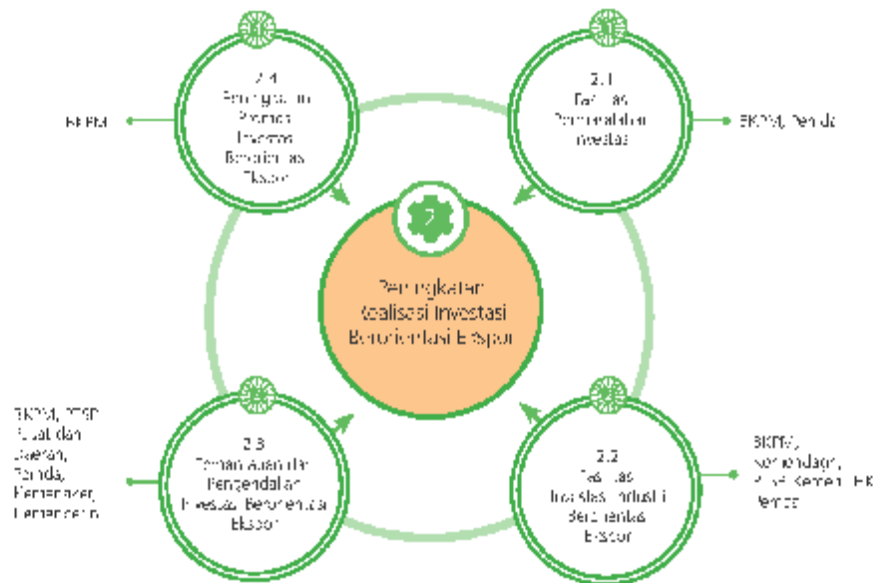
Kegiatan Prioritas

Gambar 2.145 Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor



Tabel 2.146 Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1. Sisi Produksi : Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor		
1	Penguatan potensi ekspor daerah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah ekspor daerah di 11 provinsi Peningkatan 3 tahun nilai komoditas ekspor Nilai ekspor Timbul dan Setara LHK dan PSM dan BSM per tahun mencapai Rp 1,3 triliun Ekspor produk industri bahan-bahan bernilai tinggi mencapai 29,2 juta m³
2	Peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan standar	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan 3 tahun jumlah belayener penerbitan mutu barang Peningkatan kompetensi 1/0 BSM bidang standarisasi dan sertifikasi mutu
3	Peningkatan sistem informasi standar dan mutu yang berbasis digital untuk tujuan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Tersebutnya informasi terkait standar untuk 2 juta tujuan ekspor 75% belayener penerbitan sesuai dengan SIA
4	Peningkatan kelengkapan sertifikasi mutu	<ul style="list-style-type: none"> 1 Mtu dengan PK negara tujuan ekspor

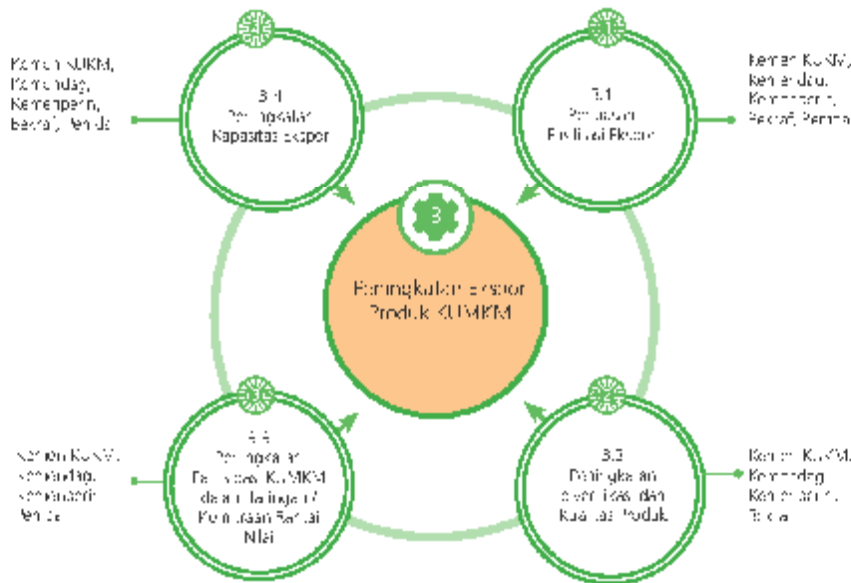


Tabel 3.145
Kegiatan
Monev
dan
Evaluasi
Proses
Perencanaan
Ekspor

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2. Sisi Produksi : Peningkatan Realisasi Investasi berorientasi Ekspor		
1.	fasilitasi permasalahan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah perizinan dan modal yang berorientasi ekspor di Wilayah I (5 perusahaan), Wilayah II (7 perusahaan), Wilayah III (10 perusahaan) dan Wilayah IV (7 perusahaan)
2.	hasil-hasil investasi industri berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rekomendasi kebijakan pemecatan masalah hambatan investasi industri yang berorientasi ekspor
3.	Pemantauan dan pengendalian realisasi investasi berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi investasi berorientasi ekspor di Wilayah I, II, III, dan IV sebesar Rp 35,5 triliun • Peningkatan keselamatan dan ketertarikan pembiayaan ekspor
4.	Peningkatan promosi investasi berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • 35 perusahaan investasi pada sektor yang berorientasi ekspor • Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan BUMN untuk menyukseskan pembiayaan ekspor non migas

Tabel 3.146
Kegiatan
Monev
dan
Evaluasi
Proses
Realisasi
Ekspor

Gambar 3.175
Sugilar
Mizal
Peningkatan
Eksport Produk
KUMKM

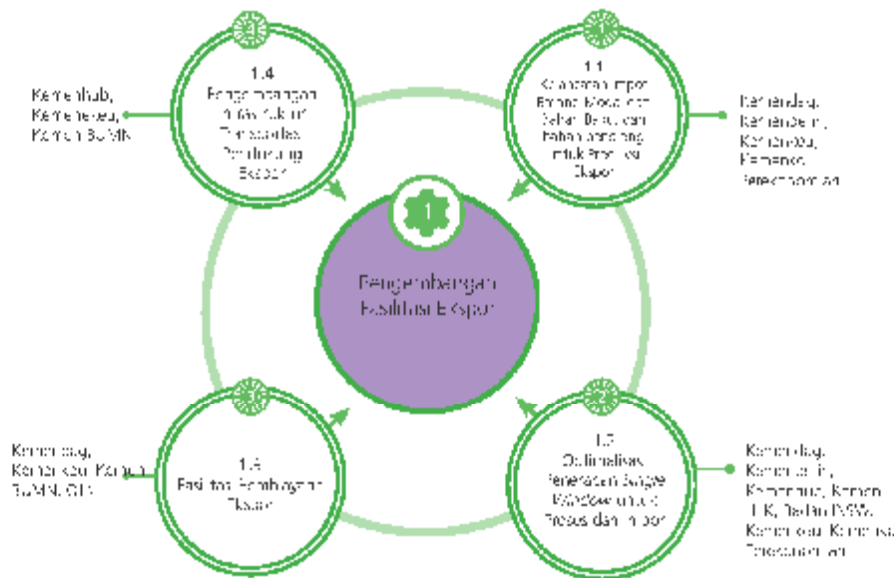


Tabel 3.117
Sugilar
Mizal
Peningkatan
Eksport Produk
KUMKM

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3. Sisi Produksi : Peningkatan Ekspor Produk Koordinasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
1	Perluasan fasilitas ekspor	<ul style="list-style-type: none"> 1.500 UKM mitra bisnis yang difasilitasi 240 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan teknis atau barang gratis atau subsidi 1 unit <i>trade fair</i> berbasis UKM 100 UKM yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran luar negeri
2	Peningkatan direktif kas dan kualitas produk	<ul style="list-style-type: none"> 100 KUMKM yang difasilitasi standarisasi dan mutu produk 500 KUMKM yang difasilitasi akses ke pasar ekspor 400 KUMKM yang difasilitasi sertifikasi halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan Obat, SVLK, ISO, dll terwujudnya 50 desain produk baru dari <i>Indonesia Design Development Standard (ID)</i>
3	Peningkatan aksesibilitas KUMKM dalam jejaring dan transaksi nilai	<ul style="list-style-type: none"> 200 KUMKM mitra bisnis yang difasilitasi Tersedianya Sistem Informasi Online Kemudahan UKM dengan <i>mesor</i> as <i>ng</i>/besar 75 KUMKM yang difasilitasi komitmen produksi dan pemasaran
4	Peningkatan kapasitas ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya volume dan kualitas penjualan dengan bergulir bagi KUMKM untuk mendukung ekspor 0,34 Provinsi 5.000 usaha mikro sektor menengah yang mendapatkan pelatihan dan mentoring 420 SDM KUMKM yang ditingkatkan kompetensi untuk mendukung ekspor

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> • 3000 UKM/di luar UMK yang difasilitasi • 20 pembinaan/koordinasi teknis/bidang selenggara dan pelaku usaha • terciptanya 15 eksporimpor
4	Penguatan Industri Pengula Sun ber Daya Alam Berorientasi Ekspor	
* Lihat Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Baru		

Penguatan Sisi Permintaan

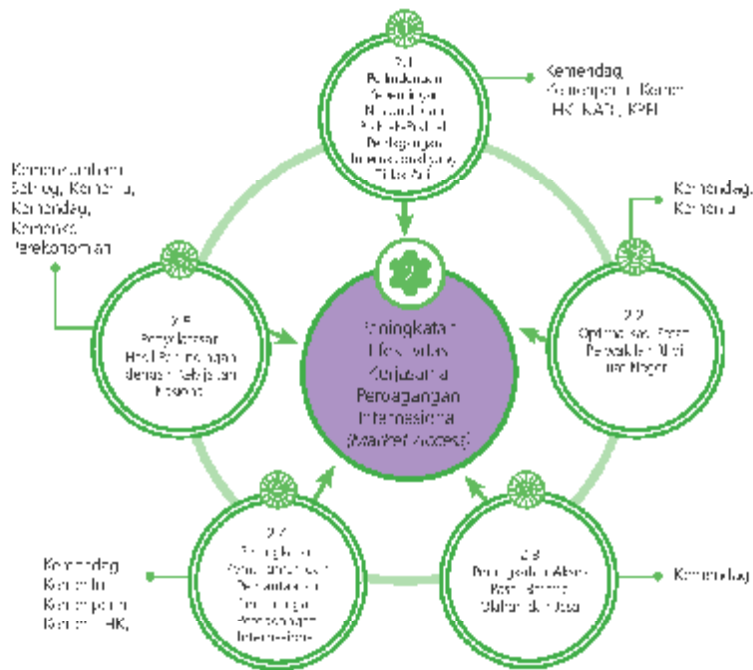


Subsidi 2016
Kegiatan
Prioritas
Penguatan
Sisi Permintaan
Ekspor

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1. Sisi Permintaan: Penguatan Sisi Permintaan Ekspor		
1.	Kelengkapan impor barang mada dan bahan baku, dan bahan penolong untuk produksi ekspor non migas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kontribusi impor barang mada bahan baku dan bahan penolong menjadi sebesar 50,1% • Tersedianya rekomendasi kebijakan fasilitasi ekspor produk manufaktur
2.	Optimalisasi Penerapan Single Window untuk proses ekspor-impor	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pencapaian kinerja ekspor dan impor sesuai dengan SLA sebesar 85% • Meningkatnya penggunaan sistem perantara online bidang perdagangan luar negeri sebesar 10% • Penerapan sistem manajemen risiko untuk bahan baku • Layanan Ekspor/Impor dengan menggunakan ISIR untuk ekspor-impor limbah B3 dan limbah non B3
3.	fasilitasi pelayanan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • 6 fasilitas pengembangan pemasaran ekspor • peningkatan realisasi investasi pemasaran ekspor
4.	Penguatan infrastruktur transportasi pendukung ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • 10 subsidi keiakuat BUN untuk pembangunan infrastruktur transportasi pendukung ekspor non migas

Subsidi 2016
Kegiatan
Prioritas
Penguatan
Sisi Permintaan
Ekspor

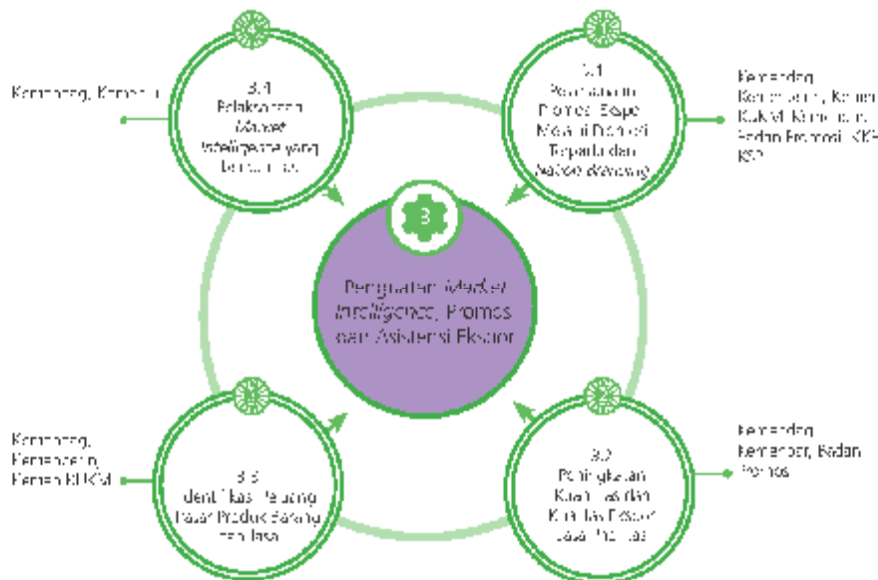
Gambar 2.20
Gegam
2016
Peningkatan
Efektifitas
Kinerja
Kegiatan
Perdagangan
Internasional
(Market
Access)



Tabel 3.143
Gegam
2016
Peningkatan
Efektifitas
Kinerja
Kegiatan
Perdagangan
Internasional
(Market
Access)

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3. Sisi Permintaan : Peningkatan efektifitas kerjasama perdagangan Internasional (Market Access)		
1	Peningkatan kemampuan nasional dari produk domestik internasional yang diakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan 25 tahunnya, kemudian dengan subsidi dan sa sekurad • Peningkatan 60% keajaiban perdagangan nasional di fora internasional • Peningkatan 50 persen senyawa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar domestik Indonesia
2	Optimalisasi peran perwakilan R o luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • 10.000 inc. ig yang efektif dan oleh 19 Fuset Promosi Eksportasi keajaiban Promosi Indonesia • Peningkatan kualitas promosi perwakilan di luar negeri
3	Peningkatan akses pasar barang olahan non pangan Indonesia di pasar internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ekspor jasa standar 7-10% • Peningkatan ekspor jasa lain (keajaiban) ekspor jasa standar 7,92% • Peningkatan indeks content measures yang bershat barrier menuju 2% dari 5 negara tujuan ekspor Indonesia

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional sebesar 10% • Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hasil kerjasama dan kesepakatan perdagangan internasional minimal 80% • Penguatan Unit AEC Center menjadi FTA Center di Musibadan 2 pilot pemerintahan FTA Center Daerah Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur) • Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan SKA pada bentuk sebesar 80%
5.	Fenylngkatan antare-nasil perundingan dengan kebijakan nasional di ca am nezer	<ul style="list-style-type: none"> • Felimaaan 80% dokumen rethikasi dan kominogoc instansi terkait • Penyusunan 1 dokumen implementation plan of (M1-01-191-001) dan <i>Business Strategic Action Plan 2014-2017</i>



Gambar 3.258 Kegiatan Promosi Melalui Digital dan Makro Kawang

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3. Sisi Permintaan : Penguatan Market Intelligence, Promosi, dan Asistensi Ekspor		
1.	Pelaksanaan promosi ekspor melalui pameran beradu dan <i>trade branding</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 24 pameran unggulan luar negeri dan 10 partisipasi di pameran dalam negeri serta 1 trade Expo Indonesia (TEI) yang berikut • 7 kegiatan pendataan produk ekspor • Nilai transaksi ekspor promosi produk ke luar negeri sebesar USD 225 juta • Terwujudnya 2 galeri ekspor produk Indonesia di dalam negeri dan/atau di luar negeri • Peningkatan signifikan <i>trade branding</i> Indonesia dalam brand <i>Export Nation Award Index</i> (target tahun 2017 mencapai 70)
2.	Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • 80% rencana aksi yang di implementasikan beroperasi dan siap

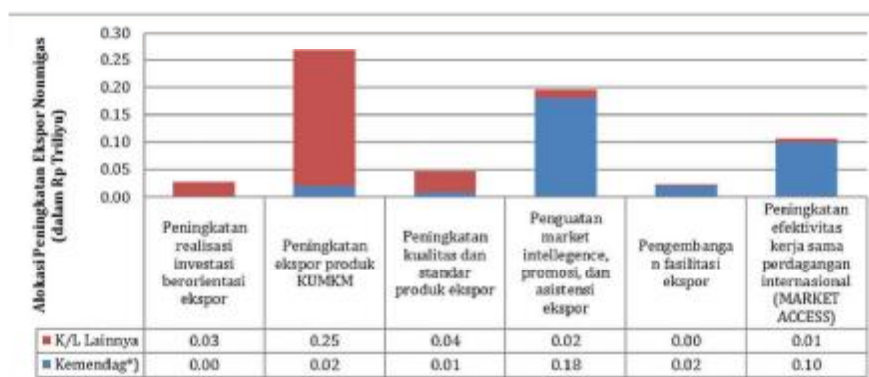
Tabel 3.100 Kegiatan Promosi Melalui *Trade Branding* Melalui Ekspor

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> 50 pengenangan produk ekspor sesuai basis ekspor utama dan prospektif 80 pengembangan produk kreatif/hasil di pasar ekspor utama dan prospektif
4.	Penguatan <i>market intelligence</i> yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> 100 pengamatan pasar TPO (<i>market intelligence</i>) Tersedianya 24 informasi basis data export help desk

Alokasi Pendanaan

Untuk pelaksanaan program prioritas peningkatan ekspor nonmigas dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 0,9 Triliun. Kebutuhan anggaran ini merupakan anggaran di sektor perdagangan (Kemendag) maupun non-sektor perdagangan (misalnya BKPM, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemen LHK, Kemenko Perekonomian, Kemen BUMN, dan lainnya).

Gambar 3.259
Alokasi
Anggaran
Peningkatan
Ekspor
Non Migas
Berdasarkan
Sektor dan
Program
Prioritas



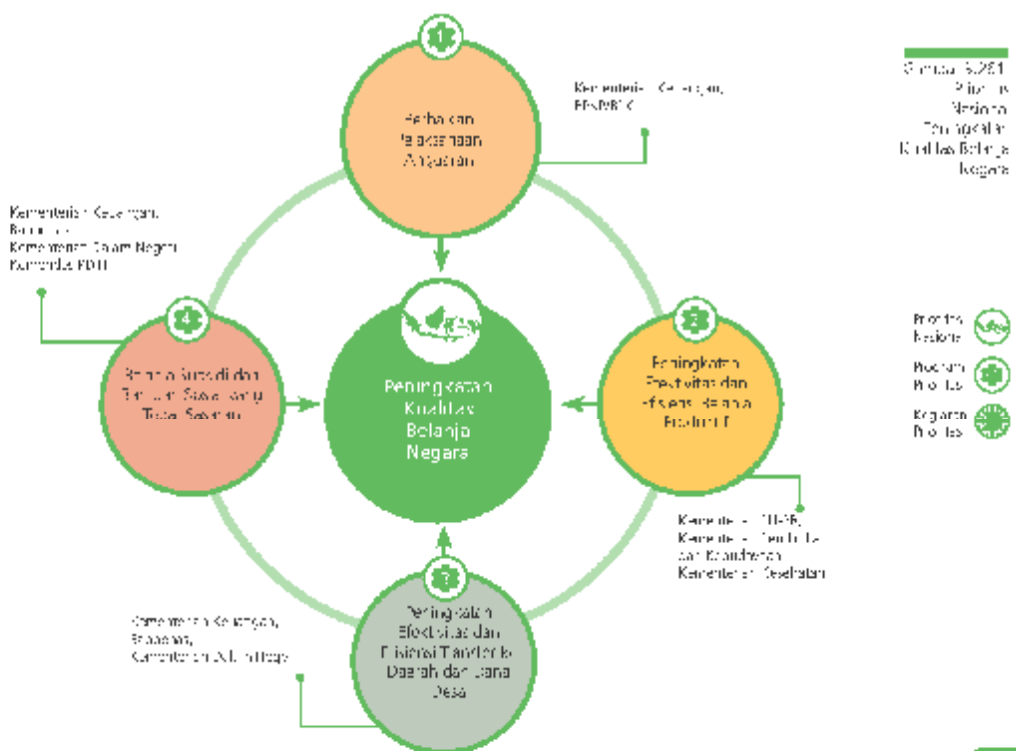
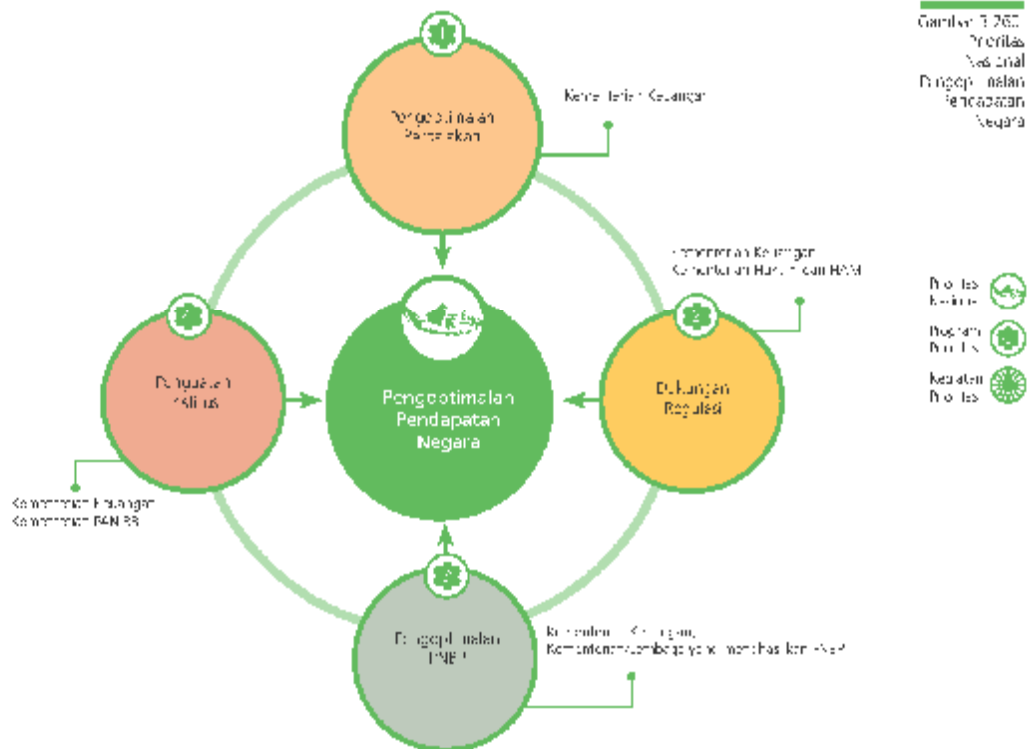
Catatan : berdasarkan rekapitulasi SIMU tanggal 24 Maret 2016 (belum termasuk DAK dan belum semua alokasi kegiatan masuk dalam SIMU)

*) Berdasarkan hasil trilateral meeting Kemendag tanggal 9 Mei 2016

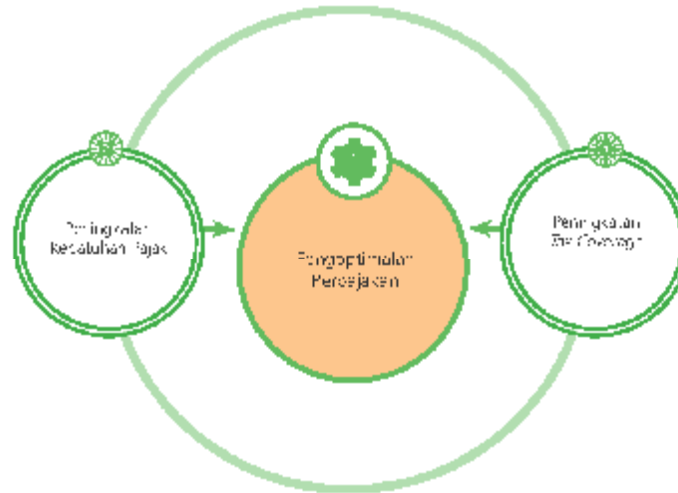
Aspek	Arah Kebijakan
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan dan pembalikan regulasi dan kebijakan untuk memperlengkapi perencanaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit pembiayaan Peningkatan luas yang efektif untuk mencapai jumlah alokasi kas yang ideal untuk membiayai pelaksanaan Mekanisasi kontrol dan <i>approval</i> pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi
Desentralisasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyelesaian RUU tentang Undang-Undang Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Membahas dan pelayanan evaluasi Fiskus/Raport tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Peningkatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk urusan yang telah menjadi kewenangan daerah Peningkatan daya lempas pemerintah pusat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Pembiayaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai terapan kritis sesuai Surat Permintaan (SBM) dan Surat Permintaan (SBM) Optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif Peningkatan LRD melalui pengembangan pasar SBM domestik dan pengembangan metode penawaran SBM yang lebih efisien Peningkatan risiko keuangan yang terintegrasi Peningkatan lembaga keuangan berjaminan investasi dalam satu wadah Implementasi manajemen kekayaan utang (Asset Liability Management - ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara
Reformasi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan satu lembaga khusus (di bawah Presiden) yang bertugas mengumpulkan dana-dana dan penerimaan negara Peningkatan fungsi pengelolaan keuangan fiskal aspek kementerian (Menteri), pemerintahan, dan penerimaan negara Harmonisasi dan sinergi yang berimplikasi pada perencanaan dan pengalokasian anggaran/pendana
Pengawasan Kepabeahan dan Cukai	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>border security</i> Pendirian kawasan bebas cukai di kawasan darat
Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan regulasi media penyelesaian RUU di bidang pengelolaan kekayaan negara Pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi tertib fisik dan tertib hukum Implementasi perencanaan (Rencana BMN, <i>asset planning</i>) melalui penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Negara (RKMGN) Peningkatan pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga

Program Prioritas

Prioritas Nasional Reformasi Fiskal mencakup Empat Program Prioritas dan Prioritas Peningkatan Pendapatan Negara dan Empat Program Prioritas dan Prioritas Peningkatan Kualitas Bejana Negara.

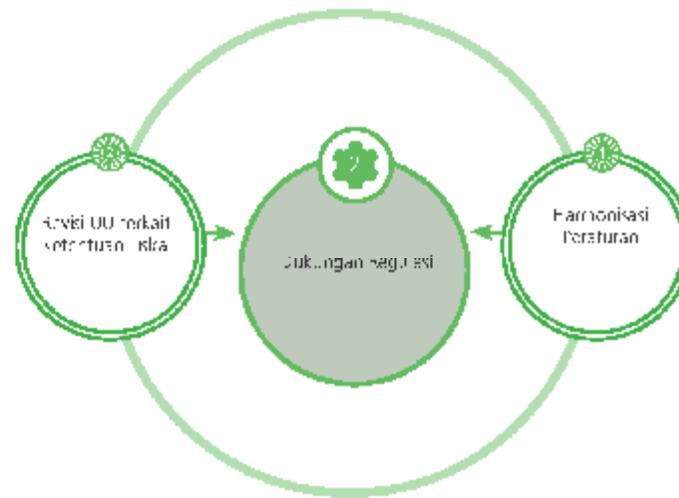


Gambar 3.152
Program
Peningkatan
Efektifitas
Penyaji
Layanan



Tabel 3.153
Program dan
Sasaran
Peningkatan
Efektifitas
Penyaji
Layanan
Negara

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Pergoimalan Persejakan	
	1. Peningkatan Lex Coverage	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas penyaji layanan • Peningkatan efektifitas kerjasama antara lembaga • Peningkatan efektifitas pelayanan Keajaiban di bidang PPP • Peningkatan efektifitas kerjasama antara lembaga • Publikasi dan (v) sensus penduduk (a) semua penduduk (b) antar sensus, (c) statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, (d) statistik tanaman pangan hortikultura, dan perikanan, (e) statistik perumahan, perumahan, dan (v) sensus ekonomi
	2. Peningkatan Keefektifitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Keuasan Pengguna Layanan • Peningkatan efektifitas penegakan hukum • Peningkatan Efektifitas Keajaiban dan dan dan • Peningkatan Efektifitas Penegakkan dan Penegakkan Hukum • Penerimaan Pajak Negara yang Optimal dan Tingkat Keselamatan Wajib Pajak yang Tinggi • Penerimaan Pajak Negara yang Optimal • Pelaksanaan Anggaran yang Optimal • Peningkatan Pelayanan Publik • Terwujudnya Administrasi di Bidang Fasilitas Keajaiban yang Dapat Memberikan Dukungan Industri Perdagangan dan Masyarakat Serta Optimalisasi Peningkatan dan Masyarakat Serta Optimalisasi Peningkatan dan Masyarakat Serta Optimalisasi Peningkatan

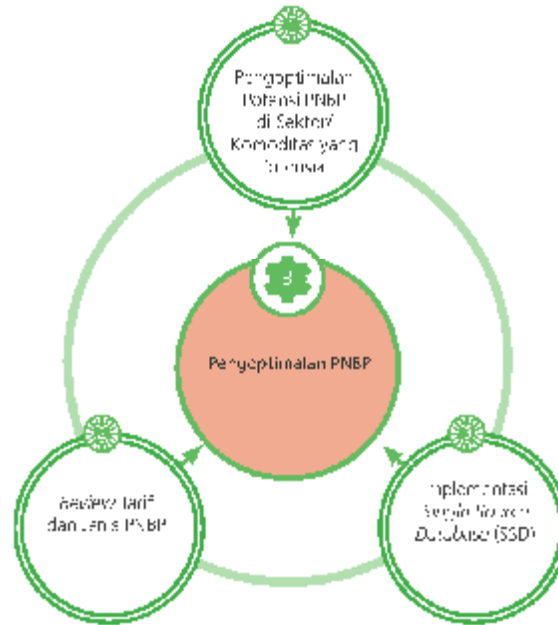


Gambar 3.25.3
Kegiatan
Moralitas
Dukung &
Regulasi

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Dukungan Regulasi	
	1. Harmonisasi Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Belanja Investasi dan Bisnis (sejauh) Percepatan Masyarakat Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal • Terwujudnya Penguatan konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap memperhatikan aspek pendapatan cukai serta terselainya instruksi yang dapat meningkatkan pemanfaatan efek ifluiditas beaya yang terakumulasi • Terselainya Administrasi di Bidang Fasilitas Kesehatan yang Dapat Memerankan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat serta Koordinasi dan Sinergi
	2. Revisi UU terkait Kepatuhan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Belanja Investasi dan Bisnis (sejauh) Percepatan Masyarakat Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

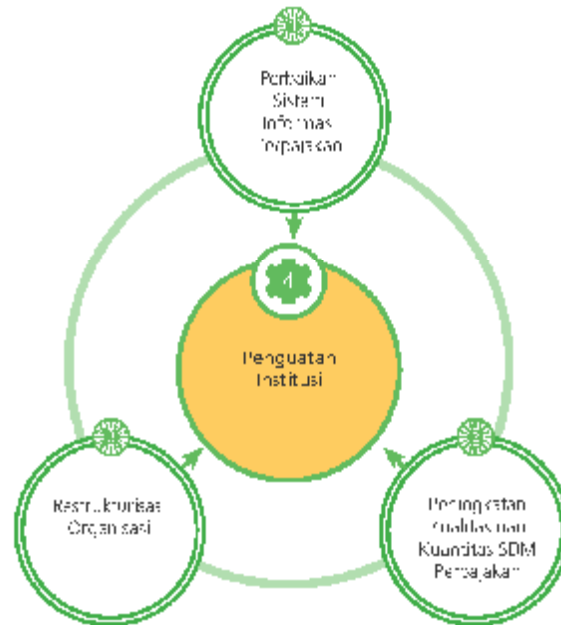
Halaman 3154
Kegiatan
Moralitas
Dukung &
Regulasi

Gambar 2.26
Kegiatan
Mencari Penguat
Optimalisasi
PNEP



Gambar 3.15
Kegiatan
Mencari Penguat
Optimalisasi
PNEP

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Pengoptimalan PNEP	
1	Pengoptimalan Potensi PNEP di Sektor Komoditas yang Potensial	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang PNEP dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat Menyempurnakan Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Menuju pada Tujuannya Kebijakan Fiskal Mengoptimalkan Pembiayaan APBN Hasil Perolehan Pinjaman Sehingga Menurunkan Pengeluaran Keuangan Negara yang Berkesinambungan Optimalisasi oleh Cash Pemerintah Menutupi Cost of Borrowing Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit APBN
2	Implementasi Single Source Database (SSD)	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang PNEP Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat Optimalisasi oleh Cash Pemerintah Menutupi Cost of Borrowing Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit APBN
3	Review Tarif dan Jenis PNEP	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang PNEP dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat Menyempurnakan Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Menuju pada Tujuannya Kebijakan Fiskal

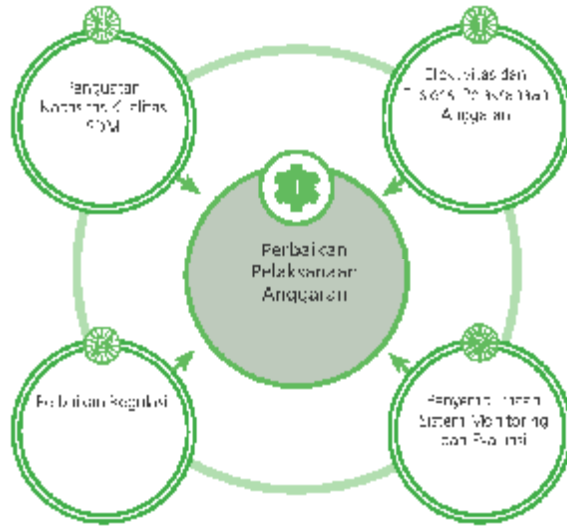


Salah satu kegiatan prioritas yang akan dilakukan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4	Penguatan Institusi	
1.	Perbaikan Sistem Informasi Persejajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Layanan Publik • Sistem Manajemen yang handal • Tersedianya sistem informasi ke pelayanan dan muka yang dapat memberikan fasilitas terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta prima bias penerimaan
2.	Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM Persejajaran	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang kompetitif • Tersedianya Kinerja Kelembagaan DIBC yang Efisien
3.	Restrukturisasi Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Benar-benar Struktur Organisasi yang Efektif • Organisasi Sehat yang Berkualitas Tinggi • Melaksanakan Anggaran yang Efisien • Tersedianya Kinerja Kelembagaan DIBC yang Efisien

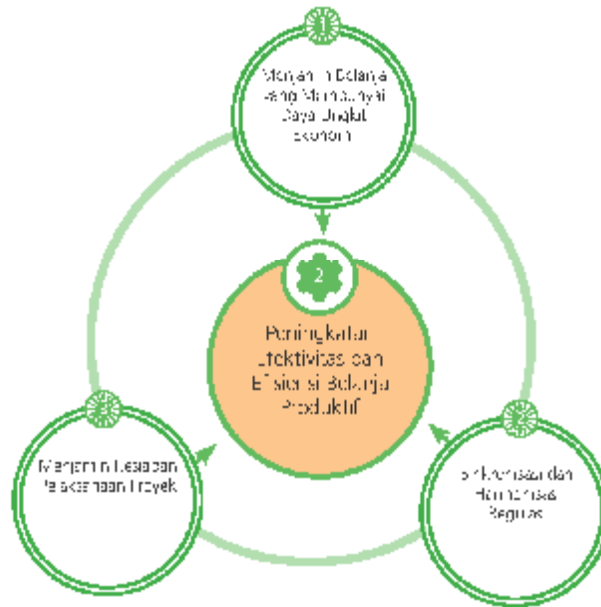
Salah satu kegiatan prioritas yang akan dilakukan

Gambar 2.266 Kegiatan Monev untuk Perbaikan Pelaksanaan Anggaran



Tabel 2.107 Kegiatan Prioritas Perbaikan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
-	Perbaikan Pelaksanaan Anggaran	
1	Identifikasi dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem pelaksanaan anggaran dalam rangka menjamin keancaman pelaksanaan anggaran Wewujudkan Sistem Perencanaan Negara yang Mendem
2	Penyempurnaan Sistem Manajerial dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sub-subsidi Menteri P&A untuk memiliki <i>spending review</i> hasil pelaksanaan anggaran dan permohonan yang dapat digunakan dalam memonitor pelaksanaan anggaran (CI) dan mengevaluasi kinerja belanja (CI) dalam rangka peningkatan Kualitas dan
3	Perbaikan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi regulasi pelaksanaan anggaran melalui deregulasi dengan simplifikasi peraturan yang menghambat kondisi pelaksanaan anggaran yang semakin kompleks Persediaan sistem perencanaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder
4	Pengkatan Kapasitas Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan kinerja pegawai bidang pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan kemahasiswaan, analisis dan kemampuan selanjutnya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan optimal Persediaan sistem perencanaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder Wewujudkan Sistem Perencanaan Negara yang Mendem Memoeriset Penyelenggaraan Dana APBD Kepada Stakeholder dan meningkatkan Perencanaan Stakeholders termasuk kontinuitas Pengelolaan Perbendaharaan Wewujudkan Perencanaan Masalah/risiko terhadap Kontinuitas Pengelolaan Perbendaharaan

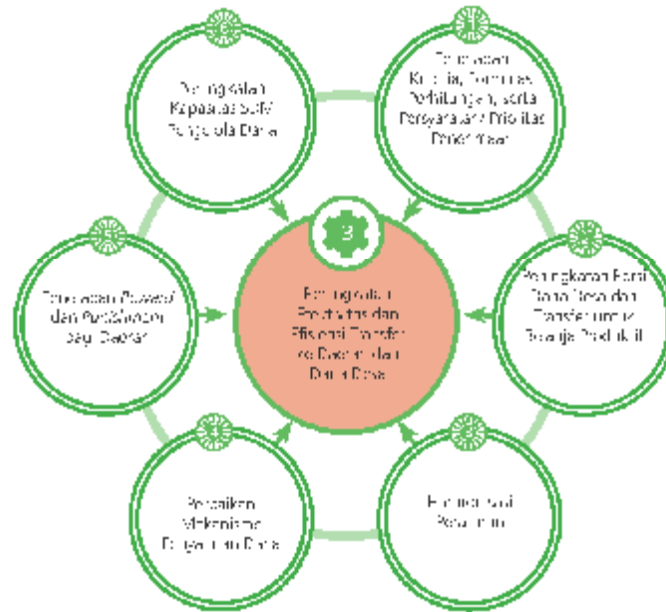


Tabel 3.157
Regulator
Nilai
Peningkatan
Efektivitas
dan Efisiensi
Belanja
Produktif

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran
2	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif	
1	Menjamin Lestari dan Keberlanjutan Daya Unggul Ekonomi	• Pengeluaran sesuai prosedur yang profesional, jujur, dan akurat
2	Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi	• Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBD yang Sistematis Untuk Mendukung Pembangunan Nasional
3	Menjamin kesediaan pelaksanaan proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya laporan pertanggung jawaban dan pembinaaan anggaran APBD • Tersedianya penganggaran pembinaaan dan pengawasan pembinaaan minimum • Tersedianya kegiatan peraturan pengembangan pengendalian lingkungan pertukinan • Tersedianya kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kemitraan serta inovasi ke mana kab/kota • Tersedianya materi teknis, MSPK, rencana dan strategi pengembangan dan pembiayaan mikro, investasi, usaha tani, rumah susun dan rumah swadaya • Tersedianya dokumen kebijakan dan strategi analitis makro pembangunan daerah dan perencanaan sistem informasi pembangunan perumahan

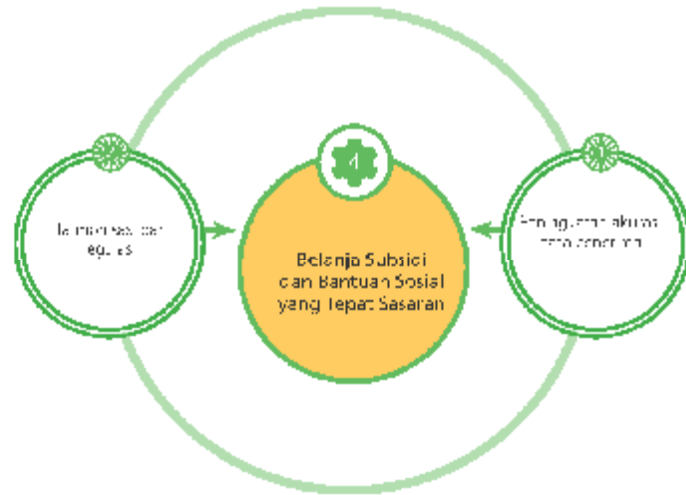
Tabel 3.158
Gedung
Terdapat
Peningkatan
Efektivitas
dan Efisiensi
Belanja
Produktif

Gambar 2.268
Kegiatan
Peningkatan
Efektivitas
dan Efisiensi
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa



Tabel 3.193
Kegiatan
Peningkatan
Efektivitas
dan Efisiensi
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa	
1.	Pondasi dan kriteria Formula perhitungan, serta persyaratan prioritas penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya implementasi penggunaan kriteria kegiatan yang menuntut urusan dan kewenangan sesuai mekanisme urusan dan kewenangan daerah
2.	Peningkatan Perencanaan Dana Desa dan Transfer untuk Belanja Produktif	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya anggaran Dana Desa mencapai pada rata-rata lebih dari 10% dari Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan Publikasi Laporan survei pendahuluan antar kabupaten, koordinasi dan ketenagakerjaan, pendataan pokok Publikasi Laporan analisis dan pengumpulan data statistik daerah
3.	Peningkatan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya progres pembahasan RUU tlg Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU-HKD) Integrasi Rencana Kerja Anggaran APBN yang sustainable untuk mendukung Pembangunan Nasional
4.	Perbaikan Mekanisme Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya perbaikan mekanisme penyaluran dana desa dan transfer lainnya
5.	Peningkatan Akurasi dan Maksimalisasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akurasi dalam pengisian data yang akan dipergunakan dalam formulasi perhitungan Dana Manufik Daerah Publikasi laporan statistik keuangan, teknologi informasi dan komunikasi yang terdistribusi tepat waktu
6.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Dana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemampuan sumber Daya yang memahami aspek-aspek keuangan daerah



Gambar 4.269
Kegiatan
Prioritas
Belanja Subsidi
dan Bantuan
Sosial yang
Tepat Sasaran

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran	
	1. Peningkatan akurasi data penerima	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Investasi Pemerintah yang Profesional, Pruden, dan Akuntabel Mencoba pengukuran mata keranjang yang lebih akurat Pengalokasian anggaran analisis dan pengembangan statistik
	2. Efisiensi dan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kebijakan yang tepat guna yang transparan dan akuntabel Tersusunnya Laporan Keuangan BBL yang transparan dan akuntabel Terlaksananya forum serta pelaksanaan Kebijakan Stimulasi Fokus di Bidang Harmonisasi Produksi Perindustrian Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Perumbuhan Nasional

Tabel 5.160
Kegiatan
Prioritas
Belanja Subsidi
dan Bantuan
Sosial yang
Tepat Sasaran

BAB 4

PEMBANGUNAN BIDANG





The image shows a table of contents on a purple background with a floral pattern. The table consists of seven rows, each representing a section of the document. The text is white and centered within each row. The rows are separated by thin white horizontal lines. The first row is 'Pendahuluan'. The second row is 'Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional'. The third row is 'Prioritas Pembangunan Nasional'. The fourth row is 'Pembangunan Bidang'. The fifth row is 'Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan'. The sixth row is 'Kaidah Pelaksanaan'. The seventh row is 'Penutup'.

Pendahuluan
Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Nasional
Pembangunan Bidang
Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan
Kaidah Pelaksanaan
Penutup



PEMBANGUNAN BIDANG

4.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

4.1.1 PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan sebagai elemen strategis dalam RPJMN 2015-2019 diresepkan secara konkrit di dalam bidang-bidang pembangunan yang relevan. Penerapan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara efisien dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tetap terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas dan kesejahteraan sosial masyarakat terjaga berkeadilan.

Penerapan pembangunan berkelanjutan tersebut sejalan dengan kesepakatan global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diumumkan pada bulan September 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut merupakan kelanjutan dan perluasan dari MDGs, dengan tujuan besar dan komprehensif untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan terpadu didukung dengan tata kelola yang baik.

Pada tahun 2016, persiapan pelaksanaan SDGs telah dilakukan bersama para pemangku kepentingan untuk menelaraskan pelaksanaan SDGs yang sejalan dengan prioritas dan kondisi nasional sesuai RPJMN 2015-2019. Untuk memperkuat komitmen dan memsinergikan para pemangku, kepentingan akan disiapkan rencana aksi pelaksanaan SDGs, agar dapat diarusutamakan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

Sasaran

Sasaran pembangunan berkelanjutan dalam RKP 2017 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan
2. Pembangunan sosial yang meningkat dan berkelanjutan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencapai 65,0-65,5
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan menurunnya tingkat korupsi

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
III	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,0-65,5	66,5-66,5

Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, pembangunan sosial yang meningkat dan berkelanjutan, serta meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi dan menurunnya tingkat korupsi, mengikutinya sasaran pembangunan yang tertera pada Rencana Kerja Pemerintah 2017 (Tabel 2.1)

Tabel 2.1
Sasaran
Pembangunan
Berkelanjutan
tahun 2017

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang juga merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan SDGs adalah:

1. Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan
3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan pengurangan limbah
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam, dan
5. Meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendidikan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya

4.1.2 PENGARUSTAMAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat penting untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, elektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dampak lainnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di lingkungan internasional.

Sasaran

Indikator
Sasaran
Pengukuran
Tahun
Nomenklatur
yang Baik Tahun
2017

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
I.	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik		
1.	SS jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		
	Ka	70,0%	100,0%
	Provinsi	100,0%	100,0%
	Kabupaten	70,0%	100,0%
	Kota	100,0%	100,0%
2.	% KAD yang melaksanakan kerjasama dengan media massa dalam rangka Publik Awareness Campaign jumlah penting ya informasi publik	79,1%	100,0%
3.	% KAD yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat	86,0%	100,0%
4.	% KAD yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja	86,0%	100,0%
II.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan		
1.1.	SS KAD yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik	81,0%	100,0%
1.2.	% KAD yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing	50,0%	100,0%
1.3.	SS KAD yang memiliki sistem publikasi informasi yang mudah diakses	62,1%	100,0%

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
II.4	% K/L/D yang memiliki mentasarane partisipasi masyarakat dalam alih bentukan dan pelaksanaan pembangunan dan inovasi pembangunan	80,8%	100,0%
III. Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi			
III.1	% K/L/D yang telah menyusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi	47,5%	100,0%
III.2	% K/L/D yang telah melakukan renstrat organisasi	70,3%	100,0%
III.3	% K/L/D yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi unit kerja	83,9%	100,0%
III.4	Jumlah K/L/D yang memajukan dan meneruskan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan	90,8%	100,0%
III.5	% K/L/D yang menggunakan Computer Control Jarak (CCJ) secara maksimal dalam CPS	85,1%	100,0%
III.5	% K/L/D yang menerapkan sasaran kinerja pegawai	40,0%	100,0%
III.7	% Jumlah K/L/D yang meniadakan 5 unsur sistem pengendalian internal pemerintahan	77,0%	80,0%
III.8	% Pemerintah Daerah yang telah mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) secara penuh	10,8%	100,0%
III.9	Penerapan e-Proc	60,0%	100,0%
IV. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
IV.1	% Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan	80,5%	100,0%
IV.2	% Unit penyelenggara pelayanan publik yang memfasilitasi Unit Pelayanan Masyarakat berbasis telecektif informasi	40,1%	100,0%
IV.3	% Unit penyelenggara pelayanan publik yang memfasilitasi sistem informasi pelayanan publik berbasis IT	81,8%	100,0%
IV.4	% Unit penyelenggara pelayanan publik yang menerbitkan pelayanan melalui satu Pintu (1-SP)	15,1%	100,0%
IV.5	% Unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat	20,0%	100,0%

Arah Kebijakan

Gambar 4.1
Arah Kebijakan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan yang Baik Tahun
2017

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan	Peningkatan kapasitas birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik
<ul style="list-style-type: none"> Masukkan pemerintah ke dalam Portal Pengaduan Masyarakat Sejajarkan dengan media massa dan media online pemerintah sebagai media penghubung ke komisi audit Publikasi proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masing-masing instansi Publikasi laporan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan informasi dan komunikasi dari masyarakat melalui pengumuman, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Publikasi informasi hasil program dan kegiatan prioritas di instansi pemerintah Tanpa hambatan akses ke informasi yang dapat diakses dan sudah dipamerkan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan Grand Design dan Road Map Ketersediaan Burekrasi Tanpa hambatan akses ke informasi yang dapat diakses dan sudah dipamerkan Pengaturan penerimaan sistem pemerintahan melalui Pengaturan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pengaturan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Berbasis Mobile (SMB) dan Sistem Informasi Manajemen Data (SMD) untuk seluruh organisasi Pengembangan Sistem Sistem Berbasis Aplikasi dan Sistem Informasi Pemerintah Pengembangan dan pemanfaatan e-Government Pengembangan Sistem dan Unit Organisasi pemerintah Pengembangan laporan kinerja yang akurat dan berbasis teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Audit Pengembangan layanan keadilan, cepat, dan yang dapat diakses Menyediakan informasi yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Menyediakan buku, database, Yag dapat diakses kinerja pelayanan publik

4.1.3 PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

KKG dalam pelaksanaan pembangunan manusia di Indonesia semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) (metode baru) dari 89,42 tahun 2010 menjadi 90,34 tahun 2014. Namun demikian masih terdapat ketidaksihinggaan gender di berbagai bidang pembangunan. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf (AMH) perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Selain gender lainnya ada ada angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi. Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kontribusi perempuan dalam kerja-pekerjaan di sektor non pertanian, dan rata-rata upah pekerja perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif juga masih rendah.

Sasaran

Deri uraian di atas, secara umum sasaran PUG tahun 2017 adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur dengan:

No	Indikator	2014 (baseline)	2017	Sasaran Akhir RP. MN 2019
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,34	Meningkat	Meningkat
2.	Indeks Keadilan Gender (IKG)	9,48	Meningkat	Meningkat

Tabel 4.0
Sasaran
Pembangunan
G20 dan Tahun
2017

Secara khusus, sasaran PUG tahun 2017 adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasio AMHR/rata-rata lama sekolah/partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan, sumbuangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang diukur dari prevalensi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP); dan (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan, data terdolan dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM terlatih, serta terlaksananya koordinasi antar berbagai kepentingan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui: (i) peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang PUG; (ii) peningkatan ketersediaan data terpilah dan percepatan pelaksanaan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di K/L/Pemda; dan (iii) peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam menangani berbagai isu gender.
2. Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui: (i) peningkatan upaya pencegahan KTP; (ii) peningkatan akses dan kualitas layanan bagi korban KTP; (iii) penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum bagi korban KTP; (iv) peningkatan ketersediaan data KTP; (v) peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani KTP; dan (vi) peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari KIP, yang dilakukan melalui: (i) peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang PUG dan KTP; (ii) penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang responsif gender di K/L/Pemda; (iii) pelaksanaan review, harmonisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan aturan pelaksanaan terkait KTP; (iv) peningkatan kapasitas SDM lembaga penggerak PUG/PPRG dan lembaga layanan bagi korban KTP; (v) penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG/PPRG serta pencegahan dan penanganan KIP; (vi) penguatan jejaring PUG di pusat dan daerah; (vii) penguatan

sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; (viii) penguatan kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan di K/L/Pemda; dan (ix) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG/PPRG dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtP.

4.1.4 PENGARUSUTAMAAN ANTI NARKOBA

Pengarusutamaan anti narkoba dilaksanakan sejak periode RKP 2016. Pengarusutamaan tersebut bersifat imperatif mengingat tingginya resiko penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tingginya resiko tersebut ditunjukkan melalui semakin banyaknya kelompok masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba seperti para anak-anak usia TK dan SD; masih intensnya peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari dalam penjara; kapasitas teknologi yang belum mampu kontrol produksi dan distribusi narkoba; serta makin meningkatnya kerugian yang terkait penyalahgunaan narkoba sebesar Rp63,1 triliun per tahun. Mengingat tingkat kerawannya, diperlukan kesadaran bersama dan sinergitas yang lebih kuat untuk dapat menekan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara rasional dan berkelanjutan.

Sasaran

Tabel 4.4
Sasaran
Pengarusutamaan
Anti Narkoba
Perubahan Anti
Narkoba
Tahun 2017

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba			
1	% K/L/DA yang melaksanakan tes urin bagi pegawainya	50,0%	100,0%
2	% K/L/DA yang menyosialisasikan informasi bahaya narkoba di lingkungan kerjanya	70,0%	100,0%
3	% K/L/DA yang mempunyai satuan tugas (satgas) anti narkoba	50,0%	100,0%

Arah Kebijakan

Pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan tes urin bagi pegawai secara berkala oleh K/L/DA
2. Pelaksanaan diseminasi informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba baik cara media cetak, elektronik, dalam dan luar ruangan (misalnya, poster, majalah, videotron, situs, belihon, LED, spanduk, dan sejenisnya)
3. Pembentukan satgas satgas anti narkoba di seluruh K/L/DA

4.1.5 PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk tahun 2017 terus diperkuat. Mitigasi atau pengurangan penyebab perubahan iklim terus dilakukan terutama pada sektor prioritas, yaitu kegiatan berbasis lahan dan hutan, gambut, serta energi, dapat menurunkan emisi dan menghindari penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK). Sementara, kegiatan adaptasi perubahan iklim dititikuskan pada upaya peningkatan sistem ekonomi, sosial, dan kolektif untuk meningkatkan daya tahan menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi.

Sasaran

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RP. MN 2019
I. Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas			
1.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap kondisi dasar pada usual di tahun 2010	20,0%	Menekuni 26%
II. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim			
2.	Jumlah wilayah yang telah menyusun strategi adaptasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan	4	11

Tabel 1.5
Sasaran
Penguatan dan
Peningkatan
Jumlah Bidang
Terintegrasi
dan 2017

Arah Kebijakan

1. Penguatan upaya mitigasi perubahan iklim, melalui: (i) Perluasan dan pengembangan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, antara lain melalui pengembangan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan energi baru dan terbarukan (bioenergi dan biomassa – pengembangan PLT Matahari, Hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir), efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii) Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iii) Pengembangan dan mobilisasi sumberdaya untuk perubahan iklim, termasuk penguatan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim (CCFE); (iv) Peningkatan inventarisasi GRK di Pusat dan Daerah; dan (v) Kaji ulang RAD-GRK.
2. Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis, dan pelaksanaan upaya adaptasi di 3 (tiga) daerah percontohan, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan dengan melakukan: (i) Pelaksanaan rencana aksi adaptasi perubahan iklim secara terkoordinasi antara KL dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii) Penguatan mekanisme dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adaptasi di pusat dan daerah; (iii) Finalisasi indikator kerentanan, sistem informasi dan database kerentanan, dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim; dan (iv) Penguatan kapasitas daerah dalam melaksanakan adaptasi seruasannya.

4.2. BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

4.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1. Pelayanan KB				
a.	Angka prevalensi low TFRMS (Gly) KBRH5 per kabupaten/ kota reduksi 15-19 tahun	2,8 (50,45012)	2,8	1,28
b.	Angka prevalensi peningkatan kompetensi (Competence Assessment Result) staf unit unit pelayanan KB	61,9 (SKK 2012)	65,8	66,0

Tabel 1.6
Sasaran
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
	11. Tingginya perilaku tidak bertanggung jawab	27, (SKK 2013)	25,3	24,0
	12. Persentase penggabungan lembaga komunikasi, informasi dan publikasi (KIP) (persen)	18,3 (SKK 2013) 10,6 (Survei 5 SKK 2013)	21,7	23,5
c	Angka kematian bayi (AKDR) (persen)	11,4 (Survei 5 SKK 2013)	10,3	9,5
2. Advokasi dan KIE				
a	Persentase TMS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang komunikasi dan konsultasi modern (persen)	41 (Survei RPJMN 2013, SKKBN)	41	40
b	Persentase pengetahuan masyarakat tentang ibu kebidanan (persen)	34 (Survei RPJMN 2013, SKKBN)	38	50
3. Pembinaan Remaja				
a	Angka kelahiran kasar remaja (kemungkinan usia 15-19 tahun) (Age-Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 years old) (Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	48 (SKK 2012)	42	38
b	Median usia kawin pertama perempuan (penemuan usia kawin pertama) (tahun)	20,1 (2012)	21,0	21,0
4. Pembangunan Keluarga				
a	Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang Lunas keluarga (Persen)	5 (Survei RPJMN 2013, SKKBN)	30	50
5. Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi				
a	Menyusunnya kapasitas kelembagaan pemanfaatan sistem informasi dan keluarga berencana di pusat dan daerah	Dianggap komplet dan kapasitas	Untuk kemungkinan pemanfaatan sistem informasi kelembagaan KKB secara bertahap	Terbentuknya kelembagaan pemanfaatan sistem informasi kelembagaan KKB secara bertahap
b	Terwujudnya landasan hukum dan kebijakan yang mendukung harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya	1. UU 52/2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Peraturan perundang-undangan terkait dengan perkembangan program	Peraturan pelaksanaan terkait dengan perkembangan program

No	Indikator	2014 (Rencana)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
		2. Meningkatkan kemandirian, ketahanan, kesetaraan, dan pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga		
c.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKBPK yang akurat dan tepat waktu serta pembaruan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	Registrasi Penduduk, Sensus, Survei, Proyeksi Data Keluarga dan Kajian Tertentu KKBPK	tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan KKBPK dari berbagai sumber	tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan KKBPK dari berbagai sumber

Arah Kebijakan

Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui:

1. Meningkatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokan), penyediaan pelayanan medis dan pelayanan kontrasepsi, dan penyediaan fasilitas kesehatan reproduksi serta sarana dan prasarana kesehatan reproduksi.
2. Memperkuat advokasi kepada para pemangku kebijakan melalui berbagai media dan audiensi, serta memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat (khususnya PUS) melalui berbagai bauran media dan tenaga lapangan KKB tenag program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui pusat konseling kesehatan reproduksi remaja serta bina keluarga remaja
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga
5. Memperkuat kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyesuaian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta memperkuat data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana

4.2.2 Kesehatan

Sasaran

No	Indikator	2014 (Rencana)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Kesehatan Sehat (KIS) sebagai jaring	88,4	94,4	100,0

Tabel 7
Sasaran
Kesehatan

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
3.	Persentase nagari/kabupaten/kota/kelurahan yang mendapat ASI eksklusif	38 (2013)	44	50
4.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi		1.400	5.000
4.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10	297	487
5.	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	212 (2013)	265	300
6.	Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	20 (2013)	21	34
7.	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	15,3 (2013)	50,0	70,0
8.	Persentase ketersediaan obat-obatan di Puskesmas	75,5	88,0	90,0
9.	Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis perujukannya	15	40	60
10.	Persentase alat yang memenuhi syarat	93	93	94

Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk:

1. Mengakselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas
 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
 6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
 7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
 8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan
 9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 10. Memperkuat manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan
1. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) cabang kesehatan
 2. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan

4.2.3. Pendidikan

Sasaran

Tabel 4.8
Sasaran
Pendidikan

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	APK EDAM/Sesuai	11,04	11,43	11,09

No	Indikator	2014 (Rasio)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
2.	APK SD/MI/Sederajat	91,28	92,20	94,78
3.	APK SMP/MTs/Sederajat	101,57	105,29	106,94
4.	APK SMA/MA/Sederajat	79,43	81,29	82,02
5.	APK NMA/AMK/VA/Sederajat	79,22	88,14	91,83
6.	APK SMA/SMK/MA/Sederajat	55,25	63,89	67,48
7.	APK TI	28,51	37,95	46,73
8.	APK PAUD	66,81	72,37	77,23

Arah Kebijakan

Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi dan daya saing pendidikan melalui:

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, dan memuaskan dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah ber kualitas
2. Peningkatan kualitas pembelajaran yang mencakup penguatan jaminan mutu pendidikan, kurikulum, dan sistem penilaian pendidikan
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas, pengelolaan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini
5. Peningkatan kualitas pendidikan orang dewasa yang mencakup pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, dan pendidikan keluarga
6. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan keagamaan
8. Peningkatan pendidikan agama, kewargan, dan karakter di sekolah
9. Peningkatan akses dan kualitas, serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
Penguatan tata kelola pendidikan

4.2.4 Perpustakaan

Sasaran

No	Indikator	2014 (Basis)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Perustakaan yang meningkatkan Perustakaan juta orang	17	20	22
2.	Koleksi Perustakaan Nasional (juta)	153	191	194
3.	Perpustakaan daerah yang sesuai dengan standar (juta)	89	111	133

Tabel 4.3
Sasaran
Perpustakaan

Arah Kebijakan

Pembangunan perpustakaan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui:
 - a. pembudayaan kegemaran membaca
 - b. pemilihan duta baca yang inspiratif
 - c. sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui:
 - a. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
 - b. peningkatan kualitas dan keseragaman koleksi perpustakaan serta naskah kuno termasuk karya cetak dan karya rekam
 - c. pengencangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
 - d. memperkuat kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan dunia usaha

4.2.5 Pemuda dan Olahraga

Sasaran

Tabel 4.11
Sasaran
Pemuda dan
Olahraga

No	Indikator	2014 (base/td)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019	
1.	Pertabilitas pemuda di berbagai bidang pembangunan				
	Pemuda yang difasilitasi sebagai Facer Kewirausahaan (Orang)	4.000	4.000	4.000	
	Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan olahraga kreatif (Orang)	90	90	90	
2.	budaya olahraga	Pemuda kader yang difasilitasi dalam program olahraga populer, kesukan lokal dan kepeloporan (Orang)	1.200	1.000	1.500
		Meningkatnya partisipasi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga (Persen)	24,99 (2012)	30,00	35,00
		Partisipasi olahraga massal, olahraga, tantang dan wisata (Orang)	6.000	8.000	8.000
3.	Prestasi olahraga	Pemuda juara Asia Games (Peringkat)	17		10 orang (2010)
		Peringkat juara Asian Paragames (Peringkat)	5		8 orang (2015)
		Peringkat juara SEA Games (Peringkat)	4	3	Peringkat 1 (usia Umum)
		Pemuda juara AHAHA Paragames (Peringkat)	2	2	Peringkat 1 (usia Umum)
		Olahragawan Ancalan yang prima (Orang)	2.000	3.000	2.000
		Bilik olahraga yang difasilitasi dalam pemantauan tingkat tingkat Olahraga Unggulan (Orang)	16.000	15.000	15.000

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
	Olahragawan yang difasilitasi dalam pengembangan olahraga berbakat (orang)	5.000	5.000	5.000
	FKLP/FPLM yang memenuhi standar (persen)	10	10	30

Arah Kebijakan

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas melalui:
 - a. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan
 - b. penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda
2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui:
 - a. pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreatifitas pemuda
 - b. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui:
 - a. perkuatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus melalui Gerakan Masyarakat Sehat
 - b. pengembangan industri dan promosi olahraga
4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui:
 - a. keikutsertaan pada SEA Games XXIX tahun 2017 dan ASEAN Paragames IX di Malaysia dan persiapan pelaksanaan Asian Games XXVII dan Asian Paragames II tahun 2018 di Indonesia
 - b. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan
 - c. penyediaan sarana olahraga sesuai standar internasional
 - d. peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Program Indonesia Emas (PRIMA)

4.2.6 Agama

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama			
	Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (orang)		12.000	37.250 (kumulatif)
2.	Meningkatnya harmoni sosial dan keukhukhan kelompok masyarakat			
	FKJB yang memenuhi standar (persen)	91,30%	98,50%	100%
	Penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan	18,1	1.200	5.616 (kumulatif)
	Desa sader kerukunan	-	54	100 (kumulatif)

Tabel 4.11
Sasaran
Agama

No	Indikator	2014 (baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama			
	Lembaga agama yang difasilitasi dalam melaksanakan pelayanan keagamaan	-	821	7.772
	Kantor Hausan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan umum layanan administrasi keagamaan (UPI)	2,74% (2014)	2.068	3.188
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah			
	Indeks kepuasan jemaah haji	82,60%	85,23%	87,50%
	Jumlah lembaga TI yang berakreditasi (orang)	4.879	4.879	4.879
	Rehabilitasi dan pengembangan asrama haji (unit)	4	11	17
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bioang agama yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Agama	WTP	WTP	WTP
	Pejabat pegawai yang melaporkan harta kekayaan nya (orison)		70,00%	100,00%

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui:
 - a. Peningkatan peran penyuluh agama yang berkualitas
 - b. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra-nikah dan pembinaan keluarga harmonis (sakinah, kristiani, bahagia, sukinah, hitthasukhaya)
2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama
 - b. Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan KUA
3. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:
 - a. Penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan
 - b. Perkuatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - c. Fasilitasi pengembangan desa sadar kerukunan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui:
 - a. Peningkatan pembinaan calon jemaah haji
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan akomodasi, katering, dan transportasi jemaah haji
 - c. Peningkatan perlindungan jemaah haji
 - d. Peningkatan pengelolaan dan fungsi asrama haji
5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bioang agama melalui:
 - a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan
 - b. Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah

4.2.7 Kebudayaan

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kebudayaan budaya - Peserta Internalisasi Nilai-Nilai Warisan Budaya (Juta) - Peserta Internalisasi Nilai-nilai Sejarah (Juta)	1,10 14,50	1,20 35,00	1,21 31,50
2	Apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya - Apresiasi karya seni oleh masyarakat umum	18	10	30
3	Kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pemertahanan dan pemanfaatan warisan budaya - Jumlah mata budaya yang dilestarikan (unit)	86.720	91.732	95.592
4	Kepesertaan dan kesadaran komunitas di daerah serta antara komunitas mancanegara - Peserta yang menjadi hubungan dengan semua unit pemerintah informasi budaya dengan Indonesia (Mn.kumulatif)	40	46	52
5	Kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pemertahanan, dan pemanfaatan kebudayaan bangsa	1.155	1.185	1.275

Tabel 4.12
Sasaran
Kebudayaan

Arah Kebijakan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berakhlak dan berjiwa yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, melalui:

1. Penguatan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan berorientasi iptek
2. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya dengan menyediakan sarana yang memadai serta pemberian subsidi bagi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi *societal*
3. Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya serta penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat
4. Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri serta peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara
5. Peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan arkeologi, serta sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat

4.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (negeri dan banji)	50,540	Meningkat	Meningkat

Tabel 4.17
Sasaran
Kesetaraan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
2	Indeks Kefinoaksetaraan/ Ketimpangan Gender (IKG)	0,984	Menurun	Menurun
3	Jumlah Pemula gender yang sesuai ¹	Masih seikit	Meningkat	Meningkat
4	Jumlah biang pembangunan yang memiliki data terdilis hak-hak dan bea-muar	Masih seikit	Meningkat	Meningkat
5	Jumlah K/L/Pemda yang menstapakan PUG/PPRG	Masih seikit	Meningkat	Seluruh K/L/Pemda
6	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP)	Condung meningkat	Menurun	Menurun
7	Jumlah SDM K/L/Pemda terlatih PUG/PPRG	Masih seikit	Meningkat	Meningkat

Arah Kebijakan

Pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dirahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari kekerasan, yang dilakukan melalui:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang PUG dan kekerasan terhadap perempuan (KtP)
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang responsif gender di K/L/Pemda
3. Pelaksanaan review, harmonisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan aturan pelaksanaan terkait KtP
4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penggerak PUG/PPRG dan lembaga layanan bagi korban KtP
5. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG/PPRG serta pencegahan dan penanganan KtP
6. Penguatan jejaring PUG di pusat dan daerah
7. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP
8. Penguatan kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan di K/L/Pemda
9. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG/PPRG dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtP

4.2.9 Perlindungan Anak

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	Anak di lak 38,02%; anak perempuan 20,78% (KUE)	Menurun	Menurun
2.	Jumlah kabupaten/kota menuju kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	239 kabupaten/kota	349 kabupaten/kota	470 kabupaten/kota

Sasaran
Indikator
Perlindungan
Anak

Arah Kebijakan

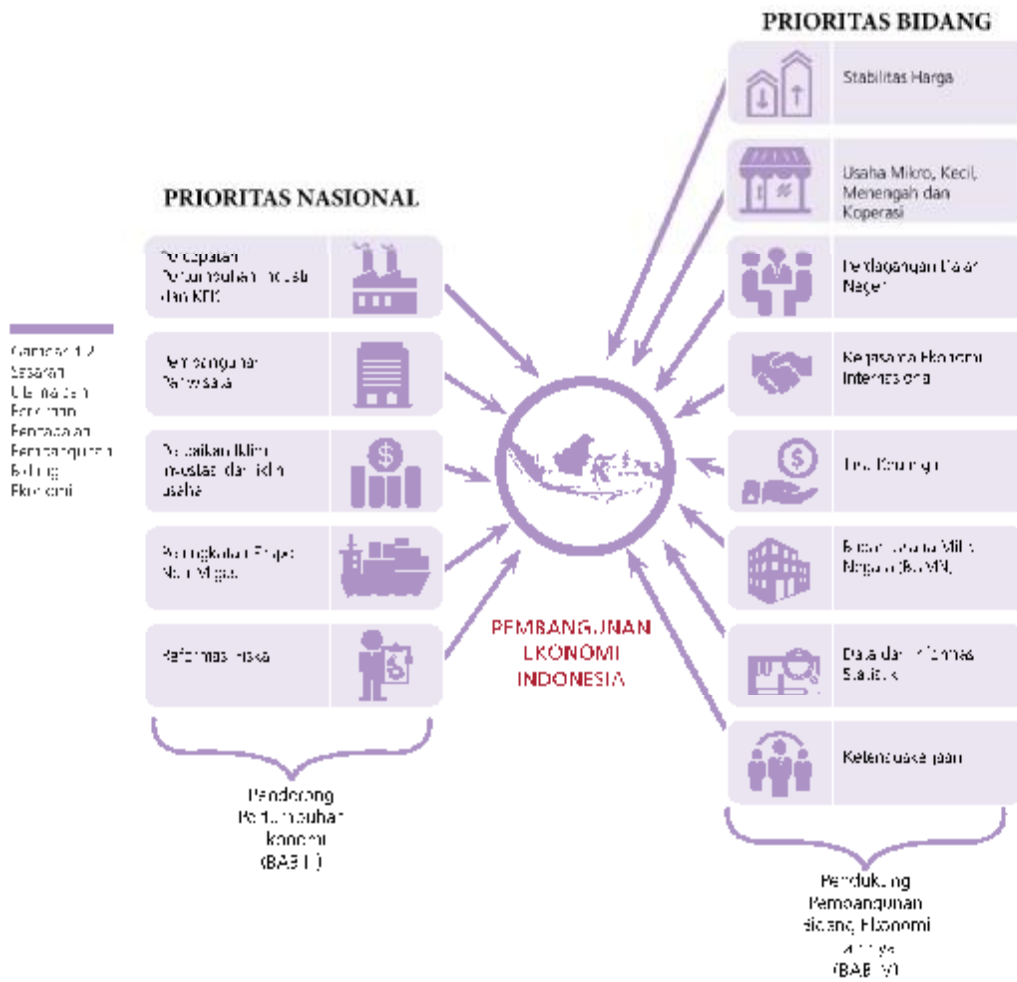
Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui:

1. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak mencakup penyusunan strategi dan materi KIE perlindungan anak berbasis masyarakat yang sesuai dengan konteks lokal
2. Peningkatan fasilitasi pembentukan lingkungan yang ramah anak seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, informasi layak anak dan pembentukan kabupaten/kota layak anak, serta pengembangan anak usia dini holistik integratif
3. Penguatan pusat pelayanan terpadu untuk anak rentan dan korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan, serta pengasuhan alternatif
4. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa
5. Peningkatan partisipasi anak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui gerakan nasional forum anak
6. Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan terkait perlindungan anak termasuk pengasuhan anak dan kepemilikan akta kelahiran
7. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi mengenai perlindungan anak serta pemanfaatannya secara lintas Kementerian/Lembaga/SKPD dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak

4.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi pada tahun 2017 diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-5,9 persen melalui dukungan pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang ekonomi secara tematik, holistik dan terintegrasi dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan ketimpangan antarkelompok pendapatan dengan memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Secara garis besar, pembangunan bidang ekonomi dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.2 Sasaran Utama dan Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi

Sasaran utama bidang pembangunan ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Sasaran Utama dan Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RP, MN 2019
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5-5,9	8
2	PDB per kapita tahun dasar 2010 (Rp. Rp.) tahun dasar 2010	53.518,0 - 54.590,2	72.711
3	Inflasi (%)	4,0	3,5
4	Pertumbuhan ekspor/PDB (%)	12,0	15,0
5	Tingkat Pengangguran (%)	9,3 - 10,3	7,0 - 8,0
6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,3 - 5,5	4,0 - 4,0

4.3.1 STABILITAS HARGA

Sasaran

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Tingkat inflasi umum yang terkontrol melalui terjaganya tingkat inflasi pada komponen inti (core), harga pangan (walaupun food), dan harga diatur (regulated) (GDP deflator)	4,0 persen	3,5 persen
2	Nilai tukar Rupiah yang stabil melalui terendahnya nilai dan suku bunga acuan yang kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi	Rp15.700 Rp14.200 per USD	Rp12.000 per USD

Tabel 4.16
Sasaran
Utama dan
Perkiraan
Stabilitas
Harga

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan moneter tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter diintensifikan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter akan selalu diingkatkan melalui kerjasama yang solid antara Pemerintah dengan Bank Indonesia. Sasaran dan arah yang telah ditetapkan akan di tempuh melalui beberapa strategi kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan keseluruhan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan beuran kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan sektor riil;
2. Peningkatan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan (baik daerah maupun pusat) dalam pengendalian stabilitas harga antara lain melalui pengelolaan persepsi/ekspektasi pasar, melakukan monitoring dan pemetaan basis data, penyediaan kecukupan *buffer stock* pangan, dan pengawasan harga secara berkala;
3. Peningkatan pengawasan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI; dan
4. Menjaga kecukupan cadangan devisa.

4.3.2 USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Sasaran

Sasaran	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam pertumbuhan perekonomian	1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pertumbuhan PDB	6,5%	7,5%
	2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM	5,0%	3,5%
	3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas	5,0%	7,0%
	4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi	10,0%	10,5%

Tabel 4.17
Sasaran
Utama K2
Pertumbuhan
dan Koperasi

Sasaran	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
2. Meningkatkan daya saing UMKM	5. Kontribusi produktivitas UMKM	1,0%	7,0%
	6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal	23,5%	23,0%
	7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	7.100 unit	10.000 unit
3. Meningkatkan usaha baru	8. Perumbuhan jumlah wirausaha baru melalui program pusat dan daerah	200.000 unit	200.000 unit
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan usaha koperasi	9. Fundisipal anggota koperasi dalam pemodal	54,0%	53,0%
	10. Perumbuhan jumlah anggota koperasi	7,1%	10,0%
	11. Kontribusi volume usaha koperasi	17,0%	18,0%

Arah Kebijakan

Kebijakan pengembangan UMKM dan Koperasi pada tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi melalui penguatan rantai pasok dan perluasan pemasaran.

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi penguatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan, pelatihan manajerial, perkoperasian dan vokasi, yang didukung pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan terutama melalui peningkatan jangkauan dan kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, *start-up capital* bagi wirausaha baru/pemula, serta pendampingan sertifikasi hak atas tanah
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran di antaranya melalui perbaikan manajemen produksi dan pemasaran koperasi/sentra produksi, inovasi produk, *green business*, standarisasi/sertifikasi, revitalisasi pasar rakyat, fasilitasi promosi dan *trading house*
4. Penguatan kelembagaan usaha terutama melalui penguatan koperasi sektor riil (produsen dan pemasaran) dan kemitraan investasi berbasis rantai nilai/pasok
5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha terutama melalui pendampingan dan penyediaan izin usaha mikro dan kecil, serta pendampingan dalam mengantisipasi dan mitigasi dampak bencana

4.3.3 PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Sasaran

Tabel 4.18
Sasaran
Perdagangan
Dalam Negeri

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	1.000 unit	5.000 unit (kumulatif)
2	Pembinaan Jaringan Nasional Pasar Rakyat	100 unit	450 unit (kumulatif)

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
3	Pertumbuhan Debit Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	7,5 %	8,2 %
4	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	≤ 9,0 %	≤ 9,0 %
5	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	≤ 13,8 %	≤ 13,0 %

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2017 adalah mendorong aktivitas perdagangan domestik yang lebih efisien agar dapat mendukung kelancaran distribusi barang antar wilayah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi perkuatan yang dititikberatkan pada tahun 2017 adalah:

- Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan**, dengan fokus pada: (i) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan pemberdayaan terpadu pasar rakyat sesuai dengan kaidah di dalam SNI Pasar Rakyat (ii) optimalisasi pembangunan dan pengembangan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) terutama bagi gudang yang telah *over capacity* dan gudang yang sudah berdiri namun belum mengimplementasikan ataupun menerbitkan SRG (iii) pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) sesuai kebijakan di dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (iv) pembangunan gudang non SRG untuk mendukung ketersediaan bahan pokok di wilayah yang jaringan distribusinya belum memadai dan rawan, serta (v) pengembangan sarana distribusi rantai dingin terutama untuk bahan pokok yang mudah rusak (*perishable*). Strategi ini juga ditujukan untuk Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan, seperti yang tertuang dalam Bab III.
- Pengendalian harga pangan**, yang akan dilakukan melalui: (i) integrasi dan sinkronisasi sistem pemantauan pasar bahan kebutuhan pokok milik pemerintah dengan sistem pemantauan harga dan stok bahan pokok sejenis milik PEMDA maupun swasta (ii) perluasan fitur dan pemanfaatan sistem pemantauan pasar bahan kebutuhan pokok milik pemerintah melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) kenaikan harga dan kelangkaan stok (iii) pengelolaan kebijakan impor pangan dan harmonisasi dengan kebijakan ketahanan pangan nasional (iv) membenahan tata niaga pangan, serta (v) penerapan integrasi SRG dan pasar lelang *online*.
- Peningkatan upaya perlindungan konsumen**, yang akan dititikberatkan pada: (i) impo-orientasi strategi nasional dan rencana aksi nasional perlindungan konsumen (ii) peribenehan regulasi dan kelayanan perlindungan konsumen di tingkat pusat dan daerah (iii) penguatan metrologi legal, serta (iv) pelaksanaan kebijakan tertib niaga, yang mencakup pengawasan barang beredar dan jasa serta penguatan pasar te-ribukur di daerah.
- Pengembangan dan pemantauan skema perdagangan modern**, yang meliputi: perdagangan melalui sistem elektronik (*ecommerce*), ritel modern, dan waralaba, dimana upaya pengembangannya diarahkan untuk mendorong peningkatan pelaku usaha domestik.

5. Peningkatan efisiensi perdagangan serta perdagangan antar wilayah, yang meliputi: (i) pelaksanaan gerai maritim untuk menopang distribusi bahan pokok di wilayah terpencil dan tidak terjangkau oleh jalur distribusi swasta (ii) pembangunan bantuan sarana usaha perdagangan bagi pedagang kecil (iii) penyediaan pendampingan bagi pedagang mikro, kecil dan menengah untuk bermitra dengan pedagang ritel *modern*, dan (v) pembinaan bagi pedagang sektor informal agar menjadi pedagang formal.

4.3.4 KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Sasaran

Sasaran sub bidang Kerjasama Ekonomi Internasional dibagi menjadi 2 (dua) Pilar, sebagai berikut:

Isi tabel 4.11:
Sasaran sub bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1. Pilar 1: Penguatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional			
	Indeks Daya Tarik Investasi (IDTI) dan Indeks Daya Tarik Investasi (IDTI) (Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura Baru; termasuk baseline 2015)	7,9%	6,8%
	Indeks Non-Tarif Measures (baseline tahun 2015 berdasarkan data WTO)	29,2	20,0
2. Pilar 2: Minimalisasi Dampak Globalisasi			
	Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi	8,0%	10,0%
	Persentase peningkatan pengamanan kebijakan nasional di forum internasional	80,0%	90,0%
	Persentase tingkat pemantauan masyarakat terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional	40,0%	60,0%

Arah Kebijakan

Dalam rangka penguatan peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional, arah kebijakan bidang kerjasama ekonomi internasional pada tahun 2017 akan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi.

Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi penguatan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan Kekuatan Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)* periode 2015-2017, dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional, yang antara lain difokuskan untuk: (i) Memajukan regionalisme di Samudera Hindia (ii) Mengembangkan kerjasama maritim antar negara anggota, termasuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta (iii) Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota IORA melalui kerjasama ekonomi (perdagangan dan investasi), fisheries, maritime security, tourism, trade and investment, dan PTEK.
2. Peningkatan sinergitas antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi, melalui penguatan peran Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional, terutama dalam proses identifikasi potensi kerjasama yang menguntungkan ekonomi Indonesia, proses penyusunan *cost-benefit*, serta diseminasi hasil perundingan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Bangsa Indonesia.

Sementara itu, dalam rangka meminimalisasi dampak globalisasi, arah kebijakan bidang kerjasama ekonomi internasional pada tahun 2017 akan difokuskan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan kerjasama ekonomi internasional agar memberikan keuntungan yang optimal bagi perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi perkuatan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional yang telah diimplementasi, antara lain dengan: (i) Memperkuat peranan *ASEAN Economic Community* (AEC) *Center* di tingkat pusat menjadi *FTA Center* serta membentuk *Pilot Project FTA Center* daerah di beberapa wilayah Indonesia (ii) Memaksimalkan manfaat kerjasama bilateral Indonesia-Pakistan PTA (*Preferential Trade Agreement*) (iii) Melakukan negosiasi tahap kedua (renegosiasi) kerjasama bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (*IJEPA*) (iv) Melakukan evaluasi terhadap *cost and benefit* dari implementasi kerjasama ekonomi internasional yang telah dilaksanakan selama minimal 5 tahun, serta (v) Meningkatkan kesiapan Indonesia untuk menuju *AEC 2025*, termasuk mempersiapkan penyusunan *Strategic Action Plan* (*SAP*) *AEC Blueprint 2025* dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.
2. Perundingan kerjasama ekonomi internasional yang masih dalam tahap perundingan atau yang akan diikuti, terutama dengan: (i) Menitikberatkan pada perundingan kerjasama ekonomi bilateral dengan: Uni Eropa, EFTA, Australia, dan Turki, serta mendorong penyelesaiannya pada tahun 2017 (ii) Mendorong penyelesaian persiapan menuju tahap perundingan kerjasama ekonomi dengan Chile, Iran, dan Peru, serta melakukan identifikasi kemungkinan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara Afrika seperti Nigeria dan Afrika Selatan (iii) Meningkatkan kerjasama perdagangan dengan pasar ekspor prospektif lainnya, terutama kawasan Asia Tenggara dan Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur (iv) Meningkatkan pemahaman dampak *Trans Pacific Partnership* (TPP) terhadap ekonomi Indonesia, termasuk roadmap persiapan Indonesia, serta (v) Meningkatkan aktivitas diplomasi perdagangan untuk mengurangi hambatan perdagangan, terutama hambatan nontarif, di pasar ekspor utama, seperti Kawasan Asia Timur dan Tenggara, Amerika, dan Eropa.

4.3.5 JASA KEUANGAN

Sasaran

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Ketahanan dan stabilitas sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mandiri dan terkendali	Meningkat	Meningkat
2	Peleaksanaan keuangan inklusif dan peningkatan akses online masyarakat untuk kemanjuran, pemerataan dan keamanan yang utamanya salah ke arah perbankan dan pemolisian dari industri keuangan non bank termasuk pasar modal	Meningkat	Meningkat
3	Efisiensi dan daya saing sektor keuangan antara lain terkhusus pada pertumbuhan suku bunga perbankan, aset sektor keuangan dan pelayanan publik lembaga keuangan	Meningkat	Meningkat

Tabel 4.20
Sasaran Jasa
Keuangan

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Jasa Keuangan adalah meningkatkan pembiayaan pembangunan khususnya pembiayaan investasi, dan meningkatkan keuangan inklusif sehingga akses pembiayaan masyarakat terutama usaha mikro dan UKM meningkat secara berarti.

Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi yaitu:

1. Peningkatan ketahanan dan stabilitas sektor keuangan yang akan diupayakan melalui penyusunan Peraturan Pelaksanaan RUU/UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang akan diselesaikan pada tahun 2016. Kebijakan lainnya adalah diseminasi UU JPSK agar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan di sektor keuangan
2. Penguatan fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan diupayakan perbankan melalui: (i) Perluasan akses keuangan kepada UMKM/masyarakat melalui lembaga keuangan di daerah/perdesaan, seperti skema KUR, lembaga keuangan mikro, koperasi (KSP/BMT) yang berbunga rendah, proses sederhana dan beragunan minimal (ii) Perluasan implementasi layanan keuangan digital (LKD), penyaluran bantuan Pemerintah (misal: Program Keluarga Harapan/PKH) melalui LKD, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), elektronifikasi layanan keuangan, peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pengembangan sistem informasi debitur dan (iii) Peningkatan akses layanan keuangan formal dilakukan melalui sinkronisasi antara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Forum Koordinasi Keuangan Inklusif (FKKI) untuk memastikan terlaksananya Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Aksi Keuangan Inklusif (AKI)
3. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga/industri keuangan non bank, IKNB (asuransi termasuk asuransi pertanian/ternak, pasar modal, dana pensiun, *investment bank*, lembaga pembiayaan). Untuk meningkatkan pembiayaan investasi, selain melalui perbankan juga dilakukan melalui pasar modal seperti kemudahan bagi UKM untuk menerbitkan surat berharga di pasar modal. Selain itu diupayakan pula pembentukan/operasionalisasi lembaga baru seperti sistem tabungan pos dan lembaga pembiayaan sektor-sektor prioritas
4. Pengembangan keuangan syariah antara lain melalui: (i) Pelaksanaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) (ii) Sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh KNKS kepada pemangku-pemangku kepentingan di bidang keuangan dan masyarakat, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha (iii) Peningkatan simpanan (dana pihak ketiga, DPK) perbankan/lembaga keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan pembiayaan perbankan syariah (iv) peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program Pemerintah dan sistem pembayarannya.

4.3.6 BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Sasaran

Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam tahun 2017 adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian melalui

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Peran BUMN sebagai agen pembangunan melalui penyediaan tugas, bentuk dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan daya saing pes	Meningkat	Meningkat
2	Meyakinkan publik BUMN terutama di kawasan perbatasan, ering kemaritiman, infrastruktur, dan perumahan serta sektor prioritas lainnya	Meningkat	Meningkat
3	Pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja	Meningkat	Meningkat

Tabel 2.1
Sasaran
Struktur Usaha Mikro
Sebagai BUMK

Arah Kebijakan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMN, diarahkan untuk mendukung upaya pembangunan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap.

Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat. Khususnya dalam mendukung penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, fasilitas perumahan/permukiman dan layanan transportasi yang memadai.
2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan mempertahankan struktur BUMN yang efektif dan efisien dan optimalisasi partisipasi masyarakat, antara lain melalui penjualan saham dan obligasi BUMN.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan merancang bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal bagi kelancaran dan pengembangan usaha BUMN, serta peningkatan sinergi antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dan usaha swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan nasional.
4. Memberikan tambahan modal bagi beberapa BUMN, sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai pertumbuhan, penyediaan sasaran-sasaran prioritas yang telah ditetapkan.

4.3.7 DATA DAN INFORMASI STATISTIK

Sasaran

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas cara kerja	80 persen	80 persen
2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent/responden)	93 persen	94 persen
3	Menyusun perencanaan mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien	9 self-assessment	13 self-assessment
4	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user)	84 persen	84 persen
5	Meningkatnya korelasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SIA	150 meteoata	150 metoata

Tabel 2.2
Sasaran Data
dan Informasi Statistik

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada tahun 2017 adalah meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan strategi pokok sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, yang mencakup upaya untuk: (i) meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas (ii) meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, dan (iii) meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional

Pada tahun 2017 akan diselenggarakan kegiatan statistik dalam skala besar, yaitu lanjutan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) 2016 seperti Pendataan UMK SE 2016 dan Pendataan Sensus Lengkap UMB, Pendataan Survei Biaya Hidup (SBH) 2017, dan Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

2. Peningkatan *response rate*, yang akan ditempuh dengan upaya untuk: (i) meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, dan (ii) meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik, dengan upaya: (i) meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik, serta (ii) mempublikasikan *quality gate* pada masing-masing tahapan kegiatan statistik

Pada tahun 2017 akan dilakukan Survei Biaya Hidup Tahun 2017 (SBH 2017) dengan pemutakhiran pada diagram timbang IHK dan memperluas cakupan wilayah, penduduk/rumah tangga dan jumlah barang dan jasa. Selain itu, data harga, baik harga di tingkat produsen komoditas pertanian maupun harga-harga di tingkat konsumen perdesaan merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting, sehingga sangat diperlukan penyajian data statistik harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan harga konsumen perdesaan yang teratur, lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kebutuhan data masyarakat luas melalui Survei Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP)

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat, dengan upaya: (i) meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik (ii) meningkatkan *customer relationship management*, serta (iii) meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN, termasuk penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik. Hal ini akan dilakukan dengan: (i) meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan metadata kepada BPS (ii) mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta (iii) mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait, serta (iv) mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS
6. Peningkatan kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN, yang meliputi (i) meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan metadata kepada BPS, serta (ii) mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta.

4.3.8 KETENAGAKERJAAN

Sasaran

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Jumlah pelayanan perizinan penggunaan TKA satu pintu menjadi sistem <i>online</i>	134 provinsi/kota	200 provinsi/kota

Indikator
Sasaran
Ketenagakerjaan

Arah Kebijakan

Selain membuat semakin terbukanya kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN menimbulkan konsekuensi meningkatnya jumlah TKA yang bekerja di Indonesia. Sebagai upaya untuk mempercepat perizinan penggunaan TKA, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan pelayanan penggunaan TKA melalui:
 - a. Peningkatan Penggunaan fasilitas pelayanan terpadu satu pintu
 - b. Peningkatan efisiensi pelayanan *online*
2. Peningkatan pengendalian TKA melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan keandalan *database* TKA
 - b. Peningkatan koordinasi yang erat antar berbagai pihak terkait di daerah, dan disertai oleh penegakan hukum jika terjadi pelanggaran

4.4 BIDANG IPTEK

Kerangka kebijakan di bidang Iptek yaitu **Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi** diarahkan untuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan *modern*.

Sasaran

1. Meningkatnya dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing produksi
2. Meningkatnya dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam
3. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan
4. Terbangunnya 5 (lima) pilot *science* dan *technopark* (STP) sebagai percontohan

Arah Kebijakan

1. Untuk meningkatkan dukungan iptek bagi peningkatan daya saing produksi, maka:
 - a. Frontis adalah yang mampu menghasilkan temuan/produk yang dapat digunakan oleh sektor. Kegiatan penelitian dan pengembangan juga harus berlangsung secara berkesinambungan yang didukung proses inovasi sampai hasil litbang tersebut dapat dimanfaatkan secara luas sehingga tidak berhenti di tengah jalan sebelum dimanfaatkan

- b. Pengkajian dan perekayasa teknologi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna yang diarahkan untuk mendukung penerapan teknologi di bidang pertahanan keamanan; energi baru dan terbarukan; kemaritiman dan perkapalan; serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan
 - c. Pelayanan standarisasi diarahkan untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan infrastruktur mutu yang mendukung peningkatan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor; serta perluasan cakupan layanan standarisasi ke beberapa bidang strategis
 - d. Kegiatan pengawasan teknologi nuklir diarahkan untuk inspeksi keselamatan/keamanan instalasi dan operasionalisasi fasilitas radiasi dan zat radioaktif khususnya fasilitas kesehatan berbasis radiologi dan sistem keamanan nuklir nasional di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia; serta pengawasan persiapan pembangunan PLTN
2. Dalam rangka peningkatan keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, meliputi:
- a. Dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dengan: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan diseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan
 - b. Dukungan iptek untuk eksplorasi sumberdaya nirhayati dengan meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Prakarsa-prakarsa utama meliputi; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana dan perekayasa curah hujan
 - c. Litbang teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan; pangan dan pertanian; serta persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
 - d. Litbang penerbangan dan antariksa diarahkan untuk mendukung teknologi satelit (operasional satelit A2 dan A3 serta penyiapan satelit A4); teknologi roket untuk hankam dan penyiapan teknologi roket peluncur satelit; penyiapan komersialisasi pesawat N-219; serta penyediaan data penginderaan jauh dan data citra resolusi tinggi
3. Peningkatan dukungan bagi kegiatan iptek mencakup:
- a. Penguatan SDM iptek peningkatan jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa sesuai bidang penelitian unggulan di masa depan, mengingat saat ini kapasitas dan kemampuan SDM iptek mengalami keterbatasan karena jumlah peneliti ahli yang pensiun atau alih profesi tidak seimbang dengan penerimaan peneliti baru dalam hal kuantitas dan terutama kualitas

Tabel 4.34
Jumlah Peneliti
Yang Mengikuti
Tugas Gabung

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Kumulatif
2013	70	35	-
2014	n.a.	17	52
2015	210	86	138
2017	210	-	-

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Kumulatif
2019	210	-	-
2020	210	-	-

Sumber: Rincian data Karya siswa PMO diolah (2015)

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Kumulatif
2013	100	119	-
2014	100	202	401
2015	400	211	612
2017	800	-	-
2019	850	-	-
2020	850	-	-

Tabel 4.25
Jumlah Karya
Siswa PMO dari
Program
Gelar

Sumber: Rincian data Karya siswa PMO diolah (2015)

b. Penguatan sarana prasarana penelitian dan pengembangan, antara lain:

Revitalisasi Puspiptek; pembangunan laboratorium BPP terpadu; pembangunan stasiun kelautan di Sadang; pembangunan kebun raya cooran; revitalisasi reaktor riset terkait litbang nuklir; pembangunan observatorium sains dan antariksa; pembangunan laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU); pembangunan fasilitas inspeksi keamanan dan keselamatan nuklir nasional

c. Jejaring inovasi: pembangunan dan penguatan inkubator di Universitas; pembangunan repositori dan diseminasi informasi iptek; penguatan pusat diseminasi hasil litbang; peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset dan *join research* khususnya dengan litbang di dunia industri

4. Dalam rangka mendukung pembangunan 5 (lima) pilot *science* dan *technopark* (STP) sebagai contoh *technopark* untuk menginkubasi hasil penelitian dan pengembangan menjadi produk komersial. STP yang akan dikembangkan sebagai percontohan adalah STP yang telah memiliki komponen-komponen yang mendekati standar operasional antara lain: Bandung *Technopark* (ITB); Puspiptek; Pusinov LIPI; Agro *Technopark* BATAN; dan Pelalawan *Technopark* (BPPT)

4.4.1 NSPK PEMBANGUNAN IPTEK

Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan bidang iptek, maka akan dilakukan strategi-strategi penguatan sebagai berikut:

1. Proses inovasi hasil litbang unggulan khususnya yang mendukung peningkatan daya saing sektor produksi dan pemantaatan sumber daya alam, melalui perencanaan dan penganggaran litbang unggulan yang bersifat *multi-years* dengan penanggungjawab kegiatan yang jelas; penjaminan kemauan pemerintah; pemerataan dan pusat informasi yang lengkap dan handal mengenai potensi dan hasil penelitian dari tiap lembaga litbang

2. Dukungan bagi sistem inovasi melalui penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan Iptek, sarpras litbang, serta jejaring inovasi melalui penguatan kembali RISETPRO yang menjadi salah satu program peningkatan kualitas SDM Iptek melalui bea siswa luar negeri, pelatihan, magang, *join research, training*, dan *capacity building* untuk para peneliti; permohonan *recruitment* tenaga peneliti baru dan apabila memungkinkan yang telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu yang dibutuhkan; percepatan pemutakhiran, revitalisasi dan pengadaan sarpras litbang; penguatan *triple helix* hubungan pemerintah, industri (bisnis) dan Universitas; percepatan pembangunan dan pengembangan inkubator di perguruan tinggi
3. Dalam rangka percepatan keberfungsian 5 (lima) pilot STP di atas akan dilaksanakan penyiapan kerangka regulasi terkait pembangunan *science* dan *technopark* (regulasi kerjasama dengan industri, skema pembiayaan perusahaan *startup*, kepemilikan lahan dan fasilitas); dukungan *anchor industry* di tiap *technopark*; pengenalan kurikulum dan unit kegiatan kewirausahaan di perguruan tinggi; hubungan yang kontinu dengan perguruan tinggi sebagai *source of knowledge*

4.4.2 KERANGKA REGULASI

Sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan maka direncanakan kegiatan dalam kerangka regulasi sebagai berikut:

1. Percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pembahasan dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Penyusunan kerangka regulasi yang terkait langsung dengan proses inovasi seperti regulasi terkait pembangunan *science* dan *technopark* (bersama dengan industri, skema pembiayaan perusahaan *startup*, kepemilikan lahan dan fasilitas); kerangka insentif bagi peneliti; dan lain lain

4.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK

Sasaran

Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah

Tabel 4.28
Sasaran Utama
Bidang Politik
Tahun 2017

No	Indikator	2014 (Sasaran)	2017	Sasaran Akhir RP. MN 2019
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	83,71	74,00	75,00
	Indeks Lembaga Demokrasi	72,21	77,00	79,00
	Indeks Kecebasan Sipil	79,00	85,00	87,00
	Indeks Hak-hak Politik	46,75	66,00	68,00
2.	Tingkat pengakuan Indonesia di dunia internasional	n.a	89%	89%

Arah Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas

Diplomasi tahun 2017, maka arah kebijakan Prioritas Bidang Politik tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, melalui strategi: Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, melalui strategi: perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, serta pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, yang akan ditempuh dengan strategi: pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia
4. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi: pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
5. Diseminasi Informasi Publik melalui berbagai media (*online/offline*) dengan tema prioritas sesuai kebijakan Presiden dan/atau Pemerintah, dan kontribusi pada penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional dan internasional (*media center*)
6. Pembinaan pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan strategi: penyusunan regulasi dan kebijakan bidang komunikasi publik (*grand design* komunikasi publik serta norma standar prosedur kriteria), peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang komunikasi publik melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (bimbingan teknis, sertifikasi), serta pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat bidang komunikasi publik
7. Peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta literasi media melalui: penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) di Yogyakarta, penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, pengembangan SDM di Balai-balai pengkajian dan pengembangan daerah, serta literasi media penyiaran bagi masyarakat
8. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, yang akan ditempuh dengan strategi: penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism*, berbasis negara dan masyarakat sipil
9. Promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan global, melalui strategi: penyelenggaraan *Bali Democracy Forum*, partisipasi aktif dalam forum regional dan multilateral terkait isu HAM dan Kemanusiaan
10. Peningkatan peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian di tingkat internasional, melalui strategi: implementasi *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers* untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, pelaksanaan kampanye berkeadilan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dukungan aktif terhadap negara Palestina Merdeka dan perdamaian di Timur Tengah
11. Penguatan kualitas pengrajin dan pengembangan kebijakan luar negeri, melalui strategi: penyusunan pengkajian kebijakan luar negeri untuk isu-isu prioritas nasional, peningkatan kapasitas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri (BPKK Kemlu) dalam menyampaikan hasil kajian dan anggotanya kepada pejabat yang relevan.

4.6 BIDANG APARATUR

4.6.1 APARATUR NEGARA

Sasaran

Sasaran utama yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sub bidang aparatur pada RKP 2017 adalah terwujudnya:

1. Birokrasi yang efektif dan efisien
2. Birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas
3. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Pencapaian sasaran tersebut tercermin dari indikator kinerja dan target sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.27
Pencapaian
Indikator Kinerja
pada Tingkat Sub
Bidang Aparatur

No	Indikator	Satuan	2014 (Rencana)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
A Sasaran 1: Birokrasi yang efektif dan efisien					
1	Persentase Pejabat Pemerintah yang Memiliki Kualifikasi Profesional, Siskolka, dan Kualifikasi PIR* ke-4 atau lebih				
	a. Kementerian/lembaga	%	47	61	75
	b. Provinsi	%	44	40	60
	c. Kabupaten/Kota	%	44	25	45
2	Tingkat Profesionalitas ASN	%	44	20	66
B Tidak e-Government Nasional					
	a. Kementerian/lembaga	skor	2,68	3,0	3,4
	b. Provinsi	skor	2,2	3,2	3,7
	c. Kabupaten/Kota	skor	2,3	3,2	3,4
1	Penggunaan e-Government dan akses dalam pelayanan	%	20	60	80
b Sasaran 2: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas					
1	Tingkat Kepuasan atas Pelaksanaan II. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Survei Hijau)				
	a. Kementerian	%	11,8	78	100
	b. Lembaga	%	8,1	35	100
	c. Provinsi	%	4,4	51,5	100,0
	d. Kabupaten/Kota	%	4,4	30	60
C Sasaran 3: Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
1. Opini WFP tentang Integritas Keuangan					
	a. Kementerian/lembaga	%	77	87	95
	b. Provinsi	%	53	73	85
	c. Kabupaten/Kota	%	7,6	48	60
	d. Loka	%	11	36	65
2. Tingkat Keakhlisan ASN (Tera) WFP					
	a. Kementerian/lembaga	%	44	40	85
	b. Provinsi	%	44	40	85
	c. Kabupaten/Kota	%	44	30	70
3. Tingkat Keakhlisan (Materi) atas SPK (Survei Loka)					
	a. Kementerian/lembaga	%	44	45	85
	b. Provinsi	%	44	45	85
	c. Kabupaten/Kota	%	44	30	70

No	Indikator	Satuan	2016 (Rencana)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1	Indeks Kinerja yang Akutabel (Seri Bius LANS)				
a.	Kemampuan lembaga	%	60,24	75	85
b.	Manusia	%	47,30	62	75
c.	Kapabilitas	%	2,38	31	50

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang Aparatur Negara pada RKP 2017 di fokuskan pada:

Meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mementapkan akuntabilitas kinerja birokrasi
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan implementasi agenda transformasi birokrasi nasional Penataan strukturisasi kelembagaan Penataan dan proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi Penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit secara konsisten Promulgasi dan kepatuhan untuk perubahan cara birokrasi Peningkatan efisiensi belanja aparatur Penerapan sistem manajemen kinerja Penerapan manajemen kearsifan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan dan manajemen keuangan Penerapan kebijakan pengelompokan kinerja pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem integritas berbasis yang efektif Penerapan sistem pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis Penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Peningkatan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja Penerapan <i>Service, transparency, dan profesionalisme</i> dalam pengadaan barang dan jasa
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan dan manajemen keuangan Penerapan kebijakan pengelompokan kinerja pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem integritas berbasis yang efektif Penerapan sistem pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis Penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Peningkatan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja Penerapan <i>Service, transparency, dan profesionalisme</i> dalam pengadaan barang dan jasa 	
<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem integritas berbasis yang efektif Penerapan sistem pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis Penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Peningkatan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja Penerapan <i>Service, transparency, dan profesionalisme</i> dalam pengadaan barang dan jasa 		

Gambar 1.21 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Aparatur

4.7 BIDANG PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN TATA RUANG

Sasaran

Sasaran pembangunan bidang kewilayahan dan tata ruang tahun 2017 yaitu

No	Indikator	2014 (Data Real)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1.	Informasi Geospasial			
1	Pembangunan Informasi Geospasial Dasar (IGD)			
a.	Jumlah peta nasional skala 1:5000 untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan daerah yang di prioritaskan	400 NLF	8 KIK dan 14 KJ, 400 KLF	8 KIK dan 14 KJ, 2.150 NLF
b.	Jumlah peta lingkungan Pantai Indonesia (PIL) dan lingkungan Laut Nasional (ILN)	22 NLF	41 NLF	224 NLF

Tabel 4.22 Sasaran Pembangunan Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Sasaran Akhir RUPM 2019
a	Jumlah lokasi status teguh	-	73 NLP	237 NLP
b	Jumlah basis kesekeloaan wilayah administrasi desa yang dioptimasi secara harmonis	-	3.950 desa	27.473 desa
2) Pembinaan dan Pengintegrasian Informasi Geospasial tematik (IGT)				
a	Jumlah pemetaan data IG yang terintegrasi dan sinkronisasi status, perencanaan ruang, dan operasi antar K/L dalam mendukung Kebijakan Satu Peta (Perpres No. 99/2016)	-	14 Pemeta	64 Pemeta
2) Tata Ruang				
a	Tersejainya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan aktualisasi	-	1 perancangan peraturan perundang-undangan	1 peraturan perundang-undangan
b	1 harmonisasi peraturan perundang-undangan	-	2 kajian ▪ Bidang TR dengan Bidang Keluaran ▪ Bidang TR dengan Bidang pemerintahan Selain itu juga	5 kajian
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang tata ruang				
a	Penyenggaraan Balok-balok BKTR	-	1 balok-balok BPN	10 kegiatan
b	Pelatihan PPS B dan Tata Ruang	100 orang	400 orang	1.000 orang
c	Penyusunan Pecoran Kerja PPS	-	1 NSFK	1 NSPK
3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya terdistribusi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang				
a	Penyelesaian penyusunan Perpres RTR <SN	1 RTR KSM	5 RTR KSM	67 RTR KEN
b	Penyusunan RTR Level Nasional	-	-	1 peraturan perundang-undangan
c	Pengambilan persetujuan 1.500 titik RDR	-	260 RDR	1.919 RDR
4) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang				
a	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang	-	2 kegiatan ▪ Penyusunan NADP mengenai penyelenggaraan pemanfaatan ruang ▪ Yonev risk management RUPM	5 kegiatan
3. Pembangunan Kawasan Strategis				
a	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa	-	-	-

No	Indikator	2014 (Basisline)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
a	Ketersediaan Fasilitas dan Bebas dari Pelanggaran Bebas (KPBFB)	4 KPBFB	4 KPBFB, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung dan Kalimantan	4 KPBFB
4. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah				
1. Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Daerah				
a	Jaeran Gerakan Baru (JGB) dengan peningkatan kinerja pemerintahan	-	60%	100%
b	Terwujudnya lingkaran 11 dalam pelayanan publik yang didukung oleh Reformasi Pelayanan Publik (RPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	15 bidang SPM	6 SPM, 16 NSPM	6 SPM, 18 NSPM
c	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam proses pelaksanaan pemenuhan 10 pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu	-	40 kabupaten/kota	110 kabupaten/kota
d	Jumlah daerah dengan pelayanan terpadu satu atap (PTSA) prima, termasuk daerah terdepan	-	51 kabupaten/kota, 40 kabupaten/kota di daerah tertinggal	704 kabupaten/kota
e	Jumlah daerah yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PISA dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATK)	70% untuk PISA, 50% untuk PATK	10 provinsi untuk PISA, 10 provinsi untuk PATK	34 provinsi/508 kabupaten/kota
f	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Reformasi PATEN, termasuk daerah tertinggal	50% kabupaten/kota telah memiliki dan melaksanakan regulasi pelayanan terpadu tingkat kecamatan	20 kabupaten/kota di 6 provinsi, 40 kabupaten di daerah tertinggal	380 kabupaten/kota di 30 provinsi
g	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100%	95% daerah provinsi dan 70% kabupaten/kota memiliki kerja tinggi berdasarkan EKPPD	95% daerah provinsi dan 70% kabupaten/kota berdasarkan tinggi berdasarkan EKPPD
h	Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai kelas	100%	100%	100%
i	Evaluasi daerah otonom (khusus kota) dalam rangka pemertanian terhadap kelembagaan, aparatur, dan bena dasar pelaksanaan tugas	-	3 provinsi	3 provinsi
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah				
a	Jumlah angkatan pengembangan kompetensi pemerintah dan lembaga pemerintahan	148 angkatan	191 angkatan	607 angkatan

No	Indikator	2014 (baseline)	2017	Esasran Akhir RUM N 2018
b	Jumlah angkatan Penerimaan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah, Wilayah, Pemerintahan Politik, pemerintahan umum, dan pemerintahan	87 angkatan	100 angkatan	474 angkatan
3) Peningkatan Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah				
a	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan Peta APBD (peta dasar)	-	30 provinsi, 275 kabupaten/kota	30 provinsi, 300 kabupaten/kota
b	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang ditujukan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan	-	110 daerah (provinsi dan kabupaten/kota)	110 daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
c	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang ditujukan dalam pembangunan kesetaraan	-	7 provinsi, 120 kabupaten/kota	7 provinsi, 120 kabupaten/kota
d	Jumlah Daerah tertinggal yang meningkat berdasarkan daerah	-	28 kabupaten yang terancam, dan 26 kabupaten Daerah tertinggal lainnya	28 kabupaten yang terancam, dan 26 kabupaten Daerah tertinggal
e	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah termasuk retribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah dari APBD	48%	54%	68%
f	Persentase daerah yang menyalurkan DAK (jumlah DAK > 40% DAK dalam APBD sesuai dengan lokasi)	-	60%	60%
g	Jumlah provinsi/kabupaten/kota Daerah tertinggal yang melaksanakan Peta APBD tanggungjawab dan pelaksanaan APBD yang melibatkan masyarakat	-	30 provinsi, 275 kabupaten/kota	30 provinsi, 300 kabupaten/kota
h	Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (provinsi dan kabupaten/kota)	-	25 provinsi, 250 kabupaten/kota	23 provinsi, 305 kabupaten/kota

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Sub Bidang Informasi Geospasial yaitu:

1. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan Informasi Geospasial, melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidang Informasi Geospasial secara rutin selanjutnya.
2. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain: pembangunan bernilai tinggi dan kelautan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KIK), pembangunan perdesaan dan perkotaan, kedaulatan pangan, serta Reformasi Agraria, melalui: (i) pemetaan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan Rencana Detail dan Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan daerah yang di prioritaskan; (ii) biaya anggaran pemetaan batas wilayah NRI dengan Kurva Tertutup; (iii) penyelenggaraan pemetaan kelautan dan lingkungan pantai; (iv) pembangunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) strategis yang mendukung prioritas pembangunan.

nasional (v) pengintegrasian IGT nasional melalui Kebijakan Satu Peta (*one map policy*) dan (vi) penyusunan NSPK pemetaan IGT

3. Penyebarluasan dan pemanfaatan Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan kebijakan publik, melalui pembangunan dan pengembangan simpul jaringan secara nasional (Ina-Geoportal)
4. Pemenuhan SDM dan kelembagaan bidang Informasi Geospasial secara terpadu, melalui: (i) pembinaan Jabatan Fungsional, Diklat dan Litbang Informasi Geospasial, dan (ii) sertifikasi SDM dan badan usaha Informasi Geospasial
5. Penyediaan teknologi dan industri penyelenggaraan Informasi Geospasial secara mandiri, melalui: (i) penguatan kerjasama luar negeri di bidang Informasi Geospasial, dan (ii) penguatan kemitraan antar akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan industri dan kemandirian teknologi Informasi Geospasial nasional

Arah Kebijakan Sub Bidang Tata Ruang yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi bidang tata ruang yang efektif dan harmonis dicapai melalui: (a) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan PRUN (b) penyusunan regulasi turunan UU Nomor 27 Tahun 2007 (c) harmonisasi antarperaturan perundangan (d) internalisasi kebijakan sektoral dalam NSPK, dan (e) integrasi RTR dengan rencana pembangunan
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang dicapai melalui: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara penataan ruang (b) pembentukan perangkat PPNS (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dan (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang dicapai melalui: (a) peningkatan kualitas seluruh produk RTR (b) penyusunan peraturan zonasi yang menjamin implementasi RTR (c) percepatan penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR, dan (d) peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang dicapai melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur

Arah Kebijakan Sub Bidang Pengembangan Kawasan Strategis yaitu:

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi potensi kemaritiman dan sumber daya kelautan yang ada
2. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan, melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi
3. Pengembangan SDM dan Iptek, melalui peningkatan kualitas BLK bidang industri dan pariwisata serta peningkatan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat
4. Peningkatan regulasi dan kebijakan, melalui percepatan penyelesaian permasalahan kewenangan bidang perikanan dan energi di KPBBP Sabang, serta penguatan tata kelola kelembagaan
5. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, melalui optimalisasi peran dan fungsi PPS, promosi investasi yang inklusif, pemanfaatan lahan yang sudah ada, dan peningkatan peran pemerintah daerah

Arah Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah:

1. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, akuntabel, transparan, dan efisien dalam rangka pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah melalui: (1) Peningkatan kapasitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (2) Peningkatan kinerja Daerah Otonom Baru (DOB) (3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh daerah (4) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (5) Penataan kewenangan pusat-daerah serta di lingkup daerah (provinsi/kabupaten/kota) (6) Evaluasi daerah otonomi khusus (otsus) dalam rangka pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus (7) Harmonisasi regulasi pusat-daerah, dan (8) Koordinasi pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu
4. Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah melalui: (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur dalam rangka penguatan etos kerja, pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan, dan kapasitas kepemimpinan, serta (2) Penataan sistem standarisasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan
5. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui: (1) Peningkatan persentase penerimaan pajak serta retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah dalam APBD (2) Peningkatan persentase daerah dengan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan (3) Peningkatan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta (4) Peningkatan ketepatan waktu penetapan Perda APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD

4.8 BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Sasaran

Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana yang akan dicapai di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28
Garis
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Tahun
2017

No	Indikator	2014 (Geserke)	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
Perumahan dan Prasarana Dasar Permukiman				
1.	Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak			
a.	Terselenggaranya bantuan pembiayaan perumahan	Angka kelangkaan minimal (Gecserke) sebesar 100 juta Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • KPR (KPR) 275.000 Rumah Tangga • KPR Swadaya 150.000 Rumah Tangga • Bantuan Uang Muka: 174.250 Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kelangkaan minimal (Gecserke) sebesar 5 juta Rumah Tangga melalui • KPR (KPR) 400.000 Rumah Tangga
b.	Terselenggaranya bantuan pembiayaan Kecit Konstruksi		1.500 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • KPR Swadaya 450.000 Rumah Tangga
c.	Terselenggaranya pengedahan hunian layak melalui pembangunan baru		<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Stimulan Pembangunan Hunian Rumah Swadaya 2000 rumah tangga • Rumah susun sewa 11.400 unit susunan • Rumah khusus 1.400 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Uang Muka 475.000 Rumah Tangga • Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya 250.000 Rumah Tangga • Rumah susun sewa 530.000 unit susunan • Rumah khusus 50.000 unit

Nu	Indikator	2014 (Basis/ha)	2017	Sesaran Akhir RPJMN 2019
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah susun sewa 550.000 unit sarusun • Rumah khusus 50.000 unit 	
n	Indeks biaya penyelesaian hunian layak melalui peningkatan kualitas sarana swadaya	Rumah Layak Huni (RTLH) sebesar 3,4 juta Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Dimajukan kualitas hunian 107.300 rumah tangga 	Rumah layak huni (RTLH) sebesar 1,6 juta Rumah Tangga melalui Peningkatan kualitas hunian layak untuk 1.400.000 Rumah Tangga
Catatan : * Program baru tahun 2017				
2. Berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0 persen				
a	Meningkatnya kualitas permukiman kumuh di daerah perkotaan	81,4% (1 Ha (Komposisi kumulatif 100%))	81,411 Ha (komposisi kumulatif 45%)	88,411 Ha (Komposisi kumulatif 0%)
b	Penyusunan dalam rencana pembangunan permukiman kumuh daerah	Seluruh kabupaten/kota	121 kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota
3. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan				
a	Tersedianya sertifikasi dan pengawasan bangunan gedung	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota
4. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan				
a	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum	70%	84%	100%
b	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dasar dan limbah domestik	59,47% yang terdidi dari akses layak (61,08%) dan akses dasar (8,34%)	83,26% yang terdidi dari akses layak (70,7%) dan akses dasar (12,4%)	100% (85% akses layak dan 15% akses dasar)
c	Cakupan pelayanan pengumpulan sampah	47% sampah terangkut	63,5% sampah terangkut	100% (80% sampah terangkut dan 20% sampah diolah melalui B3)
Catatan : * Pengaiman terhadap data dan 3 Prioritas Nasional (Keamanan dan Perumahan				
Sarana dan Prasarana Transportasi				
1. Perhubungan Laut				
a	Pengembangan Pelabuhan Baru Komersial (lokasi)	40	40	180 (kumulatif)
b	Rata-rata dwelling time (hari)	7-9	7-9	7-9
2. Jalan dan Perkeretaaparan				
a	Tertumbuhnya jalur KA termasuk jalur ganda (km)	454,73	800,6	3.258 (kumulatif)

No	Indikator	2014 (baseline)	2017	Sesuai Akhir RPJMD 2019
	b. Terbangunnya jalan baru (km)	1.268	502,5	2.550 (kumulatif)
	c. Pengembangan jalan tol (km)	820	200	1.000 (kumulatif)
3.	Perhubungan Udara			
	a. Tersengunnya bandara baru / peningkatan bandara yang ada	0	1 (komplet)	15 (komplet)
4.	Subsidi Perintis			
	a. Tersedianya Subsidi Perintis angkutan Laut (trayek)	76	100	193
	b. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Pengaliran (trayek)	131	237	361
	c. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)	115	240	265
	d. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat (trayek)	108	198	470
	e. Tersedianya Subsidi Perintis Nelayan (lintas)	2	4	5
5.	Anggaran Perkotaan			
	a. Pensiun besar angkutan umum (senang)	23	28	52
	b. Pengembangan kota perkotaan (kota)	7	7 (komplet)	10 (komplet)
	c. Pengembangan BK (kota besar)	17	21 (komplet)	32 (komplet)
6.				
	a. Menurunnya rasio angka kecelakaan karena api (kecelakaan per 1 juta km perjalanan karena api)	0,042	0,032	< 0,025
	b. Menurunnya angka fatalities korban kecelakaan karena explosion (korban dari korban explosion)	10	32	50
7.	Badan Pengelola Wilayah Suramadu			
	a. Pembangunan unit per di hari di Suramadu	22 Unit	2 Unit	20 Unit

No	Indikator	2014 (Basis/has)	2017	Sesuai Akhir RPJMN 2019
Komunikasi dan Informatika				
1.	Komunikasi dan Informatika			
a.	Persentase jangkauan siaran dan cakupan populasi dalam negeri (P1-P10)	81% wilayah; 41% populasi	87% wilayah; 88% populasi	72% wilayah; 66% populasi
b.	Persentase jangkauan siaran dan cakupan populasi dalam negeri (P1-P10)	60% wilayah; 77% populasi	64% wilayah; 88% populasi	94% wilayah; 94% populasi
c.	Jumlah BTS yang dibangun di daerah terpencil	286 unit (jumlah awalnya)	125 unit	575 unit
d.	Jumlah pengguna akses internet di wilayah non komersial	162	800 lokasi	4000 lokasi
e.	Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPLU) yang beroperasi	2.325	2.350	2.350
f.	Jangkauan siaran TV digital terhadap populasi	90%	90%	100%
g.	Indeks e-Government	1,7	1,0	1,4
Energi dan Ketenagalistrikan¹				
1.	Ketenagalistrikan			
a.	Rasio Efisiensi	84,1%	92,75%	98,5%
b.	Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh)	843	1.058	1.200
2.	Energi			
a.	Pemangunan PLM Re-qualifikasi (td)	1	1	1
b.	Jumlah pipa gas kumulatif, km	11.980	15.354	18.102
c.	Pemangunan pipa, km	13	25	15
d.	Jumlah gas kota (kwh/Sambungan Rumah) ²	5/16.945**	1.2/110.000	48/3/1.000
e.	Pow. TBT dalam Bataren Energi (%)	6	15	16
Catatan : * Merupakan target tahunan 2014 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan pemangusaha dan diabaikan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,5 juta sambungan rumah ** Angka ini merupakan jumlah sambungan yang dibangun melalui A-10N ¹ Sesuai dengan ketentuan pada Bab 3 Prioritas Nasional - Kebijakan Energi				
Ketahanan Air				
1.	Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya melalui pengelolaan DAS			
a.	Kelembagaan status DAS lintas negara	0	3 DAS lintas negara	10 DAS lintas negara

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	Target Akhir RPJMD 2019
	b. Memulihkan kesehatan dan meningkatkan perlindungan mata air, serta penggunaan embung, dan pemanfaatan penelahan sedimen melalui kemitraan dengan petani	0	15 DAS terultras (Tilamati, Cilivung, Serayu, Sece Brentas, Cisadane, Kapatras, Tikak, Musi, Asahan, Tobak, Jember, Pang, Samang, Klaten, Way Sekampung, Limbungan)	15 DAS terultras
	c. Meningskakan kualitas data dan informasi di DAS prioritas, serta implementasi RPJWASI dalam KIRW	0	21 RPJWASI	100 RPJWASI
	d. Rehabilitasi lahan kritis oleh KP- dan DAS prioritas	0,5 ha	20 ribu ha	5,5 juta ha
	e. Pemulihan kesetaraan DAS melalui kemitraan dengan petani	±60 ribu ha	4,82 juta ha (2017); 7,83 juta ha (kumulatif 2015-2019)	12,70 juta ha
	f. Pengembangan perbenihan tanaman hutan	4.500 ha areal sumber bibit	80 ha area kebun benih skala/kelompok sumber daya pemetik 10.500 ha area usaha kebun sumber bibit; dan distribusi bibit sebanyak 37,5 juta bibit berkualitas	490 ha area kebun benih skala/kelompok sumber daya pemetik 10.500 ha area usaha kebun sumber bibit; dan distribusi bibit sebanyak 137,5 juta bibit
2.	Meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi, rumah tangga, kota dan industri (RRI), dan energi melalui pembangunan waduk multi guna, embung/aito, serta revitalisasi damak dan bangunan penampung air lainnya			
	a. Pembangunan waduk baru	0	4 waduk 30 (kumulatif 2015-2019)	49 waduk baru
	Pembangunan waduk anutan (2017)	16	29	
	b. Meningkatkan kapasitas sarana air baku kumulatif	51,44 m ³ /detik	7,1 m ³ /detik (2017) (kumulatif 2015-2019)	67 m ³ /detik
	c. Efektifnya Bina Airsani Saran prioritas	0	4 Dana Insentif	15
	d. Teraganya fungsi dan layanan publik	0	9 m ³ /detik	98 m ³ /detik
3.	Terlaksananya pemadangan/peningkatan Daerah Irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung Kedeaulan Pangan			
	a. Pembangunan/ peningkatan layanan jaringan irigasi	8,9 juta ha	70,230 juta ha (2017); 9,18 juta ha (kumulatif 2015-2019)	9,9 juta ha
	b. Rehabilitasi jaringan irigasi	0	218.048 ha (2017) 208.385 ha (kumulatif 2015-2019)	304.747 juta ha

Nu	Indikator	2014 (Basis/ha)	2017	Sesaran Akhir RPJMN 2019
a.	Pemukiman rumah tata tertib	186.747 ha	12.000 ha	115.000 ha
b.	beroperasi dan tersebarannya perumahan perumahan	0	3,2 juta ha	7,2 juta ha
4.	Meningkatnya perlindungan terhadap dampak daya rusak air di daerah pinggiran dan daerah perkotaan serta daerah-daerah terluar			
a.	Pemangunan pengendalian banjir	0	26,5 km pengendalian banjir; 15 buah saop dam, dan 48,7 km tanggul banjir	3.000 km pengendalian banjir; 306 buah saop dam; 331 km tanggul banjir
b.	Kebangkitan pengunungan pengendalian banjir	0	110 km pengendalian banjir dan 9 buah saop dam	1.000 km pengendalian banjir dan 95 buah saop dam
c.	Bangunan dan tersebarannya pengunungan pengendalian banjir	0	8.631 km pengendalian banjir; 138 km tanggul pantai dan 285 saop dam	8.000 km pengendalian banjir; 95 km tanggul pantai dan 326 buah saop dam

Arah Kebijakan

1. Perumahan dan Prasarana Dasar Perumahan

- Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah (MBR) terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas kredit/pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan.
- Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh.
- Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat.
- Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air.

2. Sarana dan Prasarana Transportasi

- Membangun dan memperkuat konektivitas melalui pengembangan transportasi pada jalur-jalur utama Logistik, akses ke simpul utama moda transportasi dan akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan pariwisata, KEK, kawasan industri) untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menekan biaya logistik serta pembangunan jalan tol, jalan lintas pulau, jalur kereta api trans-pulau, jaringan tol laut termasuk 24 debarukan strategis, sabuk penyeberangan, pelayanan pesir (short-sea shipping), pelabuhan dan bandara utama, serta jalan dan kereta api akses ke pelabuhan dan bandara
- Membangun dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah Timur Indonesia, daerah tertinggal, daerah terpendil dan kawasan perbatasan melalui

1. Sebagaimana tertuang pada sub 3 Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

- pembangunan jalan lingkar pulau, pembangunan jalan perbatasan, peningkatan kualitas jalan, revitalisasi pelayaran rakyat serta penyediaan sarana, prasarana dan subsidi transportasi perintis dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
- c. Meningkatkan **mobilitas** transportasi perkotaan melalui pembangunan angkutan umum massal kereta api dan sistem *bus rapid transit* (BRT), pembangunan jalan lingkar kota, dan pembangunan perlintasan tak sebidang jalan dan kereta api di kota-kota metropolitan dan kota besar.
 - d. Pembangunan transportasi **multimoda** dan **antar-moda** melalui percepatan pembangunan moda kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta pembangunan fasilitas perpindahan antar-moda untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi ketergantungan pada moda jalan.
 - e. Penguatan **keberlanjutan transportasi** melalui peningkatan keselamatan transportasi, pengurangan dampak negatif transportasi terhadap lingkungan serta mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
3. Komunikasi dan Informatika
 - a. Mempercepat pembangunan infrastruktur *broadband* dan menjangkau seluruh wilayah R.I
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas
 - c. Mendorong pembangunan akses tetap pita lebar
 - d. Mempercepat implementasi e-Pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan, *interoperabilitas*, dan *cost effective*
 - e. Mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik
 - f. Mendorong tingkat literasi TIK, di antaranya dalam bentuk penyertaan digital melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK
 - g. Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri
 - h. Merestrukturisasi sektor penyiaran terkait penataan spektrum frekuensi untuk mendukung penyiaran digital serta memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, tidak komersial, dalam hal prasarana penyiaran dan pembuatan produksi siaran
 4. Energi dan Ketenagalistrikan
 - a. Meningkatkan akses tenaga listrik (rasio elektrifikasi): (i) memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan ke wilayah perbatasan, terpencil dan perbatasan (ii) mendorong penggunaan sumber daya energi lokal untuk penggunaan setempat (iii) pemberian subsidi listrik yang lebih terarah, dan lebih tepat sasaran (iv) menggariskan dana transfer daerah untuk lokasi prioritas
 - b. Meningkatkan konsumsi listrik per kapita: (i) mempercepat pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk dengan intervensi pendanaan pemerintah; (ii) mendukung pengembangan fasilitas ketenagalistrikan ke pusat pertumbuhan ekonomi dan objek/proyek strategis lainnya; (iii) mengembangkan

- tata kelola sistem ketenagalistrikan yang lebih sehat dan berkelanjutan termasuk dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya
- c. Meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi (*green subsidy*), dan harga yang tepat (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati
 - d. Meningkatkan peran badan usaha dalam penyediaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan terutama untuk pemanfaatan gas kota dan mendorong konversi BBM ke BGG
 - e. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi (ii) audit energi (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (*Energy Service Company/ ESCO*)
 - f. Mengembangkan penggunaan komponen/industri ketenagalistrikan nasional
5. Ketahanan Pangan dan Air
- a. Meningkatkan peran serta komunitas pada kawasan konservasi sumber daya air melalui proyek percontohan konservasi lahan dan pengelolaan karamba ikan
 - b. Meningkatkan penyusunan master plan dan strategi pengelolaan sumber daya air di luar Jawa, serta penyusunan *mid term review* pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai untuk mengadopsi perkembangan dan dinamika pembangunan
 - c. Meningkatkan pengelolaan daya rusak air melalui penyusunan *Flood Risk Map* dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan mengadopsi penataan sempadan sungai, waduk, pantai, pesisir, dan *river restoration*
 - d. Menuntaskan pengelolalan aset irigasi dan aset sumber daya air lainnya sebagai basis data untuk perencanaan pengelolaan sumber daya air
 - e. Meningkatkan pemanfaatan potensi kinetik air waduk bagi PLTA termasuk penyelesaian hambatan regulasinya
 - f. Menyempurnakan *role sharing* antar dan lintas kementerian/lembaga, BUMN, daerah BUMD, termasuk peran serta masyarakat dan dunia usaha
 - g. Menyempurnakan NSPK infrastruktur SDA dengan mengadopsi prinsip pembangunan dan teknologi terkini serta kearifan lokal
 - h. Meningkatkan keterpaduan sistem dan basis data hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi dalam pengelolaan sumber daya air
 - i. Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan modernisasi irigasi, termasuk mendorong dibentuknya unit pengelola daerah irigasi
 - j. Meningkatkan pengelolaan bendungan untuk menjamin keamanannya, termasuk meningkatkan fungsi unit keamanan bendungan
 - k. Mendukung penyusunan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dengan mengacu kepada amanah putusan Mahkamah Konstitusi
 - l. Meningkatkan pemanfaatan DAK Sub Bidang Irigasi sebagai pembiayaan pemerintah terhadap daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah, dan mendorong penerapan Hibah Pemerintah kepada pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
 - m. Mengatur mekanisme pembagian kewenangan pengelolaan sumberdaya air kepada pemerintah pusat

- n. Mempercepat proses diterbitkannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
 - o. Mendorong penerapan skema BJPSDA, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pembiayaan partisipatif BUMN, swasta, dan di bidang sumber daya air
6. Dukungan Terhadap Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
- a. Meningkatkan penelitian dan inovasi teknologi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur
 - b. Melaksanakan penerapan teknologi pada skala lapangan di bidang jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, sumber daya air, penyediaan air minum, dan sanitasi
 - c. Meningkatkan pemanfaatan bahan baku lokal bagi pembangunan infrastruktur
 - d. Meningkatkan kerjasama penelitian dan penerapan teknologi infrastruktur dengan stakeholder penelitian dan pengembangan
 - e. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur yang transparan, partisipatif dan akuntabel
 - f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas konstruksi nasional melalui penetapan standar kualitas kerja, pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi
 - g. Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi, produktif, serta berkepribadian
 - h. Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah pengembangan strategis untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional
7. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur
- a. Penerapan *Value for Money* (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek
 - b. Mendorong pembiayaan infrastruktur melalui APBN/APBD sebagai *the last resources*;
 - c. Penyediaan anggaran oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
 - d. Penerapan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU melalui:
 - Kepastian pengembalian investasi dengan pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (*user charge*) atau pembayaran atas ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - Penyediaan dukungan pemerintah dengan *Viability Gap Funding* (VGF) dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penyelesaian Jaminan Perantara
 - e. Peningkatan kapasitas SDM dan keambiguan melalui pembentukan simul-simpuh KPBU pada kementerian sektor dan seluruh provinsi di Indonesia

No.	Kegiatan	Sasaran 2017
1.	Kembangan Teknik Tenaga Listrik 1000 MW Jawa Tengah	
	a. Penyelesaian perolehan lahan b. Monitoring pelaksanaan serentetan kerjasama	Pemenuhan Perolehan Lahan (Financial Case)
2.	KAWUK (Kamu-bangkang-estanjung, Kalimantan Tengah)	
	a. Pengajuan permohonan lahan atas risiko politik dari pemerintah b. Monitoring pelaksanaan serentetan kerjasama	Pemenuhan Perolehan Lahan (Financial Case)
3.	Jalan Tol Medan-Kualanaram-Lubuk Linggau	
	a. Penyelesaian pengadaan tanah b. Monitoring pelaksanaan serentetan kerjasama	Pemenuhan perolehan perolehan (Financial Case)
4.	Jalan Tol Kayuagung – Palembang – Serang Sumatera Selatan	
	Pengadaan tanah	Pemenuhan perolehan perolehan (Financial Case)
5.	TPPAS Regional Jawa Barat, di Nanggung	
	a. Penyelesaian pengadaan lahan usaha b. Pengadaan lahan	Pemenuhan perolehan perolehan (Financial Case)
6.	Proyek Palapa Ring	
	Instansi pemerintah di PPK	Pemenuhan perolehan perolehan (Financial Case)
7.	PKU (Mulut, Lantai 9 dan 10), Sumatera Selatan	
	a. Fasilitas perizinan di PPK b. Pengadaan lahan	Pemenuhan perolehan perolehan (Financial Case)
8.	Kembangan Jalan Tol Cikampek	
	Proses pengajuan lahan	Pemenuhan perolehan perolehan (Financial Case)
9.	SRM (Cirok Gede Kota Bekas)	
	a. Penyelesaian pengadaan lahan usaha b. Pengadaan lahan	Pemenuhan perolehan perolehan (Financial Case)
10.	Jalan Tol Tamas-Maleno	
	Pengadaan lahan	Selesai pengadaan tanah
11.	Right of Way (ROW) di Batam	
	Penyelesaian anggaran badan usaha	Perencanaan konstruksi
12.	Proyek Pengelolaan Sampah Kota Batam	
	Pengadaan lahan usaha	Terselesaikan badan usaha pelaksana KPRU
13.	Konjungsi Palauhan Kabil (Jembatan Jorong Sarung) di Batam	
	Pengadaan lahan usaha	Terselesaikan badan usaha pelaksana KPRU
14.	Sistem Layanan Pajak Terpadu	
	Pengadaan lahan usaha	Terselesaikan badan usaha pelaksana KPRU
15.	Fasilitas PCN Papua Tahun 2020	
	Penyusunan Pre-studi Kelayakan KPRU	Tersusunnya dokumen Pre-studi Kelayakan
16.	KPRU Bidadari (Pemasangan)	
	Penyusunan Pre-studi Kelayakan KPRU	Tersusunnya dokumen Pre-studi Kelayakan

Tabel 4.30
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Fungsional KPRU TA 2017

4.9 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**Sasaran**

Indikator Kinerja Utama
Kementerian
Perencanaan
Kemampuan
dan Sumber Daya
Manusia
Tahun 2017

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
Pengembangan Agribisnis, Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan			
1.	Hasil Perkebunan (ribu ton)		
	a. Kelapa Sawit	23.294	36.470
	b. Karet	3.490	3.910
	c. Kakao	775	870
	d. Teh	187	161
	e. Kopi	723	778
	f. Kelapa	3.160	3.791
2.	Hasil Hortikultura (ribu ton)		
	a. Mangga	2.047	2.518
	b. Nenas	1.904	2.042
	c. Manggis	150	155
	d. Salak	1.107	1.146
	e. Kentang	1.373	1.431
3.	Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan		
	a. Produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman (juta m ³)	38,3	185,0
	b. Produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu (ton)	257.000	370.000
	c. Nilai ekspor nonmigas sektor kehutanan (US\$ miliar)	8,04	40,17
	d. Produksi kayu hutan rakyat (juta m ³)	70	100
4.	Pengolahan Hasil Perikanan		
	a. Ketersediaan Pasokan Ikan di UPI (%)	65	75
	b. Nilai ekspor hasil perikanan (US\$ miliar)	7,87	9,54
Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan			
1.	Peningkatan Produksi Mineral (ton)		
	a. Tembaga	210.000	2.350.000
	b. Emas	105	575
	c. Besi	307	1.510
	d. Timah	70.000	350.000
	e. Perunggu	1.400.000	6.900.000
	f. Nikel Matte	81.000	405.000
2.	Peningkatan Nilai Tambah Hilirisasi		
	a. Efisiensi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri (miliar unit)	6	30
	b. Penetapan formula harga mineral (pontosasi)	12	60
	c. Penguasaan produksi dan pemasaran (perusahaan mineral)	20	95
	Optimalisasi penerimaan negara:		
	a. Penerimaan negara (Rp triliun)	45,7	125,8
	b. Dana investasi (Rp triliun)	21,2	103,2
	Investasi ke sektor mineral (Rp triliun)	82,7	414,8

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RP, MN 2019
3.	Pertambangan Berkelanjutan		
a.	Kekamasiwilayah beres tambang (ha)	6.800	34.000
b.	Recovery pada pertambangan batu bara (%)	57	67
c.	Recovery pada pertambangan mineral (%)	60	80
d.	Pengawasan pertambangan mineral tanpa ijin/ilegal (caerah)	5	10
e.	Pengawasan pertambangan batubara tanpa ijin/ilegal (caerah)	3	10
Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut serta Kerjasama Antar Regional dan Internasional dalam Konservasi Laut			
1.	Jumlah kawasan pesisir yang meningkat keampuhannya	25	25
2.	Jumlah kegiatan konservasi perairan	7	10
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Restorasi Gambut			
1.	Penegahan Kebakaran Hutan dan Lahan		
a.	Pesko grado kesuksesan kampanye di 7 provinsi kawasan kebakaran	100 pesko tingkat desa	100%
b.	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap kebakaran dan kebakaran	100%	100%
c.	Penurunan korban sebesar 10% dari batas toleransi maksimum jumlah korban	6%	10%
2.	Penanggulangan Kebakaran		
	Penurunan luas kebakaran pada hutan/ lahan gambut dan non gambut	10%	10%
3.	Restorasi Gambut		
a.	Area kritis Air Pemangunan restorasi	400 ribu ha	2 juta ha
b.	Revegetasi di lahan gambut terdegradasi	400 ribu ha	2 juta ha
Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keekaragaman Hayati			
1.	Konservasi Hutan dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan		
a.	Penetapan kawasan hutan	25%	100%
b.	Operasionalisasi KPH (unit)	381 KPH yang terdiri dari 20% KPH ; 10% KPH dan 60 NPHK Non lahan Nasional	629 KPH - 347 KPH-R, 162 KPH-L dan 100 KPH Non lahan Nasional
c.	Penataan Batas kawasan hutan	0,610 km	40.500 km
d.	Peningkatan efektivitas pengelolaan 260 unit kawasan konservasi hingga memperoleh MELI minimal 70%	150 unit	250 unit
e.	Akses kelola hutan bersama masyarakat (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat & Kemitraan)	0,3 juta ha	12,70 juta ha
2.	Pengelolaan DAS		
a.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH dan DAS	15 ribu Ha	5,3 juta Ha
b.	Pilihnya kesehatan DAS Prioritas	3 DAS	10 DAS

No	Indikator	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
	c. Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di DAS Prioritas melalui konservasi sumber daya air	3 DAS	15 DAS
3.	Pelestarian dan Pemanfaatan Ketnekaragaman Hayati		
	a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai daftar Red Data Book/ IUCN)	Sesuai 2 (2) sesuai baseline data tahun 2013	Sesuai 10 (10) sesuai baseline data tahun 2013
	b. Jumlah taman nasional (TN) yang memiliki satwa langka spesies satwa terancam punah	5 TN	50 TN
	c. Ecosistem RBNB dan hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	1010 Miliar	1p40 Miliar
	d. Jumlah kawasan ekosistem esensial (KHE) yang memiliki keragaman hayati di tingkat nasional	6 KEE	48 KEE
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan			
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55 - 61,5	68,5 - 88,5
	b. Berkurangnya jumlah tribulan samudera besar sumbu	12,45 juta ton	24,5 juta ton
2.	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana		
	a. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tingkat nasional	132,2	132,8
	b. Menurunnya rata-rata IRBI pada 130 kabupaten/kota sasaran prioritas nasional	154,1	144
3.	Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan		
	a. Digitalsisasi Peralatan MKG	100%	100%
	b. Meningkatnya pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, keadilan energi, kemajemukan wilayah serta kompetensi nasional pembangunan pariwisata desa tertinggal, dan lingkungan KPR	100%	

Arah Kebijakan

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - a. Jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri dari sektor pertanian (termasuk perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan dan sektor kehutanan
 - b. Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pemud dayakan, pengolah, pemasar hasil perikanan dan petambak garam melalui: (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan diseminasi informasi pasar, harga dan komoditas secara real time dan kontinu kepada pelaku perikanan (2) Penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah untuk petani dan nelayan (3) Pengadaan asuransi bagi petani dan nelayan, dan bantuan teknis pengembangan jaringan pasar, teknologi dan pelayanan informasi pasar, dan (4) Penataan sentra nelayan dan peningkatan keterampilan SDM petani dan nelayan
 - c. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan

- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan untuk memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan dan kelestarian fungsi hutan
 - e. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk industri hulu hingga industri hilir dalam rangka mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (*forest-based cluster industry*) untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi industri dan peningkatan *value supply chain*.
 - f. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor melalui: (i) Penetapan standar mutu olahan (ii) Penguatan bantuan teknis terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil (iii) Peningkatan kemampuan operasi pasar regional dan global (iv) Pengembangan sistem informasi pasar komoditas perikanan yang akurat (v) Penguatan aspek promosi produk perikanan, dan (vi) Pengembangan sistem rantai dingin dalam distribusi dan pemasaran produk perikanan
2. Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan
- a. Peningkatan produksi mineral
 - b. Peningkatan nilai tambah/efisiensi dengan cara: (a) Meningkatkan keterpaduan pengembangan industri (b) Mendukung insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan penunjam di dalam negeri, dan (c) Meningkatkan kepastian hukum pengusahaan pertambangan, terutama terkait kewajiban pengolahan dan penunjam di dalam negeri
 - c. Peningkatan Pertambangan Tanpa Izin (PTT) dan penerapan pertambangan berkeanjutan, melalui: (a) Penegakan standar pertambangan berkeanjutan (b) Pembinaan dan pendampingan cara operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang (c) Pengelolaan dan peningkatan jumlah inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, dan (d) Penegakan keharusan pengolahan limbah dan area pasca tambang
3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut serta Kerjasama Antar Regional dan Internasional dalam Konservasi Laut
- a. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir (*coastal resilience*)
 - b. Penguatan sarana pendukung mitigasi bencana wilayah pesisir, termasuk penyediaan informasi kebencanaan di daerah rawan bencana
 - c. Perluasan lingkup kerjasama beraturan di tingkat regional dan global, antara lain melalui pengelolaan *Large Marine Ecosystem*, termasuk *Coral Triangle Initiative (CTI)*, *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSMEI)*, *Mangrove for the Future (MFFI)*, *Amfura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)*, dan *Marine Biodiversity*
 - d. Penguatan kerjasama pengelolaan laut antar daerah, seperti Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Sea, Karimaja
4. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Restorasi Gambut
- a. Upaya pencegahan kebakaran hutan melalui: (1) Penyusunan rencana pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dan komprehensif antar pemangku kepentingan (2) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan

- dasar bagi para pihak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (3) Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan (4) Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat untuk mendukung pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), serta (5) Peningkatan kemitraan bersama pengusaha dan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- b. Penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui: (1) Koordinasi pelaksanaan penanggulangan kebakaran antar pemangku kepentingan di tingkat tapak (2) Pembangunan sumur bor di wilayah gambut rawan terbakar (3) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dan pemantauan kebakaran (4) Pemantauan terhadap pelaku usaha (perusahaan dan petani penyediaan dan kepemilikan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan (5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan sarpras dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- c. Revegetasi di lahan gambut dan lahan bekas kebakaran dilakukan melalui: (1) Penyusunan peta kerja kesatuan hidrologi gambut (KHG) khusus di lahan gambut (2) Koordinasi dan pembangunan sekat kanal di lokasi gambut kritis bekas terbakar (3) Penanaman kembali (revegetasi) pada area genangan sekat kanal (4) Partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya restorasi gambut, dan (5) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka pemulihan ekosistem gambut
5. Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
- a. Konservasi hutan dan tata kelola hutan, melalui: (1) Penyelesaian pengukuhan/ penetapan kawasan hutan (2) Pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (3) Peningkatan pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak, dan (4) Peningkatan luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKM, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemirisan
- b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui: (1) Pemulihan dan perlindungan mata air di 15 DAS prioritas (2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS (3) Rehabilitasi hutan di dalam KPH dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanaman, dan (4) Memperbaiki koordinasi dan pemahaman para pihak dalam upaya peningkatan kualitas RTRW berbasis DAS
- c. Pelestarian dan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (1) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas keragaman hayati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik, dan (3) Pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara *in-situ* dan *ex-situ*
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui: (1) Penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan (2) Pengendalian pencemaran pesisir dan laut (3) Pengolahan sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah (4) Penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR), dan (5) Pemanfaatan sampah untuk sumber energi
- b. Penanggulangan Bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintahan, pemerintahan daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui: (1) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan

berkelanjutan di pusat dan daerah (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan (3) Peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bersifat *mainstreaming* pada bidang-bidang prioritas pembangunan nasional RKP 2017

- c. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan, melalui: (1) Peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim (2) Peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempa bumi dan tsunami, dan (3) Peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim dan kebencanaan

BAB 5

KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
PENDANAAN PEMBANGUNAN





Pendahuluan
Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Nasional
Pembangunan Bidang
Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan
Kaidah Pelaksanaan
Penutup



KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

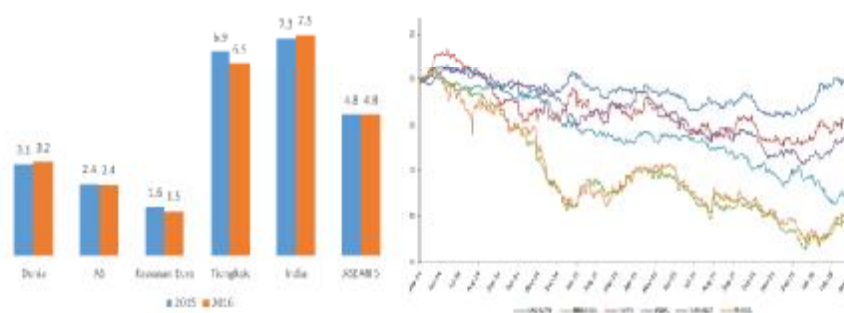
5.1 KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kerangka ekonomi makro 2017 memuat (i) perkembangan terkini dan perkiraan perekonomian global dan domestik sampai dengan akhir 2016, dan (ii) pandangan ekonomi makro di tahun 2017.

5.1.1 PERKEMBANGAN TERKINI TAHUN 2015 DAN 2016

Ekonomi Global

Pada tahun 2015, aktivitas perekonomian global masih lemah, didorong oleh pelemahan ekonomi negara berkembang, terutama Tiongkok, sementara pemulihan perekonomian negara maju, seperti Amerika Serikat, cenderung berjalan lambat. IMF memperkirakan perekonomian global akan meningkat dari 3,1 persen di tahun 2015 menjadi 3,2 persen di tahun 2016, lebih rendah dari prediksi sebelumnya yang besarnya 3,4 persen. Kinerja ekonomi beberapa negara berkembang, terutama Cina, Rusia, dan Brasil menjadi alasan di balik penurunan tersebut.



Gambar 5.1
Kiri:
Pertumbuhan
Ekonomi Global

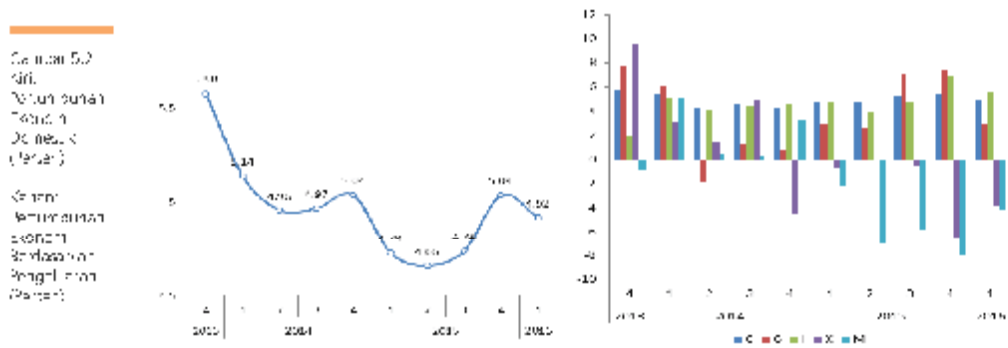
Kanan:
Perkembangan
Harga
Komoditas
Energi Global

Sumber: WEO IMF April 2016, Bloomberg

Faktor eksternal lain yang juga cukup berpengaruh adalah turunnya harga komoditas global, terutama komoditas energi. Harga minyak dunia jenis WTI dan Brent Oil berturut-turut turun sebesar 24,5 dan 35,0 persen sepanjang tahun 2015. Di tahun 2016, harga komoditas diperkirakan masih tetap rendah. Harga minyak dunia diperkirakan di kisaran US\$44,0 per barre.

Ekonomi Domestik

Di tengah berbagai tantangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 melambat menjadi 4,8 persen, tetapi masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Untuk tahun 2015, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi menjadi 5,3 persen, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh sebesar 5,1 dan 5,2 persen, serta ekspor yang kembali tumbuh positif sebesar 1,0 persen.



Sumber: Bank Indonesia

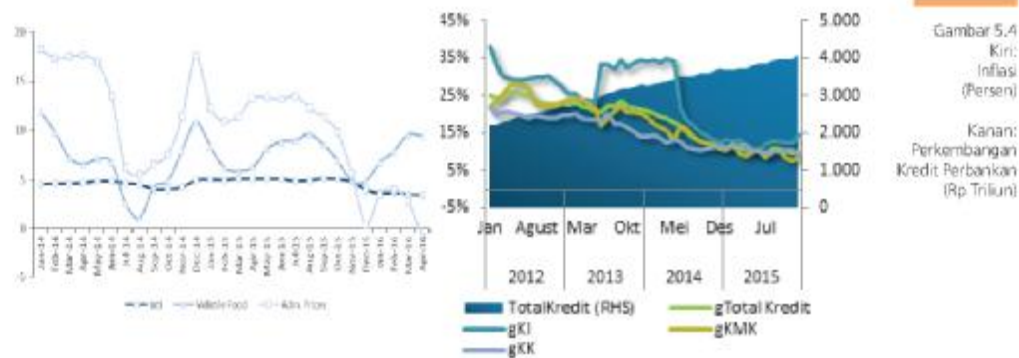
Di tengah perlambatan ekonomi global kinerja neraca pembayaran Indonesia menurun pada tahun 2015, yaitu mengalami defisit sebesar USD1,1 miliar. Lekanam arus modal keluar Indonesia seiring dengan ketidakpastian kenaikan suku bunga the Fed menyebabkan penurunan kinerja neraca modal dan keuangan Indonesia. Sementara itu, defisit transaksi berjalan pada tahun 2015 mampu dijaga pada tingkat 2,1 persen PDB (sepanjang 2015) dan secara struktural lebih sehat dari sebelumnya.



Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg

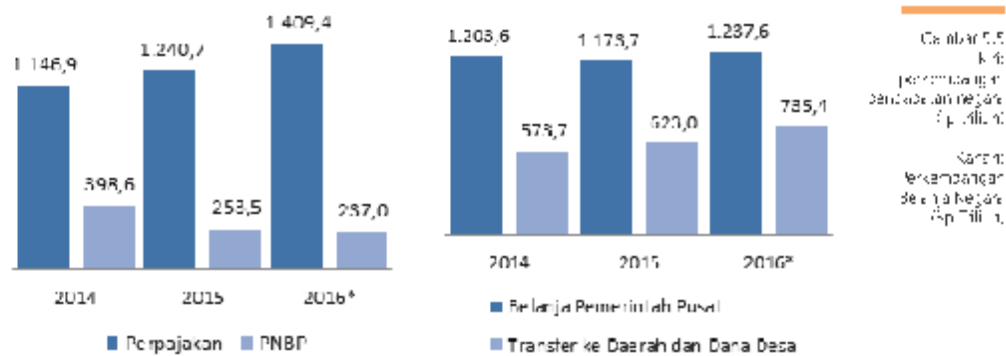
Kondisi neraca pembayaran mempengaruhi pergerakan Rupiah dan IHSG yang sempat tertekan sepanjang tahun sebelum menguat seiring dengan redanya volatilitas dasar keuangan dunia di akhir tahun 2015. Di akhir tahun 2016, nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar Rp13.000 per USD.

Dari sisi stabilitas harga, tingkat inflasi hingga akhir tahun 2015 acuan sebesar 3,35 persen (YOY), terendah sejak bulan Desember tahun 2009. Meskipun dampak H-Nino masih dirasakan di beberapa wilayah hingga akhir bulan Desember 2015, namun secara keseluruhan stabilitas harga bahan pokok masih terkendali. Di akhir tahun 2016, inflasi diperkirakan tetap terjaga pada tingkat kurang dari 4,5 persen.



Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg

Dari sisi sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat. Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan tetap tumbuh, walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan. DPK pada triwulan IV tahun 2015 tercatat tumbuh sebesar 7,3 persen dibanding tahun 2014 (YoY). Sementara itu, kredit mengalami pertumbuhan sebesar 10,5 persen dibanding tahun 2014 (YoY). Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) pada triwulan IV tahun 2015 juga tercatat lebih dari 92,0 persen.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dari sisi fiskal, melambatnya perekonomian global dan domestik cukup memengaruhi kinerja APBN selama tahun 2015. Realisasi penerimaan perpajakan hanya sebesar Rp1.240,4 triliun, atau 83,3 persen dari APBN-F 2015. Sementara itu, belanja negara bulan pajak (PNBP) realisasinya mencapai Rp253,7 triliun, atau 94,3 persen dari target dalam APBN-P. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tahun 2015 mencapai Rp1.178,7 triliun, atau 90,6 persen dari APBN-P (Rp1.984,2 triliun). Realisasi tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.174,5 triliun (88,9 persen dari APBN-P) dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp523,0 triliun (93,8 persen dari APBN-P). Dengan realisasi

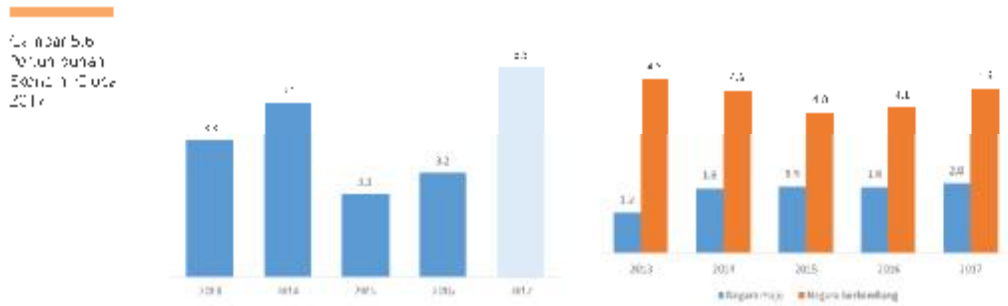
pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit anggaran tahun 2015 mencapai Rp292,1 triliun, atau sebesar 2,5 persen dari PDB.

Pada tahun 2016, kinerja penerimaan perpajakan diperkirakan akan lebih baik, ditargetkan mencapai Rp1.546,7 triliun, yang disumbang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.360,2 triliun. Dari sisi belanja, peningkatan belanja produktif terus dilanjutkan, yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi belanja infrastruktur menjadi Rp313,4 triliun. Alokasi transfer ke daerah terus ditingkatkan dan diubah strukturnya untuk lebih meningkatkan efektivitas penggunaannya. Dengan perkembangan tersebut, defisit anggaran akan dijaga pada 2,2 persen PDB.

5.1.2 PERKIRAAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2017

Tantangan dan Resiko Ekonomi Global dan Domestik

Tahun 2017 ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2016. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Faktor lain, harga komoditas, diperkirakan masih tetap rendah, sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil.



Sumber: WEO IMF April 2016

Pada tahun 2017 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan dan resiko sebagaimana berikut:



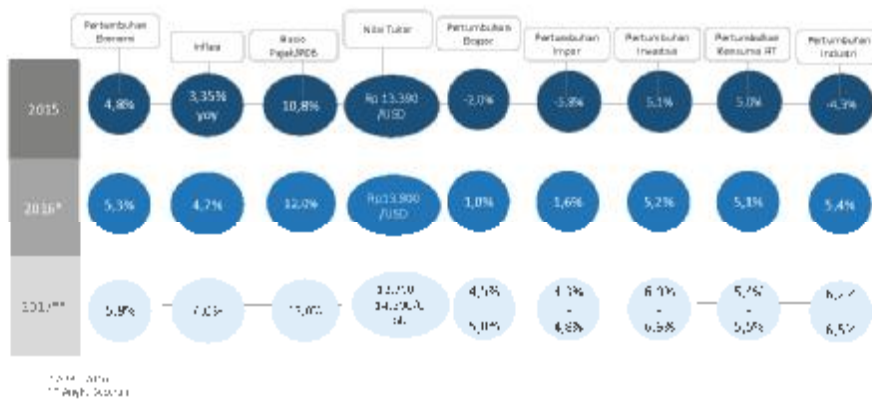
Sementara itu ekonomi domestik juga masih dihadapkan pada berbagai resiko:



Gambar 5.8 Resiko Ekonomi Domestik

Hal Penting dalam Sasaran Ekonomi Makro 2017

Menghadapi berbagai tantangan dan resiko ekonomi, baik global maupun domestik, ekonomi Indonesia di tahun 2017 diperkirakan akan mampu mencapai sasaran ekonomi makro berikut:



Gambar 5.9 Sasaran Ekonomi Makro 2017

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,5 - 5,9 persen pada tahun 2017.

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi global baik di AS dan Uni Eropa mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,5-5,0 persen terutama ekspor produk nonmigas, yang didorong oleh: (i) meningkatnya efektivitas diplomasi perdagangan (ii) meningkatnya efektivitas *maxter intelligence*, promosi dan asistensi ekspor, serta (iii) pengembangan fasilitasi ekspor produk manufaktur. Membaliknya iklim investasi dan peluncuran pasar domestik yang luas mendorong investasi tumbuh 5,0-6,6 persen yang didukung oleh: (i) kemudahan dalam berjinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah (ii) percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing usaha dan (iii) meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Tingkat inflasi yang stabil di kisaran 4,0 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga daya belinya akan mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,4-5,5 persen. Konsumsi pemerintah tumbuh 6,7 persen yang didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

Dari sisi penawaran, industri pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh 4,2-4,3 persen, yang didorong oleh: (i) meningkatnya produksi tanaman pangan (ii) meningkatnya produksi tanaman perkebunan yang didorong oleh permintaan minyak kelapa sawit dalam negeri (iii) suplai daging sapi dan unggas yang semakin baik dengan didorong alat transportasi antar pulau, serta (iv) kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan juga produk olahan perikanan terutama didorong oleh penegakan hukum dan pembangunan industri olahan hasil perikanan.

Industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh antara 6,2-6,5 persen yang didorong oleh ketersediaan dan kualitas bahan baku, infrastruktur dan energi yang memadai, pemberian insentif fiskal yang harmonis, sumber daya manusia industri yang kompeten, peningkatan penanaman modal, pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif, hubungan industrial yang bersahabat, dan peningkatan akses ke pasar global.

Neraca Pembayaran. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan membaik ditopang oleh perbaikan pada neraca transaksi modal dan finansial terutama sumbangan dari investasi langsung luar negeri (PMA) yang mengalami peningkatan. Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri, memungkinkan PMA dan investasi portofolio untuk meningkat di tahun 2017. Kinerja ekspor diperkirakan membaik, tetapi impor nonmigas diperkirakan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi, didorong oleh permintaan domestik yang meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik serta percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Kondisi ini akan meningkatkan defisit transaksi berjalan tetapi dalam tingkat yang terjaga,

Kuangan Negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik akan berpengaruh terhadap kinerja APBN tahun 2017. Pada sisi penerimaan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 13,9% PDB dengan penerimaan perpajakan sebesar 12,0% PDB, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,8% PDB. Sementara itu, belanja negara tahun 2017 diperkirakan mencapai 16% PDB terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10% PDB dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar 6% PDB. Dengan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2017 diperkirakan mencapai sebesar 2,2% dari PDB. Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri.

Inflasi dan Nilai Tukar. Sasaran dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yang diperkirakan sebesar 5,8 persen perlu didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Pada tahun 2017 tingkat inflasi diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran 4,0 persen seiring dengan masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia. Sementara itu dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan Tiongkok dan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp13.700- Rp14.200 per USD.

5.1.3 KEBUTUHAN INVESTASI

Kebutuhan investasi tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp4.498,0-4.617,0 triliun. Kebutuhan dana tersebut berasal dari investasi pemerintah dan investasi masyarakat yang masing-masing menyumbang sebesar 11,3 persen dan 88,7 persen. Sumber pembiayaan investasi pemerintah berasal dari pengalangan modal pemerintah sedangkan sumber investasi masyarakat berasal dari sektor perbankan, obligasi pemerintah dan aliran modal asing.

Uraian	2014 (Baseline)	2015	2016	
			Perkiraan	Sasaran*
Pertumbuhan Ekonomi ¹	5,0	4,8	5,3	5,3 – 5,9 Tdk. 5,8
Pertumbuhan Sisi Pengeluaran²				
Konsumsi Rumah Tangga	5,2	5,0	5,1	5,4 – 5,5
Konsumsi LNFST	12,2	-0,0	4,8	8,8 – 11,0
Konsumsi Pemerintah	1,2	5,4	5,4	5,3 – 5,7
M.D.I	4,8	5,1	5,2	5,0 – 5,6
Impor Barang dan Jasa	1,0	-0,0	1,0	4,1 – 5,0
Impor Barang dan Jasa*	2,2	5,5	1,0	4,5 – 4,8
Pertumbuhan Sisi Produksi³				
Perdagangan	4,2	4,0	4,2	4,2 – 4,3
Investasi dan Pengalihan	0,7	-5,1	0,2	0,1 – 0,6
Industri dan Pertambangan	4,8	4,3	5,4	5,2 – 5,5
Pengadaan Listrik dan Gas	5,8	1,1	2,6	4,4 – 4,5
Pengadaan Air, Pengaliran Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,9	7,1	7,4	7,1 – 7,6
Konstruksi	7,0	6,7	8,0	7,7 – 8,4
Pengadaan Besar dan Ecran: Reparasi Kapal dan Sepeda Motor	5,2	2,5	3,3	3,3 – 4,3
Transportasi dan Pergudangan	7,4	6,7	6,8	7,1 – 8,8
Pengediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	4,4	5,7	5,6 – 6,6
Informasi dan Komunikasi	10,1	10,1	10,7	10,1 – 10,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,7	8,5	8,7	8,9 – 9,1
Retail	5,0	4,8	5,0	5,0 – 5,6
Jasa Persewaan	4,8	7,7	8,1	8,1 – 9,1
Aktivitas Perumahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,4	4,8	5,0	5,1 – 6,1
Jasa Kesehatan	5,8	7,6	8,3	8,6 – 9,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,0	7,1	8,2	8,1 – 8,6
Jasa Lainnya	8,9	8,1	8,5	8,1 – 8,8

Tabel 5.1
Sasaran Ekonomi
Makro Daerah
2016

*Data DBE Menggunakan nilai Tahun Dasar 2010

URAIAN	Realisasi sd 31 Des 2015	2016		2017
		APBN	Proyeksi	Proyeksi
Pendapatan Negara dan Lihai	11,0	14,1	13,0	13,9
I. Pendapatan Dalam Negeri	12,0	14,3	13,0	13,8
1. Penghasilan Pajak	10,8	12,7	11,1	12,0
2. Penerimaan Negara bukan Pajak	2,2	2,2	1,9	1,8
II. Hibah	0,1	0,0	0,0	0,0
Belanja Negara	15,0	10,5	12,0	10,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	10,7	10,4	9,8	10,0
II. Belanja ke Daerah	4,4	6,1	5,8	5,0
Keseimbangan Primer	(0,7)	(0,7)	(1,1)	(0,7)
Surplus/Defisit Anggaran	(0,0)	(0,0)	(0,5)	(0,0)
Pembiayaan	2,8	2,1	2,5	2,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	2,7	2,1	1,5	1,1
II. Pembiayaan Luar Negeri	0,1	0,0	0,0	0,0

Tabel 5.2
Pemerataan
2015-2017
(% PDP)

5.2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Sasaran

Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah. Semangat dan tekad kuat membangun daerah telah menjadi bagian dari agenda Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2017 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan menekankan pada keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam, jasa, sumberdaya manusia yang berkualitas, serta peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi.

Pengembangan wilayah didasarkan pada 7 (tujuh) pengembangan wilayah prioritas yang meliputi Wilayah Pulau Papua, Wilayah Kepulauan Maluku, Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Wilayah Pulau Sulawesi, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Jawa-Bali dan Wilayah Pulau Sumatera. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2017 dititikankan pada pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan meningkatkan peran ekonomi wilayah luar Jawa melalui percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran Pemerataan Pembangunan Antarwilayah

Wilayah	2014	2017	2019
Sumatera	23,6	24,3	24,8
Jawa	48,0	56,2	55,1
Bali-Nusa Tenggara	2,5	2,1	2,5
Kalimantan	8,7	9,3	9,0
Sulawesi	4,8	5,1	5,2
Maluku – Papua	2,3	2,5	2,9

Arah Kebijakan

- Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera
- Meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
- Pengembangan wilayah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
- Ciptaan pertumbuhan/pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH:

- Meningkatkan transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah RI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua;
- tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah Pengembangan Wilayah Papua

Pada tahun 2017, peran wilayah Papua terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Papua. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2017 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pedalaman dan pesisir pantai.

Tema Pembangunan Wilayah Pulau Papua

1. Pengembangan industri berbasis komoditas lokal di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
2. Pengembangan obyek wisata alam melalui industri perikanan dan pariwisata bahari
3. Peningkatan pariwisata budaya dan alam
4. Pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tambaga
5. Peningkatan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dan masyarakat
7. Pengembangan kawasan ekonomi industri non orokelanjutan across wilayah masyarakat adat

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat			
Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan ekspor	7,9 (11,1)	10,2 (11,2-5,2)	14,8
Tingkat Kemiskinan	25,6 (25,7)	24,5	21,7
Tingkat Pengangguran	5,1 (8,1)	4,8	4,6

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua			
Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekspor	14,1 (8,0)	15,0 (8,9-5,2)	17,1
Tingkat Kemiskinan	30,9 (28,7)	28,5	26,1
Tingkat Pengangguran	3,4 (4,0)	3,2	3,1



Beberapa Kegiatan Prioritas Provinsi Papua Barat tahun 2017 untuk Mendukung Tema Pembangunan

Kedaulatan Pangan

- Pembangunan Irigasi seluas 5.132 Ha
- Rehabilitasi Irigasi seluas 800 Ha

Pengembangan Pariwisata

- Pengembangan Destinasi Pariwisata Musmusi

Konektivitas

- Pembangunan Rute KA Sorong-Mandawari

Beberapa Kegiatan Prioritas Provinsi Papua Tahun 2017 Untuk Mendukung Tema Pembangunan

Kedaulatan Pangan

- Pembangunan Irigasi seluas 24.180 Ha
- Rehabilitasi Irigasi seluas 8.286 Ha

Konektivitas


- Pembangunan Rute KA Jayapura-Sarmi
- Pembangunan Bandara Semani
- Pembangunan Kawasan Pelabuhan
- Pembangunan Jalan Arteri Primer menghubungkan PKM Jayapura dengan Kab. Keerom

Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

Perencanaan Wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2017 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Maluku. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2017 di arahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Maluku, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.

Tema Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku

1. Pemecatan masalah land claim dan pengakuan nasional
2. Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata perikanan
3. Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga
4. Pariwisata bahari



Sasaran Pemograman Provinsi Maluku Utara

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,9 (5,7)	6,1 (5,0 - 5,4)	7,0
Tingkat Kemiskinan	8,6 (5,2)	6,7	5,5
Tingkat Pengangguran	14,4 (5,7)	12	10

Sasaran Pemograman Provinsi Maluku

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	6,4 (5,4)	7,1 (6,3 - 5,7)	8,3
Tingkat Kemiskinan	18,3 (19,4)	17,9	16,5
Tingkat Pengangguran	7,2 (9,4)	6,7	6,1

Beberapa Kegiatan Prioritas Provinsi Maluku Utara tahun 2017 untuk Mendukung Tema Pembangunan

Kedaulatan Pangan

- Pembangunan Irigasi seluas 1.221 Ha
- Rehabilitasi Irigasi seluas 1.787 Ha

Pengembangan K&K

- Peningkatan K&K Vocmai
- Peninggunya alan lingkaran transmigrasi Wasabulu - Suli

Konektivitas

- Peninggunya relabuhan Wayabula

Beberapa Kegiatan Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2017 untuk Mendukung Tema Pembangunan

Kedaulatan Pangan

- Pembangunan Irigasi seluas 70.082 Ha
- Rehabilitasi Irigasi seluas 3.950 Ha

Konektivitas

- Peningkatan relabuhan pengangkutan antar pulau pulau di Maluku

Pengembangan Kawasan Perbatasan

- Pembangunan/Peningkatan Bandara Toboali
- Pembangunan Jalan Nasional di Wilayah P&SN Samalaki

V-12 BAB 5. TENDANG KELOLA PEMERINTAH 2017

www.peraturan.go.id

Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Teren wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2017 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2017 diarahkan pada upaya penuntasan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.

Tema Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

1. Penguatan pariwisata ekologis melalui pengembangan Industri *Marine, Creative, Eco-tourism, Eco-tour*;
2. Penguatan pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
3. Pengembangan industri berbasis pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja;
4. Pengembangan industri manufaktur berbasis.

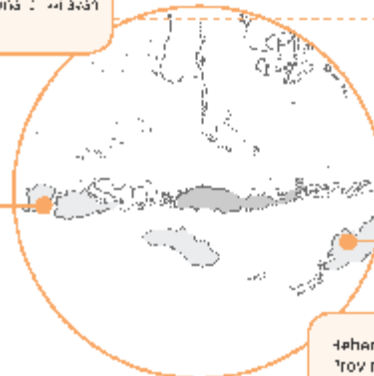
Beberapa Kegiatan Prioritas Provinsi NTB Tahun 2017 untuk Mendukung Tema Pembangunan

Kebudayaan Pangan

- Gembalaan Sengaja Berdaging Halal
- Pengembangan Pariwisata
- Pengembangan perikanan dan perikanan
- Pengembangan Kawasan Perbatasan
- Pengembangan Jasa Nasional di Wilayah KKN Atambur

Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	6,0 (5,0)	6,2 (5,1-6,5)	6,8
Tingkat Kemiskinan	18,4 (17,5)	17,0	15,7
Tingkat Pengangguran	2,8 (3,8)	2,4	2,3



Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	3,7 (2,2)	8,1 (7,6-2,2)	8,3
Tingkat Kemiskinan	15,9 (18,5)	15,0	14,4
Tingkat Pengangguran	4,0 (5,2)	4,8	4,6

Beberapa Kegiatan Prioritas Provinsi NTB Tahun 2017 Untuk Mendukung Tema Pembangunan

Kebudayaan Pangan

- Pembangunan Berdaging Halal dan Bekas
- Penguatan Pendanaan dan Dana Pembangunan KPR
- Pengembangan KPR Mandala dan Komunitas
- Pengembangan Koperasi Berbasis Komunitas dan

Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

Sejak tahun 2017, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2017 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.

Tema Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi

1. Penguatan Indonesia dalam perdagangan internasional dan zona perdagangan FTI
2. Pengembangan industri berbasis logistik
3. Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri perikanan, perikanan, pertanian
4. Pengembangan industri berbasis mineral, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (lautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	2015	2016	2017
Perumbuhan Ekonomi	7,1 (6,0)	7,2 (6,1 - 8,3)	7,4
Tingkat Kemiskinan	7,1 (8,0)	6,6	6,1
Tingkat Pengangguran	7,2 (9,0)	7,0	6,7

Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo

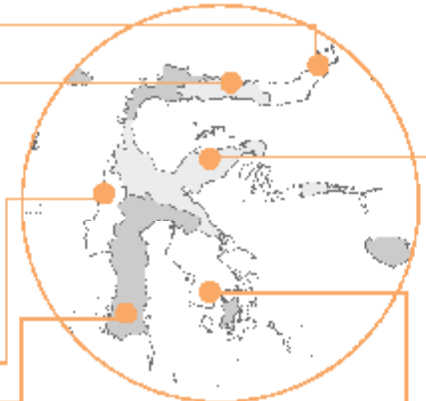
Indikator	2015	2016	2017
Perumbuhan Ekonomi	6,7 (6,2)	7,2 (6,4 - 8,0)	8,4
Tingkat Kemiskinan	15,8 (18,2)	14,7	14,1
Tingkat Pengangguran	40,6(50)	3,8	3,7

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	2015	2016	2017
Perumbuhan Ekonomi	7,7 (7,1)	7,4 (7,5 - 7,3)	8,5
Tingkat Kemiskinan	9,1 (10,1)	8,5	7,9
Tingkat Pengangguran	5,6(6,0)	5,1	5,2

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

Indikator	2015	2016	2017
Perumbuhan Ekonomi	8,1 (7,7)	9,8 (9,3 - 10,3)	10,1
Tingkat Kemiskinan	10,2 (11,8)	9,4	8,7
Tingkat Pengangguran	2,0 (2,7)	1,3	1,3

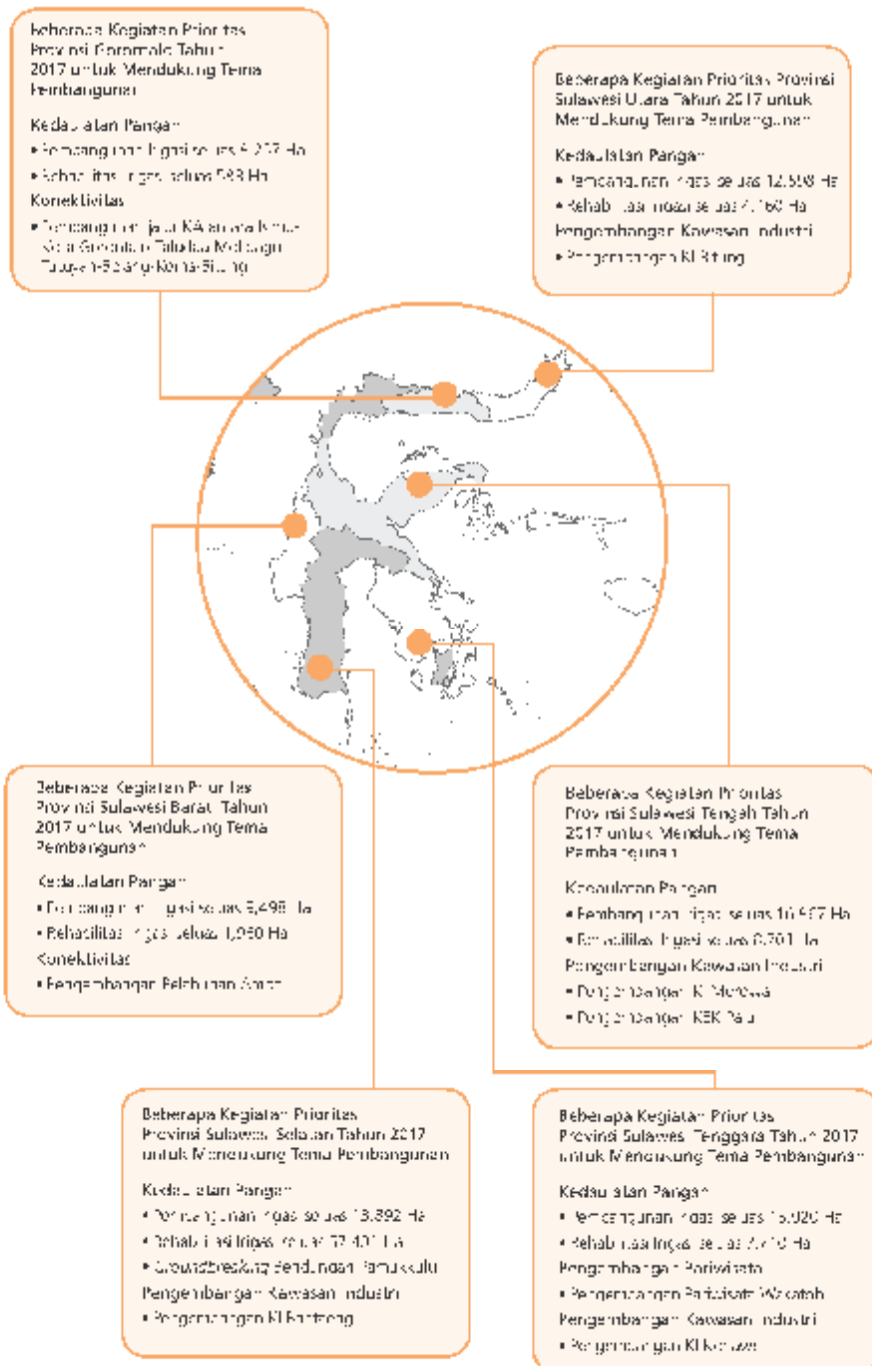


Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator	2015	2016	2017
Perumbuhan Ekonomi	7,1 (6,9)	8,0 (6,9 - 7,9)	8,2
Tingkat Kemiskinan	12,5 (12,7)	12,1	11,7
Tingkat Pengangguran	4,7(5,0)	4,5	4,4

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator	2015	2016	2017
Perumbuhan Ekonomi	7,6 (7,7)	7,7 (7,7 - 7,7)	8,1
Tingkat Kemiskinan	13,7 (14,7)	12,7	11,7
Tingkat Pengangguran	3,6 (3,1)	3,5	3,1



Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

Pada tahun 2017, peran wilayah Kalimantan terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kalimantan. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2017 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Kalimantan, khususnya kesenjangan daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.

Tema Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan

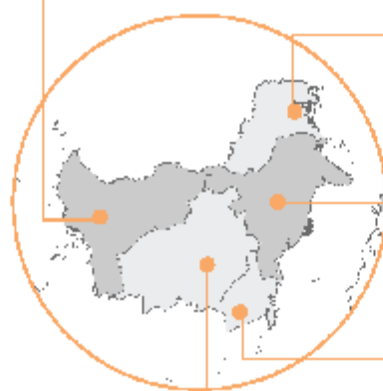
1. Memertanankan fungsi Kalimantan sebagai pulau dunia
2. Meningkatkan peran nasional dengan mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan untuk mendukung pertumbuhan
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zircon dan pasir kuarsa
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu ujung banteng nasional

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,8 (4,8)	6,0 (5,0 - 5,4)	6,2
Tingkat Kesehatan	4,7 (6,4)	4,0	7,4
Tingkat Pengangguran	4,3 (5,2)	4,3	3,1

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,0 (7)	5,0	6,0
Tingkat Kesehatan	5,7 (6,7)	6,2	5,7
Tingkat Pengangguran	7,9 (5,7)	7,6	7,2



Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

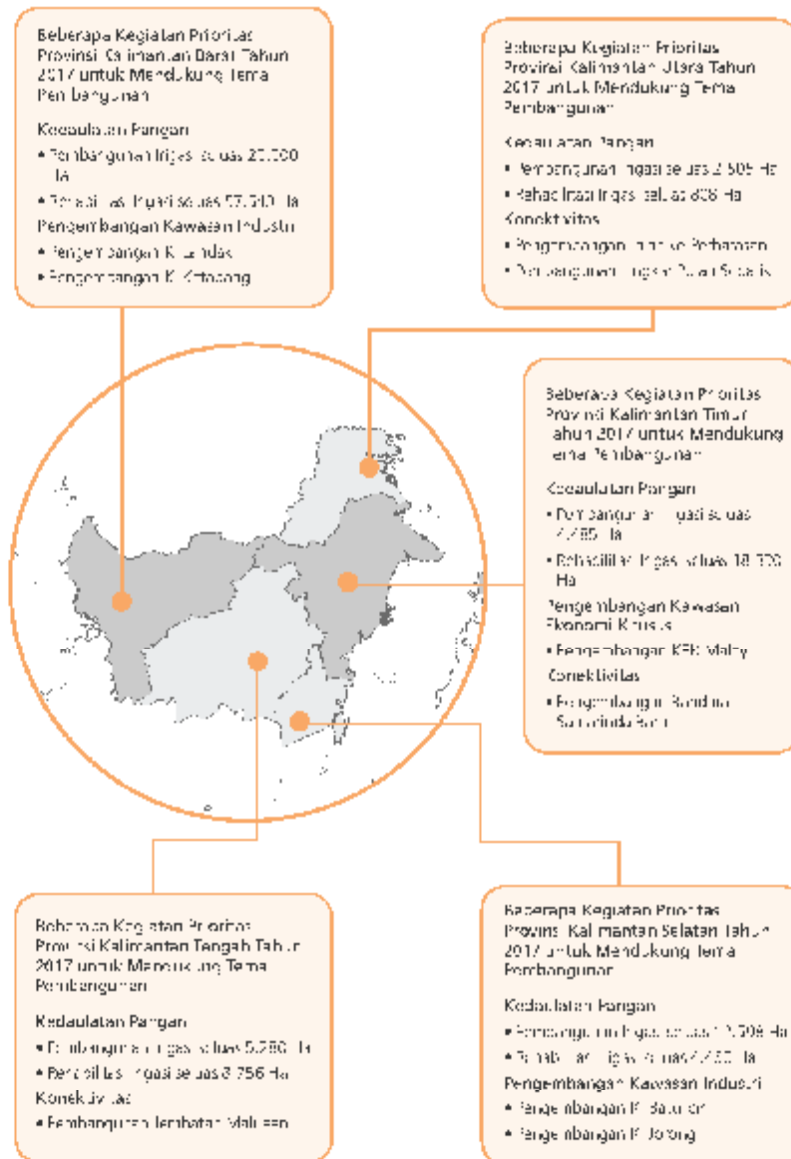
Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	4,5 (0,15)	5,7 (0,2 - 0,7)	5,6
Tingkat Kesehatan	5,7 (5,7)	4,7	4,5
Tingkat Pengangguran	4,4 (7,4)	4,0	7,6

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	6,1 (7,6)	7,0 (6,3 - 6,7)	7,5
Tingkat Kesehatan	6,0 (2,5)	5,8	3,0
Tingkat Pengangguran	2,6 (4,7)	3,5	2,4

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,0 (0,8)	6,2 (0,9 - 4,7)	6,8
Tingkat Kesehatan	4,7 (2,7)	4,0	3,8
Tingkat Pengangguran	4,0 (6,8)	3,9	3,7

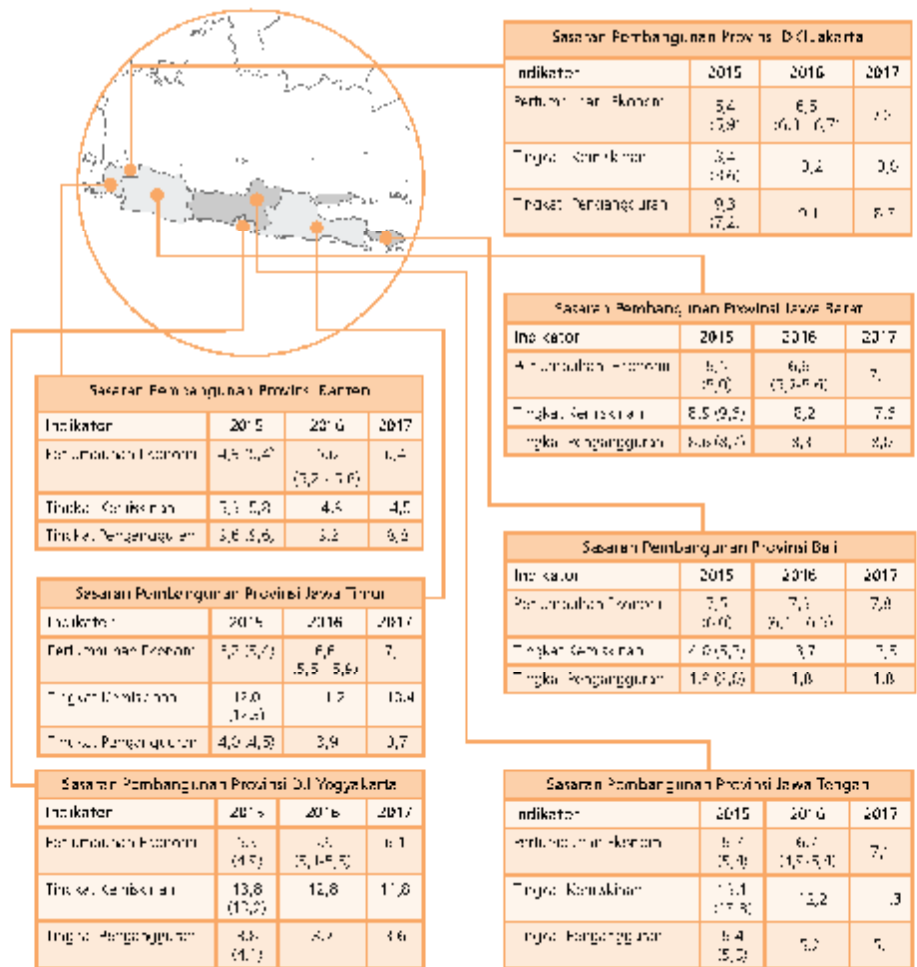


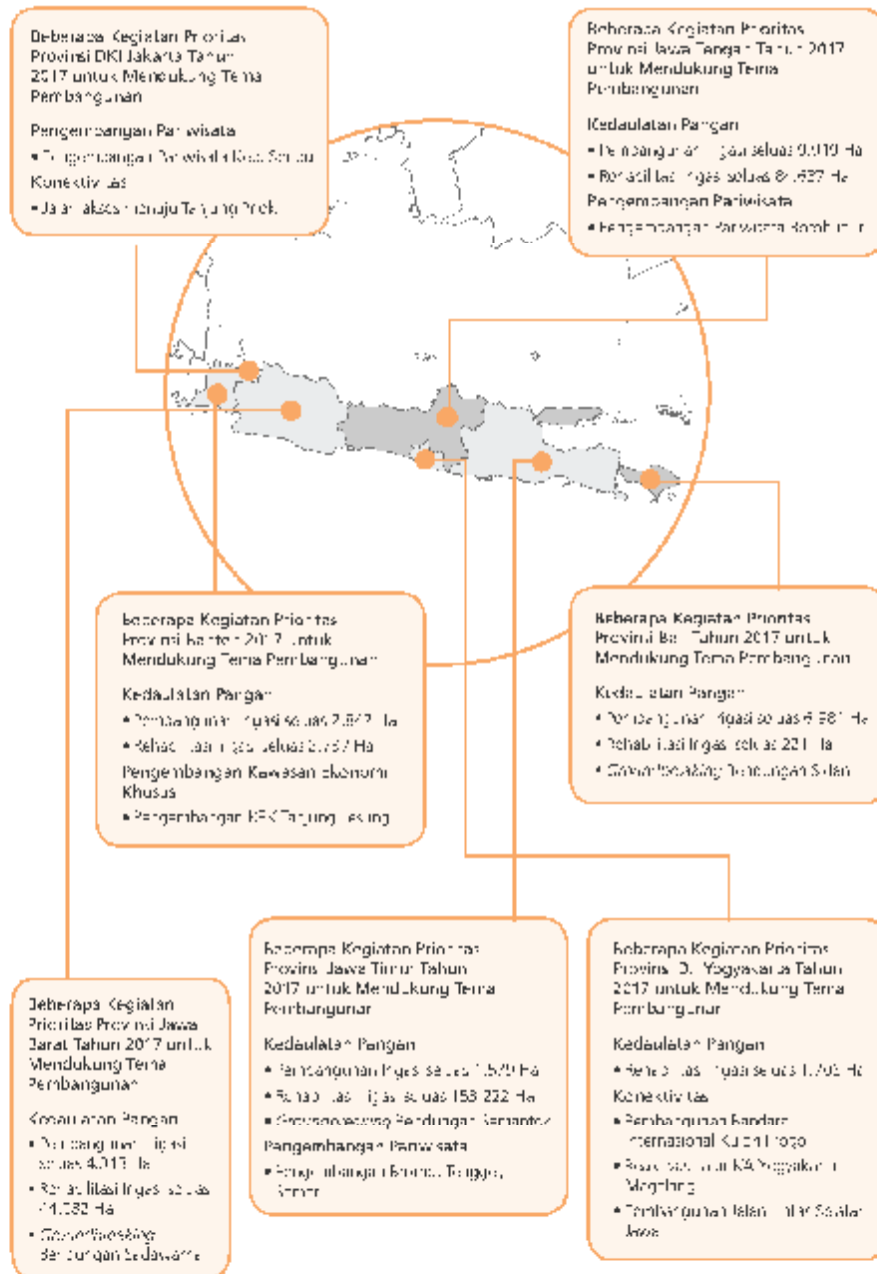
Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Bali

Pada tahun 2017, peran wilayah Jawa Bali terhadap perekonomian nasional diharapkan sedikit menurun, namun perekonomian tetap tumbuh positif. Pengembangan wilayah Jawa Bali diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah Jawa Bali. Pengembangan infrastruktur dalam RPJ 2017 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa.

Tema Pembangunan Wilayah Pulau Jawa Bali

1. Turnover pangan nasional
2. Peningkat sektor industri nasional dengan pengemasan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, elektronik, telekomunikasi, kimia, aluminium, besi-baja
3. Salah satu nilai unggulan dan nilai tambah terbaik untuk pengembangan dan ekonomi sosial
4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (pelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari





Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Peta wilayah Sumatera pada tahun 2017 terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat. Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2017 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Sumatera.

Tema Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera

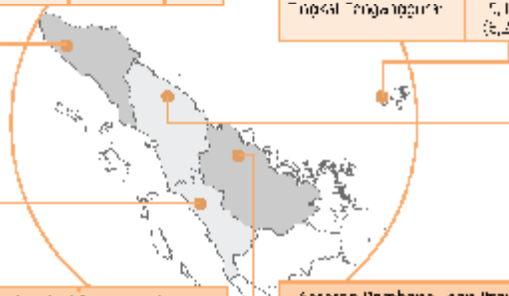
1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional
2. Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan alternatif
3. Pengembangan bisnis sumber daya alam
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, vanili, timah, baukit, dan kakao
5. Peningkatan pemerataan ekonomi berbasis martani kelautan melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkabupaten, dan industri perlayanan

Sasaran Pembangunan Provinsi Aceh

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,8 (4,72)	5,8 (2,9-2,9)	6,0
Tingkat Kemiskinan	16,7 (17,1)	14,0	13,7
Tingkat Pengangguran	8,5 (6,6)	8,5	7,0

Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,7 (4,2)	7,4 (3,3 - 4,3)	7,0
Tingkat Kemiskinan	5,1 (5,8)	4,6	4,5
Tingkat Pengangguran	5,1 (5,2)	4,8	4,5



Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

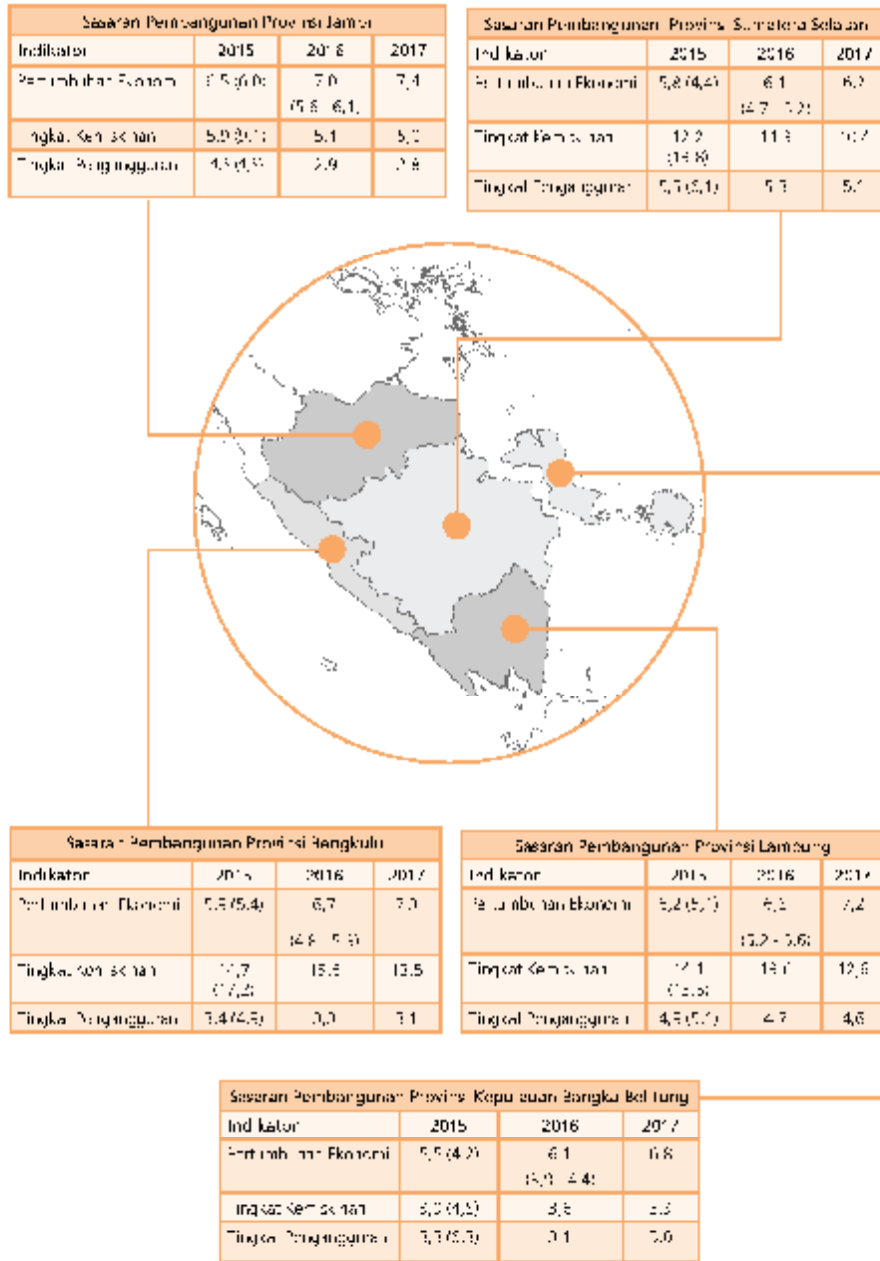
Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,7 (5,1)	5,0 (3,2 - 3,8)	5,7
Tingkat Kemiskinan	6,7 (6,7)	6,2	5,8
Tingkat Pengangguran	6,1 (6,8)	5,8	5,7

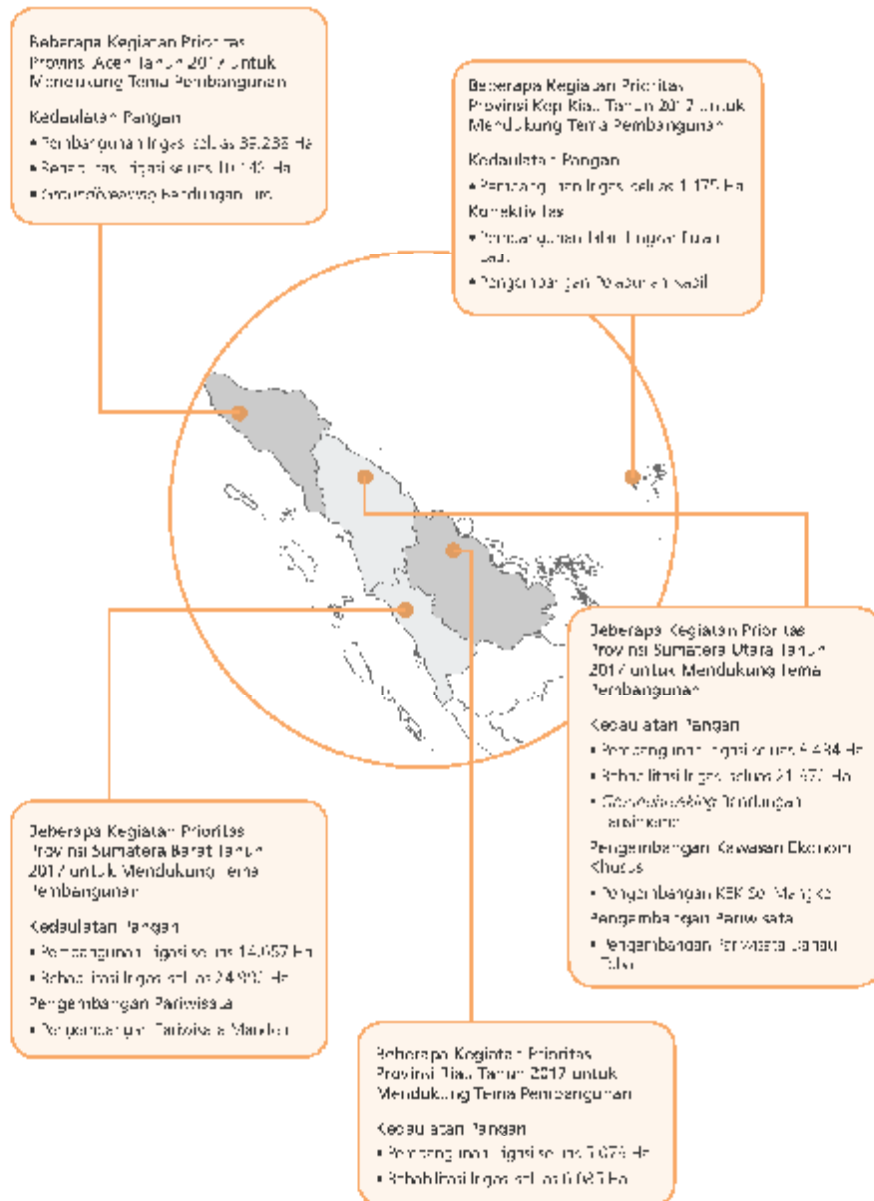
Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

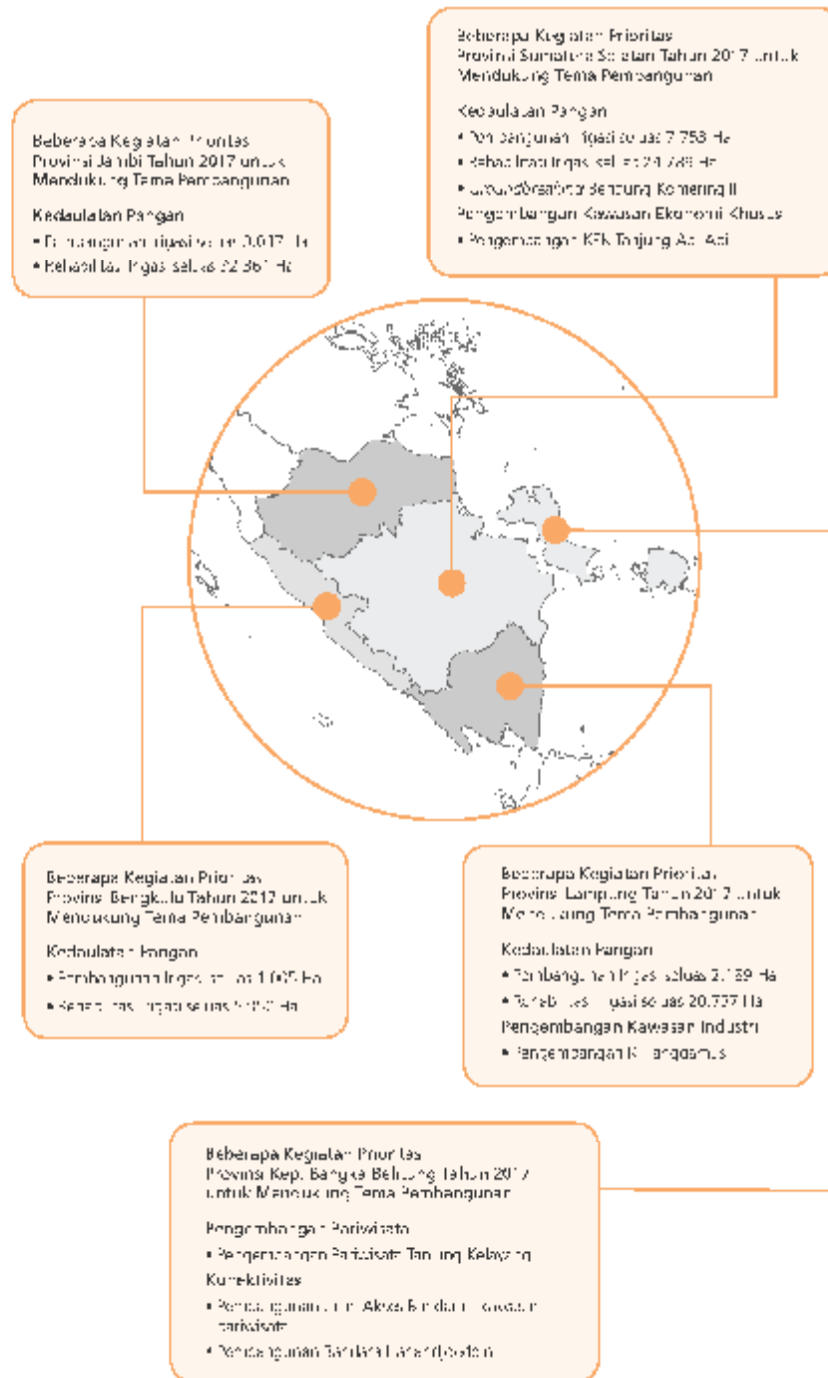
Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	6,1 (5,7)	6,7 (5,9)	7,0
Tingkat Kemiskinan	9,2 (10,8)	8,7	8,1
Tingkat Pengangguran	6,0 (6,7)	5,8	5,0

Sasaran Pembangunan Provinsi Riau

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	4,6 (1,7)	4,5 (1,7 - 1,5)	5,7
Tingkat Kemiskinan	7,0 (5,8)	6,4	5,8
Tingkat Pengangguran	4,8 (5,8)	4,7	4,5







5.3 PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana tindak pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2017 untuk menuju pencapaian sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2015–2019. Penyusunan kerangka pendanaan diarahkan untuk mendukung rencana tindak pembangunan yang holistik-komprehensif, integratif, dan spasial. Dengan demikian, kerangka pendanaan yang disusun diarahkan terpadu baik antar instansi, antar tingkatan pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek spasial serta didukung oleh kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.

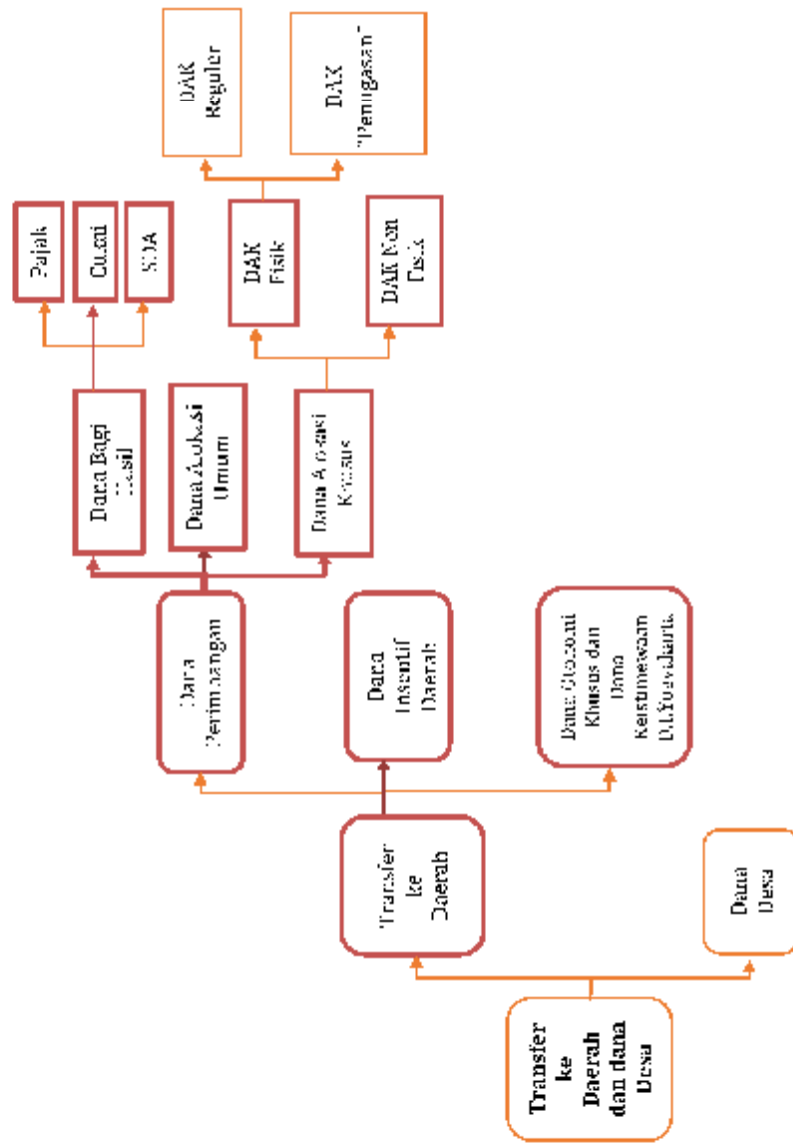
Dalam RKP 2017, kerangka pendanaan dipertajam untuk meningkatkan efektivitas belanja. Kebijakan anggaran tidak lagi hanya berdasarkan *money follows function*, tetapi berdasarkan *money follows program*. Penganggaran yang lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari Kementerian/Lembaga (K/L), berpotensi hanya sebagai pemenuhan pelaksanaan tugas di K/L dan tidak langsung terfokus pada pencapaian sasaran pembangunan.

Sementara, kebijakan anggaran yang *money follows program* dengan anggaran yang terbatas, dapat lebih terfokus pemanfaatannya karena disusun berdasarkan:

- Program prioritas dan kegiatan prioritas (bukan program dan kegiatan K/L) untuk mencapai sasaran-sasaran yang konkret. Hal ini akan didukung oleh perumusan sasaran dan target pembangunan yang lebih konkret sehingga dapat lebih cepat dan mudah dinilai kinerja pelaksanaannya. Pendekatan ini juga akan berimplikasi pada *refocusing* dan realokasi pada kegiatan prioritas.
- *Kewilayahan atau spatial planning*. Program prioritas dan kegiatan prioritas tersebut juga mempromosikan integrasi pendanaan pembangunan sebuah spasial baru kawasan semisal kawasan Parawisata, Industri, Kerluatan Pangan dan pemerataan antarwilayah/konektivitas.

5.3.1 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dibagi dalam 4 komponen, yaitu (1) Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) -fiskal dan Non Fiskal (2) Dana Insentif Daerah (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, dan (4) Dana Desa



Sumber: Pasal 110 Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2013

Sumber: Peraturan Daerah Yogyakarta Tahun 2013

Tabel 5.3
Arah Kebijakan
Dana Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
tahun 2017

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Arah Kebijakan
1	Dana Pembiayaan	
1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara yang dibagikan guna memdana kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dilaksanakan dengan arah kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH ii) Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penentuan berdasarkan pola cadraah perusaha iii) Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas FNEF yang dibagikan ke daerah iv) Meningkatkan peringatan optimalisasi dan efektivitas pengurusan DBH, khususnya DBH Sumber Daya Alam dan Kehutanan
1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja DAU. <ul style="list-style-type: none"> i) Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant) ii) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah iii) Mendukung pertumbuhan pemanfaatan DAU melalui inovasi belanja pegawai di Daerah iv) Meningkatkan efektivitas DAU yang ditujukan untuk mendanai urusan Daerah serta kepentingan strategis nasional v) Mendukung efektivitas DAU dalam pemerataan pelayanan dasar (S-M)
1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah (sesuai dengan dan bagian urusan dasar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan sesuai dengan Prioritas Nasional (bersifat specific grant)
1.3.1	DAK Khusus	
a	DAK Regenerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mendanai kegiatan khusus yang mendukung urusan daerah dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik; 2. Mendanai kegiatan untuk bidang: <ul style="list-style-type: none"> ii) Pendidikan iii) Kesehatan

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Arah Kebijakan
b	DAK "Perugasan"	<p>Membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu yang terbatas dan lokus yang ditentukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air minum 2. Sanitasi 3. Jalan 4. Pasar 5. Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) 6. Kesehatan (Rumah Sakit Kejuruan) 7. Riset
1.3.2	DAK Non Fiskal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana ini merupakan perubahan bentuk atau cara dana transfer lainnya di tahun 2012 dan dana sama fungsinya dengan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah 2. Jenis DAK Non Fiskal adalah: <ol style="list-style-type: none"> (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (ii) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (iii) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (iv) Tunjangan Profesi Guru PNSD (v) Tambahan Penghasilan Guru PNSD (vi) Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) (vii) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kelembagaan, dan (viii) Pengalihan Dekonsentrasi dan TP lainnya
2	Dana Insentif Daerah (DID)	<p>Dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagai penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam fiscal dan non-fiscal. Kawasan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, serta Berkeadilan dan Kesejahteraan, termasuk pengendalian tingkat inflasi. Penggunaan dana insentif daerah (DID) menjadi diskresi daerah namun diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah</p>

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Arah Kebijakan
3	Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Keistimewaan D. J. Yogyakarta	<p>Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh ditujukan untuk meredakan bias yang disebabkan oleh perbedaan (Dana Otsus Papua dan Papua Barat), infrastruktur (Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Papua dan Papua Barat), serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta penguatan demokrasi, sosial, dan keadilan (Dana Otsus Aceh dengan arah kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang (ii) Memastikan peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (iii) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan (iv) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan <p>Sedangkan arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.J.Yogyakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Keistimewaan D. J. Yogyakarta (ii) Meningkatkan pengurusan Dana Keistimewaan D.J.Yogyakarta sesuai dengan 5 Kewenangan yang diamanatkan UU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (iii) Meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan Dana Keistimewaan D. J. Yogyakarta (iv) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan Dana Keistimewaan D. J. Yogyakarta
4	Dana Desa	<p>Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan difokuskan untuk pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa, pengurangan kesenjangan antara desa-kota, dan mendorong pemerataan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan proses untuk memayai pembangunan infrastruktur perdesaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja di daerah (ii) Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara terintegrasi, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab (iii) Meaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan (iv) Mewujudkan sinergi antara pemerintahan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat

BAB 6

KAJIDAH PELAKSANAAN





Pendahuluan
Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Nasional
Pembangunan Bidang
Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Pendanaan Pembangunan
Kaidah Pelaksanaan
Penutup



KAJIDAH PELAKSANAAN

6.1 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan pembangunan, yang dilandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan tatakelola hubungan internal dan antarlembaga yang harmonis dan sinergis, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional, beretika, dan berintegritas.

Kerangka kelembagaan diperlukan untuk menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada tumpang tindih fungsi/ kewenangan, baik intra maupun antarlembaga
2. Memastikan adanya tatakelola dan hubungan kerja yang sinergis dan fungsif/ kewenangan, baik intra maupun antarlembaga
3. Memastikan tersedianya ASN yang profesional untuk melaksanakan fungsi/ kewenangan yang ada di setiap lembaga
4. Memastikan bahwa format kelembagaan memberikan daya ungkit terhadap pencapaian hasil pembangunan

Fenomena kegiatan yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian/Lembaga acuan sebagai berikut:



Penguatan SDM

1. Jumlah, kapasitas dan kualitas ASN
2. Kompetensi ASN
3. Keadilan
4. Insentif dan disinsentif
5. Sistem evaluasi kinerja



Penguatan Organisasi

1. Struktur organisasi
2. Fungsi/kewenangan
3. Budaya Kerja organisasi
4. Budaya Kerja ASN



Penguatan Jaringan dan Tatakelola Kerja

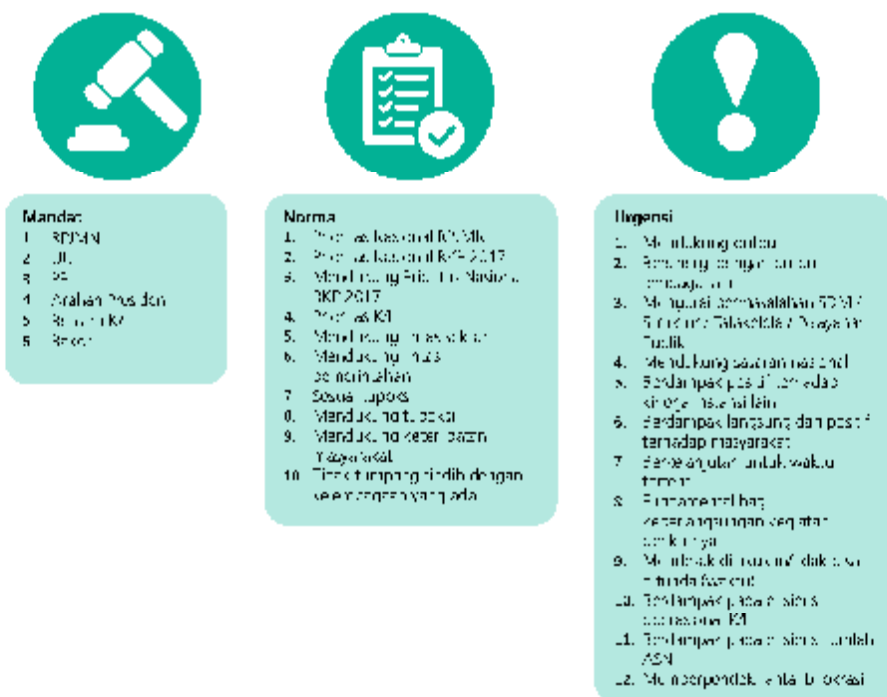
1. Mekanisme koordinasi internal dan eksternal (antarlembaga)
2. Tata kelola pembuat keputusan/ kebijakan dan tata kelola organisasi
3. Mekanisme penanganan konflik antar-lembaga/ organisasi
4. Manajemen data dan informasi
5. Tata kelola pengawasan dan pengendalian



Penguatan Tatakelola Pelayanan Publik

1. Tata kelola pelayanan publik
2. Tata kelola pengaduan masyarakat

Pelaksanaan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:



6.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi adalah serentetan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peran Kerangka Regulasi dalam pembangunan, yakni:



Karena setiap penetapan Regulasi memerlukan biaya, semakin buruk kualitas regulasi akan mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kerangka Regulasi

yang berkualitas sangat ditentukan oleh hasil analisa dampak dan biaya yang ditimbulkan. Untuk itu regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulasi tidak memungkinkan diimplementasikan. Urgensi integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2017:



Untuk memastikan terjadinya sinergi, pengintegrasian perencanaan RKP 2017, hasil pembahasan Kerangka Regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2017.



Dalam rangka memastikan dukungan kerangka regulasi yang baik pada pelaksanaan RKP 2017 perlu dilakukan melaui beberapa batu uji berdasarkan aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek kemandirian (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan). Penjabaran aspek-aspek tersebut diturunkan kedalam kriteria regulas sebagai berikut, ya ini:



Kebijakan terkait Kerangka Regulasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional juga perlu ditempuh melalui upaya simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyerderhanaan, deregulasi). Hal ini merupakan bagian penting langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2017 dan Nawa Cita.

6.3 NORMA PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah 2017 merupakan rujukan wajib bagi setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan program/kegiatan. Dalam proses penyusunan program/kegiatan pembangunan non-prioritas nasional harus mengarah dan senantiasa memperhatikan norma-norma pembangunan, sebagai berikut:

Pertama, pembangunan untuk manusia – bahwa setiap dimensi pembangunan baik dimensi pembangunan ekonomi, dimensi pembangunan infrastruktur, dimensi pembangunan sosial, dan dimensi pembangunan wilayah harus ditujukan untuk kepentingan kehidupan manusia yang mendiami suatu wilayah. Pembangunan tersebut ditujukan untuk manusia dan masyarakat serta lingkungan hidup dimana masyarakat tersebut tinggal, harus memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri dan tidak justru menjadikan masyarakat yang lemah. Pada akhirnya pembangunan tidak boleh merusak bahkan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem.

Kedua, pembangunan terintegrasi – bahwa setiap kebijakan pembangunan baik dalam kerangka kebijakan dan kerangka regulasi yang tertuang sebagai kebijakan makro, program pembangunan, maupun kegiatan pembangunan, baik di pusat dan daerah, harus mempunyai satu kesatuan arah gerak dan tujuan untuk memastikan pencapaian pembangunan bagi manusia. Pembangunan harus bersifat holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi terkait. Pembangunan tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.

Ketiga, perencanaan teknokratis – bahwa setiap langkah-langkah penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas harus mengedepankan akuntabilitas teknokratik agar rencana pembangunan dapat disusun secara substansi logis, benar dan etis, secara teknis dapat dilaksanakan, dan secara operasional dapat diukur pencapaian kinerjanya.

Kempat, perencanaan partisipatif – bahwa setiap kebijakan pembangunan harus dibuat melalui proses yang partisipatif. Proses tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kebutuhan/kepentingan masyarakat banyak, serta harus dapat diterima secara proporsional oleh para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk menjamin implementasi kebijakan pembangunan secara terintegrasi, tepat manfaat, dan tepat sasaran, dengan pencapaian kinerja yang terukur. Pembangunan harus mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dan tidak mematikan kegiatan usaha yang sudah berjalan.

Kelima, penyerasian pelaksanaan program/kegiatan. Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan pelaksanaan program/kegiatan masing-masing secara sinergis dan serasi dengan pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2017.

Kenam, penyerasian rencana dan anggaran pembangunan. Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keselarasan setiap program/kegiatan yang mencaipatkan alokas pencanaan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019, RKP 2017, dan rencana tata ruang wilayah.

BAB 7

PENUTUP







PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2015-2019 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema RKP 2017 adalah "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah". Penyusunan RKP 2017 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial untuk memastikan terwujudnya koordinasi, sinergi dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan dengan memusatkan orientasi pembangunan wilayah dan daerah.

RKP 2017 menjadi acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian/Lembaga, RKP 2017 menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi untuk rakyat, dan akhirnya dijabarkan dalam APBD 2017; dan
2. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi/kabupaten/kota), RKP 2017 menjadi acuan dalam menyusun RKPD 2017, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan RKP 2017 mendapatkan masukan dan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lain dan mengikuti prinsip-prinsip pengurusan/urusan yaitu: (1) pembangunan berkelanjutan, (2) tata kelola pemerintahan yang baik; (3) keadilan dan kesetaraan gender; dan (4) pemerataan/penggunaan narkoba.

Keefektifan pelaksanaan RKP 2017 sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif masyarakat terutama dalam hal: (i) perumusan peraturan perundang-undangan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan; dan (iii) mobilisasi dan pengelolaan sumber daya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2017 dengan tujuan untuk:

1. Menastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019, RKP 2017, dan RKPD 2017; dan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri, Pimpinan Lembaga Gubernur, Bupati dan Walikota wajib menerapkan prinsip integratif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendaliannya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan dalam RKP 2017 dan RKPD 2017.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

JOKO WIDODO

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)**

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
K/L	URUTAN	URUTAN	KEMERDEKAAN									Jumlah
			REKONSTRUKSI	PEM. BANGUNAN	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	
01	01	01	121.00	00	00	00	00	00	00	00	00	121.00
01	02	02	50.00	00	00	00	00	00	00	00	00	50.00
01	03	03	250.00	00	00	00	00	00	00	00	00	250.00
Jumlah			321.00	00	00	00	00	00	00	00	00	321.00

REKONSTRUKSI
 1) Belanja Non Operasional KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
 a. Belanja Non Operasional
 b. Belanja Non Operasional
 2) Belanja Non Operasional KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
 a. Belanja Non Operasional
 3) Alokasi Pagu Indikatif K/L untuk kepentingan:
 a. Belanja Anggaran Pendidikan Rp - juta
 b. Belanja Anggaran Kesehatan Rp - juta
 c. Belanja Anggaran BMD Rp - juta

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)**

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KESEHATAN										
K/L	URUTAN	URUTAN	KEMERDEKAAN									Jumlah
			REKONSTRUKSI	PEM. BANGUNAN	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	
02	01	01	40.00	00	00	00	00	00	00	00	00	40.00
02	02	02	100.00	00	00	00	00	00	00	00	00	100.00
02	03	03	60.00	00	00	00	00	00	00	00	00	60.00
Jumlah			200.00	00	00	00	00	00	00	00	00	200.00

REKONSTRUKSI
 1) Belanja Non Operasional KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
 a. Belanja Non Operasional
 b. Belanja Non Operasional
 2) Belanja Non Operasional KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
 a. Belanja Non Operasional
 b. Belanja Non Operasional
 c. Belanja Non Operasional

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)**

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KESEHATAN										
K/L	URUTAN	URUTAN	KEMERDEKAAN									Jumlah
			REKONSTRUKSI	PEM. BANGUNAN	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	
04	01	01	100.00	00	00	00	00	00	00	00	00	100.00
04	02	02	100.00	00	00	00	00	00	00	00	00	100.00
04	03	03	100.00	00	00	00	00	00	00	00	00	100.00
Jumlah			300.00	00	00	00	00	00	00	00	00	300.00

REKONSTRUKSI
 1) Belanja Non Operasional KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
 a. Belanja Non Operasional
 b. Belanja Non Operasional
 2) Belanja Non Operasional KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
 a. Belanja Non Operasional
 b. Belanja Non Operasional
 c. Belanja Non Operasional

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	SALINAN PERALOKASIAN										
			BUNGA	PER	BUPERS	PL	BUPERS	PER	PER	PER	PER	PER	
01	01	Program Pengembangan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	457.115,8	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.857,2	0,0	460.973,0
018	03	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	73.300,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73.300,6
018	06	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hertiikultura	7.053.792,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,2	0,0	7.054.422,4
018	07	Program Peningkatan Kualitas Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1.211.175,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.211.175,7
018	08	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.325.626,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,4	0,0	1.326.472,4
018	09	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.616.671,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.274,4	29.734,1	1.659.679,9
018	11	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	6.976.517,8	9.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.987.517,8
018	12	Program Peningkatan Penjualan dan Pelatihan Pertanian	1.211.371,3	213.000,0	49.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.390,1	0,0	1.490.761,4
018	13	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.091.535,4	152.587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.506,6	0,0	1.248.630,8
018	14	Program Peningkatan Kualitas Pengkantin Pertanian dan Pengawasan Keselamatan Hayati	602.873,9	82.976,9	24.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710.690,8
018	15	Program Peningkatan Kualitas Pengkantin Pertanian dan Pengawasan Keselamatan Hayati	515.687,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.885,8	0,0	572.573,3
Jumlah			42.444,8	49.576,8	74.840,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.704,4	29.734,1	47.979,3

1. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 47.979,3 miliar.
 2. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 47.979,3 miliar.
 3. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 47.979,3 miliar.
 4. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 47.979,3 miliar.
 5. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 47.979,3 miliar.

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	SALINAN PERALOKASIAN										
			BUNGA	PER	BUPERS	PL	BUPERS	PER	PER	PER	PER	PER	
019	01	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	667.554,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.858,1	8.790,5	723.202,8
019	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	13.573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.573,6
019	03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	32.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.077,0
019	06	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	139.399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139.399,9
019	07	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	120.366,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.366,3
019	08	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	151.969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151.969,2
019	09	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	234.138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	234.258,7
019	10	Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	648.549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648.549,0
019	11	Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	45.731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.731,0
019	12	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	72.275,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84.107,1	71.561,2	227.943,8
Jumlah			2.127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147.465,2	80.351,7	2.254,9

1. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 2.254,9 miliar.
 2. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 2.254,9 miliar.
 3. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 2.254,9 miliar.
 4. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 2.254,9 miliar.
 5. Jumlah Belanja Non Operasional Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 adalah Rp. 2.254,9 miliar.

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(MILYAR RUPIAH)

KODE	PROGRAM	SALURAN PERSEKUTUAN										
		DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	
029 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	198.359,6	0,0	0,0	41.409,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.023,0	38.295,0	279.086,7
029 03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.524,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.524,3
029 04	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.064,0	0,0	60.852,0
029 06	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	287.450,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.878,8	0,0	478.329,3
029 07	Program Penyelidikan DAS dan Hutan Lindung	440.347,6	0,0	0,0	7.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455.699,9	0,0	903.578,6
029 08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Biosistem	790.410,3	0,0	0,0	91.192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278.889,7	0,0	1.141.192,0
029 09	Program Planologi dan Tata Lingkungan	84.867,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.433,5	0,0	129.301,0
029 10	Program Peningkatan Penyaluhan dan Peningkatan SDM	114.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.199,6	0,0	164.442,7
029 11	Program Perhutanan Sosial dan Kemasyarakatan Lingkungan	55.695,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.783,6	0,0	100.558,8
029 12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.172,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.527,3	0,0	118.699,7
029 13	Program Penyelidikan Perubahan Iklim	295.049,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.410,1	0,0	370.460,0
029 14	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	101.994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101.994,7
029 17	Program Pengelolaan Perikanan dan Budidaya Perikanan	798.809,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	798.809,7
TOTAL		3.177.845,1	0,0	0,0	141.131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.124.187,7	38.295,0	4.441.368,0

REVISI
 1. 17.140.000
 2. 1.124.187,7
 3. 1.124.187,7
 4. 1.124.187,7
 5. 1.124.187,7
 6. 1.124.187,7
 7. 1.124.187,7
 8. 1.124.187,7
 9. 1.124.187,7
 10. 1.124.187,7
 11. 1.124.187,7
 12. 1.124.187,7
 13. 1.124.187,7
 14. 1.124.187,7
 15. 1.124.187,7
 16. 1.124.187,7
 17. 1.124.187,7
 18. 1.124.187,7
 19. 1.124.187,7
 20. 1.124.187,7
 21. 1.124.187,7
 22. 1.124.187,7
 23. 1.124.187,7
 24. 1.124.187,7
 25. 1.124.187,7
 26. 1.124.187,7
 27. 1.124.187,7
 28. 1.124.187,7
 29. 1.124.187,7
 30. 1.124.187,7
 31. 1.124.187,7
 32. 1.124.187,7
 33. 1.124.187,7
 34. 1.124.187,7
 35. 1.124.187,7
 36. 1.124.187,7
 37. 1.124.187,7
 38. 1.124.187,7
 39. 1.124.187,7
 40. 1.124.187,7
 41. 1.124.187,7
 42. 1.124.187,7
 43. 1.124.187,7
 44. 1.124.187,7
 45. 1.124.187,7
 46. 1.124.187,7
 47. 1.124.187,7
 48. 1.124.187,7
 49. 1.124.187,7
 50. 1.124.187,7
 51. 1.124.187,7
 52. 1.124.187,7
 53. 1.124.187,7
 54. 1.124.187,7
 55. 1.124.187,7
 56. 1.124.187,7
 57. 1.124.187,7
 58. 1.124.187,7
 59. 1.124.187,7
 60. 1.124.187,7
 61. 1.124.187,7
 62. 1.124.187,7
 63. 1.124.187,7
 64. 1.124.187,7
 65. 1.124.187,7
 66. 1.124.187,7
 67. 1.124.187,7
 68. 1.124.187,7
 69. 1.124.187,7
 70. 1.124.187,7
 71. 1.124.187,7
 72. 1.124.187,7
 73. 1.124.187,7
 74. 1.124.187,7
 75. 1.124.187,7
 76. 1.124.187,7
 77. 1.124.187,7
 78. 1.124.187,7
 79. 1.124.187,7
 80. 1.124.187,7
 81. 1.124.187,7
 82. 1.124.187,7
 83. 1.124.187,7
 84. 1.124.187,7
 85. 1.124.187,7
 86. 1.124.187,7
 87. 1.124.187,7
 88. 1.124.187,7
 89. 1.124.187,7
 90. 1.124.187,7
 91. 1.124.187,7
 92. 1.124.187,7
 93. 1.124.187,7
 94. 1.124.187,7
 95. 1.124.187,7
 96. 1.124.187,7
 97. 1.124.187,7
 98. 1.124.187,7
 99. 1.124.187,7
 100. 1.124.187,7

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(MILYAR RUPIAH)

KODE	PROGRAM	SALURAN PERSEKUTUAN										
		DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	
029 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	65.532,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.532,4
029 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	22.306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	0,0	22.576,4
029 03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	17.206,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.206,6
029 04	Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	529.386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.369,0	0,0	543.755,0
029 06	Program Pembangunan Konektivitas	443.044,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	0,0	443.147,2
029 07	Program Pembiayaan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan	12.974.470,4	2.685.622,4	114.537,5	22.446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.101,7	0,0	15.800.178,1
029 08	Program Penyelenggaraan Jalan	36.554.876,6	1.948.144,8	283.361,7	0,0	0,0	0,0	7.432.880,0	4.691,7	20.000,0	46.243.954,9	
029 10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.360.543,1	1.533.204,8	106.591,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	30.000.514,5
029 11	Program Pengembangan Perumahan	8.986.799,1	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.989.799,1
029 12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	174.802,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.171,2	254.973,2
029 13	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	447.474,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447.474,6
029 14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.074,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.925,2	0,0	199.999,8
TOTAL		3.177.845,1	5.215.847,2	4.441,3	22.446,1	0,0	0,0	7.432.880,0	4.691,7	15.240,4	104,4	4.441.368,0

REVISI
 1. 65.532,4
 2. 22.306,0
 3. 17.206,6
 4. 529.386,0
 5. 443.044,4
 6. 12.974.470,4
 7. 36.554.876,6
 8. 28.360.543,1
 9. 8.986.799,1
 10. 174.802,0
 11. 447.474,6
 12. 198.074,6
 13. 65.532,4
 14. 22.306,0
 15. 17.206,6
 16. 529.386,0
 17. 443.044,4
 18. 12.974.470,4
 19. 36.554.876,6
 20. 28.360.543,1
 21. 8.986.799,1
 22. 174.802,0
 23. 447.474,6
 24. 198.074,6
 25. 65.532,4
 26. 22.306,0
 27. 17.206,6
 28. 529.386,0
 29. 443.044,4
 30. 12.974.470,4
 31. 36.554.876,6
 32. 28.360.543,1
 33. 8.986.799,1
 34. 174.802,0
 35. 447.474,6
 36. 198.074,6
 37. 65.532,4
 38. 22.306,0
 39. 17.206,6
 40. 529.386,0
 41. 443.044,4
 42. 12.974.470,4
 43. 36.554.876,6
 44. 28.360.543,1
 45. 8.986.799,1
 46. 174.802,0
 47. 447.474,6
 48. 198.074,6
 49. 65.532,4
 50. 22.306,0
 51. 17.206,6
 52. 529.386,0
 53. 443.044,4
 54. 12.974.470,4
 55. 36.554.876,6
 56. 28.360.543,1
 57. 8.986.799,1
 58. 174.802,0
 59. 447.474,6
 60. 198.074,6
 61. 65.532,4
 62. 22.306,0
 63. 17.206,6
 64. 529.386,0
 65. 443.044,4
 66. 12.974.470,4
 67. 36.554.876,6
 68. 28.360.543,1
 69. 8.986.799,1
 70. 174.802,0
 71. 447.474,6
 72. 198.074,6
 73. 65.532,4
 74. 22.306,0
 75. 17.206,6
 76. 529.386,0
 77. 443.044,4
 78. 12.974.470,4
 79. 36.554.876,6
 80. 28.360.543,1
 81. 8.986.799,1
 82. 174.802,0
 83. 447.474,6
 84. 198.074,6
 85. 65.532,4
 86. 22.306,0
 87. 17.206,6
 88. 529.386,0
 89. 443.044,4
 90. 12.974.470,4
 91. 36.554.876,6
 92. 28.360.543,1
 93. 8.986.799,1
 94. 174.802,0
 95. 447.474,6
 96. 198.074,6
 97. 65.532,4
 98. 22.306,0
 99. 17.206,6
 100. 529.386,0

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(MILYAR RUPIAH)

KODE	PROGRAM	SALURAN PERSEKUTUAN										
		DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	
029 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	65.532,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.532,4
029 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	22.306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	0,0	22.576,4
029 03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	17.206,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.206,6
029 04	Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	529.386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.369,0	0,0	543.755,0
029 06	Program Pembangunan Konektivitas	443.044,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	0,0	443.147,2
029 07	Program Pembiayaan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan	12.974.470,4	2.685.622,4	114.537,5	22.446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.101,7	0,0	15.800.178,1
029 08	Program Penyelenggaraan Jalan	36.554.876,6	1.948.144,8	283.361,7	0,0	0,0	0,0	7.432.880,0	4.691,7	20.000,0	46.243.954,9	
029 10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.360.543,1	1.533.204,8	106.591,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	30.000.514,5
029 11	Program Pengembangan Perumahan	8.986.799,1	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.989.799,1
029 12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	174.802,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.171,2	254.973,2
029 13	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	447.474,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447.474,6
029 14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.074,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.925,2	0,0	199.999,8
TOTAL		3.177.845,1	5.215.847,2	4.441,3	22.446,1	0,0	0,0	7.432.880,0	4.691,7	15.240,4	104,4	4.441.368,0

REVISI
 1. 65.532,4
 2. 22.306,0
 3. 17.206,6
 4. 529.386,0
 5. 443.044,4
 6. 12.974.470,4
 7. 36.554.876,6
 8. 28.360.543,1
 9. 8.986.799,1
 10. 174.802,0
 11. 447.474,6
 12. 198.074,6
 13. 65.532,4
 14. 22.306,0
 15. 17.206,6
 16. 529.386,0
 17. 443.044,4
 18. 12.974.470,4
 19. 36.554.876,6
 20. 28.360.543,1
 21. 8.986.799,1
 22. 174.802,0
 23. 447.474,6
 24. 198.074,6
 25. 65.532,4
 26. 22.306,0
 27. 17.206,6
 28. 529.386,0
 29. 443.044,4
 30. 12.974.470,4
 31. 36.554.876,6
 32. 28.360.543,1
 33. 8.986.799,1
 34. 174.802,0
 35. 447.474,6
 36. 198.074,6
 37. 65.532,4
 38. 22.306,0
 39. 17.206,6
 40. 529.386,0
 41. 443.044,4
 42. 12.974.470,4
 43. 36.554.876,6
 44. 28.360.543,1
 45. 8.986.799,1
 46. 174.802,0
 47. 447.474,6
 48. 198.074,6
 49. 65.532,4
 50. 22.306,0
 51. 17.206,6
 52. 529.386,0
 53. 443.044,4
 54. 12.974.470,4
 55. 36.554.876,6
 56. 28.360.543,1
 57. 8.986.799,1
 58. 174.802,0
 59. 447.474,6
 60. 198.074,6
 61. 65.532,4
 62. 22.306,0
 63. 17.206,6
 64. 529.386,0
 65. 443.044,4
 66. 12.974.470,4
 67. 36.554.876,6
 68. 28.360.543,1
 69. 8.986.799,1
 70. 174.802,0
 71. 447.474,6
 72. 198.074,6
 73. 65.532,4
 74. 22.306,0
 75. 17.206,6
 76. 529.386,0
 77. 443.

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)**

KEMENTERIAN		LEMBAGA NON OPERASIONAL										
KU	KUR	INDUK	REKON	REKOP	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
KEMENTERIAN		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
LEMBAGA NON OPERASIONAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)**

KEMENTERIAN		LEMBAGA NON OPERASIONAL										
KU	KUR	INDUK	REKON	REKOP	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
KEMENTERIAN		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
LEMBAGA NON OPERASIONAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)**

KEMENTERIAN		LEMBAGA NON OPERASIONAL										
KU	KUR	INDUK	REKON	REKOP	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
KEMENTERIAN		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
LEMBAGA NON OPERASIONAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)**

KEMENTERIAN		LEMBAGA NON OPERASIONAL										
KU	KUR	INDUK	REKON	REKOP	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR	REKOR
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
KEMENTERIAN		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
LEMBAGA NON OPERASIONAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

LEMBAGA KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

K/L	PELAKSANA	DESKRIPSI	SUMBER PENDANAAN												
			BUNYAN	PLN	BUMILAS	PLN	BUMILAS	PLN	SDS	PMU	DAU	PIHAK LAIN			
001	01	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	02	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	03	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JENJANG			30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 30.000,00 juta

2) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 30.000,00 juta

3) Alokasi Pagu Indikatif K/L sudah memperhitungkan:

- a. Belanja Anggaran Pendidikan: Rp - juta
- b. Belanja Anggaran Kesehatan: Rp - juta
- c. Belanja Anggaran BMP: Rp - juta

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

LEMBAGA KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

K/L	PELAKSANA	DESKRIPSI	SUMBER PENDANAAN										
			BUNYAN	PLN	BUMILAS	PLN	BUMILAS	PLN	SDS	PMU	DAU	PIHAK LAIN	
056	01	Program Dengan Manajemen dan Pelaksanaan Program Pelayanan Lainnya	210.313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.324,2	0,0	215.637,2
056	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ADK/BPN	22.373,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.373,7
056	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ADK/BPN	10.276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.276,5
056	04	Program Perencanaan Data Kuang dan Pemanfaatan Kuang	289.894,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289.894,0
056	05	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Lainnya	21.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.470,0
056	06	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Lainnya	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
056	07	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Lainnya	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
056	08	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Lainnya	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
056	09	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Lainnya	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
056	10	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Lainnya	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
JENJANG			667.867,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.324,2	0,0	673.191,4

1) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 667.867,20 juta

2) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 667.867,20 juta

3) Alokasi Pagu Indikatif K/L sudah memperhitungkan:

- a. Belanja Anggaran Pendidikan: Rp - juta
- b. Belanja Anggaran Kesehatan: Rp - juta
- c. Belanja Anggaran BMI: Rp - juta

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

LEMBAGA KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

K/L	PELAKSANA	DESKRIPSI	SUMBER PENDANAAN										
			BUNYAN	PLN	BUMILAS	PLN	BUMILAS	PLN	SDS	PMU	DAU	PIHAK LAIN	
001	01	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	2.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,0
001	02	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	1.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,0
001	03	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	1.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,0
JENJANG			4.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,0

1) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 4.000,00 juta

2) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 4.000,00 juta

3) Alokasi Pagu Indikatif K/L sudah memperhitungkan:

- a. Belanja Anggaran Pendidikan: Rp 390.116,0 juta
- b. Belanja Anggaran Kesehatan: Rp - juta
- c. Belanja Anggaran BMP: Rp - juta

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

LEMBAGA KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

K/L	PELAKSANA	DESKRIPSI	SUMBER PENDANAAN										
			BUNYAN	PLN	BUMILAS	PLN	BUMILAS	PLN	SDS	PMU	DAU	PIHAK LAIN	
001	01	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	02	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	03	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	04	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	05	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	06	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	07	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	08	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	09	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
001	10	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan	10.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,0
JENJANG			100.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,0

1) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 100.000,00 juta

2) Total alokasi Pagu Indikatif K/L: Rp 100.000,00 juta

3) Alokasi Pagu Indikatif K/L sudah memperhitungkan:

- a. Belanja Anggaran Pendidikan: Rp - juta
- b. Belanja Anggaran Kesehatan: Rp - juta
- c. Belanja Anggaran BMP: Rp - juta

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)**

K/C	TRIG	PROGRAM	SIMPULAN													
			FISIKAL	PLN	REPLAS	ILM	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS				
000	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri														
000	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	746.285,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.020,2	941.743,6	1.713.049,1			
000	03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	3.197.520,0	2.580.548,4	247.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.282.279,2	180.891,6	10.089.039,2			
000	04	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	111.839,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.126,3	0,0	114.955,3			
000	05	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	12.012,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.012,7			
000	06	Program Pembeledaan Sumber Daya Manusia Polri	201.325,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.256,5	0,0	719.682,0			
000	07	Program Pengembangan Strategi Komunikasi dan Keterbukaan	143.976,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	0,0	144.219,0			
000	08	Program Korpsama Komandan dan Ketersediaan	739.132,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.933,7	0,0	834.066,5			
000	09	Program Pembeledaan Potensi Komandan	45.578,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.578,2			
000	10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	919.122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.416,1	0,0	935.568,5			
000	11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.484.259,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.402.971,1	0,0	6.887.230,6			
000	12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkedar Tingkat	1.474.826,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.474.826,4			
000	13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	100.435,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.435,1			
000		Jumlah	23.719,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.719,9			

1) Jumlah Belanja Non Operasional : Rp 4.000.000,00
 2) Total alokasi Pagu Indikatif K/L : Rp 72.573.551,4 Juta
 3) Alokasi Pagu Indikatif K/L sudah memperhitungkan :
 a. Belanja Anggaran Pendidikan : Rp - Juta
 b. Belanja Anggaran Kesehatan : Rp 1.363.000,0 Juta
 c. Belanja Anggaran BNP : Rp 2.152.103,4 Juta

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)**

K/C	TRIG	PROGRAM	SIMPULAN													
			FISIKAL	PLN	REPLAS	ILM	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS				
000	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri														
000	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	1.024.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000	03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	1.024.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000	04	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	1.024.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000		Jumlah	3.072.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Angko pada kolom jumlah BELUM memperhitungkan alokasi Belanja Operasional :
 a. Belanja Pegawai Operasional : Rp 488.465,5 Juta
 b. Belanja Barang Operasional : Rp 119.137,2 Juta
 2) Total alokasi Pagu Indikatif K/L : Rp 1.888.628,0 Juta
 3) Alokasi Pagu Indikatif K/L sudah memperhitungkan :
 a. Belanja Anggaran Pendidikan : Rp - Juta
 b. Belanja Anggaran Kesehatan : Rp 1.888.628,0 Juta
 c. Belanja Anggaran BNP : Rp - Juta

**PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)**

K/C	TRIG	PROGRAM	SIMPULAN													
			FISIKAL	PLN	REPLAS	ILM	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS	REPLAS				
000	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri														
000	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	1.024.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000	03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	1.024.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000	04	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	1.024.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000		Jumlah	3.072.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Jumlah Belanja Non Operasional : Rp 4.000.000,00
 2) Total alokasi Pagu Indikatif K/L : Rp 72.573.551,4 Juta
 3) Alokasi Pagu Indikatif K/L sudah memperhitungkan :
 a. Belanja Anggaran Pendidikan : Rp - Juta
 b. Belanja Anggaran Kesehatan : Rp - Juta
 c. Belanja Anggaran BNP : Rp - Juta

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS									
K/L	PROGRAM	SALURAN BELANJA									
		DAFTAR	DAK	DAK-PP	DAK-PLN	DAK-PLM	DAK-PLS	DAK-PPM	DAK-PPH	DAK-PPK	DAK-PPA
40	1. Pendidikan dan Kebudayaan	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2. Pendidikan dan Kebudayaan	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	3. Pendidikan dan Kebudayaan	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI:

1. Belanja Pegawai: Rp 0,00

2. Belanja Perjalanan Dinas: Rp 0,00

3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS									
K/L	PROGRAM	SALURAN BELANJA									
		DAFTAR	DAK	DAK-PP	DAK-PLN	DAK-PLM	DAK-PLS	DAK-PPM	DAK-PPH	DAK-PPK	DAK-PPA
02	1. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	3. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI:

1. Belanja Pegawai: Rp 0,00

2. Belanja Perjalanan Dinas: Rp 0,00

3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS									
K/L	PROGRAM	SALURAN BELANJA									
		DAFTAR	DAK	DAK-PP	DAK-PLN	DAK-PLM	DAK-PLS	DAK-PPM	DAK-PPH	DAK-PPK	DAK-PPA
03	1. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	2. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI:

1. Belanja Pegawai: Rp 0,00

2. Belanja Perjalanan Dinas: Rp 0,00

3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS									
K/L	PROGRAM	SALURAN BELANJA									
		DAFTAR	DAK	DAK-PP	DAK-PLN	DAK-PLM	DAK-PLS	DAK-PPM	DAK-PPH	DAK-PPK	DAK-PPA
04	1. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	2. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	3. Pendidikan dan Kebudayaan	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI:

1. Belanja Pegawai: Rp 0,00

2. Belanja Perjalanan Dinas: Rp 0,00

3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp 0,00

10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp 0,00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKONSILIASI									
KEL	PRGK	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI
02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

REKONSILIASI:
 1. Saldo Awal: 01
 2. Saldo Akhir: 01
 3. Saldo Awal: 01
 4. Saldo Akhir: 01

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKONSILIASI									
KEL	PRGK	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI
02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

REKONSILIASI:
 1. Saldo Awal: 01
 2. Saldo Akhir: 01
 3. Saldo Awal: 01
 4. Saldo Akhir: 01

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKONSILIASI									
KEL	PRGK	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI
02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

REKONSILIASI:
 1. Saldo Awal: 01
 2. Saldo Akhir: 01
 3. Saldo Awal: 01
 4. Saldo Akhir: 01

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKONSILIASI									
KEL	PRGK	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI
02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

REKONSILIASI:
 1. Saldo Awal: 01
 2. Saldo Akhir: 01
 3. Saldo Awal: 01
 4. Saldo Akhir: 01

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKONSILIASI									
KEL	PRGK	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI
02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

REKONSILIASI:
 1. Saldo Awal: 01
 2. Saldo Akhir: 01
 3. Saldo Awal: 01
 4. Saldo Akhir: 01

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KONSERVASI ALAM DAN BUDAYA												
K/L	PERSYARIFAN	FUNGSI	SINERGI PENCEGAHAN											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL			100000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KONSERVASI ALAM DAN BUDAYA												
K/L	PERSYARIFAN	FUNGSI	SINERGI PENCEGAHAN											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL			100000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KONSERVASI ALAM DAN BUDAYA												
K/L	PERSYARIFAN	FUNGSI	SINERGI PENCEGAHAN											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL			100000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KONSERVASI ALAM DAN BUDAYA												
K/L	PERSYARIFAN	FUNGSI	SINERGI PENCEGAHAN											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL			100000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(JUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KONSERVASI ALAM DAN BUDAYA												
K/L	PERSYARIFAN	FUNGSI	SINERGI PENCEGAHAN											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
TOTAL			100000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPA RUPAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
NO	PROG	INDIKATOR	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
100	10	Program Logistik Kebutuhan dan Nalarnya Tergo Tawar dan G. (RUPA RUPAH)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPA RUPAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
NO	PROG	INDIKATOR	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
101	10	Program Logistik Kebutuhan dan Nalarnya Tergo Tawar dan G. (RUPA RUPAH)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPA RUPAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
NO	PROG	INDIKATOR	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
102	10	Program Logistik Kebutuhan dan Nalarnya Tergo Tawar dan G. (RUPA RUPAH)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPA RUPAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
KEMENTERIAN		KEMENTERIAN		SILVERPENGANTAR									
NO	PROG	INDIKATOR	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
103	10	Program Logistik Kebutuhan dan Nalarnya Tergo Tawar dan G. (RUPA RUPAH)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEL	KODK	FUNGSI	DIBERKESKANS								TOTAL	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
001	001	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
001	002	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
TOTAL			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000

REKAPITULASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017 (RUPIAH)

1. Anggaran Belanja Jarak Jauh (KEM) yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- 1.1. Belanja Perjalanan Dinas
- 1.2. Belanja Perjalanan Dinas

2. Belanja Belanja Lainnya:

- 2.1. Belanja Belanja Lainnya
- 2.2. Belanja Belanja Lainnya
- 2.3. Belanja Belanja Lainnya

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEL	KODK	FUNGSI	DIBERKESKANS								TOTAL	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
001	001	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
001	002	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
TOTAL			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000

REKAPITULASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017 (RUPIAH)

1. Anggaran Belanja Jarak Jauh (KEM) yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- 1.1. Belanja Perjalanan Dinas
- 1.2. Belanja Perjalanan Dinas

2. Belanja Belanja Lainnya:

- 2.1. Belanja Belanja Lainnya
- 2.2. Belanja Belanja Lainnya
- 2.3. Belanja Belanja Lainnya

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEL	KODK	FUNGSI	DIBERKESKANS								TOTAL	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
001	001	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
001	002	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
TOTAL			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000

REKAPITULASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017 (RUPIAH)

1. Anggaran Belanja Jarak Jauh (KEM) yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- 1.1. Belanja Perjalanan Dinas
- 1.2. Belanja Perjalanan Dinas

2. Belanja Belanja Lainnya:

- 2.1. Belanja Belanja Lainnya
- 2.2. Belanja Belanja Lainnya
- 2.3. Belanja Belanja Lainnya

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEL	KODK	FUNGSI	DIBERKESKANS								TOTAL	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
001	001	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
001	002	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
TOTAL			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000

REKAPITULASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017 (RUPIAH)

1. Anggaran Belanja Jarak Jauh (KEM) yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- 1.1. Belanja Perjalanan Dinas
- 1.2. Belanja Perjalanan Dinas

2. Belanja Belanja Lainnya:

- 2.1. Belanja Belanja Lainnya
- 2.2. Belanja Belanja Lainnya
- 2.3. Belanja Belanja Lainnya

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEMENTERIAN/LEMBAGA		REKAPITULASI BELANJA										
KEL	KODK	FUNGSI	DIBERKESKANS								TOTAL	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
001	001	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
001	002	Kelembagaan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
TOTAL			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000

REKAPITULASI BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017 (RUPIAH)

1. Anggaran Belanja Jarak Jauh (KEM) yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- 1.1. Belanja Perjalanan Dinas
- 1.2. Belanja Perjalanan Dinas

2. Belanja Belanja Lainnya:

- 2.1. Belanja Belanja Lainnya
- 2.2. Belanja Belanja Lainnya
- 2.3. Belanja Belanja Lainnya

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN											
KEMENTERIAN KEHUTANAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN											
KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN KEHUTANAN								KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	
			KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KEMENTERIAN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN											
KEMENTERIAN KEHUTANAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN											
KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN KEHUTANAN								KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	
			KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KEMENTERIAN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PAGU INDIKATIF BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017
(RUTA RUPIAH)

KEMENTERIAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN											
KEMENTERIAN KEHUTANAN		KEMENTERIAN KEHUTANAN											
KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN KEHUTANAN								KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	
			KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KEMENTERIAN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1